

REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045:

KOMPILASI PIDATO MENDIKDASMEN
ABDUL MU'TI

KEMENDIKDASMEN



Reformasi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045:

Kompilasi Pidato
Mendikdasmen Abdul Mu'ti



**Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Reformasi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045:

Kompilasi Pidato
Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Penyunting:

Rita Pranawati
Azaki Khoirudin
Ari Susanto



**Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

2025

**Reformasi Sistem Pendidikan Nasional
Menuju Indonesia Emas 2045:**
Kompilasi Pidato Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Diterbitkan oleh:

**Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Kompleks Kemendikdasmen**

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Indonesia

xii + 442 hlm. 14,5 x 21 cm

Cetakan I: Oktober 2025

2025 © *All Right Reserved*

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit

Pengantar

SEGALA puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul **Reformasi Sistem Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045: Kompilasi Pidato Mendikdasmen Abdul Mu'ti** dapat hadir di hadapan pembaca. Buku ini merupakan kumpulan pidato terpilih dari Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 21 Oktober 2024 hingga sekarang yang merupakan rekaman gagasan, refleksi, sekaligus arah kebijakan pendidikan.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menyelami pemikiran mendalam Mendikdasmen Mu'ti tentang gagasan pendidikan bermutu, kepemimpinan, reformasi birokrasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, revitalisasi infrastruktur sekolah, dan integrasi sains dengan nilai-nilai agama. Setiap pidato yang dihimpun dalam buku ini merekam denyut zaman, menjawab tantangan global, dan menghadirkan solusi yang berpijak pada semangat kebangsaan serta nilai keindonesiaan.

Lebih dari sekadar dokumentasi, buku ini menjadi inspirasi dan bahan renungan bagi semua pihak—guru, siswa, orang tua, birokrat, akademisi, dan masyarakat luas—tentang bagaimana pendidikan harus dijalankan: ramah, santun, inklusif, serta berorientasi pada mutu. Visi Indonesia Emas 2045 yang berulang kali ditegaskan dalam berbagai kesempatan, menjadi benang merah yang menuntun arah kebijakan agar generasi mendatang tumbuh sebagai generasi unggul, berkarakter, dan berdaya cipta.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, rujukan, sekaligus penggerak semangat bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan setiap kata bermutu sebagai langkah nyata menuju pendidikan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bermartabat.

Selamat membaca!

Daftar Isi

PENGANTARv

DAFTAR ISIvii

1. **Menjaga Legasi, Membawa Inovasi: Serah Terima Jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024** 1

2. **Generasi Sehat, Kuat, dan Berkarakter: Penutupan dan Penganugerahan Galasiswa Indonesia 2024**..... 5

3. **Bahasa sebagai Jiwa Bangsa: Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra**..... 9

4. **Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia: Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024**..... 13

5. **Jalan Panjang Reformasi Pendidikan Indonesia: Rakor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional Bahas Reformasi PPDB dan Penataan Guru P3K** 15

6. **Guru Agen Peradaban: Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2024**..... 19

7. **Makna Partisipasi Semesta: Anugerah Kihajar 2024**..... 23

8. **Guru Hebat, Indonesia Kuat: Puncak Hari Guru Nasional 2024**..... 25

9. **Penguatan Karakter Melalui Film: Peluncuran Film Kemenangan Sejati** 27

10. Mudah, Bermakna, Bermutu untuk Semua: <i>Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah</i>	31
11. Talenta Hebat Indonesia Kuat: <i>Gelar Karya Prestasi Anak Bangsa</i>	35
12. Pendidikan Nonformal Pilar Bangsa Maju: <i>Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus & Pelatihan 2024</i>	37
13. Membangun Karakter Generasi Masa Depan: <i>Peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat</i>	39
14. Capaian Pendidikan 2024 dan Agenda Prioritas 2025: <i>Taklimat Media Akhir Tahun 2024 Kemendikdasmen</i>	43
15. Guru sebagai Agen Transformasi Pendidikan: <i>Kuliah Umum Tantangan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru Menuju Indonesia Emas</i>	53
16. Layanan Pendidikan RAMAH dan Insan Pendidikan SANTUN: <i>Pelantikan Pejabat Kemendikdasmen</i>	63
17. Kepemimpinan Pendidikan RAMAH dan SANTUN: <i>Pelantikan Pejabat Kemendikdasmen</i>	67
18. Rumah Pendidikan yang Ramah, Santun, dan Inklusif: <i>Peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Melalui Rumah Pendidikan</i>	73
19. Salat sebagai Pondasi Pendidikan Karakter: <i>Pengkajian Isra' Mi'raj Nabi Muhammad 1446 H</i>	77
20. Mengemban Amanah dengan RAMAH dan SANTUN: <i>Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendikdasmen</i>	79
21. Memahami Pembelajaran Mendalam: <i>Kuliah Umum di Universitas Negeri Malang</i>	83

22. Filosofi dan Praktik Pembelajaran Mendalam: Seminar Nasional dan Sosialisasi Deep Learning: Implementasi Pembelajaran Mendalam dalam Rangka Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di UHAMKA	97
23. Memperbarui Tekad RAMAH dan SANTUN: Pelantikan Pejabat Manajerial JT Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Kemendikdasmen	109
24. Pemerataan Akses Pendidikan Berkeadilan: Taklimat Media Sistem Penerimaan Murid Baru	113
25. Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Guru: Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah	121
26. Jabatan adalah Amanah: Pelantikan Pejabat Manajerial dan Fungsional di Lingkungan Kemendikdasmen	125
27. Membangun Peradaban Melalui Pembiasaan: Pagi Ceria Peluncuran Buku Panduan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	133
28. Kedaulatan Bahasa Indonesia: Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	141
29. Arah Baru Pendidikan Indonesia, Membangun Generasi Emas 2045: Sambutan Pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar & Menengah Tahun 2025	149
30. Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua: Amanat Upacara Peringat Hari Pendidikan Nasional 2025	161
31. Teknologi sebagai Alat, Pendidikan sebagai Jiwa: Keynote Speech Seminar Nasional Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	163
32. Pendidikan Bermutu Untuk Semua Melalui Teknologi Digital: Kolaborasi Hardiknas 2025 Mendukung Pendidikan Bermutu dan Aman untuk Semua	173

33. Membangun Kembali Pembelajaran yang Bermakna <i>SEMNAS PGSD 2025: Pendekatan Deep Learning pada Pembelajaran Sekolah Dasar di Era Abad 21</i>	177
34. Menyelamatkan Pendidikan dari Krisis Nilai: Tuisyah Pendidikan Hari Pendidikan Nasional Muhammadiyah Temanggung	195
35. Melestarikan Bahasa Ibu, Memperkuat Kebudayaan Bangsa: Nesia dan Tiga Sahabat Berpetualang di Negeri Garuda	221
36. Meneguhkan Fondasi Masa Depan Pendidikan Indonesia: Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional	225
37. Transformasi Pendidikan Indonesia: Pelantikan Pejabat Manajerial JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Non-Manajerial	233
38. Sadar Tertib Arsip sebagai Fondasi Merawat Memori Kolektif Bangsa: Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip GNSTA 2025-2029	237
39. Peran Guru Menyiapkan Generasi Emas di Era Disrupsi: Orasi Ilmiah dalam acara Upacara Dies Natalis ke-60 UNNES	243
40. Tantangan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua: Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh	259
41. Transformasi Kepemimpinan Sekolah: Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah.....	275
42. Konvergensi Peradaban dan Pesantren Masa Depan: International Conferance on the Transformation of Pesantren DPP Partai Kebangkitan Bangsa	285
43. Bahasa Indonesia sebagai Jembatan Logika dan Kedaulatan Bangsa: Pak Menteri Menyapa Guru Indonesia	299
44. Sekolah sebagai Rumah Kedua: Peluncuran MPLS Ramah bersama Penerima Beasiswa ADEM	313

45. Jalan Tengah Evaluasi Pendidikan Nasional: <i>Webinar Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)</i>	321
46. Dari Kebiasaan Kecil Lahir Karakter Hebat: <i>Pak Menteri Menyapa Murid dan Guru di Awal Tahun Ajaran Baru 2025-2026</i>	329
47. Mengawali Hari Pertama Masuk Sekolah: <i>Pelaksanaan MPLS Ramah bersama Mendikdasmen di Sumbawa</i>	333
48. Pengembangan Kurikulum dengan Pembelajaran Mendalam sebagai Pendekatan: <i>Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025</i>	341
49. Menjadi Generasi Hebat dari Kebiasaan Kecil: <i>Pertemuan Pagi Ceria Serentak dalam rangka Hari Anak Nasional 2025</i>	349
50. Pendidikan Islam Terpadu dan Kebangkitan Kelas Menengah Muslim: <i>Pembukaan Munas VI JSIT Indonesia</i>	353
51. Dari <i>Complain Culture</i> Menuju <i>Compliance Culture</i> : <i>Pembinaan Pegawai UPT Kemendikdasmen Provinsi Sulawesi Selatan</i>	363
52. Integrasi Alquran dan Sains Teknologi: <i>Seminar Nasional Dan Musyawarah Wilayah III Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan</i>	375
53. Kampus Cermin Peradaban Bangsa: <i>Dies Natalis ke-64 Universitas Negeri Makassar 2025</i>	389
54. Dari Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, hingga Kesejahteraan Guru: <i>Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru</i>	401
55. Setiap Anak Bisa Belajar Dimana Saja dan Kapan Saja: <i>Peluncuran Uji Terap Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh PJJ Jenjang Pendidikan Menengah</i>	407

56. Mewujudkan Kemerdekaan Sejati melalui Pendidikan, Persatuan, dan Gotong Royong: Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia	415
57. Mahir Numerasi Majukan Negeri: Peluncuran Gerakan Numerasi Nasional	419
58. Membangun Kepemimpinan yang Melayani: Pidato Pelantikan Pejabat Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.....	427
59. Teknologi & Kemampuan Literasi: Pidato pada Jagat Literasi Festival – Live HUT 30 Tahun Kompas.com	431
60. Meneladani Rasulullah dalam Pendidikan Karakter: Pidato dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ...	433
61. Membangun Budaya STEM: Pidato pada Rilis Panduan dan Hasil Kurasi Pembelajaran STEM 2025.....	435
62. Mewujudkan Cita-Cita Besar: Pidato pada Acara Mengenal Sekolah GARUDA: Harapan Baru Pendidikan Unggul	439

7 Menjaga Legasi, Membawa Inovasi:

Serah Terima Jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024

Senin, 21 Oktober 2024

Serah terima jabatan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersamaan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Kementerian Kebudayaan merupakan momentum refleksi sekaligus penegasan kembali arah perjalanan pendidikan Indonesia. Dalam momen ini, perlu disampaikan apresiasi mendalam terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024, dan jajarannya. Tidak bisa dipungkiri, periode tersebut menjadi fase penting yang menandai perubahan mendasar dalam dunia pendidikan nasional. Pandemi COVID-19, yang sempat melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan, justru menjadi titik uji keberanian menghadirkan terobosan baru di dunia pendidikan. Mulai dari kurikulum darurat, digitalisasi pembelajaran, hingga Merdeka Belajar adalah contoh nyata bahwa kebijakan yang lahir dari krisis mampu menjadi fondasi baru.

Pengakuan atas kerja keras tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa langkah-langkah sebelumnya telah membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan, mengoreksi, dan menyempurnakan. Pendidikan tidak hidup di ruang-ruang seminar

elit semata, tetapi di jalanan, transportasi publik, dan kehidupan nyata di mana rakyat berjuang. Selain itu, pendidikan dasar dan menengah adalah pondasi segala pembangunan bangsa. Jika fondasi ini rapuh, maka mustahil melahirkan sumber daya manusia yang unggul di tingkat global.

Kaidah *al-muhafadhah ‘ala al-qadim as-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik) dapat memberi arah untuk terus melakukan inovasi kebijakan yang lebih baik. Pendidikan Indonesia tidak boleh terus-menerus menafikan tradisi dan warisan baik yang sudah ada, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam nostalgia. Warisan baik perlu dipertahankan, sementara hal-hal baru yang lebih relevan harus terus diadopsi. Ini adalah prinsip keseimbangan: menjaga yang sudah terbukti bermanfaat, sembari berani membuka diri terhadap inovasi. Kaidah ini amat penting di tengah tarik-menarik antara konservatisme pendidikan dan desakan perubahan yang kian cepat.

Tugas yang diemban Kemendikdasmen ke depan jelas tidak ringan. Dalam Asta Cita, Presiden Prabowo memberi amanah besar: meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas sumber daya manusia. Tugas ini kini dibagi ke dalam tiga kementerian—sebuah fakta yang menegaskan betapa luas dan kompleksnya persoalan pendidikan di Indonesia. Apa yang dulu ditangani satu lembaga, kini harus ditanggung bersama. Artinya, koordinasi, sinergi, dan visi yang jelas adalah syarat mutlak.

Analogi “Kabinet Merah Putih” dengan seragam anak sekolah dasar menjadi simbol yang menarik. Merah putih bukan hanya bendera, bukan hanya simbol negara, tetapi juga hadir setiap hari di tubuh anak-anak sekolah dasar kita. Ia sederhana, tapi penuh makna. Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah ruang di mana identitas kebangsaan pertama kali ditanamkan, di mana nilai-nilai dasar kebersamaan dan persatuan dipupuk sejak dini.

Serah terima ini akhirnya bukan hanya pergantian kursi, melainkan peralihan estafet gagasan, tanggung jawab, dan harapan.

Pendidikan Indonesia tidak boleh hanya berputar pada jargon, tetapi harus berbuah pada mutu layanan yang benar-benar dirasakan anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di kota besar dengan akses internet cepat, tetapi juga di pelosok di mana anak-anak masih harus berjalan jauh menuju sekolah.

Ke depan, pendidikan dasar dan menengah harus benar-benar menjadi motor penggerak kualitas manusia Indonesia. Pendidikan harus membuat anak-anak tidak hanya pandai berhitung dan membaca, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkarakter, dan memiliki empati sosial. Pendidikan bukan hanya tentang menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membentuk warga negara yang utuh, berintegritas, dan cinta tanah air.

Pada akhirnya, serah terima jabatan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah kerja kolektif. Tidak bisa hanya dibebankan pada seorang menteri atau kementerian. Ia memerlukan dukungan semua pihak: guru, orang tua, masyarakat, bahkan anak-anak itu sendiri. Semangat gotong royong adalah kunci. Dengan kerja bersama, warisan baik bisa dijaga, inovasi baru bisa diwujudkan, dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bisa benar-benar menjadi kenyataan.

2 Generasi Sehat, Kuat, dan Berkarakter:

Penutupan dan Penganugerahan Galasiswa Indonesia 2024

Sabtu, 26 Oktober 2024

Olahraga adalah cermin dari perjalanan sebuah bangsa dalam membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Ia hadir sebagai aktivitas jasmani yang menyehatkan tubuh sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter. Dari olahraga kita belajar tentang disiplin yang konsisten, kesabaran dalam berproses, tanggung jawab atas setiap keputusan, serta semangat pantang menyerah. Semua nilai itu tidak hanya berlaku di lapangan, melainkan juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Sepak bola, sebagai olahraga yang sangat populer di Indonesia bahkan di dunia, menjadi salah satu wadah utama bagi pembelajaran nilai-nilai tersebut. Lapangan hijau tidak sekadar menjadi tempat berlari mengejar bola, melainkan ruang untuk mengasah keterampilan hidup: bagaimana bekerja sama dalam tim, bagaimana menjaga sportivitas, serta bagaimana mengelola kemenangan maupun kekalahan dengan bijak. Dari sinilah, sepak bola menjadi lebih dari sekadar permainan; ia menjelma menjadi sarana membangun jati diri bangsa.

Galasiswa Indonesia 2024 hadir sebagai bukti nyata bahwa olahraga, khususnya sepak bola, dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan talenta generasi muda. Kompetisi ini bukan sekadar adu kemampuan antar sekolah atau antar tim, melainkan sebuah

upaya serius untuk menyiapkan masa depan sepak bola nasional. Dari pertandingan yang berlangsung, terlihat semangat juang anak-anak muda yang ingin mengukir prestasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk mengangkat martabat bangsa.

Para juara tentu layak mendapat apresiasi, tetapi yang lebih penting adalah semua peserta telah membawa pulang pengalaman berharga. Bagi mereka yang belum meraih kemenangan, kesempatan ini adalah bekal untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali berjuang di kesempatan berikutnya. Karena dalam olahraga, kekalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar. Di situlah makna sejati dari sportivitas: menghargai proses, bukan hanya hasil akhir.

Lebih jauh, Galasiswa Indonesia juga menjadi ruang seleksi alami untuk menemukan bibit-bibit unggul sepak bola. Harapannya, mereka yang berprestasi di turnamen ini dapat melangkah lebih jauh, masuk ke dalam skuad Tim Nasional U-16, dan pada akhirnya mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Ajang ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi olahraga sejak usia dini, agar Indonesia memiliki generasi emas yang siap bersaing di tingkat global.

Galasiswa Indonesia bukan sekadar acara tahunan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan berkembang, tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga gerakan nasional yang menumbuhkan semangat sportivitas, solidaritas, dan kebanggaan bersama. Dengan dukungan semua pihak—pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas—Galasiswa bisa menjadi wadah lahirnya bintang-bintang lapangan hijau yang kelak membawa Indonesia menuju kejayaan olahraga dunia.

Pada akhirnya, pesan yang paling penting dari Galasiswa Indonesia adalah bahwa olahraga mampu menyatukan kita. Ia mengajarkan bahwa kemenangan adalah buah dari kerja keras kolektif, dan kekalahan pun bisa menjadi guru yang berharga. Dari sini, kita

belajar bahwa masa depan gemilang bangsa tidak dibangun dalam semalam, melainkan ditempa melalui proses panjang yang penuh dedikasi. Sepak bola hanyalah salah satu jalannya, tetapi dari sana kita bisa melihat harapan besar untuk lahirnya generasi Indonesia yang sehat, percaya diri, berkarakter, dan siap membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih cemerlang.

3 Bahasa sebagai Jiwa Bangsa:

Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra

Senin, 28 Oktober 2024

Sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya, kita sering kali merayakan identitas kita melalui bahasa. Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra pada 28 Oktober 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menjadi momen penting untuk merefleksikan peran bahasa Indonesia dalam membentuk masa depan kita. Tema ‘Berbahasa Cerdas untuk Generasi Emas’ bukan sekadar slogan; ia adalah panggilan untuk menjadikan bahasa sebagai pondasi kedaulatan budaya Indonesia dan peradaban bangsa. Inilah momentum saatnya kita semua—dari pejabat negara hingga pelajar—berkomitmen penuh untuk memajukan bahasa Indonesia, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai ukuran keadaban kita.

Di tengah hiruk-pikuk dunia global, bahasa Indonesia telah diakui secara internasional. Pantun, salah satu khasanah sastra kita, resmi menjadi warisan budaya tak benda UNESCO, sementara bahasa Indonesia sendiri digunakan dalam sidang-sidang UNESCO. Ini bukan prestasi kecil; ini bukti bahwa bahasa kita punya potensi untuk menyumbang pada peradaban dunia. Namun, ironisnya, survei Microsoft baru-baru ini menyoroti sisi gelap: bangsa kita dinilai kurang santun dalam berbahasa di ruang publik, yang belum berbahasa secara baik. Apakah ini mencerminkan siapa kita sebenarnya? Sebagai masyarakat yang bangga dengan budaya luhur seperti gotong royong dan sopan santun, kita seharusnya malu. Kesantunan berbahasa bukanlah formalitas belaka; ia adalah cermin peradaban. Jika kita ingin mencapai Generasi Emas 2045, kita harus mulai dari sini:

dorong gerakan berbahasa santun di media sosial, sekolah, dan ruang publik, sebagai bagian dari peradaban dan budaya Indonesia yang luhur.

Kesantunan berbahasa di ruang publik merupakan cermin dari peradaban bangsa. Sebagai masyarakat yang memiliki budaya tinggi dan sopan santun, kita diwarisi kekayaan budaya yang luar biasa. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Bahasa, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta para mitra, dalam memajukan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa sekaligus sebagai bahasa yang memperkenalkan kita di kancah internasional.

Komitmen ini harus dimulai secara holistik. Trigatra bahasa—utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing—adalah rumus sempurna. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa harus ditempatkan di garis depan, tapi itu tak berarti mengabaikan kekayaan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau Batak yang memperkaya identitas kita. Di sisi lain, penguasaan bahasa asing adalah keharusan di era globalisasi, agar kita tak tertinggal dalam kompetisi internasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan langkah-langkah tepat, seperti rangkaian acara Bulan Bahasa ini. Dukungan dari semua pihak—termasuk komisi DPR seperti Komisi X yang dipimpin oleh tokoh seperti Dr. Hetifah Sjaifudian—sangat krusial. Bukan karena hubungan pribadi, tapi karena visi bersama untuk bangsa.

Kepada para pemenang penghargaan Bulan Bahasa tahun itu, perlu dicatat dengan baik, bahwa: prestasi kalian adalah inspirasi. Dari pegiat sastra hingga pelajar yang inovatif, kalian membuktikan bahwa bahasa bisa menjadi alat pemajuan bangsa. Dan untuk Badan Bahasa di bawah kepemimpinan Aminuddin Aziz, terima kasih atas dedikasinya. Acara seperti ini bukan akhir, tapi awal dari gerakan lebih besar. Mari kita gelorakan semangat ini: berbahasa cerdas bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk warisan yang kita tinggalkan bagi generasi mendatang.

Pada akhirnya, bahasa adalah lebih dari kata-kata; ia adalah jiwa bangsa. Jika kita gagal menjaganya dengan santun dan cerdas, kita kehilangan esensi Indonesia. Saatnya bertindak—mulai dari diri sendiri, untuk Generasi Emas yang benar-benar emas.

Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia:

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024

Senin, 28 Oktober 2024

Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda sebagai tonggak bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini bukan hanya deklarasi satu bangsa dan satu tanah air yang menegaskan kedaulatan politik, tapi juga komitmen untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang memperkuat kedaulatan budaya dan identitas nasional yang majemuk. Pepatah ‘bahasa menunjukkan bangsa’ mengingatkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan jati diri dan kepribadian suatu bangsa. Keindonesiaan terukur dari kebanggaan, komitmen, serta kemahiran dalam berbahasa Indonesia, yang menjadi sarana perjuangan kemerdekaan di masa lalu, kini, dan mendatang.

Tanggung jawab bersama muncul untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di tanah air, sambil melestarikan kekayaan bahasa daerah dan tetap terbuka terhadap bahasa asing sebagai bagian dari pergaulan global. Diperlukan kedisiplinan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di forum resmi, dokumen negara, lembaga pemerintah, media, karya ilmiah, seni, serta sastra. Berkat dedikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta kementerian terkait, bahasa Indonesia kini diakui sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Pencapaian ini patut disyukuri, mengingat tidak semua bangsa memiliki kesempatan serupa untuk

menggunakan bahasa nasionalnya di panggung internasional.

Di tengah berkah keragaman bahasa, tantangan utama adalah meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, tanpa mengabaikan khazanah budaya daerah atau karya penting dalam bahasa asing. Dengan kebanggaan, kemahiran, konsistensi, serta produktivitas dalam menciptakan berbagai karya berbahasa Indonesia, bangsa ini dapat menjadi lebih berdaulat dan maju. Budaya membaca dan menulis karya bermutu akan memperkaya wawasan, kecerdasan, serta pemikiran kritis, yang menjadi modal utama untuk meraih kemajuan.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, gerakan “Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia” dicetuskan sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Inilah momentum untuk seluruh pemuda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat bergandengan tangan, menjaga identitas bangsa melalui bahasa yang hidup dan bermakna.

5 Jalan Panjang Reformasi Pendidikan Indonesia:

Rakor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional Bahas Reformasi PPDB dan Penataan Guru P3K

Selasa, 12 November 2024

Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional yang digelar pada November 2024 menjadi ruang refleksi sekaligus pijakan penting bagi arah pendidikan di tahun 2025. Pertemuan ini tidak hanya formalitas, melainkan kesempatan untuk mengulas ulang kebijakan yang telah berjalan sekaligus merumuskan perbaikan agar pendidikan di Indonesia lebih inklusif dan berkualitas. Kehadiran para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia, hingga sejumlah kepala daerah yang diundang khusus untuk berbagi pengalaman, menegaskan betapa pendidikan bukan hanya urusan kementerian, melainkan kerja bersama lintas daerah dan pemangku kepentingan.

Ada dua isu besar yang mencuat dan menjadi pusat perhatian. Pertama, soal kebijakan zonasi dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kedua, tentang penataan guru dengan skema PPPK. Keduanya bukanlah isu baru, melainkan polemik yang terus berulang dan mendapat sorotan publik luas. Namun, justru karena sering diperdebatkan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu peduli terhadap kualitas pendidikan dan menaruh harapan besar pada kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan nyata.

Visi yang diusung kementerian jelas: memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, sesuai amanat konstitusi dan landasan sistem pendidikan nasional. Dua hal penting menjadi

penopangnya. Pertama, aspek kebijakan yang berpijak pada dasar hukum yang kokoh, sehingga setiap keputusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kuat secara moral. Kedua, strategi implementasi di lapangan, yang memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam konteks PPDB zonasi, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan keadilan akses pendidikan. Zonasi seharusnya bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen pemerataan kualitas sekolah. Sementara itu, kebijakan guru PPPK adalah langkah strategis untuk memastikan tenaga pendidik yang memadai, profesional, dan sejahtera. Guru adalah ujung tombak pembelajaran; tanpa penataan yang tepat, layanan pendidikan bermutu hanyalah jargon.

Kedua isu ini memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan tidak bisa setengah hati. Jika ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya atas pendidikan yang layak, dan setiap guru mampu mengabdikan dengan maksimal, maka kebijakan harus berpijak pada keadilan, konsistensi, dan keberanian untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini menimbulkan ketimpangan.

Kebijakan zonasi dalam pendidikan seringkali diperdebatkan, tetapi jika ditarik ke akar filosofinya, kita akan menemukan spirit besar yang melandasinya. Zonasi bukan hanya persoalan administratif atau sekadar aturan penerimaan siswa, melainkan sebuah strategi untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan bermutu di dekat tempat tinggalnya. Di sini letak keadilan yang ingin ditegakkan: pendidikan berkualitas tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang mampu, atau mereka yang tinggal di pusat kota.

Lebih jauh, zonasi juga memikul misi sosial yang tak kalah penting. Dengan menyatukan murid dari beragam kelas sosial dalam satu sekolah, terciptalah ruang integrasi sosial. Sekolah pun berubah fungsi menjadi ruang pertemuan anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang. Inilah titik di mana konsep “meeting point” dan “melting point” menemukan maknanya. Murid tidak hanya

belajar matematika, bahasa, atau sains, tetapi juga belajar mengenal perbedaan, merasakan kebersamaan, dan menumbuhkan nilai keindonesiaan yang menyatukan mereka.

Sekolah, dengan demikian, bukan sekadar institusi pendidikan formal. Ia adalah laboratorium sosial di mana integrasi bangsa dipupuk sejak dini. Identitas kepribadian anak sebagai putra-putri daerah tetap terjaga, tetapi mereka juga belajar menghayati nilai kebangsaan yang lebih luas. Dari sinilah kohesi sosial lahir, sebuah kekuatan bangsa yang tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui interaksi yang berlangsung terus-menerus dalam keseharian mereka di sekolah.

Namun, setiap kebijakan besar tentu membutuhkan evaluasi. Zonasi pun tidak luput dari kebutuhan untuk ditinjau kembali. Evaluasi ini menjadi ruang untuk mendengar suara para pelaksana di lapangan, terutama kepala dinas pendidikan yang berhadapan langsung dengan dinamika penerapan zonasi. Dari pengalaman nyata mereka, lahir masukan yang lebih bermakna dan berharga. Masukan-masukan itu menjadi bekal penting agar kebijakan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga realistis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Upaya mendengarkan ini menunjukkan sikap terbuka: bahwa kebijakan pendidikan bukan milik satu pihak, melainkan hasil kerja bersama. Dalam satu bulan penuh, ruang dialog dibuka selebar-lebarnya, dengan harapan lahir informasi yang komprehensif. Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan hanya sekadar cepat, melainkan juga seksama, matang, dan berdaya guna bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anak-anak bangsa.

Kehadiran Wakil Presiden dalam forum evaluasi juga memiliki makna simbolis yang kuat. Ia menandakan bahwa urusan pendidikan memang berada di jantung kepentingan nasional. Dukungan dari pucuk pimpinan negara memberi energi tersendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya proyek teknis kementerian, tetapi bagian dari visi besar pembangunan bangsa. Kehadirannya juga memberi pesan bahwa setiap langkah evaluasi

perlu diarahkan untuk menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar seremonial belaka.

Akhirnya, kita harus menyadari bahwa kebijakan zonasi hanyalah satu bagian dari ikhtiar panjang membangun masa depan pendidikan Indonesia. Tantangan global, ketimpangan sosial, hingga kebutuhan untuk menjaga keindonesiaan di tengah arus modernisasi menuntut strategi yang menyeluruh. Zonasi dapat menjadi instrumen penting, asalkan selalu dikelola dengan hati-hati, dievaluasi secara berkala, dan diperbaiki berdasarkan masukan nyata dari berbagai pihak.

Jika semua itu dijalankan, pendidikan akan benar-benar menjadi jalan bagi anak-anak Indonesia untuk tidak hanya tumbuh sebagai individu cerdas, tetapi juga sebagai generasi yang mampu merawat persatuan, merajut kebersamaan, dan memperkuat keindonesiaan di tengah keberagaman. Itulah tujuan sejati dari kebijakan pendidikan: bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi membangun bangsa.



Guru Agen Peradaban:

Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2024

Senin, 25 November 2024

Hari Guru Nasional bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momen refleksi tentang betapa pentingnya peran guru dalam membangun bangsa. Tahun 2024 ini, tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” kembali mengingatkan kita bahwa kualitas bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Guru bukan hanya pengajar, melainkan penjaga peradaban, pengarah masa depan, dan teladan moral bagi generasi yang akan datang.

Tema ini memuat tiga makna besar yang patut direnungkan. *Pertama*, guru memiliki kedudukan penting sebagai pendidik profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Mereka mengemban tugas tidak ringan: mengajar, mendidik, membimbing, sekaligus menilai hasil belajar peserta didik. Semua ini adalah tanggung jawab yang tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.

Kedua, guru adalah agen peradaban. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan nilai, membangun karakter, dan membentuk keterampilan hidup. Dari tangan guru lahirlah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Dalam dunia yang penuh tantangan dan perubahan cepat seperti sekarang, kehadiran guru sebagai penopang nilai moral menjadi semakin tak tergantikan.

Ketiga, kualitas guru menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru yang hebat akan melahirkan lulusan yang hebat, dan

pada akhirnya membangun bangsa yang kuat. Sebaliknya, lemahnya kualitas guru akan berdampak pada lemahnya kualitas pendidikan dan daya saing bangsa. Dengan kata lain, masa depan Indonesia terletak di pundak para guru.

Menyadari hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui sejumlah program prioritas. *Pertama*, pemenuhan kualifikasi akademik. Masih banyak guru di tanah air yang belum berpendidikan D4 atau S1. Secara bertahap, pemerintah berupaya memberi kesempatan agar mereka dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Langkah ini penting, sebab kualitas pengajaran sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan guru.

Kedua, peningkatan kompetensi guru. Kompetensi yang dimaksud bukan hanya kemampuan akademik dan pedagogik, tetapi juga mencakup moral, sosial, kewirausahaan, hingga kepemimpinan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan karakter. Dengan begitu, guru diharapkan mampu membimbing murid tidak hanya untuk pintar, tetapi juga berakhlak mulia.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru. Guru tidak bisa dituntut terus berkorban tanpa penghargaan yang layak. Sertifikasi, baik bagi guru ASN, PNS, P3K, maupun non-ASN, menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan dedikasi mereka berbanding lurus dengan penghargaan finansial yang diterima. Kesejahteraan yang lebih baik akan menumbuhkan motivasi, loyalitas, dan kualitas pengajaran.

Selain itu, keamanan dan perlindungan bagi guru juga menjadi perhatian penting. Guru tidak boleh bekerja dalam tekanan atau ancaman, apalagi menjadi korban kriminalisasi atas tugasnya. Kerja sama antara Kementerian dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan melalui pendekatan restoratif adalah langkah maju yang harus terus diperkuat.

Penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan dapat menjadi solusi bijak, sehingga guru tidak lagi terjebak dalam posisi rentan.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita memperlakukan para guru. Memberikan penghargaan, kesempatan berkembang, perlindungan, dan kesejahteraan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban moral dan strategis. Hari Guru Nasional harus menjadi pengingat bahwa di balik setiap keberhasilan bangsa, ada guru yang bekerja dengan penuh dedikasi, baik di kota besar dengan fasilitas lengkap, maupun di pelosok negeri dengan sarana seadanya. Mereka semua sama-sama pejuang, sama-sama pemikul amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada akhirnya, ucapan “Guru Hebat, Indonesia Kuat” bukan hanya slogan. Ia adalah janji, tekad, dan arah pembangunan bangsa. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan bermartabat, maka langkah pertama adalah memastikan guru dihargai, dilindungi, dan diberdayakan. Tanpa guru hebat, mustahil ada Indonesia yang kuat.

Makna Partisipasi Semesta:

Anugerah Kihajar 2024

Senin, 25 November 2024

Di tengah semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, Anugerah Kihajar 2024 menjadi momen penghargaan bagi para insan pendidikan yang telah berkontribusi luar biasa. Acara ini, yang digelar pada 25 November 2024, memperhatikan dedikasi mereka dalam menumbuhkan minat baca masyarakat, memajukan berbagai kegiatan pendidikan, serta memperkuat pengembangan sains, teknologi, dan bidang STEM. Para penerima penghargaan ini bukan hanya pelaku, tapi juga teladan yang mendorong gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik.

Apresiasi mendalam layak diberikan atas upaya mereka yang tak kenal lelah. Dari pengembangan ilmu pengetahuan hingga inisiatif budaya, kontribusi ini telah menjadi pendorong kemajuan nasional. Harapannya, para penerima Anugerah Kihajar tahun itu terus berkiprah, memberikan inspirasi bagi semua kalangan agar semakin aktif terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata; ia memerlukan dukungan kolektif dari masyarakat luas.

Inilah esensi partisipasi semesta: ajakan bagi setiap individu dan kelompok untuk bergabung dalam memajukan pendidikan nasional. Semangat ini selaras dengan keteladanan Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, yang selalu menekankan pentingnya kontribusi berkelanjutan di berbagai bidang—sains, teknologi, budaya, dan lainnya—demi manfaat bersama. Melalui gerakan seperti ini, bangsa

dapat semakin cerdas dan maju, dengan setiap warga berperan aktif sebagai bagian dari perubahan positif.

Penghargaan semacam Anugerah Kihajar tak hanya merayakan prestasi masa lalu, tapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Selamat bagi para penerima; semoga dedikasi ini terus mengalir, menginspirasi generasi mendatang untuk mencerdaskan bangsa dengan penuh semangat.



Guru Hebat, Indonesia Kuat:

Puncak Hari Guru Nasional 2024

Kamis, 28 November 2024

Di tengah semangat memperingati Hari Guru Nasional pada 28 November 2024, acara puncaknya menjadi panggung penghormatan bagi para pendidik yang menjadi tulang punggung bangsa. Acara puncak ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting nasional, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga para menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta tokoh-tokoh lain seperti Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listyo Sigit. Tak lupa, penghormatan khusus diberikan kepada para guru hebat yang hadir secara virtual maupun di seluruh pelosok negeri, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang tak tergantikan.

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengawali segalanya, diikuti rasa terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo yang menyempatkan hadir meski baru kembali dari lawatan kenegaraan dan jadwal padat, untuk menunjukkan komitmen yang tulus terhadap pengembangan dunia pendidikan. Apresiasi juga mengalir kepada panitia dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mitra, serta para guru yang telah menyukseskan acara ini.

Tema ‘Guru Hebat Indonesia Kuat’ menjadi benang merah, mencerminkan tekad kementerian untuk meningkatkan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan dan pencerdas bangsa, melalui pemenuhan kualifikasi, kompetensi, serta kesejahteraan yang lebih baik. Guru tak lagi hanya pengajar mata pelajaran; mereka adalah agen utama ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan

peradaban. Hal ini selaras dengan prioritas Presiden Prabowo, termasuk pembangunan sistem pendidikan yang menekankan pembentukan karakter melalui program pengembangan budi pekerti. Mulai November 2024, pelatihan guru diperkaya dengan materi bimbingan konseling dan pendidikan nilai, agar mereka tak hanya menyampaikan pengetahuan tapi juga membimbing murid secara holistik—membangun kekuatan jasmani, rohani, intelektual, dan moral. Hasilnya, anak-anak bangsa akan tumbuh menjadi generasi kuat, yang pada gilirannya memperkuat Indonesia melalui pendidikan berkualitas untuk semua.

Melangkah ke depan, tahun 2025 akan membawa kebijakan segar yang meringankan beban guru. *Pertama*, fleksibilitas kerja bagi guru ASN, yang tak lagi terbatas pada sekolah negeri tapi bisa bertugas di sekolah swasta, sebagai respons atas aspirasi guru dan penyelenggara pendidikan swasta—hanya menanti surat keputusan menteri. *Kedua*, reformasi pengelolaan kinerja yang lebih sederhana: tanpa kerumitan administrasi, tanpa unggah dokumen, tanpa basis poin, dan tanpa evaluasi tahunan yang melelahkan. Kebijakan ini menjawab keluhan guru serta arahan Presiden untuk birokrasi yang efisien, tidak berbelit, dan memudahkan masyarakat.

Dalam penuh kebanggan, terima kasih disampaikan kepada para guru sebagai pahlawan pendidikan yang bekerja ikhlas dan penuh pengabdian, dengan jasa yang tiada terkira. Tema “Hari Guru Nasional 2024, Guru Hebat Indonesia Kuat!” menjadi sebuah seruan yang menyatukan semangat semua pihak. Acara ini bukan sekadar peringatan, tapi panggilan untuk terus maju, dengan guru sebagai pondasi kekuatan bangsa.

9 Penguatan Karakter Melalui Film:

Peluncuran Film *Kemenangan Sejati*

Minggu, 02 Desember 2024

Peluncuran film *Kemenangan Sejati* menjadi salah satu upaya nyata untuk memperkuat karakter bangsa. Film ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas, selaras dengan prioritas program Presiden Prabowo dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat, bermoral, dan beradab. Film ini hadir sebagai refleksi dan pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya soal ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga soal mental dan moral masyarakatnya.

Isu karakter bangsa kini menjadi perhatian utama. Tindakan kekerasan, perilaku melanggar hukum, dan kecenderungan moral yang menurun menunjukkan bahwa pembangunan karakter tidak bisa ditunda lagi. Salah satu fenomena yang meresahkan adalah perjudian online. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada moral dan tatanan sosial. Judi online merusak fondasi keluarga, mengikis nilai-nilai kejujuran, dan menimbulkan konflik yang nyata di masyarakat. Banyak keluarga yang hancur karena masalah ini, bahkan kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakar dari kebiasaan berjudi.

Lebih dari itu, kesadaran digital masyarakat Indonesia juga memerlukan perhatian serius. Survei internasional, termasuk yang dilakukan Microsoft beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi rendah dalam etika dan kesopanan digital.

Fakta ini menjadi cermin yang memalukan, sekaligus panggilan untuk membangun *kesalehan digital*. Penggunaan teknologi seharusnya tidak hanya sebatas hiburan atau interaksi semu, tetapi menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, informasi yang bermanfaat, dan praktik-praktik positif yang memperkuat peradaban. Teknologi yang diarahkan dengan benar bisa menjadi alat edukasi, media kolaborasi ilmiah, dan pendorong kreatifitas yang membangun.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam membangun karakter bangsa. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri; keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah harus bergerak bersama untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang kokoh. Di sisi agama, misalnya, Al-Qur'an menegaskan larangan perjudian dan minuman beralkohol, sebagai bentuk perlindungan moral dan sosial bagi masyarakat. Pesan ini relevan tidak hanya secara religius, tetapi juga sosial dan ekonomi: perjudian merusak mental, moral, hubungan keluarga, dan masa depan generasi muda.

Pesan yang tersirat jelas: kemenangan sejati bukan tentang keuntungan materi atau kemenangan sesaat, tetapi tentang integritas, kesadaran moral, dan kemampuan membangun diri serta masyarakat. Judi online atau perilaku merusak lainnya bukan sekadar masalah pribadi, tetapi ancaman bagi tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Kesadaran kolektif untuk menolak praktik-praktik ini menjadi kunci agar pondasi moral dan sosial Indonesia tetap kuat, dan karakter bangsa dapat terus berkembang ke arah yang mulia.

Film *Kemenangan Sejati* hadir bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk mengingatkan, membimbing, dan menginspirasi masyarakat Indonesia agar meneguhkan karakter, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan menolak praktik-praktik yang merusak masa depan bangsa. Ini adalah pengingat bahwa membangun karakter bangsa adalah tanggung jawab semua pihak, dan keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kualitas moral, etika, dan kesadaran sosial masyarakatnya.

Kebijakan pembangunan karakter anak-anak Indonesia kini mengambil bentuk yang lebih nyata melalui inisiatif **Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat**, yang dijadwalkan diluncurkan pada semester genap tahun ajaran baru. Program ini dirancang bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan strategi sistematis untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Tujuh kebiasaan yang menjadi inti program ini meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, aktif bermasyarakat, serta tidur cepat. Semua kebiasaan ini sengaja dipilih karena memiliki peran fundamental dalam membentuk pola hidup yang seimbang dan karakter yang kuat.

Pendekatan ini berangkat dari prinsip sederhana namun mendalam: kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membentuk kepribadian, dan kepribadian yang matang akan melahirkan keadaban. Hal ini sejalan dengan berbagai literatur tentang perilaku dan pengembangan diri, seperti *The Power of Habit* dan *Atomic Habits*. Kedua buku tersebut menekankan bahwa perubahan besar tidak selalu berasal dari tindakan besar, melainkan dari akumulasi kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang-ulang. Dengan kata lain, transformasi bangsa bisa dimulai dari transformasi individu—anak-anak yang terbiasa melakukan hal-hal positif setiap hari akan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter.

Selain pembiasaan langsung, program ini juga akan dikaitkan dengan media kreatif berupa **film pendek tentang Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat**. Film ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi yang efektif, karena dapat menyampaikan pesan karakter secara visual, menarik, dan mudah diingat oleh anak-anak. Dengan adanya film, nilai-nilai kebiasaan positif dapat lebih hidup dan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, sekaligus menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Program ini merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pendidikan dapat dirancang tidak hanya secara top-down, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari anak. Dengan konsistensi dan keterlibatan berbagai pihak—guru, orang tua, dan masyarakat—

pembentukan karakter anak bukan lagi sekadar wacana, tetapi gerakan nyata. Kuncinya ada pada *conditioning* atau pembiasaan: dari pembiasaan lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir kepribadian, dan dari kepribadian lahir keadaban.

Dengan langkah-langkah ini, Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk generasi yang disiplin, sehat, cerdas, peduli, dan berakhlak mulia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembangunan karakter bangsa dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, tetapi jika dilakukan dengan konsisten dan terpadu, dampaknya akan luas dan signifikan.

10 Mudah, Bermakna, Bermutu untuk Semua:

Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah

Senin, 09 Desember 2024

Peluncuran pembaruan sistem pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi pendidikan Indonesia. Acara ini menandai respons cepat atas arahan Presiden untuk menciptakan birokrasi yang sederhana, tidak rumit, namun tetap bermakna dalam melayani publik. Pembaruan ini lahir dari masukan langsung para guru, pengawas, dan kepala sekolah yang merasa sistem e-kinerja sebelumnya terlalu ribet dan sering menimbulkan kebingungan. Melalui diskusi intensif dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Badan Kepegawaian Negara, akhirnya sistem baru ini diluncurkan untuk menyempurnakan proses tanpa mengurangi esensi tugas utama guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Inti dari perubahan ini bukan pada pengurangan beban kerja, melainkan penyederhanaan sistem dan penyesuaian komponen pelaporan agar lebih selaras dengan realitas lapangan. Di sistem lama, fokus utama pelaporan terpaku pada pemenuhan minimal 24 jam mengajar per minggu, yang sering membuat guru berpindah-pindah sekolah seperti “dari lonceng ke lonceng” atau bahkan bersikap “*hit and run*”—datang mengajar lalu pergi tanpa pendampingan lebih lanjut. Akibatnya, tugas krusial seperti membimbing siswa sering terabaikan karena keterbatasan jam pelajaran di satu sekolah.

Kini, dengan pola kinerja baru, guru tetap wajib mengajar sesuai jadwal dan mata pelajaran di sekolah masing-masing, tapi pemenuhan 24 jam tatap muka bisa dilengkapi melalui aktivitas lain yang tak kalah penting. Misalnya, membimbing peserta didik—seperti konseling, pengembangan bakat, atau pendampingan ekstrakurikuler—akan dihitung sebagai jam tatap muka, sehingga guru bisa lebih fokus mendampingi murid secara maksimal. Selain itu, peningkatan kompetensi profesional, atau yang dikenal sebagai *continuing professional development*, menjadi komponen baru yang diakui. Guru diharuskan mengikuti pelatihan berkualitas dalam jumlah jam tertentu per tahun, bukan sekadar seminar abal-abal, dan ini pun akan tercatat sebagai bagian dari beban kerja mereka.

Lebih lanjut, keaktifan guru di masyarakat turut diintegrasikan ke dalam sistem. Keterlibatan dalam organisasi profesi atau kegiatan sosial akan dihitung, mendorong guru menjadi pelopor di lingkungan sekitar dan tak lagi terisolasi setelah jam mengajar. Begitu pula dengan partisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti kepanitiaan upacara atau acara lainnya, yang kini diakui sebagai kontribusi nyata. Pendekatan ini memastikan guru tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga pendidik holistik yang terintegrasi dengan masyarakat dan sekolah, sekaligus memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan langsung kepada siswa.

Proses pelaporan pun mengalami simplifikasi signifikan. Jika dulu harus dilakukan dua kali setahun dan setiap guru mengunggah sendiri, kini cukup satu kali per tahun, dengan verifikasi oleh kepala sekolah yang kemudian mengunggah secara kolektif. Hal ini meringankan beban administratif guru, meski menambah tanggung jawab kepala sekolah—yang posisinya sendiri sudah dihitung sebagai pemenuhan 24 jam tanpa harus mengajar penuh. Bagi pengawas sekolah, pembaruan serupa diterapkan untuk memastikan pengawasan tetap efektif tanpa birokrasi berlebih.

Secara keseluruhan, terobosan ini bertujuan agar guru lebih fokus pada tugas inti: mendidik, membimbing, dan berkontribusi bagi

masyarakat, tanpa terjebak dalam administrasi yang rumit. Mudah-mudahan dengan pembaruan olahan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah bermakna dan bermutu untuk kita semua. Birokrasi tetap ada sebagai penunjang, tapi tidak boleh menjadi penghalang. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih bermutu, di mana setiap laporan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan kinerja nyata yang mendukung kemajuan bangsa.

71 Talenta Hebat Indonesia Kuat:

Gelar Karya Prestasi Anak Bangsa

Rabu, 11 Desember 2024

Dalam acara Gelar Karya Prestasi Anak Bangsa yang berlangsung pada 11 Desember 2024, suasana penuh semangat memenuhi ruangan saat para peserta—anak-anak bangsa yang berbakat—menampilkan karya mereka. Acara ini bukan sekadar pameran, melainkan panggung untuk merayakan potensi generasi muda yang siap membawa Indonesia menuju puncak kejayaan. Di hadapan wakil menteri, anggota DPR, pejabat dari BRIN, serta panitia dan peserta, terpancar optimisme bahwa Generasi Emas 2045 bisa tercapai lebih cepat, berkat kreativitas, bakat, dan keunggulan yang dimiliki anak-anak Indonesia. Mereka bukan hanya harapan masa depan, tapi pilar yang akan membuat bangsa ini lebih maju dan hebat.

Dunia saat ini terus bergolak, penuh dengan perubahan yang sering digambarkan sebagai VUCA—*volatility, uncertainty, complexity*, dan *ambiguity*—atau bahkan TUNA yang lebih *turbulent*. Di tengah disrupsi ini, banyak yang tersingkir karena kurangnya keistimewaan, sementara yang bertahan justru mereka yang lincah atau *agile*. *Agility* menjadi kunci untuk tidak hanya bertahan, tapi juga melesat maju. Di era ini, peluang terbuka lebar bagi yang inovatif dan kreatif. Tidak cukup sekadar beradaptasi dengan perubahan; manusia harus mampu mengelolanya, menentukan arahnya, dan menjadi penggerak utama. Inilah yang membuat bakat dan minat harus berjalan seiring: bakat tanpa minat sia-sia, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen ini perlu dikembangkan melalui afirmasi, fasilitas, dan dukungan, hingga melahirkan prestasi di berbagai bidang.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bakat istimewa—entah di seni, olahraga, atau talenta lainnya—layak mendapat perhatian negara. Bakat itu anugerah ilahi yang harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk kemajuan bersama, dengan memberikan ruang aktualisasi yang luas. Lebih dari itu, kompetensi abad ke-21 seperti *critical thinking*, *creativity*, *communication*, dan *collaboration* (4C) kini dilengkapi dengan karakter dan *citizenship*. Tanpa karakter kuat, keterampilan itu tak bermakna dalam membentuk kesuksesan pribadi. *Citizenship* mengingatkan bahwa semua prestasi harus berakar pada kebanggaan sebagai warga Indonesia, membuat bangsa ini semakin kuat melalui kontribusi anak-anaknya.

Bahkan saat kesempatan studi ke luar negeri terbuka—melalui beasiswa atau program pengembangan—identitas Indonesia harus tetap terjaga. Hindari jebakan *brain drain*, di mana talenta hebat enggan kembali; sebaliknya, capailah *brain gain* dengan pulang membangun negeri, mengharumkan nama bangsa, dan mengibarkan Merah Putih di kancan global. Prestasi yang ditampilkan dalam acara ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Karya-karya itu menjadi kebanggaan pribadi sekaligus sumbangsih bagi negeri, mendorong Indonesia menjadi negara yang hebat dan kuat.

Dengan slogan “Talent Hebat untuk Indonesia Kuat”, acara ini mengajak semua pihak untuk terus berusaha. Panitia dan peserta patut diapresiasi atas kelancaran gelaran ini, yang tak hanya membangun generasi kuat, tapi juga mewujudkan Indonesia yang benar-benar hebat. Semoga semangat ini terus bergema, membawa berkah bagi bangsa.

12 Pendidikan Nonformal Pilar Bangsa Maju:

Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus & Pelatihan 2024

Selasa, 17 Desember 2024

Di tengah semangat membangun bangsa, acara Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus & Pelatihan 2024 pada 17 Desember 2024 menjadi panggung inspiratif yang menyoroti peran vital pendidikan di luar jalur formal. Acara ini, dihadiri oleh para pemangku kepentingan seperti Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pejabat eselon satu, Plt. Dirjen Vokasi, serta tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah dan penyelenggara kursus di seluruh Indonesia, bukan hanya perayaan prestasi, melainkan pengingat akan komitmen bersama untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua.

Syukur atas rahmat Tuhan menjadi pembuka yang tepat, karena acara ini menyajikan buah dari upaya lembaga kursus dan pelatihan sebagai mitra strategis dalam pendidikan. Hasil karya yang dipamerkan mencerminkan bagaimana pendidikan nonformal dan informal melengkapi jalur formal, membuka peluang bagi anak-anak Indonesia untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Dari *cappuccino* lezat hingga kue yang menggugah selera—seperti yang dinikmati para hadirin—acara ini juga menunjukkan potensi praktis dari keterampilan tersebut, bahkan diusulkan untuk diintegrasikan dalam kegiatan Kementerian, mungkin melalui alumni yang ahli di bidang *bakery* atau kuliner.

Untuk membangun bangsa yang hebat, ketergantungan pada pendidikan formal saja tidak cukup. Pendidikan nonformal, melalui lembaga kursus dan pelatihan, telah membuktikan diri sebagai pilar penting. Pertemuan dengan penyelenggara dari seluruh Indonesia mengungkap beragam program yang memberikan capaian bermakna, mulai dari keterampilan dasar hingga yang mendukung wirausaha. Alumni tidak hanya lulus dengan sertifikat, tapi sering kali menjadi pengusaha sukses, dengan kemampuan yang diakui di dalam maupun luar negeri. Ini sejalan dengan upaya memperkuat pendidikan vokasi di SMK, di mana siswa tak lagi hanya pegang ijazah, melainkan sertifikat profesi yang membuktikan kompetensi di bidang tertentu.

Kemitraan strategis menjadi kunci utama. Bukan hanya dengan industri besar, tapi juga kecil, termasuk lembaga kursus dan pelatihan berbasis masyarakat seperti PKBM. Bayangkan siswa program tata boga yang berpraktik di restoran atau kafe, keluar dengan sertifikasi sebagai barista atau *chef*. Pendekatan ini membuka akses pendidikan seluas-luasnya, memastikan setiap anak bangsa—baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal—mendapat kesempatan setara untuk berkembang dan meraih rezeki melalui profesi yang mereka kuasai. Hal ini karena gelar karya ini menjadi titik awal yang membuka lebar peluang dan kesempatan baru. Dengan demikian, anak-anak kita dapat terus mengakses layanan pendidikan berkualitas, terutama melalui lembaga kursus dan pelatihan yang inovatif, serta berbagai program pendidikan masyarakat seperti Pusat PKBM.

Acara Gelar Hasil Karya ini bukan akhir perjuangan, melainkan langkah awal untuk terus membuka peluang. Di masa depan, ruang aktualisasi bisa lebih inklusif, termasuk menampilkan karya anak-anak difabel dari lembaga kursus. Selamat menikmati hidangan—mungkin sate atau kreasi alumni lainnya—sembari merenungkan bagaimana acara semacam ini bisa menjadi model untuk integrasi keterampilan dalam kegiatan resmi. Dengan basmalah sebagai penanda, semoga ini menjadi awal kesuksesan berkelanjutan, membawa layanan pendidikan bermutu untuk semua, menuju kemenangan dan kemajuan yang dekat.

7.3 **Membangun Karakter Generasi Masa Depan:**

Peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Jum'at, 27 Desember 2024

Pada Jumat, 27 Desember 2024, peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari pemerintahan, lembaga negara, dan masyarakat. Di antara para undangan yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Kebudayaan, Kepala Badan Gizi, Ketua Komisi X DPR RI beserta wakilnya, serta wakil menteri dari berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Agama, Kemenpora, Kementerian Keuangan, Kementerian Kependudukan, KPAI, Komnas HAM, serta para tokoh agama. Acara ini juga diikuti secara virtual melalui YouTube oleh masyarakat di seluruh Tanah Air, menciptakan rasa kebersamaan yang luas.

Dalam suasana penuh syukur, acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional. Apresiasi mendalam disampaikan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, kepala dinas, dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan. Panitia yang bekerja keras patut mendapat pujian, begitu pula dewan juri yang menyeleksi lebih dari 1.900 lagu ciptaan untuk mendukung gerakan ini. Para pemenang, yang berasal dari berbagai daerah

seperti Bogor, Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan, mewakili keragaman talenta Indonesia—termasuk seorang anak kelas 2 SD yang turut hadir sebagai pemenang. Ucapan terima kasih khusus juga ditujukan kepada Dwiki Darmawan atas kontribusinya.

Gerakan ini dikembangkan sebagai upaya memperkuat pembangunan karakter bangsa melalui sinergi antara sekolah, masyarakat, keluarga, dan media. Pendidikan di sini tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan semata, melainkan juga menanamkan kebiasaan sebagai pengalaman berharga untuk membentuk pribadi hebat yang menjadi harapan bersama. Tujuh kebiasaan tersebut mencerminkan tradisi dan nilai-nilai utama bangsa Indonesia, dengan akar kuat dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada. Itulah mengapa para tokoh agama diundang, karena peran mereka menjadi kunci sukses gerakan ini. Kebiasaan-kebiasaan itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat—semuanya dirancang untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan akademik, seperti yang disebutkan oleh Ibu Suharti, tapi juga unggul dalam kecerdasan sosial serta spiritual. Anak-anak diharapkan tumbuh sehat dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus kuat secara spiritual dan peduli sosial.

Di tengah kekhawatiran akan pola hidup generasi muda saat ini—seperti menjadi generasi nocturnal yang tidur larut dan bangun siang, atau menunaikan salat subuh pada jam 7 pagi ketika matahari sudah tinggi—gerakan ini hadir sebagai respons atas berbagai tantangan dalam membangun karakter kuat. Inisiatif ini bukan hanya terfokus pada pendidikan di sekolah, melainkan membangun sinergi luas melibatkan keluarga, tempat ibadah, media, dan seluruh masyarakat. Contohnya, jika anak-anak diajak bangun pagi, orang tua pun harus ikut serta agar tidak justru dibangun oleh anaknya. Selain itu, setelah pulang sekolah, anak-anak sebaiknya tidak langsung bergantung pada gadget, melainkan menghidupkan kembali tradisi bermasyarakat dengan bermain bersama teman sebaya. Untuk

mendukung hal ini, perlu disediakan ruang bersama di lingkungan di mana anak-anak bisa berinteraksi dan bermain secara bebas.

Sebagai langkah lanjutan, sebelum memulai pembelajaran di sekolah, akan diterapkan rutinitas pagi berupa senam pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama, baru kemudian masuk kelas. Senam ini telah diciptakan khusus dengan nama Senam Anak Indonesia Hebat, menandai komitmen untuk membangun kebiasaan positif sejak dini. Dengan demikian, gerakan ini bukan sekadar program sementara, melainkan upaya berkelanjutan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berintegritas.

74 **Capaian Pendidikan 2024 dan Agenda Prioritas 2025:**

Taklimat Media Akhir Tahun 2024 Kemendikdasmen

Selasa, 31 Desember 2024

Pada Selasa, 31 Desember 2024, Kemendikdasmen menggelar Taklimat Media Akhir Tahun, sebuah acara yang menjadi wadah untuk merefleksikan pencapaian sepanjang tahun serta merencanakan langkah ke depan. Dalam taklimat ini, capaian yang dibahas mencakup seluruh rangkaian selama tahun 2024, termasuk program-program dari masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Nadiem Anwar Makarim, yang diintegrasikan sebagai satu kesatuan prestasi. Sementara itu, rencana untuk 2025 difokuskan pada program-program yang telah dianggarkan melalui APBN, meskipun masih terbuka kemungkinan penyesuaian seiring perkembangan waktu.

Sepanjang 2024, kementerian telah menjalankan berbagai inisiatif yang fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Di bidang kesejahteraan dan kompetensi guru, upaya mencakup peningkatan tunjangan sertifikasi pendidik, izin bagi guru ASN untuk mengajar di sekolah swasta, serta penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Percepatan sertifikasi juga mendapat pencapaian signifikan, dengan 605.650 guru dalam jabatan dan calon guru prajabatan yang lulus PPG pada November-Desember. Selain itu, pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi guru bimbingan dan konseling (BK) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang

aman, nyaman, dan gembira, serta pelatihan bagi guru kelas sekolah dasar dalam layanan bimbingan konseling.

Program-program inovatif untuk siswa dan anak-anak juga turut digalakkan, seperti peluncuran film “Kemenangan Sejati”, Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan senam Anak Indonesia Hebat yang bertujuan membangun karakter positif. Di sisi infrastruktur dan kebijakan, kementerian menyusun panduan revitalisasi sekolah, panduan PAUD-SD Satu Atap, serta rekomendasi untuk program makan bergizi gratis, yang semuanya mendukung akses pendidikan yang lebih merata.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu pilar utama, dengan pelaksanaan *vocasionomics* melalui forum kebijakan yang memfasilitasi interaksi, berbagi ide, dan diskusi seputar pendidikan vokasi dan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing tenaga kerja terampil dilakukan melalui SMK Teaching Factory, SMK Pusat Keunggulan, dan Pendidikan Kecakapan Kerja, yang semuanya bertujuan mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja yang kompetitif.

Di ranah bahasa, sastra, dan literasi, tahun 2024 diramaikan dengan berbagai kegiatan yang memperkuat identitas budaya. Lomba sastra siswa nasional jenjang pendidikan dasar dan SMP menarik partisipasi besar, yang diikuti 2.137 siswa dalam lomba mendongeng dan 2.453 siswa dalam lomba menulis cerita. Gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa nasional. Festival Literasi Swantara Aksara, dengan tema “Membumikan Literasi Menguatkan Aksi”, melibatkan para penggerak literasi guna meningkatkan literasi masyarakat secara keseluruhan. Pelibatan komunitas sastra memperkuat apresiasi terhadap karya sastra sebagai ekspresi nilai luhur dan kreativitas berbahasa. Tak ketinggalan, perayaan 100 tahun AA Navis serta Bulan Bahasa dan Sastra yang bertujuan memperdalam pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia.

Penguatan literasi numerasi berbasis PISA juga menjadi fokus, melalui penyusunan perangkat pembelajaran, penyediaan buku teks utama dan non-teks, sosialisasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana sekolah, dan forum diskusi grup (FGD) tentang kualitas pembelajaran sains. Selain itu, Temu Wicara dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan memastikan kebijakan yang partisipatif, sambil membangun kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas dan merata.

Selain itu, Kementerian juga telah menyelesaikan serangkaian kajian mendalam yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pendidikan. Kajian-kajian ini mencakup isu krusial seperti ujian nasional beserta asesmen nasional, pengembangan kurikulum, program Guru Penggerak, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), integrasi coding dan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan, redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), visi SMK Masa Depan, hingga pendekatan pembelajaran mendalam atau *deep learning*. Semua kajian tersebut telah dirumuskan secara menyeluruh dan kini tinggal menunggu implementasinya di tahun-tahun mendatang. Pada tahun sebelumnya, penghargaan juga berhasil diraih oleh kementerian, khususnya yang berskala internasional, yaitu Penghargaan UNESCO terhadap Sastrawan Nasional AA Nafis dalam peringatan 100 tahun AA Nafis dan sebagai Finalis dalam kompetisi International PR Week Global Award 2024.

Pada tahun 2024, kemajuan signifikan juga dicapai dalam berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas hingga peningkatan kualitas. Sebanyak 53,32 juta anak telah terlayani pendidikan melalui 448.367 satuan pendidikan. Tingkat partisipasi sekolah juga mengalami peningkatan, dengan anak usia 7-12 tahun mencapai 99,19% dari sebelumnya 99,16% pada 2023, sementara usia 13-15 tahun naik dari 96,10% menjadi 96,17%. Khusus untuk anak dengan disabilitas, partisipasi rata-rata mencapai 231.880 siswa setiap tahun, dengan tingkat 83,39% untuk usia 7-12 tahun dan 60,95% untuk usia 13-

15 tahun. Selain itu, 18.899.557 siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin menerima bantuan melalui Program Indonesia Pintar, memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif.

Upaya perluasan dan afirmasi akses pendidikan semakin diperkuat dengan bantuan afirmasi pendidikan menengah (ADEM) yang diberikan kepada 4.072 anak, pembinaan pendidikan kesetaraan di 514 kabupaten/kota, serta dukungan untuk 153 Community Learning Center yang fokus pada pendidikan anak dan keluarga pekerja migran Indonesia. Di sisi kesejahteraan guru, pemerintah memberikan berbagai tunjangan seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan insentif. Pada 2024, 330.750 guru non-ASN menerima tunjangan, sementara 1.774.813 guru ASN juga mendapat manfaat serupa. Secara rinci, terdapat 245.002 tunjangan profesi untuk guru non-ASN, 28.912 tunjangan khusus non-ASN, 56.836 insentif non-ASN, 1.085.766 tunjangan profesi guru secara umum, 52.097 tunjangan khusus guru, dan 636.950 bantuan insentif guru, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kualitas pengajaran.

Kualitas pendidikan secara keseluruhan juga menunjukkan tren positif, dengan persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49% pada 2022 menjadi 68,13% pada 2023, serta numerasi dari 45,24% menjadi 62,51% dalam periode yang sama. Melanjutkan momentum ini, pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2024 menekankan pada kualitas pembelajaran dan penguatan karakter dalam ekosistem pendidikan. Di antaranya, penataan 176.040 formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pengembangan 5.000 lembaga PAUD untuk pembelajaran berkualitas dan layanan holistik, serta pembinaan prestasi 26.764 peserta didik di bidang sains, riset, teknologi, inovasi, seni budaya, literasi, olahraga, vokasi, dan kewirausahaan. Selain itu, 121.488 satuan PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan formal telah diakreditasi, 548 dinas provinsi serta kabupaten/kota mendapat pendampingan penguatan karakter, 10.603 satuan pendidikan dan 20.662 fasilitator guru mengikuti bimbingan teknis program Roots,

25.189 orang menerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar, serta 607 orang untuk keaksaraan usaha mandiri.

Aspek lingkungan belajar turut ditingkatkan melalui peningkatan iklim keamanan dan kebinekaan di sekolah, dengan skor rata-rata yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 406.718 satuan pendidikan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, didukung oleh 27 satuan tugas provinsi dan 444 di tingkat kabupaten/kota. Iklim keamanan sekolah naik secara bertahap: untuk SD dari 69,63 menjadi 72,65, SMP dari 66,65 menjadi 68,97, SMA dari 69,09 menjadi 71,83, dan SMK dari 66,83 menjadi 68,94 antara 2022 dan 2023. Demikian pula iklim kebinekaan: SD dari 68,39 menjadi 72,74, SMP dari 66,24 menjadi 72,53, SMA dari 67,68 menjadi 75,85, serta SMK dari 65,23 menjadi 70,75.

Penguatan pendidikan vokasi menjadi fokus utama untuk menyelaraskan keterampilan siswa dengan kebutuhan industri. Hal ini tercermin dari 2.096 SMK yang menerima penguatan pembelajaran berbasis industri 4.0 melalui proyek kreatif, 146.207 siswa SMK yang mengikuti magang dan sertifikasi kompetensi, 24.732 peserta program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW), 57.604 peserta pendidikan kecakapan kerja (PKK), 15.184 pendidik vokasi yang meningkatkan keterampilan melalui upskilling dan reskilling, 1.076 lembaga kursus yang bersertifikasi industri, 4.614 guru kejuruan yang dilatih sesuai tuntutan dunia kerja, serta 304 kemitraan antara institusi vokasi dan dunia usaha atau industri.

Capaian literasi kebahasaan dan kesastraan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan literasi nasional, melestarikan bahasa daerah, memperkaya bahasa Indonesia, serta mempromosikannya secara global. Distribusi 21,47 juta buku bacaan bermutu dilakukan ke 35.785 SD dengan literasi rendah, penambahan 80.000 lema dari kosakata bahasa daerah ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan 1.395 lembaga untuk pengutamaan bahasa Indonesia, partisipasi 233.451 peserta dalam Ujian Kemahiran

Berbahasa Indonesia, bantuan untuk 340 komunitas literasi, revitalisasi 114 bahasa atau dialek yang menjangkau 11.568 orang di 38 provinsi dan 608 komunitas, dukungan bagi 121 komunitas dan tokoh sastra dengan produksi 175 karya, pembuatan 114 komik cerita rakyat dari 38 provinsi serta 61 buku cerita bergambar termasuk Hikayat Raja Buddha, dan fasilitasi program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di 56 negara melalui 387 lembaga. Keseluruhan capaian ini dapat membangun fondasi pendidikan yang lebih kuat dan inklusif menuju masa depan yang cerah.

Di samping itu, pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2024 di bidang pendidikan menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran hingga penguatan literasi kebahasaan. Di tengah upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik, pemerintah berhasil menata 176.040 formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta memastikan 5.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mampu melaksanakan pembelajaran berkualitas dan layanan holistik. Selain itu, prestasi siswa dikembangkan secara *targeted*, dengan 26.764 peserta didik yang unggul di bidang sains, riset, teknologi, inovasi, seni budaya, literasi, olahraga, vokasi, dan kewirausahaan. Akreditasi juga ditingkatkan untuk 121.488 satuan PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan formal. Pendampingan penguatan karakter diberikan kepada 548 dinas provinsi serta kabupaten/kota, sementara 10.603 satuan pendidikan dan 20.662 fasilitator guru mengikuti bimbingan teknis program Roots. Bantuan pendidikan keaksaraan dasar mencapai 25.189 orang, dan keaksaraan usaha mandiri untuk 607 orang, semuanya berkontribusi pada fondasi karakter yang kuat bagi generasi muda.

Lingkungan belajar juga menjadi fokus utama, dengan peningkatan iklim keamanan dan kbinekaan di sekolah yang terukur. Skor rata-rata iklim ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh pembentukan 406.718 tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, serta 27 satuan tugas provinsi dan 444 di tingkat kabupaten/kota. Secara spesifik,

iklim keamanan sekolah mengalami peningkatan: dari 69,63 menjadi 72,65 untuk SD, 66,65 menjadi 68,97 untuk SMP, 69,09 menjadi 71,83 untuk SMA, dan 66,83 menjadi 68,94 untuk SMK antara 2022 dan 2023. Begitu pula dengan iklim kebinekaan, yang naik dari 68,39 menjadi 72,74 untuk SD, 66,24 menjadi 72,53 untuk SMP, 67,68 menjadi 75,85 untuk SMA, serta 65,23 menjadi 70,75 untuk SMK pada periode yang sama. Capaian ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan mendukung keragaman.

Sementara itu, penguatan pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan keterampilan siswa dan tenaga pendidik melalui magang, sertifikasi, pelatihan kurikulum, serta kemitraan dengan dunia industri. Sebanyak 2.096 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima penguatan pembelajaran berbasis industri 4.0 dari proyek kreatif, dengan 146.207 siswa SMK yang mengikuti magang dan sertifikasi kompetensi. Program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) menjangkau 24.732 peserta, sementara pendidikan kecakapan kerja (PKK) mencapai 57.604 peserta. Upskilling dan reskilling diberikan kepada 15.184 pendidik vokasi, diikuti sertifikasi industri untuk 1.076 lembaga kursus, pelatihan bagi 4.614 guru kejuruan sesuai kebutuhan dunia kerja, serta pembentukan 304 kemitraan antara institusi vokasi dan sektor usaha atau industri. Langkah-langkah ini memastikan lulusan pendidikan vokasi siap bersaing di pasar kerja yang dinamis.

Capaian Literasi Kebahasaan dan Kesastraan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan literasi secara keseluruhan, melestarikan bahasa daerah, memperkaya bahasa Indonesia, serta mempromosikannya di tingkat nasional maupun internasional. Distribusi 21,47 juta buku bacaan bermutu dilakukan ke 35.785 SD dengan tingkat literasi rendah, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diperkaya dengan 80.000 entri baru dari kosakata bahasa daerah. Pembinaan pengutamaan bahasa Indonesia diberikan kepada 1.395 lembaga dari sektor pemerintah, pendidikan, dan swasta, dengan 233.451 peserta yang mengikuti Ujian Kemahiran

Berbahasa Indonesia. Bantuan pemerintah juga mengalir ke 340 komunitas literasi, revitalisasi 114 bahasa atau dialek untuk 11.568 orang di 38 provinsi dan 608 komunitas, serta dukungan bagi 121 komunitas dan tokoh sastra aktif yang menghasilkan 175 karya. Produksi konten budaya mencakup 114 komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan 61 buku cerita bergambar, termasuk Hikayat Raja Buddha. Selain itu, program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) difasilitasi di 56 negara dan 387 lembaga, memperluas pengaruh bahasa Indonesia secara global. Keseluruhan program ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih literat dan berbudaya.

Di tengah upaya membangun generasi Indonesia yang cerdas dan maju, Kementerian telah menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2025. Program-program ini difokuskan pada delapan aspek utama: penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan pendidik serta tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, penciptaan lingkungan sosial budaya yang mendukung, pembelajaran yang adaptif dan bermakna, ketersediaan layanan pendidikan yang merata, pembiayaan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Semua ini selaras dengan visi besar pendidikan bermutu untuk semua, yang menekankan penguatan pendidikan karakter, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta serta prestasi, pemenuhan sarana prasarana, dan pembangunan kebahasaan serta kesastraan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, program prioritas tahun 2025 mencakup berbagai inisiatif konkret. Di antaranya, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun disertai pemerataan kesempatan pendidikan, yang didukung oleh penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 18,59 juta siswa. Selain itu, ada bantuan afirmasi untuk siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Papua melalui beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk 3.879 siswa. Dukungan bagi guru juga

menjadi sorotan utama, dengan pemberian tunjangan profesi, dana tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus untuk 1.522.727 guru ASN daerah, serta tunjangan serupa untuk guru non-ASN mencakup 392.802 penerima tunjangan profesi, 57.000 insentif, dan 28.892 tunjangan khusus.

Kompetensi guru turut ditingkatkan melalui pelatihan bimbingan konseling bagi 22.000 guru, serta pendidikan profesi guru (PPG) untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan. Di sisi operasional, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) disalurkan secara luas, termasuk BOS Reguler untuk 43.387.718 siswa di SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB; BOP PAUD Reguler untuk 6.135.659 siswa; BOP Kesetaraan Reguler untuk 939.835 siswa; serta BOSP Kinerja untuk 51.439 satuan pendidikan. Revitalisasi sarana pendidikan juga dilakukan pada 10.440 satuan pendidikan melalui rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran, dan pembangunan baru, yang tidak hanya memperluas akses tapi juga mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat.

Pendampingan lebih lanjut mencakup kurikulum, pembelajaran, karakter, dan mutu di 514 kabupaten/kota serta 38 provinsi, disertai fasilitasi pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) difasilitasi pada 10.000 lembaga, sementara implementasi kurikulum nasional diterapkan di seluruh jenjang dari PAUD hingga menengah di semua provinsi dan kabupaten/kota.

Program prioritas lainnya menekankan penguatan pendidikan karakter bagi siswa dasar dan menengah, serta pengembangan talenta melalui 21 ajang nasional dan partisipasi di 17 ajang internasional. Beasiswa prestasi disediakan untuk 7.104 penerima melalui Beasiswa Unggulan, Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju di belanja Kementerian, ditambah 1.366 penerima Beasiswa Indonesia Maju melalui kolaborasi LPDP. Akreditasi satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dilakukan pada 55.404 lembaga untuk mendorong perbaikan kualitas, sementara asesmen nasional

mencakup 494.665 satuan pendidikan guna memotret hasil belajar dan mempercepat peningkatan mutu.

Di bidang vokasi, penguatan kualitas 2.012 SMK dilakukan melalui program pusat keunggulan, proyek kreatif, kewirausahaan, industri 4.0, peningkatan mutu, dan pabrik pembelajaran. Sertifikasi kompetensi dan magang luar negeri diberikan kepada 100.750 siswa SMK, sementara peningkatan keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan vokasi juga menjadi prioritas. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) menysasar 19.699 anak tidak sekolah. Selain itu, distribusi 1.530.000 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah, pembinaan 1.402 lembaga untuk pengutamaan bahasa Indonesia, serta bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra beserta fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di 56 negara dan 408 lembaga, melengkapi rangkaian upaya ini. Program-program yang telah dilaksanakan pada 2024 dan direncanakan untuk 2025 ini disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas publik, yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua, sekaligus mendukung pembangunan generasi Indonesia yang cerdas dan maju.

15 Guru sebagai Agen Transformasi Pendidikan:

Kuliah Umum Tantangan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru Menuju Indonesia Emas

Senin, 6 Januari 2025

Menjadi guru bukan sekadar menjalankan profesi, melainkan sebuah panggilan yang membutuhkan dedikasi, integritas, dan niat tulus. Dalam konteks Indonesia, posisi guru sudah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara formal, guru diakui sebagai profesi yang layak mendapatkan hak profesionalnya. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah persepsi publik tentang profesi ini. Banyak anak muda saat ditanya mengenai cita-citanya, menempatkan profesi guru di urutan terakhir. Pilihan utama mereka lebih sering menjadi dokter, anggota TNI, Polri, atau profesi lain yang dianggap lebih bergengsi atau menjanjikan penghasilan lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa guru sering dianggap sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memerlukan dedikasi khusus atau persiapan yang matang.

Realitas ini menciptakan kondisi di mana sebagian orang menjadi guru bukan karena panggilan hati, tetapi karena keterpaksaan atau pilihan yang tersisa. Mereka masuk ke profesi ini karena situasi ekonomi atau keterbatasan kesempatan kerja lain. Guru yang masuk ke profesi tanpa niat tulus cenderung kurang memiliki dedikasi dan kurang fokus pada pengembangan profesionalnya. Mereka mungkin

masih “melirik” pekerjaan lain yang dianggap lebih layak atau menjanjikan.

Oleh karena itu, tantangan besar yang harus dihadapi bukan hanya soal kesejahteraan atau fasilitas, tetapi juga soal membangun persepsi publik. Guru harus dilihat sebagai sosok profesional yang memang sejak awal memilih profesi ini dengan niat tulus. Seorang guru sejati adalah mereka yang menaruh dedikasi tinggi dalam mendidik, menunjukkan kepribadian yang matang, dan mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Pengakuan formal melalui undang-undang harus diimbangi dengan pengakuan sosial dan budaya yang menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, kualitas guru menjadi kunci. Pendidikan yang berkualitas tidak bisa terwujud tanpa guru yang profesional, berdedikasi, dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengajar. Ini bukan sekadar soal kemampuan mengajar, tetapi juga soal karakter, integritas, dan kepemimpinan moral. Guru yang profesional bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kecintaan terhadap ilmu pada murid-muridnya.

Maka, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan generasi guru berikutnya lahir dari niat tulus dan kesungguhan hati, bukan dari keterpaksaan atau “kecelakaan profesi.” Semua pihak—pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, bahkan media—memiliki peran untuk membangun citra guru sebagai profesi yang mulia, dihormati, dan menjadi pilihan utama bagi anak-anak muda yang ingin berkontribusi nyata bagi bangsa. Dengan begitu, pendidikan yang berkualitas akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Sejak masa kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang, satu hal yang sangat melekat adalah kesadaran akan pentingnya peran guru. Dalam banyak buku, guru digambarkan sebagai “segalanya” bagi muridnya. Ungkapan ini bukan sekadar metafora, tetapi menegaskan

kenyataan bahwa dalam tradisi pendidikan kita, guru seringkali lebih menentukan daripada kurikulum itu sendiri. Kurikulum bukan hanya teks atau materi yang tertulis; guru lah yang menjadi jantung dari proses pembelajaran. Apa pun yang dikatakan, dilakukan, atau dicontohkan guru, menjadi kurikulum hidup bagi murid-muridnya.

Guru memang memiliki banyak wajah. Ia bisa menjadi pembimbing, teman, mentor, inspirator, bahkan kadang menjadi sosok yang harus diteladani dan digugu serta ditiru. Semua istilah ini menegaskan betapa mulia dan luar biasanya profesi guru. Namun, seiring kemajuan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan, peran guru mulai bergeser. Saat ini, guru lebih sering disebut sebagai fasilitator pembelajaran, yang tugas utamanya adalah memfasilitasi proses belajar murid. Ironisnya, tidak jarang guru sendiri berhenti pada posisi “memfasilitasi” tanpa terus mengembangkan diri atau menambah pengetahuan. Pergeseran ini menghadirkan tantangan besar, yang menuntut refleksi mendalam tentang apa arti menjadi guru di era modern.

Tantangan bagi guru tidak berhenti pada peran dan kompetensi. Isu kesejahteraan menjadi salah satu persoalan yang tidak bisa diabaikan. Di banyak negara, profesi guru menghadapi krisis serius. Sebagai contoh, ketika berkunjung ke Australia, diketahui bahwa minat menjadi guru sangat rendah karena tanggung jawabnya yang berat. Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia, di mana tantangan serupa bisa muncul jika kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru tidak dijaga.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kekuatan yang tidak boleh diabaikan: guru-guru berkualitas dengan standar kompetensi tinggi. Bahkan, guru Indonesia dianggap memenuhi syarat untuk mengajar di luar negeri, termasuk di negara seperti Australia, selama memenuhi standar setempat. Fakta ini menegaskan bahwa kualitas guru Indonesia diakui secara internasional dan menjadi aset bangsa yang luar biasa berharga.

Situasi ini menuntut tindakan nyata dari semua pihak. Pendidikan bangsa tidak hanya soal kebijakan, kurikulum, atau infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana menghargai dan memelihara profesi guru. Memastikan jumlah guru berkualitas cukup, menjaga kesejahteraan mereka, dan menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat bagi pendidik menjadi kunci utama. Bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan profesi guru maupun seluruh pendidik di tanah air, tantangan ini sekaligus menjadi panggilan: profesi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi misi yang membentuk masa depan bangsa.

Guru adalah teladan, inspirator, fasilitator, dan pilar pendidikan sekaligus. Menjadi guru berarti menanggung tanggung jawab besar, menghadapi tantangan kompleks, namun juga memiliki kesempatan luar biasa untuk mengubah kehidupan murid dan, pada gilirannya, membentuk bangsa. Menguatkan profesi guru, menghormati perannya, dan memastikan kualitas serta kesejahteraan mereka adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar.

Masalah pendidikan di Indonesia tidak lagi sekadar soal jumlah guru, melainkan distribusi dan kualitas mereka. Secara kuantitatif, rasio guru dan murid di Indonesia sebenarnya cukup, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mulai merasa kekurangan guru. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak guru cenderung memilih mengajar di kota-kota besar atau tempat yang nyaman, seperti Semarang, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil dan tertinggal kerap kekurangan tenaga pengajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa problem utama bukan kurangnya guru secara angka, tetapi ketimpangan distribusi guru. Tantangan ini menjadi salah satu fokus penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Selain distribusi, kualitas guru juga menjadi isu krusial. Kompetensi guru tidak boleh hanya terbatas pada kemampuan akademik saja. Seorang guru idealnya menguasai empat kompetensi dasar: akademik, pedagogik, moral, dan digital, yang kesemuanya

saling melengkapi. Kompetensi akademik memastikan guru memahami bidang ilmunya dengan baik. Kompetensi pedagogik memungkinkan guru menjadi lebih dari sekadar penyampai materi; guru harus menjadi inspirator yang mampu mendorong murid melakukan transformasi pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Ini membedakan proses transfer informasi dari transformasi yang bermakna, di mana pembelajaran menjadi pengalaman hidup yang relevan bagi murid.

Kompetensi moral juga penting. Guru bukan hanya panutan akademik, tetapi juga teladan dalam berperilaku dan berinteraksi, membentuk karakter murid sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Namun, di era modern, kompetensi digital muncul sebagai kebutuhan niscaya. Guru harus menguasai teknologi digital dan memanfaatkannya secara kreatif, produktif, dan sehat. Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, seharusnya menjadi alat yang memperkaya proses pembelajaran, membantu guru dan murid memahami fakta dan konsep dengan lebih efektif.

Sayangnya, kondisi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Teknologi digital belum sepenuhnya mencerminkan peradaban dan keadaban bangsa. Survei internasional, misalnya oleh Microsoft, menunjukkan bahwa bangsa kita termasuk yang paling belum beradab dalam interaksi digital. Media sosial, yang seharusnya mendekatkan, sering kali justru menjauhkan. Fenomena yang muncul di sekitar kita cukup ironis: duduk bersebelahan dengan teman tapi lebih memilih berinteraksi dengan orang yang berada di luar negeri, sementara hubungan dekat di sekitar justru diabaikan. Budaya digital seperti ini belum selaras dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi dasar interaksi sosial.

Dengan demikian, tantangan pendidikan saat ini bersifat ganda. *Pertama*, perlu memastikan pemerataan guru ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar setiap anak memiliki akses pendidikan yang layak. *Kedua*, perlu meningkatkan kompetensi guru agar mereka mampu membimbing murid tidak hanya menjadi

cerdas secara akademik, tetapi juga beradab, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Transformasi pendidikan bukan sekadar masalah angka atau teknologi, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai luhur, kompetensi profesional, dan kecakapan digital berpadu untuk membentuk generasi masa depan yang utuh.

Digitalisasi teknologi kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa. Menguasai teknologi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk membentuk bangsa yang maju. Namun, penguasaan teknologi harus disertai kompetensi digital yang memadai, khususnya bagi guru. Penggunaan teknologi ini harus selalu dalam konteks yang positif, membangun, dan mencerminkan peradaban serta akhlak yang baik. Tanpa hal ini, kemajuan teknologi bisa kehilangan arah dan makna.

Pelatihan guru menjadi tantangan sekaligus peluang utama. Tidak cukup hanya mengajarkan materi, tetapi juga membangun personifikasi dan internalisasi nilai-nilai utama dalam diri guru. Hal ini sangat penting karena guru adalah garda terdepan dalam membentuk generasi hebat, yang akan menjadi generasi emas Indonesia 2045.

Peningkatan kesejahteraan guru, sertifikasi, dan kualifikasi menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Saat ini tercatat sekitar 249.000 guru yang belum memiliki pendidikan D4 atau S1, sebagian besar mengajar di taman kanak-kanak. Untuk itu, upaya pemberian kesempatan studi lanjut bagi guru-guru ini menjadi fokus penting. Strategi yang digunakan termasuk pengembangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sehingga guru yang sudah memiliki D2, D3, atau hampir menyelesaikan S1 dapat menempuh pendidikan D4 atau S1 tanpa harus mengulang seluruh proses, yang memakan waktu bertahun-tahun. Salah satu mitra yang direncanakan untuk mendukung program ini adalah Universitas Negeri Semarang.

Sertifikasi guru juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan. Penting dicatat bahwa sertifikasi bukan sekadar kenaikan gaji, tetapi bentuk pengakuan resmi atas kompetensi guru dan memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang lulus PPG

(Pendidikan Profesi Guru). Tahun ini, program PPG ditargetkan menjangkau lebih dari 806.000 guru, dan saat ini lebih dari 400.000 guru telah mendaftar. Dengan harapan, pada 2026, lebih dari 93% guru sudah memiliki sertifikat pendidik dan menerima tunjangan sertifikasi.

Selain kualifikasi dan sertifikasi, peningkatan kompetensi guru terus menjadi perhatian. Pelatihan-pelatihan guru akan dihidupkan kembali, tidak hanya terbatas pada bidang studi, tetapi juga pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan berbagai program peningkatan kemampuan pedagogik secara menyeluruh. Dengan kombinasi pendidikan lanjut, sertifikasi, dan pelatihan berkelanjutan, guru-guru diharapkan menjadi tenaga pendidik yang kompeten, sejahtera, dan mampu membentuk generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Keseluruhan upaya ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak sekadar soal infrastruktur atau teknologi semata, tetapi soal manusia: guru sebagai penggerak perubahan dan pembentuk karakter bangsa. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia diharapkan dapat mencapai visi menjadi bangsa yang maju, beradab, dan berdaya saing tinggi pada 2045.

Pendidikan di Indonesia kini memasuki fase pembaruan yang cukup signifikan. Mulai tahun ajaran 2025-2026, **pendekatan *deep learning*** akan diperkenalkan secara resmi di sekolah-sekolah. Deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kualitas pemahaman siswa. Dengan tiga prinsip utama—*mindful, meaningful, dan joyful*—pendekatan ini mendorong siswa untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga memahami, meresapi, dan menemukan kegembiraan dalam proses belajar. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, pelatihan khusus akan diberikan kepada para guru, sehingga mereka siap mengadaptasi metode pembelajaran ini di kelas.

Perubahan ini juga selaras dengan pembaruan dalam **sistem pelaporan dan penilaian guru**. Kewajiban 24 jam mengajar tidak

lagi harus sepenuhnya tatap muka. Waktu yang dihabiskan guru sebagai pembimbing atau dalam kegiatan bimbingan konseling juga akan dihitung. Hal ini menegaskan bahwa peran guru bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pendamping dan pembimbing siswa. Guru diharapkan meneladani peran dosen yang memiliki mahasiswa bimbingan akademik: memastikan siswa yang kesulitan belajar tidak terabaikan, mendengarkan masalah mereka, dan menjadi inspirator yang memotivasi mereka tetap bersemangat mencapai cita-cita.

Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah **penguatan guru bimbingan konseling (BK)**. Selama ini, persepsi terhadap guru BK sering salah kaprah, menganggapnya sebagai pihak yang menghukum siswa yang melanggar aturan. Padahal, bimbingan konseling sesungguhnya adalah proses akademik untuk membimbing dan mendampingi siswa, membantu mereka menemukan bakat dan minat, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dengan penataan yang lebih jelas, guru BK akan kembali berfungsi sebagai pendamping sejati bagi siswa, bukan sekadar figur penegak disiplin.

Selain itu, reformasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah perilaku siswa yang selama ini kerap diabaikan karena kekhawatiran guru terhadap masalah hukum atau laporan disiplin. Dengan sistem pelaporan baru dan penguatan fungsi BK, guru tidak lagi membiarkan siswa yang berkelahi atau melakukan perbuatan tidak terpuji tanpa pendampingan. Justru, guru dituntut untuk hadir sebagai pembimbing, pendengar, dan inspirator yang mampu mengarahkan siswa ke perilaku dan keputusan yang lebih baik.

Langkah-langkah ini juga sejalan dengan pembaruan **Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)** yang kini memasukkan materi bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi figur yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga memenuhi tugas “5 M” yang tercantum dalam undang-undang: menjadi pendidik, pembimbing, inspirator, motivator, dan teladan bagi muridnya. Hal ini menciptakan harapan bahwa generasi siswa ke

depan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional, bermoral, dan siap menghadapi tantangan kehidupan.

Secara keseluruhan, integrasi deep learning, penguatan guru BK, dan reformasi sistem pelaporan mengarah pada visi pendidikan yang lebih manusiawi dan mendalam. Pendidikan bukan lagi sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses membimbing siswa menjadi individu yang mampu berpikir kritis, memahami makna belajar, menemukan minat dan bakat, serta tetap termotivasi mencapai cita-cita. Inilah arah yang jelas bagi pendidikan Indonesia—pendekatan yang mendalam, pembimbingan yang nyata, dan perhatian penuh terhadap perkembangan setiap siswa.

Pendidikan bukan sekadar menyiapkan siswa untuk menguasai ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai, tetapi juga menuntut guru menjadi pemimpin. *Leadership* bukan hanya milik kepala sekolah; setiap guru memiliki potensi untuk memimpin. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan perlu dibekali sejak dini, bahkan sejak mahasiswa menempuh studi di program keguruan. Dengan menanamkan kompetensi kepemimpinan sejak awal, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sosok yang mampu menggerakkan perubahan di sekolah dan komunitasnya.

Akses untuk menjadi kepala sekolah pun sebaiknya lebih terbuka. Tidak eksklusif hanya bagi guru penggerak, melainkan dapat dijangkau oleh semua guru yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi melalui jalur dinas pendidikan. Dengan begitu, tercipta ekosistem pendidikan yang mendorong pertumbuhan pemimpin-pemimpin kompeten di semua jenjang, bukan hanya di posisi formal.

Penting juga untuk menekankan bahwa materi kepemimpinan tidak boleh terbatas pada pelatihan singkat. Kepemimpinan yang kompeten harus menjadi bagian integral dari kurikulum bagi calon guru, agar mereka terbiasa berpikir dan bertindak sebagai pemimpin sejak awal karier. Filosofi ini sejalan dengan gagasan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan.

Upaya peningkatan kompetensi guru tidak berhenti pada aspek kepemimpinan. Program-program prioritas juga harus memperhatikan pemenuhan kualifikasi, kesejahteraan, serta kesempatan bagi guru untuk terus berkembang. Dengan kombinasi kemampuan profesional dan jiwa kepemimpinan, guru dapat menjadi agen perubahan yang nyata, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan.

16 Layanan Pendidikan RAMAH dan Insan Pendidikan SANTUN:

Pelantikan Pejabat Kemendikdasmen

Rabu, 8 Januari 2025

Pelantikan pejabat eselon I di Kemendikdasmen bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan momentum penting untuk meneguhkan arah pendidikan nasional. Ditekankan kembali bahwa kementerian ini memikul salah satu tugas nasional paling strategis: mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah amanat konstitusi yang menentukan harkat dan martabat Indonesia. Karena itu, peran Kemendikdasmen tidak hanya besar di tingkat nasional, tetapi juga harus tampil dalam kancah internasional. Visi besar yang diusung sederhana tetapi mendalam: *pendidikan bermutu untuk semua*. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, di manapun mereka berada, apapun kondisi fisik maupun latar belakang ekonominya.

Untuk mewujudkan itu, pendidikan harus lebih terjangkau, baik secara lokasi maupun biaya. Paradigma kementerian ditegaskan sebagai paradigma pelayanan. Lembaga ini harus menjadi rumah pendidikan yang *RAMAH*—Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi agar birokrasi pendidikan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar hadir sebagai layanan publik yang memanusiakan.

Dalam menjalankan amanah, integritas menjadi kunci. Para pemimpin diingatkan untuk menjaga reputasi, menghadirkan inovasi, dan menciptakan terobosan cerdas yang berpijak pada undang-undang. Inovasi bukan berarti meninggalkan warisan baik, melainkan

melanjutkan sekaligus memperbaikinya. Kaidah *al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah* dijadikan pedoman: merawat tradisi baik sambil mengadopsi hal baru yang lebih baik.

Konsep kepemimpinan yang ditekankan bukan hanya soal jabatan dan struktur, melainkan tentang karakter yang melekat pada diri setiap pemimpin. SANTUN menjadi akronim yang sarat makna, yaitu Setia, Amanah, Nasionalis, Teladan, Unggul, dan Ngemong. Setia berarti teguh pada bangsa dan negara, konsisten dengan janji yang diucapkan, serta loyal terhadap tanggung jawab yang diemban di manapun berada. Amanah menuntut kesungguhan untuk melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan integritas, bahkan ketika keputusan yang diambil tidak selalu populer. Amanah ini bukan hanya urusan administratif, melainkan juga pertanggungjawaban yang bersifat spiritual—dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Nasionalis mencerminkan jiwa patriotisme dan semangat juang yang diwariskan para pahlawan, sebuah panggilan untuk bekerja sebaik-baiknya demi tegaknya NKRI. Teladan menekankan bahwa pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga cermin bagi yang dipimpinnya. Apa yang diucapkan dan dilakukan pemimpin menjadi “kebijakan tak langsung” yang memberi arah bagi budaya kerja organisasi.

Unggul mengingatkan bahwa bekerja biasa-biasa saja tidak cukup. Harus ada semangat untuk terus meningkatkan kualitas, untuk bersegera dalam kebaikan, sebagaimana tuntunan *fastabiqul khairat*—berlomba dalam kebajikan. Sementara *Ngemong* menghadirkan dimensi kemanusiaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang *ngemong* adalah pemimpin yang mengasuh, menenangkan, memberi ruang bagi bawahannya untuk tumbuh, dan membangun suasana kerja yang nyaman. Ia bukan sosok yang mudah mengomel, melainkan yang murah senyum, suka menyapa, dan menciptakan harmoni dalam relasi kerja.

Jika nilai-nilai *SANTUN* benar-benar dijalankan, maka kepemimpinan di Kemendikdasmen akan lebih dari sekadar manajemen birokrasi. Ia akan menghadirkan wajah kepemimpinan yang membumi, memanusiakan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat. Pada akhirnya, kementerian ini diharapkan dapat benar-benar menjadi rumah pendidikan yang *RAMAH* bagi publik, sekaligus dijalankan oleh pemimpin-pemimpin yang *SANTUN* bagi bangsa.

77 **Kepemimpinan Pendidikan RAMAH dan SANTUN:**

Pelantikan Pejabat Kemendikdasmen

Senin, 20 Januari 2025

Pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikdasmen pada 20 Januari 2025 memiliki pesan yang jelas: jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Visi besar yang kembali harus terus ditegaskan adalah *Pendidikan Bermutu untuk Semua*. Pendidikan harus hadir tanpa diskriminasi, menjangkau setiap anak bangsa, dan memberi layanan yang setara. Visi ini diwujudkan dengan menghadirkan Kementerian sebagai rumah pendidikan yang *RAMAH*—Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis.

Nilai *RAMAH* yang dirumuskan bukan hanya sekadar rangkaian kata indah, tetapi menjadi fondasi yang merefleksikan arah dan semangat pengabdian. Responsif mengajarkan pentingnya peka terhadap perkembangan zaman, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat. Tidak cukup hanya mengetahui persoalan, melainkan juga dituntut untuk hadir dengan solusi yang cepat, tepat, dan bermartabat. Responsivitas inilah yang memastikan kebijakan maupun layanan publik tidak ketinggalan zaman, melainkan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Akuntabel menjadi penegasan berikutnya. Di dalam birokrasi, akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tata kelola, tata kerja, hingga hasil kinerja harus transparan, bersih, dan terbuka. Semua itu tidak hanya sekadar bisa dipertanggungjawabkan

di atas kertas, tetapi juga benar-benar membawa manfaat nyata, maslahat yang luas, dan keberlanjutan jangka panjang. Akuntabilitas bukan hanya prosedur administratif, melainkan prinsip moral agar setiap keputusan tidak meninggalkan jejak keraguan.

Nilai Melayani menempatkan tugas sebagai ibadah. Pekerjaan dalam birokrasi tidak boleh dilihat sebatas rutinitas, melainkan pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Melayani berarti memudahkan urusan masyarakat, memberikan yang terbaik, dan memastikan bahwa setiap warga merasa dihargai serta diperhatikan. Jiwa melayani ini menjadi pembeda antara birokrasi yang hidup untuk rakyat dan birokrasi yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri.

Adaptif adalah panggilan untuk terus berubah dan belajar. Tantangan zaman selalu bergerak cepat, dan birokrasi yang kaku akan segera tertinggal. Adaptif berarti berani menyesuaikan pola pikir, memperbaiki sistem, memperbarui cara kerja, sekaligus menumbuhkan motivasi dan kepribadian yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Namun adaptasi ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan tetap berpegang teguh pada aturan hukum dan nilai luhur budaya bangsa, sehingga perubahan tetap memiliki arah dan pijakan.

Harmonis menjadi perekat dari semuanya. Kerja birokrasi tidak mungkin dilakukan sendirian; ia membutuhkan kebersamaan, semangat kekeluargaan, toleransi, gotong royong, dan relasi yang sehat. Harmonis berarti menumbuhkan suasana kerja yang kolektif-kolegial, di mana setiap orang merasa memiliki peran dan dihargai kontribusinya. Dari harmoni inilah lahir sinergi yang membuat organisasi lebih kuat dan solid. Jika kelima nilai RAMAH tersebut benar-benar dihidupi, maka birokrasi tidak lagi tampil kaku dan jauh dari rakyat. Ia akan menjadi wajah negara yang humanis, terbuka, dan penuh kepedulian. Lebih dari itu, RAMAH dapat menjadi kompas moral yang memastikan pelayanan publik hadir sebagai wujud nyata dari negara yang tidak hanya mengurus, tetapi juga mendampingi dan tumbuh bersama masyarakatnya.

Menjadi pemimpin bukan hanya soal memegang jabatan, melainkan tentang bagaimana menghadirkan sikap dan tindakan yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. SANTUN menjadi kata kunci yang menuntun arah kepemimpinan. Ia bukan sekadar slogan, melainkan panduan moral sekaligus kompas etika. Setia, misalnya, bukan hanya kesetiaan kepada simbol negara seperti Pancasila, UUD 1945, hukum, dan perundang-undangan, tetapi juga kesetiaan terhadap garis komando, mulai dari Presiden, Menteri, hingga atasan. Kesetiaan ini menjadi fondasi agar roda birokrasi berjalan dengan harmonis dan konsisten.

Lalu ada amanah. Jabatan bukan hadiah, melainkan titipan yang menuntut profesionalisme, tanggung jawab, dan dedikasi tanpa pamrih. Dalam amanah melekat integritas, karena kepercayaan yang diberikan akan runtuh bila dijalankan dengan mental yang rapuh. Seorang pemimpin juga dituntut menjadi negarawan, artinya menumbuhkan jiwa besar, rela berkorban, dan berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Jiwa kesatria inilah yang membedakan seorang pejabat dari sekadar penguasa.

Teladan pun menjadi bagian tak terpisahkan. Kepemimpinan sejati hadir ketika kata, sikap, dan tindakan selaras, sehingga memberi cermin bagi orang lain. Pemimpin yang santun menjadi panutan, tidak hanya di ruang kerja tetapi juga dalam keseharian. Lebih jauh, ia harus unggul. Bukan unggul dalam arti menonjolkan diri, melainkan terus memperbaiki kualitas, memperkaya ilmu, memperluas pengalaman, dan menumbuhkan jejaring, agar mampu menghadirkan kinerja terbaik.

Namun kepemimpinan tidak berhenti pada diri sendiri. Ada “ngemong”: sikap mendidik, mendampingi, dan memberi ruang tumbuh bagi bawahan. Pemimpin sejati tidak menekan, melainkan menuntun dengan asah, asih, dan asuh. Filosofi Jawa pun mengingatkan: Ing ngarsa sung tuladha, di depan memberi teladan; ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat; tut

wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Dengan demikian, kepemimpinan yang santun bukanlah retorika yang kosong, melainkan perwujudan nilai yang mengikat diri dan memberi arah bagi orang lain. Di sanalah letak martabat seorang pemimpin.

Penunjukan para pejabat ini sesungguhnya tidak lahir dari pertimbangan personal, apalagi berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Tidak ada niat untuk menciptakan sekat-sekat di dalam kementerian. Yang menjadi dasar adalah kinerja yang telah ditunjukkan, rekam jejak yang nyata, serta masukan dari berbagai pihak. Bahkan, sebagian nama yang terpilih sebelumnya belum dikenal secara pribadi oleh pimpinan. Hal ini menegaskan bahwa prosesnya bukan soal kedekatan, melainkan soal tanggung jawab dan profesionalisme.

Keputusan yang diambil juga bukan keputusan sepihak. Dalam kurun waktu yang bahkan belum genap seratus hari menjabat, setiap langkah diputuskan melalui pertimbangan kolektif dengan melibatkan masukan dari jajaran pimpinan, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga pejabat tinggi kementerian. Inilah bentuk ikhtiar bersama, bukan kepentingan pribadi, melainkan upaya meletakkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Amanah yang diberikan tentu tidak ringan. Namun, harapannya jelas: agar setiap pejabat mampu melaksanakan tugas dengan kesabaran, kekuatan, dan komitmen penuh. Sebab, tujuan akhirnya tidak lain adalah memajukan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi bagi kemajuan negara. Dalam kerangka itulah, setiap keputusan harus dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif demi kepentingan bersama.

Jabatan publik, terlebih di level tinggi, bukan sekadar gelar yang melekat di depan nama. Ia adalah tanggung jawab besar yang akan mengubah ritme kehidupan, tidak hanya bagi pejabat yang dilantik, tetapi juga bagi keluarga yang mendampingi. Waktu bersama pasangan dan anak-anak akan berkurang, karena tugas negara menuntut perhatian penuh tanpa batas ruang dan waktu. Pesan sederhana bahwa

“pekerjaan ini berjalan dua puluh empat jam sehari, tujuh hari dalam sepekan” memberi gambaran betapa beratnya amanah tersebut.

Di balik tuntutan kerja tanpa henti, ada pesan moral yang jauh lebih penting: menjaga integritas. Presiden berulang kali menegaskan bahwa satu rupiah pun uang rakyat tidak boleh disalahgunakan. Amanah yang diberikan negara bukanlah tiket untuk menikmati fasilitas berlebih, apalagi mengisi tas pribadi. Justru sebaliknya, jabatan adalah ujian kejujuran. Siapa pun yang tergoda menyalahgunakan kewenangan, pada saat itu pula ia kehilangan legitimasi moral dan layak diberhentikan. Ketegasan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga dengan sikap bersih dan jujur.

Sering kali masih ada pandangan yang keliru bahwa menjadi pejabat identik dengan kenyamanan hidup, fasilitas serba ada, dan kesempatan memperkaya diri. Pola pikir seperti itu harus dipatahkan. Jabatan publik bukanlah warisan yang bisa diwariskan ke anak cucu, bukan pula dompet yang bisa diisi seenaknya. Jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, dan satu-satunya “hak istimewa” yang sah adalah kesempatan untuk mengabdikan bagi bangsa.

Karena itu, menjadi pejabat berarti bersiap untuk bekerja keras, berlari kencang, dan meletakkan kepentingan pribadi jauh di bawah kepentingan rakyat. Amanah ini menuntut pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga teguh secara moral. Integritas menjadi fondasi, sementara dedikasi adalah tenaga pendorong. Tanpa keduanya, jabatan hanya akan menjadi beban, bukan pengabdian.

Lebih jauh, setiap orang yang dipercaya memegang amanah punya kesempatan meninggalkan warisan berharga: *legacy*. *Legacy* bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas, melainkan nilai kejujuran, jejak kepemimpinan yang bersih, dan hasil nyata bagi masyarakat. Pemimpin yang berintegritas tidak diingat karena fasilitas yang pernah ia nikmati, tetapi karena perubahan positif yang ia torehkan. Dalam konteks pendidikan nasional, amanah ini menjadi semakin mulia. Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa

adalah mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Itu artinya, para pemegang jabatan di bidang pendidikan harus memiliki visi jangka panjang, kesabaran menghadapi kompleksitas, dan keberanian membuat terobosan. Mendidik bangsa bukanlah pekerjaan sehari dua hari, melainkan perjuangan lintas generasi.

Pada akhirnya, jabatan ini bukan hadiah, melainkan ujian. Ujian atas kejujuran, ketekunan, dan kesetiaan kepada rakyat. Siapa yang mampu menjalaninya dengan ikhlas, ia akan dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan legacy mulia. Siapa yang gagal menjaga integritas, ia akan tercatat hanya sebagai nama di daftar pejabat yang lewat tanpa bekas.

78 **Rumah Pendidikan yang Ramah, Santun, dan Inklusif:**

Peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Melalui Rumah Pendidikan

Selasa, 21 Januari 2025

Peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Pendidikan melalui Rumah Pendidikan bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak penting untuk membawa layanan pendidikan masuk ke era baru. Gagasan yang dibawa sangat jelas: pendidikan harus hadir dalam wujud yang ramah, santun, dan adaptif dengan dunia digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah Pendidikan diposisikan sebagai simbol sekaligus instrumen, bukan hanya nama aplikasi, melainkan wujud nyata dari komitmen menjadikan kementerian sebagai “rumah” yang benar-benar melayani insan pendidikan.

Transformasi digital dipandang sebagai keniscayaan. Di satu sisi, teknologi mempercepat akses data, memungkinkan analisis yang lebih tajam, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun di sisi lain, ada peringatan yang tegas bahwa data bukan sekadar angka. Tanpa tanggung jawab dalam penggunaannya, data bisa menimbulkan masalah baru—dari kebijakan yang salah arah hingga hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, validasi dan verifikasi data menjadi kunci. Data harus akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kebijakan benar-benar memberi dampak nyata.

Poin penting yang ditekankan adalah bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak bantuan atau program populis yang digulirkan, melainkan dari seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Bantuan, tunjangan, dan kebijakan hanya bermakna bila berujung pada peningkatan kualitas. Misalnya, sertifikasi guru tidak boleh berhenti pada tambahan tunjangan, tetapi harus diikuti dengan perbaikan kompetensi pedagogik dan keterlibatan lebih besar dalam proses pendidikan.

Semangat yang dibawa dalam peluncuran ini adalah bekerja cepat, tepat, dan penuh dedikasi—“vini, vidi, vici” dalam konteks pendidikan. Rumah Pendidikan versi beta yang dirilis hari ini hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana aplikasi ini, bersama cetak biru transformasi digital, benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar proyek teknologi tanpa ruh.

Peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan tidak boleh berhenti pada aspek material semata. Kenaikan tunjangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja, sebab setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat wajib kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi pendidikan. Dana publik seharusnya tidak menjadi beban, tetapi menjadi investasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks itu, digitalisasi menjadi kunci penting. Pendidikan tidak lagi cukup hanya berbasis sekolah, apalagi di daerah 3T yang sulit dijangkau. Teknologi digital membuka ruang baru: akses belajar yang fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai alat penyedia informasi satu arah. Ia harus menghadirkan dialog, interaksi, dan ruang partisipasi, sehingga anak-anak tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan peserta aktif dalam proses belajar.

Tantangan besar lainnya adalah menjangkau mereka yang berada di luar akses internet atau listrik. Pendidikan digital tidak boleh eksklusif hanya bagi mereka yang memiliki perangkat dan jaringan, melainkan harus mencari cara inovatif agar setiap anak bangsa bisa

tetap belajar. Inilah bagian dari visi kebijakan Presiden Prabowo yang sedang disusun: membangun platform layanan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Data dan informasi yang dihimpun melalui berbagai inisiatif pendidikan harus benar-benar dimanfaatkan. Bukan sekadar angka atau arsip, melainkan sebagai bahan bakar untuk memperkuat layanan pendidikan bermutu. Harapannya, semua guru, orang tua, dan masyarakat bisa menggunakan data ini sebagai pijakan bersama untuk memajukan pendidikan nasional.

79

Salat sebagai Pondasi Pendidikan Karakter:

Pengkajian Isra' Mi'raj Nabi Muhammad 1446 H

Jum'at, 31 Januari 2025

Peringatan Isra' Mi'raj tahun ini terasa istimewa karena menghadirkan sebuah pesan mendalam tentang pentingnya salat sebagai penopang kepribadian utama manusia. Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya memperkuat spiritualitas di lingkungan Kementerian pendidikan. Menariknya, persiapan acara hanya berlangsung dalam waktu singkat, tetapi mampu terselenggara dengan penuh kebersamaan. Hal ini menunjukkan semangat yang tulus untuk menghadirkan momen refleksi di tengah kesibukan birokrasi.

Ada hal yang patut digarisbawahi: salat bukan hanya ritual ibadah, melainkan pondasi moral. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, *innaṣ-ṣalāta tan-hā 'anil-fahsyā'i wal-munkar*—salat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, salat memiliki dimensi sosial yang nyata, bukan sekadar gerakan fisik. Ia membentuk kesabaran, keteguhan, serta komitmen untuk terus berada di jalan yang benar. Jika pesan ini diterjemahkan ke dalam dunia pendidikan, maka jelas bahwa pendidikan sejati harus melahirkan generasi berakarakter, berakhlakul karimah, bukan hanya cerdas secara intelektual.

Di sinilah titik temu antara agama dan pendidikan. Apa artinya pendidikan tinggi tanpa karakter? Apa jadinya generasi yang cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara moral? Dengan menempatkan

salat sebagai pusat pembentukan pribadi, kita sesungguhnya sedang menghidupkan kembali orientasi pendidikan yang utuh—mendidik manusia seutuhnya, bukan sekadar mencetak tenaga kerja.

Ada pula pesan simbolis dari hadirnya para pemimpin kementerian yang kompak menunjukkan kebersamaan. Bahwa spiritualitas bukan sesuatu yang terpisah dari kebijakan, melainkan harus menjadi nafas dalam setiap langkah pembangunan pendidikan bangsa. Bahkan keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi wadah untuk merawat kebersamaan, mencerdaskan, dan mencerahkan.

Isra' Mi'raj mengingatkan kita bahwa pendidikan dan ibadah berjalan seiring. Salat bukan hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga meneguhkan hubungan manusia dengan sesama. Dari sinilah lahir kepribadian yang kuat, sabar, dan bermartabat—cita-cita luhur yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita.

20 Mengemban Amanah dengan RAMAH dan SANTUN:

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan
Kemendikdasmen

Jum'at, 31 Januari 2025

Pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kemendikdasmen kali ini mengingatkan kembali pada esensi dasar pendidikan: mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Momentum ini tidak sekadar seremoni serah jabatan, melainkan juga penegasan bahwa tanggung jawab yang dipikul para pejabat baru adalah bagian dari cita-cita besar menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia.

Amanah ini jelas bukan perkara ringan. Visi yang diusung kementerian menegaskan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, berhak memperoleh layanan pendidikan yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi hanya karena faktor ekonomi, lokasi tempat tinggal, kondisi fisik, atau identitas agama. Hak konstitusional anak bangsa adalah sesuatu yang melekat dan tidak boleh dirampas oleh keadaan apa pun.

Namun, jalan menuju pendidikan bermutu itu penuh tantangan. Era digital yang menjanjikan akses luas justru membuka kesenjangan baru: keterbatasan akses teknologi, rendahnya keterampilan digital, tekanan akademik yang semakin berat, hingga ancaman keamanan dan privasi. Paradigma belajar pun berubah, menuntut pendidik untuk bertransformasi di tengah tekanan global yang kian kompleks.

Di titik inilah pelantikan pejabat fungsional menemukan

maknanya. Bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan penguatan peran individu-individu yang diharapkan mampu menjawab persoalan nyata pendidikan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa visi pendidikan bermutu tidak berhenti sebagai jargon, melainkan hadir nyata di ruang kelas, di sekolah pelosok, dan dalam kehidupan anak-anak Indonesia.

Inilah panggilan tanggung jawab: menghapus sekat-sekat diskriminasi, menjembatani kesenjangan digital, dan memastikan pendidikan kembali pada jantungnya—membuka jalan agar setiap anak memiliki masa depan yang layak. Pelantikan kali ini adalah awal langkah, bukan akhir. Sebab, amanah mencerdaskan bangsa tidak pernah selesai.

ASN hari ini berada di garis depan dalam memastikan program-program pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tuntutan yang muncul bukanlah untuk mengurangi kualitas, melainkan untuk bekerja lebih cerdas, lebih efektif, dan tetap memberikan layanan terbaik. Situasi ini menuntut adanya strategi yang tepat, diiringi kemampuan beradaptasi agar setiap program dapat berjalan maksimal tanpa kehilangan esensi dari tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks ini, peran jabatan fungsional menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya pengisi struktur birokrasi, melainkan motor penggerak yang memastikan roda organisasi tetap berjalan lancar. Para analis anggaran, APK APBN, dan pranata keuangan APBN, misalnya, memegang tanggung jawab vital sebagai penjaga keuangan negara. Mereka memastikan setiap rupiah dari APBN dikelola sesuai prioritas pemerintah, sehingga anggaran tidak hanya sekadar dibelanjakan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata.

Tak kalah krusial adalah kontribusi perencana, widyaprada, statistisi, dan analis kebijakan. Kehadiran mereka menjadi penopang bagi kementerian dalam merumuskan kebijakan yang bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga solutif menghadapi kompleksitas persoalan pendidikan. Analisis kebijakan bahkan memegang peran strategis

dalam memastikan transformasi pendidikan nasional berjalan menuju pembelajaran yang bermakna dan mendalam, sehingga setiap anak bangsa mendapat kesempatan belajar yang benar-benar berharga.

Di sisi lain, transformasi digital menuntut hadirnya pranata komputer yang andal. Mereka menjadi ujung tombak dalam mengelola sistem informasi, data, dan penerapan teknologi agar semua berjalan efektif serta efisien. Peran arsiparis pun tidak kalah penting, menjaga agar pengelolaan pengetahuan digital (*digital knowledge management*) tetap berjalan dan mendukung kerja organisasi. Sementara itu, analis sumber daya manusia aparatur diharapkan mampu mengawal proses transformasi manajemen ASN, mulai dari pengelolaan talenta hingga digitalisasi birokrasi, sehingga kualitas aparatur terus meningkat seiring kebutuhan zaman.

Tantangan-tantangan itu sejatinya hanya dapat dijawab dengan kerja yang lebih inovatif dan cerdas. Semua pihak di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan mampu mengemban amanah ini dengan baik, termasuk para pejabat fungsional yang baru dilantik. Visi besar untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua anak bangsa tidak akan tercapai tanpa sinergi dan komitmen bersama.

Di atas segalanya, budaya kerja yang dibangun harus selaras dengan nilai RAMAH: Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Dengan prinsip inilah, kementerian dapat menghadirkan wajah birokrasi yang bukan hanya efisien, tetapi juga manusiawi, dekat dengan masyarakat, dan siap menjawab tantangan masa depan.

INSAN SANTUN

Nilai-nilai dasar yang seharusnya menjwai insan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terangkum indah dalam satu kata: **SANTUN**. Bukan sekadar akronim, melainkan panduan hidup yang mengakar pada jati diri bangsa. Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong—enam prinsip yang jika dijalani dengan sungguh-sungguh, akan melahirkan pribadi-pribadi yang kokoh dan bermartabat.

Setia berarti teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta aturan hukum yang berlaku, sambil tetap menjaga loyalitas kepada pemimpin dan institusi tempat mengabdikan. Amanah mengandung pesan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjadikan tugas sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Negerawan menuntut keberanian untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sebuah sikap yang semakin penting di tengah godaan pragmatisme.

Teladan bukanlah slogan kosong, melainkan kewajiban untuk memberi contoh nyata—baik di kantor, keluarga, maupun masyarakat. Menjadi unggul menandakan komitmen untuk terus belajar, meningkatkan kualitas diri, dan menjaga profesionalisme dalam setiap penugasan negara. Sementara itu, ngemong dengan prinsip *asah, asih, asuh* menegaskan pentingnya kerja sama yang penuh penghormatan, saling mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain.

Jika seluruh insan pendidikan mampu menjadikan SANTUN sebagai nafas dalam bekerja, maka birokrasi pendidikan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berkarakter. Nilai-nilai ini bukan sekadar tuntunan moral, melainkan fondasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan, kebersamaan, dan kualitas kerja yang bermakna bagi bangsa.

21 Memahami Pembelajaran Mendalam:

Kuliah Umum di Universitas Negeri Malang

Kamis, 13 Februari 2025

Pendekatan pembelajaran mendalam, atau *deep learning*, sebenarnya bukan konsep baru dalam dunia pendidikan. Sejak pertengahan 1970-an, terutama di negara-negara Skandinavia, literatur pendidikan sudah mulai membahas pentingnya pendekatan belajar yang mendalam. Para peneliti seperti Marton dan Solio menekankan bahwa belajar bukan sekadar menghafal fakta, tetapi melibatkan pemahaman yang utuh, refleksi, dan kemampuan menghubungkan konsep. Ide ini kemudian dikenal sebagai *deep approach to learning*, yang bertolak belakang dengan pendekatan *surface learning* yang cenderung hanya mengejar nilai atau mengingat informasi secara dangkal.

Perkembangan konsep ini berlanjut pada era 1980-an hingga 1990-an, ketika kelompok kognitivistis mengangkat tema ini ke dalam wacana pendidikan global. Kognitivistis menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam belajar—bukan sekadar menerima fakta, tetapi memahami, menganalisis, dan mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan lain. Pendekatan ini kemudian diperkuat oleh teori konstruktivistis, yang menekankan bahwa pembelajaran sejati terjadi ketika siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Selain itu, aliran *information processing* menyoroti bagaimana informasi diproses pada tingkat yang lebih mendalam, yang memungkinkan pembelajaran

menjadi lebih tahan lama dan bermakna.

Menariknya, istilah *deep learning* sering memunculkan kebingungan karena juga digunakan dalam konteks *artificial intelligence* (AI). Padahal, meskipun istilahnya sama, fokusnya berbeda. Dalam pendidikan, *deep learning* menekankan kualitas pemahaman, keterlibatan intelektual, dan kemampuan menerapkan pengetahuan. Sementara dalam AI, *deep learning* mengacu pada pemrosesan informasi yang kompleks dan penyimpanan data dalam skala besar, yang memungkinkan mesin “belajar” dari pola data. Namun, keduanya memiliki benang merah yang sama: fokus pada pemrosesan informasi secara mendalam dan menyeluruh.

Dengan demikian, *deep learning* bukan sekadar istilah akademik atau tren modern. Ini adalah prinsip penting dalam transformasi pendidikan, yang menekankan bahwa belajar harus melibatkan pemahaman, refleksi, dan penerapan, bukan sekadar hafalan. Siswa yang menerapkan pendekatan ini tidak hanya mengingat informasi, tetapi mampu berpikir kritis, menghubungkan konsep, dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata.

Singkatnya, *deep learning* adalah fondasi bagi pendidikan yang bermakna. Ia menegaskan bahwa kualitas pembelajaran lebih penting daripada kuantitas informasi yang diterima, dan menuntut sistem pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menantang, relevan, dan memicu pemikiran mendalam. Di era transformasi pendidikan saat ini, prinsip ini menjadi lebih relevan daripada sebelumnya, karena bukan sekadar mempersiapkan siswa untuk lulus ujian, tetapi membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif di dunia yang terus berubah.

Belajar sejatinya adalah proses aktif membangun pengetahuan, bukan sekadar menumpuk informasi. Pandangan konstruktivis menekankan bahwa pengetahuan tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui keterlibatan individu dalam menangkap, memproses, dan menggunakan informasi. Tiga tahap ini—yang sering disebut sebagai “*Pre*, *Process*, dan *Product*”—menjadi inti

dari pembelajaran yang efektif. *Pre* mencakup persiapan dan penerimaan informasi, *Process* menekankan pada kedalaman dan kualitas pengolahan informasi, sedangkan *Product* adalah hasil akhir pengetahuan yang diperoleh. Semakin mendalam proses yang diterapkan, semakin berkualitas pula pengetahuan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan sekadar banyaknya informasi yang diterima, tetapi cara kita memprosesnya yang menentukan tingkat pemahaman dan kemampuan berpikir kritis.

Perkembangan teori konstruktivis juga banyak dipengaruhi oleh pemahaman baru tentang komputer. Konsep bahwa komputer menangkap, menyimpan, dan menggunakan informasi menjadi analogi bagi bagaimana manusia belajar. Proses belajar manusia memiliki mekanisme serupa: informasi yang diterima melalui indera diolah oleh otak dan kemudian digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks. Semakin efektif proses ini, semakin tinggi kualitas pembelajaran.

Selain itu, pemahaman tentang otak manusia turut memberi pandangan baru mengenai cara belajar. Struktur otak yang kompleks dan terlindungi dengan baik memungkinkan pengolahan informasi secara menyeluruh, termasuk aspek emosional yang turut memengaruhi bagaimana pengetahuan diterima dan digunakan. Aktivitas seperti melihat, mendengar, atau menyentuh bukanlah proses fisik semata; semuanya melibatkan otak secara aktif. Tanpa perhatian, keterlibatan pikiran, dan keterlibatan perasaan, pengalaman belajar menjadi dangkal. Al-Qur'an pun menegaskan hal ini melalui istilah *a'yunun la yubsiruna biha*—mata yang melihat, namun tidak memahami karena tidak disertai perhatian, pemikiran, dan perasaan.

Inilah inti dari *deep processing*, di mana pembelajaran menjadi bermakna hanya ketika informasi diproses secara mendalam, melibatkan seluruh indera, pikiran, dan emosi. Pengetahuan yang terbentuk dengan cara ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu diaplikasikan, memberikan pemahaman yang utuh, dan mendorong kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami proses ini,

pembelajaran bisa dirancang sedemikian rupa agar setiap pengalaman belajar menjadi kesempatan untuk membangun pengetahuan yang kaya dan tahan lama.

Proses pembelajaran yang mendalam selalu dimulai dari perhatian. Perhatian bukan sekadar fokus sesaat; perhatian merupakan sumber daya mental yang dapat dialokasikan, dikelola, dan diarahkan. Saat perhatian benar-benar terlibat, seluruh kemampuan otak bekerja, indra ikut aktif, pengalaman pribadi dimanfaatkan, dan pengetahuan yang dimiliki menjadi bagian dari proses pembelajaran. Inilah gerbang pertama bagi belajar yang bermakna: tanpa perhatian, informasi hanya lewat begitu saja dan tidak terserap secara optimal.

Belajar yang mendalam juga bukan sekadar mendengar atau melihat sesuatu secara pasif. Saat seseorang mendengar atau melihat, otak terus bekerja, menghubungkan apa yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya, pengalaman, dan rasa ingin tahu yang ada. Informasi yang masuk tidak hanya tersimpan, tetapi diolah, diinterpretasikan, dan dikaitkan dengan pengalaman hidup. Proses ini selaras dengan berbagai teori pembelajaran modern, termasuk quantum learning, yang menekankan keterlibatan penuh otak dan indra untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya.

Salah satu titik penting dalam proses ini adalah transformasi pengetahuan. Belajar yang sejati bukan sekadar transfer informasi—atau yang disebut *surface learning*—di mana seseorang tahu fakta tetapi tidak memahami konteks, tujuan, atau makna di baliknya. *Surface learning* seringkali membuat orang hanya hafal tanpa mengerti, sehingga mereka kehilangan kesempatan menemukan insight atau pencerahan. Berbeda dengan itu, pembelajaran yang mendalam memungkinkan seseorang menemukan makna, memahami tujuan, dan merasakan kegembiraan dalam proses belajar. *Insight* semacam ini selaras dengan teori Gestalt, yang menekankan pengalaman pencerahan saat seseorang menemukan hubungan baru atau pemahaman baru dari apa yang dipelajari.

Proses menemukan makna ini juga terkait dengan prinsip konstruktivisme, di mana belajar adalah proses aktif menemukan arti dan relevansi. Pengetahuan bukan hanya diterima begitu saja, melainkan dikonstruksi melalui interaksi antara pengalaman pribadi, pengetahuan yang sudah dimiliki, dan informasi baru yang diperoleh. Dengan cara ini, belajar tidak hanya menghasilkan kemampuan kognitif, tetapi juga pengalaman yang memuaskan secara emosional dan intelektual.

Dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu sejati dianggap sebagai cahaya, *al-ilmu nurun*. Pengetahuan yang benar memberikan pencerahan bagi pemiliknya, bukan sekadar fakta yang tersimpan di memori. Hal ini sejalan dengan prinsip Gestalt yang menekankan “*insight*”—proses mental yang menghasilkan pemahaman baru. Dengan kata lain, belajar yang bermakna melibatkan seluruh proses mental, mulai dari perhatian, memori, asosiasi, hingga pemrosesan mendalam, yang akhirnya membentuk pemahaman holistik.

Selain aspek kognitif, pembelajaran yang efektif juga harus menghargai kemanusiaan. Setiap individu unik, memiliki potensi, pengalaman, dan karakteristik yang berbeda. Teori humanisme menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap keunikan dan kemanusiaannya. Dalam konteks ini, pembelajaran tidak hanya soal penguasaan materi, tetapi juga pemberdayaan individu untuk mengembangkan potensi maksimalnya. Prinsip diferensiasi, yang sering disebut dalam konsep belajar merdeka, menekankan perlunya menyesuaikan proses belajar dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing siswa.

Dengan demikian, pembelajaran yang sejati menggabungkan beberapa unsur utama: perhatian yang fokus dan terarah, keterlibatan indra dan pengalaman pribadi, transformasi pengetahuan menjadi pemahaman bermakna, insight yang membawa pencerahan, serta penghargaan terhadap kemanusiaan dan potensi unik setiap individu. Proses belajar yang seperti ini tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang utuh,

kritis, kreatif, dan berdaya. Pada akhirnya, belajar bukan sekadar akumulasi fakta, tetapi pengalaman transformatif yang memuliakan manusia dan memberdayakan potensi terbaiknya.

Proses pembelajaran sejatinya berangkat dari prinsip **humanisasi**, sebuah pendekatan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki cara dan ritme belajar yang unik. Belajar bukan sekadar mengejar target atau mengikuti kurikulum secara kaku, melainkan memberikan kebebasan agar peserta didik dapat menemukan **cara berpikir** dan strategi belajar yang paling efektif bagi dirinya sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan teori *humanistic education* dari Carl Rogers, yang dikenal dengan konsep *Freedom to Learn*. Menurutinya, belajar tidak boleh dipaksa berdasarkan jurusan atau batasan tertentu—peserta didik seharusnya bebas mengeksplorasi apa yang ingin mereka pelajari, karena setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda.

Detail kecil sekalipun, seperti preferensi menggunakan tangan kanan atau kiri, juga penting dalam proses humanistik ini. Pilihan untuk menulis dengan tangan kiri atau kanan berkaitan erat dengan perkembangan motorik dan fungsi otak, yang telah lama dipelajari dalam neuropsikologi. Menghormati hal-hal semacam ini bukan sekadar toleransi, melainkan bagian dari pendidikan yang *holistic* dan mendukung perkembangan optimal setiap individu.

Dalam proses belajar, pertanyaan dan rasa ingin tahu harus selalu dihargai. Menghentikan seorang siswa ketika ia ingin bertanya dapat memutus *flow of thinking*—aliran berpikir yang sedang aktif—dan berpotensi membuat informasi yang baru diterima menjadi terlupakan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *quantum learning*, di mana otak bekerja secara penuh ketika individu sedang mendengar, melihat, dan meraba, sehingga informasi tidak hanya diterima, tetapi juga diproses menjadi pemahaman yang bermakna.

Sayangnya, banyak sistem pendidikan saat ini masih terjebak dalam *surface learning*, yaitu pembelajaran yang hanya berfokus pada *know about what* atau pengetahuan faktual tanpa pemaknaan. Misalnya, mengetahui ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya memang

benar secara fakta, tetapi jika siswa tidak memahami konteks geografisnya—misalnya Malang, Tulungagung, atau Trenggalek—maka pembelajaran itu menjadi mekanis dan tidak memberi makna. Akibatnya, siswa cenderung terjebak dalam *reproductive learning*, di mana mereka hanya mengulang atau menghafal informasi untuk ujian tanpa memahami tujuan atau relevansinya.

Untuk mengatasi hal ini, pembelajaran perlu bergerak menuju *deep learning*, yang menghubungkan *declarative knowledge* (pengetahuan faktual) dengan *procedural knowledge* (pengetahuan tentang *how* atau cara melakukan sesuatu). Fakta-fakta harus diubah menjadi *meaningful facts*, yang tidak hanya diingat, tetapi juga diaplikasikan. Contohnya, memahami peta Jawa Timur dan menentukan rute dari Malang ke Surabaya membuat pengetahuan bukan sekadar nama dan angka, tetapi memiliki makna nyata dan bisa digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, fakta-fakta yang dipelajari dapat dihubungkan satu sama lain, membentuk jaringan pemahaman yang utuh.

Dalam perspektif pendidikan humanistik, pembelajaran yang efektif bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi bagaimana informasi itu diintegrasikan, diolah, dan diaplikasikan. Ilmu yang dipelajari menjadi hidup ketika fakta-fakta dihubungkan dengan *how to use it*, sehingga otak bekerja secara maksimal untuk menambah pengetahuan, membangun pemahaman, dan memberikan konteks yang relevan. Proses ini menegaskan bahwa pendidikan seharusnya bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemaknaan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

Deep learning dalam konteks pendidikan bukan sekadar soal mengumpulkan informasi atau menghafal fakta. Proses ini lebih dalam, lebih bermakna, dan menekankan bagaimana pengetahuan itu terhubung dan digunakan. Dasarnya dimulai dari konsep *mind map*, yang dalam psikologi dikenal dengan istilah *schema*. Sebuah *schema* menunjukkan bahwa setiap ilmu yang kita pelajari tidak

berdiri sendiri; pengetahuan membentuk jejaring di otak kita, di mana satu konsep terhubung dengan konsep lain. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin kompleks jejaring ini, dan semakin kaya pemahaman yang bisa dicapai. Jejaring ini terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil—catatan, fakta, atau konsep—yang saling berhubungan. Ketika jejaring ini berkembang, pengetahuan tidak lagi menjadi kumpulan fakta terpisah, tetapi sebuah sistem yang utuh dan saling terintegrasi.

Proses *deep learning* baru terjadi ketika seseorang belajar dengan tujuan menemukan makna dari apa yang dipelajari, bukan hanya mengumpulkannya. Lebih dari itu, proses ini melibatkan kemampuan menemukan hal baru dari pengetahuan yang ada, sehingga tercipta pemahaman yang kreatif dan kritis. Dalam kerangka ini, ada tiga pilar utama yang melekat dalam *deep learning*, yaitu *mindful learning*.

Pertama, *mindful* berarti keterlibatan penuh dan kesadaran dalam proses belajar. Seseorang belajar dengan fokus, memperhatikan setiap detail, dan benar-benar hadir dalam pengalaman belajar, bukan sekadar formalitas. *Kedua*, *mindful* juga berarti penghormatan. Setiap murid, apapun karakteristiknya—yang cepat, lambat, menarik perhatian, atau tertinggal—harus diperlakukan dengan penuh hormat. Tidak boleh ada murid yang diabaikan atau direndahkan. Menghargai pendapat murid, bahkan ketika salah, menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif, di mana setiap individu merasa diperhatikan dan dihargai.

Ketiga, *mindful* mencakup refleksi atau metakognisi. Murid diajak untuk memahami proses belajar mereka sendiri—*knowing about learning*. Ini berarti mereka tidak hanya tahu apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana cara mereka belajar, mengapa mereka belajar, dan metode apa yang paling efektif untuk tiap materi. Misalnya, cara menghafal sejarah berbeda dengan cara menghafal bahasa atau memahami konsep matematika. Memberikan ruang bagi murid untuk menemukan strategi belajar mereka sendiri menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan personal.

Mindful learning ini berpadu dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL)*, di mana guru berfokus mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman murid yang ada di kelas. Guru tidak selalu mengandalkan buku teks; yang penting adalah bagaimana murid terlibat dan bagaimana materi dapat dihubungkan dengan pengalaman nyata mereka. Pendekatan ini membuat setiap murid merasa berkontribusi, dihormati, dan diperhatikan. Bahkan jika pendapat murid tidak relevan atau salah, yang utama adalah mendengar dan menanggapi dengan cara yang membangun, bukan menghukum atau merendahkan.

Dengan demikian, deep learning yang sesungguhnya adalah proses yang partisipatif, reflektif, dan manusiawi. Murid tidak hanya menghafal atau meniru, tetapi mampu memahami, menghubungkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan menjadi jejaring hidup yang terus berkembang, pengalaman dihargai, dan setiap murid merasa terlibat serta dihormati. Inilah inti dari pembelajaran mendalam: bukan sekadar pengetahuan yang tersimpan, tetapi pengetahuan yang dapat dimaknai, diaplikasikan, dan dikembangkan secara kreatif.

Pembelajaran yang sejati bukan sekadar menuntaskan materi atau sekadar lulus ujian. Ia harus *meaningful*, bermakna. Ilmu yang dipelajari akan benar-benar bermanfaat ketika seseorang memahami tujuan dan cara penggunaannya. Tidak cukup hanya menghafal fakta atau rumus; pemahaman harus disertai pengalaman mempraktikkan ilmu itu sendiri. Dalam konteks bahasa, misalnya, mempelajari kata “to be” tidak berhenti pada kalimat sederhana seperti *He is a student* atau *He is a professor*. Satu kata “is” bisa membuka dunia baru ketika siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi—mengganti subjek, mengganti predikat, mengubah konteks kalimat—hingga mereka menemukan berbagai cara penggunaan yang berbeda. Dari sini, satu konsep sederhana menjadi kaya makna dan fleksibel, serta mendorong siswa untuk berpikir kreatif.

Prinsip *meaningful learning* ini berlaku juga dalam matematika atau sains. Setelah memahami rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, pembelajaran menjadi bermakna ketika murid mampu menerapkan rumus itu dalam berbagai situasi nyata. Nilai sesungguhnya bukan hanya sekadar menghitung segitiga di buku, tetapi mengetahui bagaimana rumus itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, proyek-proyek praktis, atau konsep yang lebih luas di kemudian hari. Dengan demikian, belajar bukan hanya soal memahami “apa artinya”, tetapi juga **manfaatnya dan bagaimana bisa digunakan untuk berkembang lebih jauh.**

Ketika pembelajaran sudah *mindful* dan *meaningful*, pengalaman belajar akan menjadi *joyful*, penuh kebahagiaan. Tidak sekadar “*fun learning*” yang sering disalahartikan sebagai hiburan atau lucu-lucuan semata. *Fun* yang salah arah kadang justru mengganggu, seperti gurauan yang berpotensi menyinggung atau *body shaming*. *Joy* muncul ketika siswa merasa dihargai, mampu menemukan jawaban sendiri, bisa mengeksplorasi hal baru, dan memahami makna dari apa yang dipelajari. Kesenangan ini lahir dari proses menemukan, bukan dari hiburan semu.

Dalam kerangka *deep learning*, fokus tidak hanya pada pencapaian instan atau motivasi untuk lulus ujian. Pembelajaran yang mendalam menekankan pemahaman yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi—belajar untuk memberi manfaat, untuk mampu berpikir kritis, dan untuk memecahkan masalah. *Deep learning* meniscayakan proses *meta-cognitive*, di mana siswa sadar akan cara mereka belajar, mampu mengevaluasi diri, dan mengatur strategi belajar sendiri. Di sinilah pentingnya *learner self-direction*, kemandirian siswa dalam mengelola pembelajaran mereka.

Metode evaluasi dalam *deep learning* pun berbeda. Tidak sekadar memberi jawaban benar atau salah. Sistem seperti **SOLO** (*Self Observe Learning Outcome*) memungkinkan siswa merefleksikan hasil kerja mereka, berpikir kritis, dan mencari referensi tambahan sebelum menemukan jawaban. Guru tidak langsung memberi jawaban yang

benar, tetapi mendorong siswa untuk menelusuri, membandingkan, dan memvalidasi teori. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar materi, tetapi juga keterampilan berpikir, problem solving, dan kemampuan mengambil keputusan.

Intinya, pembelajaran yang efektif adalah kombinasi dari *mindful*, *meaningful*, dan *joyful learning*. *Mindful*, karena siswa sadar dan fokus dalam proses belajar. *Meaningful*, karena mereka menemukan tujuan dan manfaat dari apa yang dipelajari. *Joyful*, karena mereka merasakan kepuasan dari proses penemuan itu sendiri. Ketiga unsur ini menciptakan lingkungan di mana siswa berkembang tidak hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk menjadi pembelajar seumur hidup, mampu berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. *Deep learning* bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi transformasi kemampuan berpikir dan menemukan makna dalam setiap ilmu yang dipelajari.

Pendidikan seharusnya lebih dari sekadar menumpuk informasi. Yang terpenting bukan banyaknya materi, melainkan seberapa esensial dan bermakna materi itu bagi anak. Materi yang esensial memberi fondasi yang kuat karena bisa ditransformasikan ke berbagai konteks kehidupan. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan banyak materi pelajaran yang justru membingungkan dan membebani murid, sehingga anak-anak seringkali menghafal tanpa memahami. Contohnya, seorang siswa kelas lima SD mengerjakan LKS tentang “Konferensi Meja Bundar” tanpa tahu mengapa disebut meja bundar. Anak hanya diinstruksikan untuk menghafal, bukan memahami makna atau konteksnya.

Fenomena serupa juga terjadi dalam pembelajaran sejarah. Cerita Kerajaan Singosari dan Empu Gandring, misalnya, sering disampaikan hanya sebagai rangkaian peristiwa bunuh-membunuh. Jika nilai yang terkandung dalam sejarah tersebut tidak ditekankan—seperti keberanian, kejujuran, atau konsekuensi dari tindakan—murid bisa menangkap pesan yang keliru: bahwa sejarah bangsa hanyalah kisah pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan. Inilah mengapa

pendidikan nilai harus melekat pada semua mata pelajaran, bukan hanya pelajaran agama. Nilai membuat ilmu menjadi bermakna dan memberi arah moral bagi siswa.

Pendidikan nilai juga bisa disisipkan pada pelajaran non-akademis. Misalnya, olahraga bisa menjadi sarana mengajarkan karakter: menghargai lawan, belajar menang dan kalah dengan sportif, bukan sekadar mengejar kemenangan tanpa batas. Saat ini, orientasi prestasi sering membuat anak “siap menang, tidak siap kalah,” dan bahkan bisa mendorong perilaku tidak etis demi mencapai kemenangan. Dengan menekankan nilai, pembelajaran bukan hanya soal pencapaian akademis, tetapi membentuk karakter yang utuh.

Konsep deep learning menekankan integrasi ilmu. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri—setiap bidang saling terkait. Dengan pendekatan ini, wawasan anak menjadi lebih luas dan terpadu. Sebagai contoh, matematika bisa dikaitkan dengan arah kiblat, sejarah dengan warisan budaya, dan pelajaran lainnya bisa saling menguatkan. Anak tidak lagi melihat ilmu sebagai fakta terpisah, tetapi sebagai satu jaringan pengetahuan yang saling terkait.

Deep learning juga membuka jalan bagi pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Anak-anak diajak mengaitkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata. Materi yang dikurangi tidak berarti anak kehilangan ilmu, justru memberi ruang bagi mereka untuk menginternalisasi dan menerapkan pengetahuan. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih efektif, relevan, dan mendalam.

Pertanyaan tentang hubungan antara K13 dan Merdeka Belajar muncul, dan jawabannya cukup jelas: keduanya tidak identik. K13 lebih menekankan tematik dan struktur materi, sedangkan Merdeka Belajar lebih menekankan hasil belajar yang berbasis deep learning. Dengan pendekatan deep learning, outcome-nya akan selaras dengan Merdeka Belajar, karena fokusnya pada pemahaman mendalam, keterampilan, dan nilai yang melekat dalam setiap mata pelajaran.

Intinya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengajarkan makna, keterkaitan, dan nilai. Anak-anak tidak hanya

tahu, tetapi memahami, mampu mengaitkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari, dan menjadi pribadi yang berwawasan luas serta berkarakter. Materi pelajaran yang esensial, pembelajaran berbasis nilai, dan integrasi antarlilmuwan menjadi kunci agar pendidikan tidak sekadar menghafal, tetapi benar-benar membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, beretika, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

22

Filosofi dan Praktik Pembelajaran Mendalam:

Seminar Nasional dan Sosialisasi *Deep Learning*:
Implementasi Pembelajaran Mendalam dalam Rangka
Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di
UHAMKA

Selasa, 17 Februari 2025

Pembelajaran mendalam atau *deep learning* kini menjadi topik yang semakin banyak diperbincangkan di Indonesia. Awalnya, perhatian publik terhadap konsep ini muncul dari diskusi di pengajian lokal, yang kemudian tersebar luas melalui media sosial. Perhatian ini sekaligus membuka mata bahwa masyarakat memang penasaran dengan apa sesungguhnya *deep learning*. Sayangnya, penyebaran informasi tidak selalu akurat; muncul baik misinformasi—kesalahpahaman—maupun disinformasi, yakni informasi yang sengaja dipelintir atau disalahartikan untuk kepentingan tertentu. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pendidikan dan inovasi dalam pembelajaran selalu menarik perhatian, sekaligus rawan disalahpahami.

Untuk merumuskan *deep learning* secara matang, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci. Para pakar pendidikan dari berbagai universitas, guru praktisi, serta pemerhati pendidikan diajak bersama-sama meneliti dan mengembangkan pendekatan ini. Proses ini menegaskan bahwa *deep learning* bukan sekadar istilah atau tren, melainkan pendekatan nyata yang menekankan pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Hal ini membedakannya dari pendekatan

tradisional yang hanya menekankan hafalan dan pengulangan.

Banyak kesalahpahaman yang muncul terkait *deep learning*. Beberapa orang bahkan mengira ini adalah kurikulum baru atau identik dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Faktanya, *deep learning* sebagai pendekatan pembelajaran sudah ada jauh sebelum istilah AI populer. Meskipun terdapat irisan antara *deep learning* dan AI, keduanya tetap berbeda secara konsep. Fokus *deep learning* tetap pada bagaimana siswa mampu memahami materi secara mendalam, menganalisis informasi, serta mengaitkannya dengan pengalaman nyata, bukan sekadar menghafal fakta.

Di masyarakat, perbandingan antara *deep learning* dan konsep pendidikan lain, seperti *Merdeka Belajar*, juga sering muncul. Tidak semua tulisan atau opini yang beredar memiliki dasar ilmiah yang kuat, sehingga penting bagi publik untuk cermat menyaring informasi. Meski begitu, keberadaan berbagai kajian, pelatihan, dan forum akademik tentang *deep learning* menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin diterima dan relevan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada akhirnya, *deep learning* menegaskan satu hal: pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer informasi. Pendidikan harus mampu menumbuhkan pemahaman yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Dengan fondasi ini, kualitas pembelajaran akan meningkat, dan visi pendidikan bermutu untuk semua—yang inklusif dan mendalam—bisa lebih mudah diwujudkan. Implementasi *deep learning* memang bukan proses instan; ia menuntut ketekunan, kolaborasi, dan keberanian menghadapi misinformasi. Namun, perjalanan ini penting, karena pendidikan yang sejati bukan sekadar mengajar, tetapi membekali generasi muda dengan pemahaman yang kuat dan mendalam tentang dunia di sekitarnya.

Deep learning dalam pendidikan sejatinya bukanlah konsep baru, meski bagi banyak orang terdengar modern dan revolusioner. Konsep ini sudah mulai diperkenalkan sejak pertengahan 1970-an,

terutama di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Intinya, belajar bukan sekadar mengumpulkan fakta, melainkan memahami maknanya dan mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Beberapa peneliti, seperti Marton dan Saljo, menekankan pendekatan *kualitatif* terhadap pembelajaran. Mereka menekankan pentingnya kualitas pemahaman, bukan sekadar kuantitas informasi yang diserap.

Pembelajaran *kuantitatif* tradisional, yang masih dominan di banyak sistem pendidikan, sering berorientasi pada seberapa banyak siswa bisa menghafal. Bentuk pengukurannya pun biasanya sederhana: mengisi titik-titik kosong, menjawab pertanyaan faktual, atau mengingat definisi. Siswa bisa menjawab soal-soal tersebut dengan benar, tetapi mereka belum tentu memahami konsep di baliknya atau tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks lain. Pengetahuan yang diperoleh bersifat *declarative knowledge*—fakta-fakta berdiri sendiri, tersegregasi, dan seringkali kehilangan relevansi praktis.

Contohnya bisa terlihat dalam pembelajaran bahasa. Seorang siswa mungkin mampu menghafal aturan tata bahasa atau bentuk kata kerja, tetapi ketika diminta menerapkannya dalam kalimat atau teks, ia kebingungan. Hal yang sama terjadi dalam ilmu agama atau bahasa klasik: hafalan bentuk kata dan aturan gramatikal tidak menjamin kemampuan untuk mengekspresikan atau memahami teks secara utuh. Pemahaman mendalam tidak tercapai, dan hasilnya adalah belajar yang mekanis serta membosankan.

Fenomena serupa juga terjadi dalam matematika. Banyak siswa mampu menghafal rumus—misalnya luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, atau rumus volume kubus—namun ketika dihadapkan dengan soal nyata, kemampuan mereka terbatas. Mereka tidak bisa mengaitkan rumus dengan situasi konkret, seperti menghitung luas atap gedung berbentuk segitiga atau volume kotak dalam kehidupan sehari-hari. Rumus hanya menjadi hafalan kosong, tanpa logika dan pemahaman di baliknya. Hal ini menegaskan bahwa menghafal

tanpa pemahaman tidak cukup untuk membangun kompetensi yang sebenarnya.

Pendekatan *deep learning* mengajarkan sebaliknya: memahami konsep, menghubungkan teori dengan praktik, dan menekankan kualitas pembelajaran. *Deep learning* menuntut siswa untuk berpikir kritis, memahami alasan di balik fakta, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Dengan demikian, belajar menjadi lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan. Pengetahuan bukan lagi sekadar hafalan yang cepat terlupakan, tetapi menjadi alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dan membangun pemahaman yang utuh.

Dengan filosofi ini, pendidikan tidak hanya menyiapkan siswa untuk menjawab soal di atas kertas, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan berpikir, menganalisis, dan memahami dunia di sekitarnya. *Deep learning* menekankan kualitas di atas kuantitas, pemahaman di atas hafalan, dan penerapan di atas sekadar mengingat. Inilah pendekatan yang membuat proses belajar tidak hanya efektif, tetapi juga memuaskan dan bermakna bagi setiap individu yang belajar.

Belajar seringkali dipahami secara sempit, hanya sebagai upaya untuk lulus ujian. Pendekatan yang dikenal sebagai *achievement* misalnya, menekankan pencapaian skor di atas pemahaman sejati. Dalam model ini, belajar tidak lagi soal menumbuhkan pemahaman atau menanamkan nilai, tetapi lebih kepada mengerjakan soal—bahkan sampai mencari bocoran agar jawaban yang keluar sesuai prediksi. Ketika kenyataan berbeda—soal ujian tidak sesuai bocoran—kekecewaan muncul, sering kali ditujukan pada pengajar. Dalam praktiknya, *learning* jenis ini membuat siswa menyiapkan contekan, bukan pengetahuan. Belajar tereduksi menjadi mekanisme untuk mendapatkan nilai tinggi, bukan untuk menginternalisasi ilmu. Tugas-tugas sekolah pun sering sekadar formalitas; siswa mengerjakan *worksheets* (lembar kerja) tanpa membaca buku atau memahami konsep. Nilai tinggi menjadi tujuan, bukan indikator

pemahaman. Bahkan dalam pendidikan agama, ujung-ujungnya yang benar hanyalah versi *mazhab* guru, sehingga keberagaman pandangan menjadi salah.

Di sisi lain, ada pendekatan yang lebih mendalam, yang menekankan kualitas dan pemahaman hakiki. Dalam model ini, ilmu harus “tertancap dalam hati”, atau dalam istilah klasik, *fi sudur*, bukan sekadar tertulis di buku. Contohnya terlihat dalam pengajaran definisi takwa: guru mengulang definisi sampai benar-benar dikuasai, sambil menekankan seluruh perintah dan larangan Allah. Setiap kata diulang sampai tertanam kuat, bukan hanya di kepala, tapi sampai mengalir dalam hati. Bahkan sistem ulangan dibuat sedemikian rupa agar jawaban tidak sekadar hafalan mekanis; harus sesuai format tertentu, misalnya menggunakan akronim, agar siswa benar-benar memahami, bukan sekadar mengisi jawaban. Pendekatan ini menuntut kedalaman dan konsistensi, bukan sekadar kemampuan menebak.

Kemudian muncul gagasan *deep learning*, yang menjadi tonggak dalam pendidikan modern. Pendekatan ini menekankan orientasi pada *how* dan *why*, bukan sekadar *what*. Artinya, siswa tidak cukup hanya tahu fakta; yang lebih penting adalah memahami bagaimana suatu proses terjadi dan mengapa fakta-fakta tersebut saling terkait. Fakta-fakta bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh. Misalnya, pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*) tidak hanya berupa serangkaian fakta, tetapi juga cara mengaitkan fakta-fakta tersebut untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, belajar menjadi hidup, ilmu tertanam dalam diri, dan siswa mampu berpikir kritis serta menerapkan pemahaman dalam konteks nyata.

Singkatnya, perbedaan mendasar antara pendekatan *achievement* dan *deep learning* terletak pada orientasi. *Achievement* menekankan skor, ulangan, dan kepatuhan pada jawaban baku; sementara *deep learning* menekankan pemahaman, proses berpikir, dan penguasaan konsep secara mendalam. Pendekatan pertama mungkin lebih mudah

diukur, tetapi sering membuat hakikat belajar tereduksi. Pendekatan kedua menantang, menuntut kesabaran dan konsistensi, tetapi hasilnya jauh lebih bermakna: ilmu benar-benar hidup dalam diri, bukan sekadar tertulis di kertas.

Ketika berbicara mengenai sepeda, misalnya, yang dianggap bukan sekadar benda, tapi sebuah *concept*. Konsep ini terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya: roda, sadel, setang, pedal—yang masing-masing juga merupakan *concept* tersendiri. Ketika semua unsur itu digabungkan, terbentuklah sepeda yang utuh, berbeda dengan sepeda motor yang memiliki unsur tambahan seperti mesin, karburator, dan busi. Perbedaan itu bukan sekadar “ada motor”, tapi keseluruhan sistem yang menyatukan unsur-unsur itu menjadi satu *concept*.

Dari konsep ke praktik, muncul pertanyaan: bagaimana sepeda dibuat? Roda, sadel, dan setang bisa berdiri sendiri, tapi ketika digabung, mereka menjadi proses kreatif yang menghasilkan sepeda. Begitu juga dengan pengalaman naik sepeda. Ketika seseorang belajar, ada yang jatuh dan ada yang tidak. Ini bukan kebetulan, melainkan berkaitan dengan prinsip *balance*. Ilmu *balance* ini membawa kita pada fisika, hukum Newton, aksi dan reaksi, serta semua prinsip ilmiah yang menjelaskan mengapa sepeda bisa bergerak tanpa terjatuh.

Namun, bersepeda bukan hanya soal fisika. Saat berada di jalan raya, posisi di kiri jalan, lampu lalu lintas, dan aturan lain muncul sebagai bentuk *public ethics*. Tidak cukup hanya menguasai fisika; aturan sosial harus dipahami agar bersepeda selaras dengan kehidupan bersama. Bahkan dari perspektif iman, bersepeda bisa menjadi bagian dari ibadah. Dengan membaca doa sebelum naik sepeda—*Bismillahirrahmanirrahim*—dan doa saat bersepeda—*Subhaanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina, wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun*—aktivitas ini menyatu dengan nilai spiritual.

Ini lah inti dari *deep learning* dalam konteks pembelajaran. Memahami sesuatu tidak bisa dilakukan secara terpisah. Fakta, konsep,

praktik, etika, dan nilai spiritual semuanya saling terkait, membentuk pemahaman yang *holistic* dan mendalam. Belajar tidak sekadar menghafal atau memisahkan bagian-bagian, tapi menggabungkan semuanya menjadi kesadaran utuh yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dengan pendekatan seperti ini, belajar bukan lagi tentang mengingat fakta semata, tapi menghubungkan pengalaman, ilmu, aturan, dan nilai menjadi satu rangkaian yang utuh. Dari sepeda sederhana, kita belajar tentang konsep, keseimbangan, etika, bahkan iman. Setiap elemen berdiri sendiri, tetapi hanya ketika digabung mereka membentuk makna yang sejati.

Belakangan ini muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan: *schooling without learning*. Banyak laporan dari UNESCO menunjukkan bahwa fenomena ini nyata—banyak orang tetap bersekolah, tetapi tidak benar-benar belajar. Inti pendidikan bukan sekadar menghadiri kelas atau menuntaskan kurikulum; esensinya adalah *learning*, memahami dan menginternalisasi pengetahuan. Fenomena ini menjadi kritik penting yang mendorong lahirnya konsep *deep learning*, pendekatan yang berfokus pada pembelajaran mendalam dan bermakna.

Deep learning sendiri tidak muncul begitu saja. Salah satu pengaruhnya datang dari teknologi komputer. Cara kerja komputer—*input*, menyimpan, lalu *use data*—ternyata memiliki kesamaan dengan cara otak manusia memproses informasi. Hal ini semakin diperkuat oleh kajian psikologi kognitif yang menekankan pentingnya memahami struktur otak. Otak manusia menangkap informasi melalui panca indera, memprosesnya, menyimpannya, lalu menggunakannya kembali. Dengan analogi ini, belajar bukan lagi sekadar menghafal, tetapi menjadi proses aktif yang melibatkan *mental processing*, pemahaman, dan aplikasi pengetahuan.

Dalam kerangka teori *information processing*, proses belajar dibagi menjadi dua tingkat: *surface level processing* dan *deep level processing*. *Surface level processing* cenderung bersifat mekanis dan

hafalan, sementara *deep level processing* menekankan pemahaman yang mendalam. Proses ini melibatkan menangkap informasi, mengolahnya secara mental, menyimpannya, dan menggunakan informasi itu dalam konteks yang relevan. Dari sini, teori kognitif menekankan bahwa belajar adalah *mental process*—proses di mana manusia menerima, menyimpan, dan memanfaatkan informasi.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam *deep learning* adalah *attention*. Kemampuan untuk menangkap dan memahami informasi sangat bergantung pada seberapa fokus perhatian dialokasikan. Dalam psikologi disebut *allocatable mental resources*, yakni sumber daya mental yang dapat diprioritaskan. Tidak semua informasi layak mendapat perhatian; hanya informasi yang relevan dengan tujuan *learning* yang seharusnya difokuskan. Proses ini mirip dengan konsep “*pay attention*” dalam bahasa Inggris—harus serius dan sadar, seperti membayar sesuatu dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesalahan. Ketika menghadapi banyak informasi, kemampuan memilih dan memfokuskan perhatian inilah yang membedakan belajar yang bermakna dari sekadar *schooling*.

Dengan memahami mekanisme ini, pembelajaran yang sesungguhnya menjadi lebih jelas. *Deep learning* bukan sekadar menambah jumlah informasi yang diketahui, tetapi menekankan kualitas pengolahan informasi: memilih apa yang penting, memahami, mengaitkan dengan pengetahuan lain, dan akhirnya menerapkannya. Inilah inti pembelajaran yang benar-benar mempersiapkan seseorang untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi kompleksitas dunia nyata. Sekolah yang hanya menumpuk jam pelajaran tanpa mendorong *deep learning* pada akhirnya gagal memenuhi tujuan pendidikan sejati.

Setiap orang menafsirkan informasi dengan cara yang berbeda, tergantung pada pengalaman, pengetahuan awal, dan konteks yang dimiliki sebelumnya. Objek yang sama bisa diberikan makna yang berbeda karena setiap individu membawa *pre-knowledge* dan pengalaman pribadi. Hal ini membuat respons terhadap objek atau

informasi tertentu selalu bersifat unik. Misalnya, satu orang mungkin mengenali sebuah kopiah, sementara orang lain menyebutnya kupluk—meski objeknya sama, maknanya berbeda.

Proses pemaknaan ini melibatkan memori, yang terbagi menjadi *short-term memory* dan *long-term memory*. *Short-term memory* menyimpan informasi dengan cepat, tetapi mudah hilang. Sebaliknya, *long-term memory* menyimpan informasi lebih mendalam dan bertahan lama. Kedalaman penyimpanan memori ini menentukan seberapa kuat pengetahuan itu melekat. Dalam hidup, banyak hal yang kita ingat dengan jelas, tetapi tidak sedikit pula yang terlupakan. Memori bekerja seperti komputer: ada kode atau label untuk setiap “file.” Informasi yang sering diakses lebih mudah diingat, sedangkan yang jarang digunakan bisa tertumpuk dan sulit diakses. Dengan demikian, lupa bukan berarti ilmu hilang, tetapi cara penyimpanannya tidak optimal.

Dalam teori kognitif, proses mengingat dibagi menjadi dua mekanisme: *recall* dan *recognize*. *Recall* berarti memanggil informasi tanpa bantuan apapun, sedangkan *recognize* adalah mengenali informasi dengan bantuan petunjuk. Contohnya, lebih mudah mengenali wajah seseorang daripada mengingat namanya. Proses *pattern recognition*, atau kemampuan mengenali pola dan tanda, mempermudah pemanggilan informasi yang terlupakan. Petunjuk-petunjuk kecil ini sering disebut *rhetorical cues*, dan membantu otak untuk “menarik” kembali informasi yang tersimpan.

Deep learning atau pembelajaran mendalam tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga mengembangkan *higher-order thinking skills*, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kolaborasi. Proses ini menuntut pemahaman yang lebih dalam: seseorang tidak hanya tahu sesuatu, tetapi juga mampu menanyakan, “Apa makna ini untuk saya?” dan “Bagaimana informasi ini relevan dengan pengalaman saya?”

Teori konstruktivis menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses berpikir aktif (*construction of knowledge*). Guru tidak

hanya mengajarkan definisi, tetapi mengajak murid menyusun fakta sehingga terbentuk pemahaman. Selama proses ini, murid diajak mengeksplorasi fakta dari berbagai sudut pandang, setiap pendapat dihargai, dan keterlibatan murid harus penuh kesadaran (*mindful*). Bahkan gerak mata murid bisa menjadi indikator bagi guru: apakah murid benar-benar memahami atau hanya berpura-pura mengerti.

Dengan demikian, *deep learning* bukan sekadar menyerap informasi, tetapi juga memahami, mengaitkan, dan membangun pengetahuan secara aktif. Informasi tidak hanya masuk ke memori, tetapi diproses, dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya, dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, sehingga menjadi pengetahuan yang bertahan lama dan bermakna.

Belajar yang sesungguhnya bukan sekadar menghafal, tapi melibatkan kesadaran penuh—*mindful*. Ketika seseorang sadar akan tujuan belajarnya, tahu apa yang harus dipelajari, dan menemukan makna dari proses itu, maka pembelajaran menjadi bermakna. Konsep ini sejalan dengan teori konstruktivis, yang menekankan bahwa *learning* adalah proses menemukan *meaning*, bukan sekadar menerima informasi. Dalam teori tersebut, ada 12 prinsip yang menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam lahir dari keterlibatan penuh, di mana peserta benar-benar mengetahui apa yang mereka pelajari dan mengapa hal itu penting.

Proses ini membawa kebahagiaan yang sejati—bukan sekadar “*fun learning*” yang sering disalahpahami sebagai hiburan dangkal atau lucu-lucuan. *Joyful learning* berbeda: kebahagiaan muncul karena peserta merasa telah memahami sesuatu, menemukan sesuatu dari proses *learning* itu sendiri, dan mengalami kepuasan intelektual. Menariknya, pembelajaran yang menyenangkan dan cerdas sering dihubungkan dengan humor. Orang yang mampu melucu dengan cerdas menunjukkan pemahaman yang mendalam, sementara humor tanpa kecerdasan bisa jadi mengganggu. Dengan kata lain, belajar dengan gembira berarti menggabungkan pemahaman, keterlibatan, dan kepuasan intelektual—itulah esensi *true laughter learning*.

Deep learning menekankan proses berpikir tingkat tinggi, menghubungkan berbagai fakta, dan membentuk *map* pengetahuan di otak. Bukan sekadar mengingat, tetapi menafsirkan, mengaitkan informasi baru dengan yang lama, serta menerapkan pemahaman untuk konteks baru. Sebelum istilah *mind map* populer melalui Tony Buzan pada 1980-an, teori *schemata* sudah menjelaskan bagaimana otak menyusun informasi secara terhubung. Inilah inti dari pembelajaran mendalam: pengetahuan yang terintegrasi, kontekstual, dan siap digunakan dalam berbagai situasi.

Dalam praktiknya, deep learning tidak harus mengubah kurikulum yang ada. Baik yang menggunakan *K13*, pendekatan tematik, atau kurikulum *merdeka*, prinsip yang sama berlaku: fokus pada materi yang esensial, kurangi topik yang kurang mendasar, dan hubungkan setiap konsep dengan disiplin ilmu lain. *Learning* menjadi lebih fokus, mendalam, dan bermakna, karena siswa tidak sekadar menghafal fakta, tapi benar-benar memahami keterkaitan dan penerapan konsep.

Pendekatan ini bahkan bisa diterapkan di berbagai bidang, termasuk agama. Dalam studi Al-Quran, misalnya, ayat yang berulang kali menekankan konsep tertentu membantu memperkuat ingatan dan pemahaman. Dengan cara ini, deep learning mengajarkan bagaimana otak menyimpan informasi, menghubungkannya, dan memakainya untuk penerapan baru. Proses *learning* menjadi pengalaman yang melibatkan semua indera dan pikiran, bukan hanya sekadar mengulang hafalan.

Tidak hanya untuk pelajaran agama, prinsip ini relevan untuk matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan umum. Di sini, deep learning menekankan kualitas, bukan kuantitas: memahami hal-hal mendasar dengan benar dan menghubungkannya dengan konsep lain, sehingga *learning* menjadi proses aktif dan kreatif. Kebahagiaan belajar—*joyful learning*—muncul dari kesadaran bahwa pengetahuan yang diperoleh berguna, terintegrasi, dan bisa diterapkan.

Intinya, *deep learning* bukan sekadar teknik atau metode. Ia adalah filosofi *learning* yang mengedepankan keterlibatan penuh, makna yang ditemukan sendiri, dan kebahagiaan yang lahir dari pemahaman mendalam. Proses ini menuntun peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghubungkan konsep antar disiplin, sehingga *learning* menjadi pengalaman yang benar-benar transformatif.

Dalam proses penyusunan naskah akademik, keterlibatan para ahli internasional menjadi sorotan. Tiga tokoh utama yang memandu adalah Max Drummy dari Melbourne, Michael Fullen dari Ontario, Kanada, dan Joan dari Harvard University. Kehadiran mereka menegaskan bahwa konsep yang dikembangkan bukan sekadar formalitas, melainkan hasil pemikiran yang mendalam dan berkelas dunia.

Naskah akademik yang dihasilkan sudah ada dan bisa dijadikan acuan, meskipun memang masih ada beberapa kekurangan. Beberapa hal perlu diperkuat melalui kegiatan belajar tambahan atau *taklimul mutalim*, serta menelaah lebih jauh literatur relevan seperti buku *The Process of Learning* karya John B. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik adalah proses dinamis yang terus berkembang, bukan produk final yang sempurna.

23 **Memperbarui Tekad RAMAH dan SANTUN:**

Pelantikan Pejabat Manajerial JT Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Kemendikdasmen

Jum'at, 24 Februari 2025

Pelantikan pejabat manajerial, administrator, dan pengawas di lingkungan Kemendikdasmen pada dasarnya tidak sekadar prosesi formal, melainkan sebuah titik penting untuk memperbarui tekad bersama. Setiap jabatan baru yang diemban adalah amanah yang langsung bersentuhan dengan misi besar konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Inilah garis haluan yang tidak boleh tergeser, apa pun posisi yang dipegang dan di mana pun seseorang ditempatkan.

Pelantikan itu juga mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus dipandang sebagai rumah pendidikan. Sebuah tempat yang bukan hanya birokratis, tetapi sekaligus menjadi pusat pelayanan publik yang RAMAH—responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. RAMAH di sini bukan jargon kosong, melainkan standar perilaku yang menuntut seluruh aparatur untuk membuka diri, mendengar, memberi solusi, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

KOMITMEN SANTUN

Lebih jauh, nilai-nilai SANTUN menjadi ruh yang harus diinternalisasikan. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum, serta kepemimpinan yang sah. Amanah dalam menjalankan tugas, dengan kesadaran bahwa pekerjaan bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari ibadah dan pengabdian pada bangsa. Negarawan yang menempatkan kepentingan publik di atas ego dan kepentingan golongan. Teladan yang mencerminkan integritas serta akhlak mulia, baik di kantor, keluarga, maupun di tengah masyarakat. Unggul dengan terus belajar dan meningkatkan kapasitas, tidak cepat puas dengan capaian yang ada. Dan ngemong, yakni merawat budaya kerja yang saling asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta suasana kebersamaan sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara: *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.

Tidak bisa dipungkiri, jabatan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan harapan setiap individu. Ada yang menerima promosi, ada yang dipindahkan, dan mungkin ada pula yang merasa penempatannya kurang sesuai. Namun di sinilah jiwa profesionalitas diuji. Seorang pejabat yang berjiwa pendidik dituntut untuk tetap tegak memegang amanah, menjaga kebersamaan, dan mengembangkan budaya kolektif-kolegial. Esensinya bukan pada posisi, melainkan pada kontribusi nyata yang diberikan.

Pelantikan ini juga menegaskan pentingnya melihat kementerian sebagai satu keluarga besar. Kerja tidak bisa hanya dilakukan dalam lingkup direktorat masing-masing, melainkan harus melintasi batas, membangun kolaborasi, dan menguatkan korps secara menyeluruh. Hanya dengan cara itu, tugas besar pendidikan dasar dan menengah bisa dijalankan secara efektif.

Pada akhirnya, jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan tanggung jawab publik. Setiap amanah yang diterima harus dijalani dengan penuh integritas, dengan orientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Jika nilai-nilai RAMAH dan SANTUN benar-benar hidup dalam keseharian pejabat dan aparatur, maka kementerian ini

tidak hanya akan dikenal sebagai lembaga yang ramah pelayanan, tetapi juga sebagai benteng moral yang menumbuhkan kepercayaan publik. Dari sinilah, visi mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dijalankan secara lebih nyata, sekaligus memperkokoh fondasi keadaban dan kesejahteraan Indonesia.

24

Pemerataan Akses Pendidikan Berkeadilan:

Taklimat Media Sistem Penerimaan Murid Baru

Senin, 3 Maret 2025

Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 kembali ditegaskan pemerintah sebagai langkah penting dalam memperluas akses pendidikan bermutu yang adil bagi seluruh anak bangsa. Meski substansinya sudah sering disosialisasikan, kehadiran aturan resmi melalui Peraturan Menteri tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyelaraskan pemahaman publik. Proses ini juga telah melalui jalur formal, mulai dari Sidang Kabinet hingga Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, sehingga posisinya bukan sekadar gagasan internal, melainkan keputusan yang didukung secara politik dan legal.

FILOSOFI SPMB

Filosofi utama dari kebijakan ini bertumpu pada empat pilar: pemerataan mutu pendidikan, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesi sosial. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar sekaligus sarana untuk mempersatukan bangsa. Sekolah, dalam kerangka ini, bukan sekadar tempat mentransfer ilmu, melainkan arena sosial di mana anak-anak dari beragam latar belakang—suku, agama, maupun status sosial—berjumpa, berinteraksi, dan belajar hidup bersama. Inilah esensi mengapa penerimaan murid baru diarahkan berbasis zonasi: agar anak-anak tumbuh bersama lingkungannya, membangun jejaring sosial yang kuat, dan menanamkan nilai kebersamaan sejak dini.

Pemerintah menegaskan, pendidikan bermutu untuk semua hanya bisa terwujud jika akses dijaga agar tetap inklusif. Sekolah negeri diposisikan sebagai ruang utama untuk menampung keragaman sosial, sementara sekolah swasta tetap diperhatikan keberlanjutannya. Ada pengakuan atas kontribusi sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra penting negara dalam menyediakan layanan pendidikan. Dengan demikian, keadilan akses bukan berarti mengabaikan peran non-negeri, melainkan menciptakan ekosistem pendidikan yang saling menopang.

Landasan hukum yang menopang SPMB terbilang komprehensif. Amandemen konstitusi dalam Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak pendidikan bagi setiap warga negara. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga menempatkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan bernegara. Di samping itu, ada Undang-Undang HAM, UU Sistem Pendidikan Nasional, hingga UU tentang Penyandang Disabilitas yang memperluas cakupan jaminan hak. Bahkan, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden turut memberi arah politik yang lebih eksplisit, menekankan bahwa akses pendidikan bermutu adalah bagian dari visi nasional lima tahun ke depan.

Intinya, SPMB bukan sekadar soal teknis pendaftaran atau seleksi masuk sekolah. Kebijakan ini memuat visi besar: memastikan anak-anak Indonesia tidak dipisahkan oleh sekat sosial, ekonomi, atau geografis dalam mengakses pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi ruang perjumpaan sosial yang memperkuat rasa kebangsaan, solidaritas, dan kohesi sosial. Pendidikan dengan demikian menjadi instrumen paling strategis dalam merajut kembali persatuan bangsa di tengah keragaman.

Masyarakat tentu berharap implementasi kebijakan ini tidak berhenti pada level aturan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan sekolah siap menjalankan mandat ini, baik dari sisi kapasitas daya tampung, kualitas guru, maupun fasilitas belajar. Tanpa keseriusan dalam aspek teknis, filosofi mulia ini bisa terjebak menjadi sekadar jargon. Namun jika dijalankan dengan konsisten,

SPMB 2025/2026 bisa menjadi tonggak penting dalam memastikan setiap anak Indonesia, dari manapun asalnya, memiliki pijakan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi negeri.

MASALAH PPDB

Selama tujuh tahun terakhir, praktik PPDB telah menimbulkan sejumlah masalah yang sulit diabaikan. Dari sisi akademik, kualitas sekolah unggulan justru mengalami penurunan akibat masuknya murid dengan latar belakang akademik yang semakin heterogen. Fenomena banyaknya murid yang akhirnya mengundurkan diri semakin menegaskan bahwa sistem ini tidak berjalan mulus.

Di ranah administrasi, masalah makin kompleks. Pemalsuan dokumen domisili, sertifikat prestasi, hingga data pendukung lain menjadi praktik yang kerap muncul. Standar rapor yang berbeda-beda antarsekolah dan antardaerah menambah kebingungan. Sementara itu, sebagian sekolah swasta terancam kehilangan murid, sedangkan sekolah negeri justru kelebihan kapasitas. Ketidakjelasan proses seleksi, lemahnya transparansi, hingga ketidakpatuhan terhadap aturan pusat maupun daerah membuat sistem ini rentan penyimpangan.

Jika ditarik ke akar, semua ini bermula dari tiga hal: kesenjangan mutu pendidikan, persepsi bahwa sekolah negeri lebih murah, serta adanya intervensi kepentingan tertentu. Maka tidak heran jika kebijakan zonasi dalam PPDB lama yang awalnya dirancang untuk pemerataan akses justru menimbulkan ketidakpuasan. Filosofi dasarnya hanya berhenti pada jarak rumah ke sekolah, bukan pada kualitas layanan pendidikan.

SPMB INKLUSIF - BERKEADILAN

Perubahan substansial kini datang lewat SPMB. Filosofi barunya jelas: pendidikan bermutu untuk semua. Tidak hanya memastikan setiap anak dapat bersekolah di satuan pendidikan terdekat, tetapi juga memberikan ruang bagi kelompok kurang mampu dan kebutuhan khas tiap daerah.

Cakupan pengaturan pun jauh lebih luas. Jika PPDB lama sekadar mengatur teknis penerimaan lewat jalur zonasi, afirmasi, dan mutasi, maka SPMB meliputi keseluruhan sistem penerimaan murid. Termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah, hingga integrasi teknologi.

Dalam kebijakan baru ini, domisili tetap menjadi pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya. Prestasi juga diakui lebih beragam, mencakup akademik, non-akademik seperti seni, budaya, olahraga, bahasa, hingga kepemimpinan. Afirmasi dan mutasi tetap ada, namun dengan keleluasaan bagi pemerintah daerah menentukan kuota sesuai karakteristik wilayah. Yang tak kalah penting, sistem ini mendorong inovasi dengan mengandalkan kurasi prestasi yang lebih adil, pemanfaatan data, serta pengawasan berbasis teknologi melalui Dapodik. Dengan arah baru ini, harapannya sistem penerimaan murid tidak lagi hanya menjadi soal administrasi masuk sekolah, melainkan benar-benar menjadi pintu awal bagi pemerataan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

Perubahan aturan penerimaan murid baru melalui jalur SPMB kali ini menimbulkan sejumlah catatan penting. Untuk jenjang SD, skema jalur masih sama dengan PPDB, dengan porsi domisili minimal 70%, afirmasi minimal 15%, prestasi, dan mutasi maksimal 5%. Tidak ada yang berubah. Namun, mulai SMP, pergeseran proporsi terlihat jelas. Jalur domisili berkurang dari 50% menjadi 40%, afirmasi naik dari 15% menjadi 20%, dan prestasi kini dijamin minimal 25%. Untuk mutasi, porsinya tetap di angka 5%.

Perubahan yang lebih signifikan terlihat pada SMA. Kuota domisili yang semula 50% kini turun menjadi minimal 30%. Jalur afirmasi juga berada di batas minimal 30%, sementara jalur prestasi yang dulu hanya sisa kuota kini mendapat alokasi minimal 30%. Jalur mutasi tetap maksimal 5%. Sementara itu, SMK tetap memiliki aturan berbeda: seleksi didasarkan pada rapor, prestasi, atau tes bakat dan minat sesuai bidang keahlian. Prioritas tetap diberikan pada

keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, dengan kuota minimal 15%.

Selain soal kuota, kebijakan ini juga menyinggung mekanisme bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Mereka diarahkan ke sekolah swasta dengan dasar regulasi Permendagri No. 3 Tahun 2023. Praktiknya, sudah ada daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk membiayai siswa di sekolah swasta, seperti Tangerang Selatan dan Kabupaten Badung di Bali. Skema ini dianggap sebagai jalan keluar agar anak-anak tetap bisa bersekolah meski tidak masuk sekolah negeri.

Hal baru lain yang cukup penting adalah keterbukaan data daya tampung sekolah sebelum pendaftaran dibuka. Langkah ini dirancang untuk mencegah praktik penerimaan murid melebihi kapasitas serta mengurangi ruang bagi “titipan”. Selama ini, masalah daya tampung yang tidak diumumkan sejak awal sering menjadi celah penyalahgunaan, bahkan dengan angka “biaya titipan” yang berbeda-beda tergantung daerah dan sekolah.

Kini, dengan penggunaan Dapodik, pengawasan menjadi lebih ketat. Jika ada sekolah menerima murid melebihi daya tampung, otomatis data siswa tambahan itu tidak tercatat. Konsekuensinya, siswa tersebut tidak akan mendapat Dana BOS, karena dana hanya diberikan kepada siswa yang terdaftar resmi di Dapodik. Langkah ini menjadi strategi antisipatif agar distribusi murid sesuai kapasitas dan anggaran pemerintah tidak diselewengkan. Harapannya, dengan kombinasi aturan kuota, dukungan bagi sekolah swasta, dan keterbukaan data, sistem penerimaan murid baru bisa lebih transparan dan adil.

SPMB yang mulai berlaku untuk tahun ajaran 2025/2026 membawa perubahan signifikan dalam wajah pendidikan Indonesia. Prinsip dasarnya adalah inklusif-berkeadilan, dengan tujuan memastikan semua anak bangsa—baik yang bersekolah di negeri maupun swasta—mendapatkan kesempatan yang setara untuk menikmati pendidikan bermutu. Untuk mewujudkannya,

pemerintah daerah kini diwajibkan mengalokasikan dana dari APBD guna mendukung siswa yang belajar di sekolah swasta. Langkah ini penting, karena selama ini bantuan pendidikan kerap lebih banyak menyasar sekolah negeri, sementara murid di sekolah swasta sering kali berjuang dengan pembiayaan yang terbatas.

Meski begitu, ada pengecualian bagi wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan). Realitas pendidikan di sana berbeda. Sekolah saja sudah menjadi sesuatu yang langka, apalagi fasilitas belajar yang memadai. Maka, kebijakan SPMB tidak diberlakukan secara sama di daerah 3T. Fokusnya bukan sekadar pada penyediaan sekolah, tetapi juga pada memperkuat layanan belajar, baik melalui fasilitas maupun pendekatan alternatif. Di sinilah perhatian DPR patut diapresiasi, karena mereka memberi ruang khusus agar anak-anak di daerah 3T tetap bisa merasakan layanan pendidikan yang berkualitas, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Salah satu inovasi penting dari SPMB adalah fleksibilitas lokasi sekolah. Siswa diprioritaskan untuk bersekolah di institusi yang terdekat dengan domisili, bahkan bila harus melintasi batas provinsi. Hal ini menjawab persoalan lama yang sering muncul di wilayah perbatasan. Banyak keluarga yang secara administratif berada di satu provinsi, tetapi secara aktivitas sehari-hari lebih dekat dengan provinsi tetangga. Misalnya, warga Blora di Jawa Tengah yang bersekolah atau beraktivitas lebih dekat ke Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan sistem lama, batas administratif menjadi penghalang. Kini, sistem baru memberi ruang agar anak-anak bisa bersekolah di lokasi yang paling logis dan mudah dijangkau.

Contoh menarik lainnya datang dari Yogyakarta. Ada sebuah SD yang memiliki dua kampus: satu di Kota Jogja, satu lagi di Kabupaten Bantul, hanya dipisahkan oleh jalan kampung. Padahal, secara administratif itu sudah berbeda wilayah. Jika aturan lama diterapkan secara kaku, maka murid di sekolah yang sama bisa terbelah hanya karena perbedaan kabupaten. Sistem baru ini menghapus potensi ketidakadilan semacam itu, dengan menekankan fleksibilitas di atas

sekadar garis batas administratif.

Untuk tingkat SMA, sistem rayonisasi tetap digunakan dengan basis provinsi. Namun, bobot domisili relatif kecil, sementara jalur prestasi diberi porsi lebih besar. Ini menjadi jawaban atas tantangan di kota-kota besar, seperti di Semarang, di mana sekolah-sekolah favorit berdiri berdekatan dan persaingan masuk begitu ketat. Melalui jalur prestasi, siswa yang sebelumnya terhalang karena faktor zonasi atau jarak kini memiliki peluang lebih besar untuk diterima.

Lebih jauh, jalur penerimaan siswa kini diperkaya. Selain rapor, prestasi akademik, olahraga, dan seni, ditambahkan pula jalur kepemimpinan. Inovasi ini bukan sekadar variasi, melainkan sebuah afirmasi terhadap peran siswa yang aktif di organisasi dan kepemimpinan. Pendidikan tidak hanya soal nilai di atas kertas, tetapi juga soal karakter, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kemampuan memimpin. Dengan jalur ini, negara mengakui bahwa pengalaman berorganisasi adalah bagian penting dari pembentukan generasi yang tangguh.

KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Jika ditarik garis besar, SPMB 2025/2026 memperlihatkan pergeseran penting dari sistem yang kaku menjadi sistem yang lebih adaptif. Ia berusaha mengakomodasi keragaman kondisi sosial dan geografis Indonesia, memberikan afirmasi bagi anak-anak dengan bakat beragam, serta membuka akses yang lebih adil bagi semua kalangan. Tentu, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan: kesiapan daerah, pengawasan distribusi APBD, hingga koordinasi antarprovinsi. Namun, arah kebijakannya jelas: pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan berkeadilan.

Kini, bola ada di tangan para pemangku kepentingan daerah dan sekolah. Mereka ditantang untuk menjalankan aturan ini dengan hati-hati, transparan, dan konsisten. Jika berhasil, SPMB 2025/2026 bisa menjadi tonggak penting dalam memperbaiki ketimpangan akses pendidikan di Indonesia—sebuah langkah menuju cita-cita besar,

bahwa setiap anak Indonesia, di manapun ia berada, berhak atas layanan pendidikan yang bermutu.

Sosialisasi aturan pendidikan kerap kali berjalan lebih cepat dari formalitas hukumnya. Sebelum Peraturan Menteri resmi terbit, informasi sudah beredar luas melalui dinas pendidikan dan UPT di berbagai provinsi. Bahkan sebagian daerah sudah lebih dulu melakukan sosialisasi dan pertemuan, meskipun secara de jure aturan baru diresmikan pada 28 Februari lalu. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peraturan sudah diperlakukan sebagai kebijakan berjalan, hanya menunggu stempel legalitas. Dengan kata lain, publik sudah mengetahui isi regulasi tersebut, tinggal menunggu peresmian formal.

Perubahan aturan pembelajaran di bulan Ramadan juga menjadi sorotan. Pertanyaan masyarakat yang sempat mencuat akhirnya terjawab. Pemerintah mengatur agar kegiatan belajar menyesuaikan dengan dinamika Ramadan, hasil koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Menpan, hingga arahan politikus seperti AHY soal penetapan cuti bersama. Intinya, siswa akan menjalani pembelajaran mandiri pada 27–28 Februari serta 3–5 Maret, lalu kembali belajar di sekolah mulai 6–20 Maret. Setelah itu, libur Idul Fitri akan berlangsung pada 21–28 Maret dan 2–8 April, dengan aktivitas belajar kembali dimulai pada 9 April 2025.

Pola ini mencerminkan fleksibilitas kebijakan pendidikan dalam menyesuaikan tradisi dan kebutuhan masyarakat. Libur Ramadan dan Idul Fitri bukan sekadar agenda religius, tetapi juga momentum sosial yang perlu diakomodasi dalam sistem pendidikan. Keputusan bersama tiga kementerian – Pendidikan, Dalam Negeri, dan Agama – memperlihatkan bahwa kebijakan ini bukan hasil sepihak, melainkan konsensus antar lembaga negara. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bingung atau bertanya-tanya soal kepastian jadwal belajar di bulan Ramadan.

25

Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Guru:

Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah

Kamis, 13 Maret 2025

Peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening pribadi guru adalah langkah bersejarah dalam membenahan birokrasi pendidikan di Indonesia. Selama lebih dari 15 tahun, sistem lama membuat tunjangan harus melewati rekening kas umum daerah sebelum akhirnya diteruskan ke guru. Proses berbelit ini kerap memakan waktu hingga tiga bulan, bahkan di sejumlah daerah bisa lebih lama karena alasan administratif. Tidak heran jika banyak guru merasa tunjangan mereka sering tertahan. Dengan mekanisme baru, hambatan tersebut dihapuskan, sehingga tunjangan dapat diterima tepat waktu dan lebih transparan.

Terobosan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru. Kehadiran Presiden dalam acara peluncuran semakin mempertegas pesan tersebut. Setelah lebih dari dua dekade, akhirnya seorang presiden kembali hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahkan, hanya dalam rentang empat bulan, Presiden sudah dua kali membersamai para guru dalam momentum penting—pada Hari Guru Nasional November 2024 dan kini dalam peluncuran mekanisme baru ini. Itu adalah sinyal kuat bahwa peningkatan kualitas pendidikan dimulai dengan keberpihakan nyata terhadap para pendidik.

Jumlah penerima manfaat pun tidak kecil. Ada 1.476.964 juta guru ASN dan 392.802 ribu guru non-ASN yang akan menerima tunjangan langsung ke rekening pribadi mereka. Proses verifikasi data memang masih berjalan, tetapi pemerintah berkomitmen agar penyaluran bulan Maret ini bisa menjadi hadiah bagi para guru, bertepatan dengan Idul Fitri. Langkah ini tidak hanya menambah kegembiraan menjelang lebaran, tetapi juga menjadi simbol bahwa negara benar-benar hadir untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.

Keberhasilan program ini juga tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi lintas kementerian dan dukungan para kepala daerah. Terlihat jelas bahwa reformasi birokrasi seperti ini memerlukan kerja kolektif. Bahkan, beberapa daerah seperti Kabupaten Purbalingga, Temanggung, dan Kudus berhasil menjadi yang tercepat dalam menyelesaikan proses verifikasi data. Hal ini memberi pelajaran penting: komitmen pemerintah pusat harus dibarengi dengan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Lebih jauh, program ini juga mengandung pesan politik dan moral yang kuat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka tidak menutup telinga terhadap kritik. Selama bertahun-tahun, para guru menyampaikan keluhan terkait sistem penyaluran tunjangan yang berbelit dan penuh keterlambatan. Kini, aspirasi itu dijawab dengan langkah konkret. Dengan sistem transfer langsung, ruang terjadinya penundaan atau alasan birokrasi menjadi semakin sempit. Guru tidak lagi perlu resah menunggu tunjangan mereka cair, dan bisa lebih fokus pada tugas utama: mendidik generasi bangsa.

Tentu saja, kebijakan ini masih menyisakan tantangan. Validasi data harus terus diperkuat agar tidak terjadi kesalahan penyaluran. Infrastruktur perbankan di daerah juga harus mampu mengakomodasi transfer dalam jumlah besar dan serentak. Namun, dengan niat baik dan konsistensi dalam implementasi, mekanisme ini dapat menjadi model keberhasilan reformasi birokrasi yang dapat ditiru di sektor lain.

Yang paling penting, kita semua harus menyadari bahwa kesejahteraan guru bukan hanya urusan finansial, melainkan bagian dari fondasi membangun bangsa. Guru yang sejahtera akan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bersemangat dalam mengajar. Pada akhirnya, kualitas pendidikan Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan para pendidiknya.

Karena itu, terobosan ini layak disambut dengan optimisme sekaligus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai program ini berhenti sebagai seremoni sesaat. Jika benar-benar dijalankan dengan konsisten, sistem baru ini bisa menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju pendidikan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan bermutu.

Jabatan adalah Amanah:

Pelantikan Pejabat Manajerial dan Fungsional di
Lingkungan Kemendikdasmen

Senin, 24 Maret 2025

Pelantikan pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali amanah konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam setiap jabatan baru yang diemban, tersimpan harapan agar visi besar *pendidikan untuk semua* tidak berhenti menjadi slogan, melainkan hadir nyata dalam layanan yang adil dan berkualitas bagi setiap anak Indonesia.

Makna pelantikan ini mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan hadiah atau *privilege*. Setiap warga negara, tanpa memandang agama, kondisi fisik, atau lokasi geografis, berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara. Di titik inilah, pejabat baru dituntut tidak sekadar mengisi kursi birokrasi, tetapi menghadirkan keberpihakan yang nyata. Jabatan adalah amanah, dan amanah menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar urusan administrasi.

KEBIJAKAN BARU

Sejumlah kebijakan baru yang disiapkan kementerian memperlihatkan arah pembaruan pendidikan yang ambisius. Salah satu yang segera dilaksanakan adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang dirancang sebagai penyempurnaan dari mekanisme sebelumnya. Harapannya, sistem ini tidak hanya menjadi prosedur teknis masuk sekolah, melainkan wujud keberpihakan pada keadilan

sosial: menghapus diskriminasi, memperluas akses, dan memberi ruang yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Lebih jauh, tahun ini menjadi tonggak bersejarah dengan diperkenalkannya Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ujian ini disiapkan untuk menggantikan ujian nasional, yang selama bertahun-tahun sering dianggap menekan dan kurang mencerminkan potensi sebenarnya dari peserta didik. TKA diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang lebih substantif, menekankan pada kemampuan berpikir, pemahaman mendalam, dan kesiapan menghadapi tantangan abad 21, bukan sekadar kemampuan menghafal.

Di sisi lain, kementerian juga mulai memandang masa depan pendidikan dalam konteks era digital. Rencana penerapan kurikulum yang menyertakan coding, kecerdasan artifisial (AI), serta pembelajaran mendalam (*deep learning*) merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi dan siap bersaing secara global. Dokumen akademik dan uji publik telah dilakukan, menandakan bahwa proses ini bukan sekadar ide besar, tetapi sudah memasuki tahap implementasi kebijakan.

Namun, keberhasilan semua agenda ini sangat bergantung pada peran guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan, dan karena itu perhatian pada kesejahteraan mereka menjadi hal yang tak bisa ditawar. Program sertifikasi profesi, penyempurnaan sistem pelaporan kinerja, hingga kebijakan distribusi tugas guru—termasuk kemungkinan penempatan guru ASN di sekolah swasta—menunjukkan adanya upaya menata ekosistem pendidikan yang lebih adil. Dengan dukungan yang tepat, guru bukan hanya pengajar di kelas, tetapi juga agen perubahan yang mampu menghidupkan semangat belajar di setiap sudut negeri.

Dari seluruh rangkaian pelantikan ini, satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa jabatan dalam pendidikan tidak boleh dipandang sebagai puncak karier pribadi, melainkan sebagai pintu pengabdian. Para pejabat baru diharapkan membawa semangat

baru, keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik, serta konsistensi dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pelantikan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yang menjadi simbol bahwa pendidikan adalah kerja kolektif, yang hanya akan berhasil jika dijalankan dengan hati, akal sehat, dan keberanian moral. Tantangan memang tidak kecil: dari kesenjangan akses, tuntutan era digital, hingga dinamika sosial yang kompleks. Tetapi dengan komitmen yang kuat, pendidikan dapat menjadi jalan yang benar untuk memastikan masa depan Indonesia lebih adil, berdaya, dan bermartabat.

Langkah terbaru pemerintah dalam meluncurkan program pembayaran langsung tunjangan sertifikasi guru ke rekening pribadi adalah terobosan penting. Kebijakan ini bukan hanya menyederhanakan jalur birokrasi, tetapi juga mengurangi potensi hambatan administratif yang sering kali menimbulkan keterlambatan atau ketidakpastian. Lebih dari itu, ini adalah simbol kepercayaan negara kepada para guru sebagai tenaga profesional yang layak mendapat kepastian haknya tanpa perantara.

Di samping itu, kebijakan pengurangan beban jam mengajar dari 24 jam menjadi 16 jam per minggu dengan tambahan 8 jam untuk tugas profesi adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap kompleksitas peran guru. Mengajar di kelas hanyalah salah satu bagian dari profesi mereka. Membimbing siswa, menyiapkan materi, melakukan penelitian tindakan kelas, hingga berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum adalah tugas-tugas penting lain yang sering kali luput dari pengakuan formal. Dengan kebijakan ini, negara akhirnya mulai menyesuaikan aturan dengan realitas profesi guru.

Komitmen menyelenggarakan pendidikan profesi guru untuk lebih dari 800 ribu tenaga pendidik juga memperlihatkan arah serius dalam memperkuat kualitas pendidikan dasar dan menengah. Sebagian anggaran telah disiapkan, sebagian lainnya masih menunggu, tetapi fakta bahwa pemerintah dan DPR memberi lampu hijau adalah

sinyal positif. Hal ini membuktikan bahwa guru ditempatkan di garda depan pembangunan bangsa, terutama dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Tidak mungkin visi tersebut tercapai tanpa guru yang berkualitas, sejahtera, dan mendapat dukungan penuh dari negara.

DUKUNGAN INSAN KEMENDIKDASMEN

Namun, kebijakan dan program besar hanya akan bermakna jika setiap unsur di dalam Kementerian ikut bergerak. Widyaprada memiliki tanggung jawab vital untuk memastikan mutu pendidikan sesuai standar yang berlaku. Widyaiswara dituntut lebih inovatif dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran, agar tenaga pendidik dan ASN mampu menghadapi perubahan dengan gesit dan cerdas. Analisis kebijakan pun harus menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*), bukan sekadar mengikuti pola lama yang penuh asumsi. Auditor tidak kalah penting: mereka harus memastikan manajemen risiko dan tata kelola kementerian berjalan bersih, efektif, dan akuntabel.

Pengembang teknologi pembelajaran menghadapi tantangan yang sangat strategis. Mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan pedagogi yang tepat, sehingga siswa terbiasa belajar secara kolaboratif di era digital. Analisis SDM juga memegang peranan kunci: transformasi manajemen talenta ASN dan digitalisasi aparatur bukan hanya jargon modernisasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk membuat birokrasi lebih lincah, efisien, dan adaptif. Begitu pula para arsiparis—mereka bukan sekadar penjaga dokumen, tetapi aktor penting dalam memastikan manajemen pengetahuan digital bekerja dengan baik, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan cepat, tepat, dan berbasis data.

Rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Peningkatan profesionalisme guru, penguatan kelembagaan, inovasi teknologi, hingga tata kelola yang transparan adalah potongan-potongan *puzzle* yang jika disatukan akan menjadi gambar besar

tentang wajah pendidikan Indonesia masa depan. Semua ini bukan semata urusan teknis, melainkan strategi jangka panjang membangun generasi yang siap menghadapi tantangan global.

Jika konsistensi bisa dijaga, dukungan publik diperoleh, dan komitmen profesional dari para guru serta aparatur kementerian terus terpelihara, maka arah baru kebijakan pendidikan ini bisa menjadi momentum sejarah. Inilah saatnya menjadikan pendidikan benar-benar sebagai layanan publik yang dirasakan manfaatnya, bukan hanya slogan dalam pidato atau dokumen kebijakan.

BUDAYA RAMAH, PRIBADI SANTUN

Budaya kerja yang ramah kini menjadi salah satu pilar yang ingin terus ditanamkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Budaya ini bukan sekadar seruan, melainkan sebuah komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan penuh makna. Di dalamnya terkandung semangat untuk selalu responsif terhadap perubahan yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun global. Responsif di sini berarti tidak kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan yang berkembang. Selain itu, akuntabilitas menjadi nilai utama—setiap keputusan yang diambil harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sikap melayani dengan sepenuh hati pun menjadi bagian tak terpisahkan, karena esensi pelayanan publik adalah pengabdian, bukan sekadar pekerjaan administratif. Ditambah lagi, adaptivitas dan sikap harmonis menjadi penguat: adaptif dalam menghadapi tantangan zaman, dan harmonis dalam menjalin kerja sama lintas unit maupun lintas instansi.

Di atas fondasi budaya kerja itu, nilai-nilai SANTUN digariskan sebagai panduan moral. Setia berarti loyalitas dan dedikasi yang tinggi, bukan hanya pada tugas dan tanggung jawab, tetapi juga pada dasar-dasar kehidupan berbangsa: Pancasila, UUD 1945, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesetiaan ini sekaligus tercermin dalam dukungan penuh kepada pimpinan,

Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri yang menjadi penanggung jawab lembaga. Amanah bermakna menjalankan setiap tugas dengan kejujuran, menjaga kepercayaan yang diberikan, dan memastikan semua keputusan selaras dengan kepentingan bangsa dan masyarakat. Nilai ini menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan titipan yang harus dijaga dengan integritas.

Lebih jauh, sikap negarawan ditekankan sebagai landasan dalam bertindak. Negarawan berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga martabat lembaga agar tidak tercoreng oleh tindakan yang sempit dan egois. Dalam praktiknya, sikap ini menuntut setiap insan pendidikan untuk menjadi teladan. Keteladanan bukanlah hal abstrak; ia tampak dalam perilaku sehari-hari, dalam kejujuran, kedisiplinan, serta kemampuan untuk memberi inspirasi, baik kepada rekan kerja maupun kepada masyarakat luas.

Tidak berhenti sampai di situ, ada pula dorongan kuat untuk terus meningkatkan kualitas diri. Dunia pendidikan adalah ruang yang dinamis, sehingga insan pendidikan harus berorientasi pada hasil terbaik, siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta berani menciptakan inovasi. Inovasi ini bukan hanya untuk kepentingan internal lembaga, tetapi untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa dalam memajukan pendidikan nasional. Kualitas kerja yang tinggi dan sikap terbuka terhadap perubahan menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua.

Nilai terakhir yang ditekankan adalah ngemong. Kata ini mengandung makna kepedulian, membimbing, dan saling membantu. Ngemong adalah sikap tulus untuk menjaga dan mendukung rekan kerja, serta membangun suasana kerja yang harmonis. Ia menjadi perekat sosial di lingkungan kerja, menghindarkan setiap individu dari sikap saling menjatuhkan, dan justru mendorong terciptanya kebersamaan yang sehat. Dengan ngemong, sebuah institusi bisa tumbuh kuat karena setiap individu merasa didukung dan diperhatikan.

Pada akhirnya, semua nilai ini mengingatkan bahwa jabatan dan tanggung jawab yang diemban adalah amanah. Amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, bukan sekadar untuk hari ini, melainkan sebagai warisan (*legacy*) yang akan ditinggalkan bagi generasi mendatang. Amanah itu menuntut ketulusan hati, kerja keras, serta kesediaan untuk terus berbuat demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan doa dan keyakinan, semua upaya ini diharapkan mendapatkan ridha Tuhan, sehingga setiap langkah pengabdian tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang penuh arti.

27

Membangun Peradaban Melalui Pembiasaan:

Pagi Ceria Peluncuran Buku Panduan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Jumat, 11 April 2025

Pendidikan Indonesia sedang bergerak ke arah yang semakin menekankan pentingnya karakter, bukan hanya sekadar kecerdasan akademik. Dari sekian banyak upaya, lahir sebuah gerakan yang disebut *Anak Indonesia Hebat*, yang berfokus pada tujuh kebiasaan. Gerakan ini sesungguhnya bukan tambahan beban baru bagi sekolah atau keluarga, melainkan panduan sederhana namun mendasar untuk menumbuhkan generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga berakhlak dan berkepribadian.

Dasar dari gerakan ini jelas: pendidikan nasional kita sejak awal diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, bertanggung jawab, demokratis, serta cinta tanah air. Semua jenis kecerdasan yang ada—baik intelektual, emosional, spiritual, motorik, maupun spasial—tidak akan berarti bila tidak ditopang nilai dasar yang kuat. Nilai agama, budaya, dan peradaban bangsa menjadi fondasi agar kecerdasan itu tidak hanya tajam, tetapi juga bermakna. Dari sinilah tujuh kebiasaan itu dihadirkan, sebagai upaya kolektif untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih jauh, gerakan ini juga mengingatkan bahwa kecerdasan sejati lahir dari keseimbangan. Anak-anak perlu dilatih bukan hanya

untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan disiplin, empati, kerja sama, kepedulian, serta kemampuan mengelola diri. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditanam sejak dini inilah yang kelak membentuk karakter besar. Seorang anak yang terbiasa jujur akan tumbuh menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Anak yang terbiasa bertanggung jawab akan menjadi warga negara yang siap menghadapi tantangan zaman. Anak yang terbiasa menghargai sesama akan menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Gerakan Anak Indonesia Hebat juga menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendirian. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus saling bergandengan tangan. Guru bisa menanamkan nilai dalam pembelajaran, orang tua mencontohkan dalam keseharian, dan masyarakat memperkuatnya lewat lingkungan yang sehat. Hanya dengan kebersamaan, tujuh kebiasaan itu benar-benar bisa hidup, bukan sekadar tertulis di buku panduan.

Pada akhirnya, tujuh kebiasaan ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin hasilnya tidak langsung tampak esok hari, tetapi bila dijalankan dengan konsisten, kita sedang menyiapkan generasi yang lebih kuat dari kita hari ini. Generasi yang tidak hanya cerdas bersaing di dunia global, tetapi juga kokoh berdiri sebagai manusia Indonesia—berakar pada iman dan budaya, berakhlak mulia, berkarakter tangguh, dan siap membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.

INDONESIA EMAS 2045

Membicarakan tentang Indonesia Emas 2045 bukanlah soal serangkaian angka atau slogan belaka. Ia adalah gambaran nyata tentang wajah generasi muda hari ini—anak-anak yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dasar, menengah, hingga menengah atas. Dua puluh tahun dari sekarang, merekalah yang akan berdiri di garis depan, memimpin arah bangsa, mengambil keputusan penting, serta mengarahkan ke mana Indonesia bergerak. Mereka yang hari ini berusia lima atau tujuh tahun, kelak akan tumbuh menjadi sarjana-sarjana yang diharapkan mampu membawa bangsa ini ke puncak

kejayaannya.

Menyadari hal itu, persiapan menuju Indonesia Emas tidak bisa dimulai nanti, melainkan harus ditanam sejak dini. Bahkan sejak dalam kandungan, anak-anak Indonesia seharusnya sudah dipersiapkan untuk menjadi generasi tangguh. Proses ini berlanjut di taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan, dalam hal ini, bukan sekadar rutinitas akademik, tetapi sebuah pondasi yang menentukan kokoh atau rapuhnya bangunan bangsa di masa depan. Ibarat membangun rumah, sekuat dan semegah apa pun atapnya, semua akan sia-sia jika pondasinya lemah. Begitu pula dengan Indonesia: tanpa dasar pendidikan yang kuat, cita-cita sebesar apa pun bisa runtuh seketika.

Karena itu, penanaman karakter dan pembentukan kepribadian sejak dini menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan dasar bukan hanya tempat menyalurkan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membangun moralitas, kepribadian, dan rasa kebangsaan. Di sinilah kita memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai yang kokoh, siap menghadapi tantangan global sekaligus menjaga jati diri bangsa.

Indonesia Emas 2045 bukan mimpi kosong, melainkan proyek bersama yang dimulai dari hari ini. Ia menuntut keseriusan untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan mampu berdiri tegak di panggung dunia. Jika pondasi itu kuat, maka masa depan bangsa ini tidak sekadar cerah, melainkan benar-benar gemilang.

MEMBANGUN KEBIASAAN

Kebiasaan pada dasarnya adalah proses berulang yang dijalankan secara konsisten. Ia tidak selalu berbentuk aktivitas besar dan berat, melainkan bisa berupa tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Justru dari tindakan sederhana yang terus-menerus inilah, perubahan perilaku yang lebih permanen dapat tercapai. Dalam teori behaviorisme, ada tiga pendekatan utama untuk membentuk kebiasaan baru.

Pendekatan pertama adalah *fatigue theory*. Di sini, perubahan dipaksakan tanpa kompromi. Analogi yang digunakan seperti seorang joki yang menunggang kuda liar. Walaupun kuda itu berontak, joki tetap bertahan di punggungnya hingga pada akhirnya kuda menjadi jinak dan patuh. Metode ini keras, namun terbukti efektif dalam memaksa terjadinya adaptasi.

Kedua adalah *threshold theory*. Perubahan dilakukan secara bertahap, mulai dari hal-hal kecil yang bisa diterima, kemudian ditingkatkan sedikit demi sedikit. Ibarat seekor kuda liar yang belum pernah membawa beban, awalnya ia hanya diberi beban ringan, misalnya lima kilo. Setelah terbiasa, bebannya dinaikkan menjadi enam kilo, lalu tujuh kilo, hingga akhirnya kuda itu mampu membawa beban sebesar manusia. Dengan cara ini, kebiasaan baru terbentuk melalui proses bertahap yang lebih ramah bagi individu.

Pendekatan ketiga adalah *incompatible stimuli*, yaitu situasi di mana perubahan dipaksakan karena tidak ada pilihan lain. Seperti seseorang yang terdesak pada keadaan, ia dipaksa menyesuaikan diri karena jalan keluar lain tidak tersedia. Dengan kata lain, “there is no other option.”

Dari ketiga pendekatan tersebut, pilihan yang dianggap paling bijak adalah *threshold*. Perubahan besar tidak selalu harus lahir dari tekanan atau keterpaksaan. Justru dengan langkah-langkah kecil yang konsisten dan berulang, perubahan dapat dibangun lebih kokoh dan berkelanjutan. Kebiasaan, walau tampak sederhana, memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah cara hidup dan membentuk jati diri seseorang. Kuncinya ada pada rutinitas yang dijalankan dengan sabar, bukan pada paksaan yang melelahkan.

Tembok Besar Cina selalu dikagumi sebagai salah satu keajaiban dunia. Namun, di balik kemegahannya, ada pelajaran sederhana: bangunan raksasa itu dimulai dari sebuah batu kecil yang diletakkan dengan visi dan arah yang jelas. Dari situlah kita bisa memahami makna kebiasaan. Hal-hal besar sering lahir dari langkah yang tampak sepele, dari kebiasaan kecil yang terus diulang.

Begitu pula dengan seni lukis. Lukisan yang menawan sesungguhnya hanya kumpulan titik-titik dan garis-garis yang disambungkan. Hilangnya satu titik saja bisa membuat garis terputus, dan itu menunjukkan betapa sesuatu yang tampak kecil bisa menentukan hasil akhir. Titik kecil menjadi penentu lahirnya karya besar, sebagaimana kebiasaan kecil bisa menjadi fondasi perubahan hidup.

Inilah alasan mengapa pembiasaan—atau conditioning dalam bahasa psikologi—menjadi kunci. Perubahan tidak hadir tiba-tiba; ia lahir dari lingkungan dan situasi yang mendukung. Sama seperti iklan yang menampilkan *before and after*, kebiasaan adalah jembatan dari siapa kita dulu ke siapa kita sekarang, bahkan siapa kita yang akan datang.

TUJUH KEBIASAAN

Buku *The Power of Habit* dan *Atomic Habits* mengingatkan bahwa kebiasaan kecil, seukuran atom sekalipun, mampu memicu perubahan luar biasa. Seperti reaksi kimia yang bermula dari atom, begitu pula hidup kita dapat bertransformasi dari satu kebiasaan kecil yang konsisten. Maka, jika ingin melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, terampil, serta sehat jasmani dan rohani, langkah awalnya ada pada kebiasaan. Tugas kita hanyalah menciptakan kondisi agar kebiasaan itu tumbuh, hingga kelak menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebiasaan—yaitu perubahan hidup yang nyata.

Angka tujuh kerap muncul sebagai batas penentu dalam banyak hal. Dalam psikologi, ada teori yang dikenal dengan *the magical number seven*. Teori ini menjelaskan bahwa manusia pada umumnya dapat mengingat sesuatu dengan baik dalam rentang lima hingga sembilan. Maka, tujuh menjadi titik keseimbangan—ia menjadi ukuran sederhana untuk membedakan mana yang dianggap baik atau cukup, dan mana yang belum. Dalam dunia pendidikan, angka tujuh juga kerap dijadikan tolok ukur: nilai tujuh dianggap pas, enam berarti di bawah rata-rata, sementara delapan menunjukkan keunggulan. Pilihan pada angka tujuh bukan soal mistik, melainkan

soal psikologi sekaligus kebiasaan yang paling mungkin dan realistis untuk dijalankan.

Tujuh kebiasaan yang dimaksud dimulai dari sesuatu yang sangat mendasar: bangun pagi. Ada yang mungkin bertanya, mengapa tidak dimulai dari tidur? Alasannya sederhana: hidup dimulai ketika kita bangun, bukan ketika kita tidur. Saat matahari terbit dari timur, ia memberi sinyal bahwa sebuah hari baru dimulai. Itulah mengapa dalam pelajaran bahasa Inggris, contoh kalimat present tense yang paling sering digunakan adalah *the sun rises in the east*—karena ia rutin dan konsisten. Namun, meski setiap hari matahari terbit, tiap terbitnya tak pernah sama. Selalu ada keindahan, selalu ada harapan, selalu ada optimisme baru yang datang bersama fajar.

Mereka yang bisa menikmati momen terbitnya matahari, entah dari jendela rumah atau bahkan mendaki gunung untuk melihatnya, sesungguhnya sedang mengisi diri dengan energi baru. Bangun pagi bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga mental. Ia menandai semangat baru, sekalipun hari kemarin dipenuhi pengalaman pahit. Masa lalu tetaplah masa lalu; yang kita jalani adalah hari ini dan masa depan. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti bangun pagi bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun kehidupan yang lebih penuh semangat dan optimisme.

Setiap pagi sebaiknya dimulai dengan kesadaran penuh bahwa kita diberi kesempatan hidup kembali. Doa dan rasa syukur menjadi fondasi spiritual yang meneguhkan hati, memberi arah, dan menghadirkan ketenangan. Bagi yang Muslim, sholat fajar menghadirkan makna khusus: bacaan yang disaksikan malaikat, tanda betapa agungnya momen di awal hari. Inilah saat untuk memulai dengan semangat baru, mengisi jiwa dengan energi positif.

Tubuh pun perlu diajak bergerak, walau hanya ringan. Gerakan sederhana mengingatkan bahwa tanda makhluk hidup adalah aktivitas. Bergerak bukan sekadar menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga menajamkan pikiran dan membentuk karakter. Dari sana, hidup terasa lebih dinamis, lebih siap menghadapi tantangan.

Selain gerak, apa yang kita makan juga menjadi cermin siapa diri kita. Ada pepatah: “*you are what you eat*”—kita adalah apa yang kita makan. Pilihan pada makanan sehat dan bergizi bukan sekadar urusan perut, melainkan investasi bagi tubuh, mental, dan otak. Kesehatan adalah hidup itu sendiri; ia yang menjaga kita tetap “alive”. Maka, setiap suap makanan sehat adalah langkah kecil untuk memastikan kita bisa terus melangkah jauh.

Namun hidup bukan hanya soal tubuh, melainkan juga pikiran. Menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah kunci agar kita terus bertumbuh. Tak ada ilmu yang sia-sia, bahkan yang sederhana pun membawa manfaat. Awalnya mungkin sulit, tetapi kesungguhan akan membuka jalan. Seperti pepatah Melayu: “dengan ilmu semua menjadi mudah, dengan seni semua menjadi indah.” Belajar adalah cara untuk memperkaya diri, menjadikan kita tahu lebih banyak, dan bukan sebaliknya.

Kebudayaan selalu punya cara unik untuk mengingatkan kita tentang pentingnya kebersamaan. Sambutan dengan tarian Betawi, misalnya, menjadi penegasan bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan juga media untuk merayakan identitas dan memperkuat ikatan sosial. Dari tarian itu kita diingatkan bahwa menjadi Indonesia artinya belajar hidup bersama, bersosialisasi, dan bermasyarakat. Tidak cukup hanya punya teman sekelas; kita juga perlu merangkul teman sekampung, teman sepermainan, teman di kegiatan sosial. Semakin luas lingkaran pertemanan, semakin kaya pengalaman hidup, dan semakin kuat jaringan sosial yang kita miliki. Inilah modal penting untuk tumbuh menjadi pribadi Indonesia yang hebat.

Kehidupan sosial yang sehat harus berjalan beriringan dengan kebiasaan pribadi yang baik. Salah satu kebiasaan yang sering disepelekan adalah tidur lebih awal. Terlalu banyak orang, terutama anak muda, terbiasa begadang tanpa arah, seolah malam adalah waktu untuk beraktivitas tanpa henti. Padahal, hidup seperti “manusia nokturnal” justru merugikan. Tidur lebih cepat memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat, merefleksikan pengalaman

hari itu, dan menata energi untuk hari esok. Bahkan, banyak penulis dan tokoh besar yang memulai produktivitas mereka dari kebiasaan sederhana: menuliskan pengalaman dan rencana sebelum tidur. Jurnal harian bukan hanya catatan, tapi juga ruang untuk berpikir jernih dan merancang langkah.

Selain kebiasaan tidur, ada pula kebiasaan sederhana lain yang mendukung lahirnya generasi tangguh: disiplin, fokus, dan kemampuan mengelola diri. Namun, kebiasaan itu tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh lingkungan yang tepat. Di sinilah pentingnya menciptakan empat pusat pendidikan yang saling bersinergi: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media massa. Sekolah memberi ilmu dan disiplin, keluarga menanamkan nilai, masyarakat menyediakan ruang praktik sosial, sementara media massa membentuk cara pandang dan referensi budaya. Tanpa dukungan dari keempatnya, anak-anak akan mudah kehilangan arah.

Langkah kecil ini bukan sekadar rutinitas harian, melainkan fondasi untuk membangun Indonesia Emas 2045. Bayangkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara emosional, kuat secara sosial, dan sehat secara mental. Generasi yang bisa mewujudkan mimpi para pendiri bangsa: Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Masa depan bukan dibentuk oleh satu kebijakan besar saja, melainkan oleh kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan. Tidur lebih awal, rajin bersosialisasi, menulis refleksi, dan hidup dalam ekosistem yang sehat—semua itu adalah jalan sederhana tapi pasti menuju bangsa yang bermartabat tinggi di hadapan dunia.

Kedaulatan Bahasa Indonesia:

Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan
Bahasa Indonesia

Jum'at, 25 April 2025

Peluncuran pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia menandai satu momen penting dalam perjalanan bangsa menjaga jati dirinya. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi sehari-hari, melainkan simbol kedaulatan yang menyatukan keragaman budaya dan etnis di negeri ini. Tanpa penguatan dan pengawasan yang konsisten, bahasa ini bisa perlahan terpinggirkan oleh derasnya arus globalisasi yang membawa bahasa asing mendominasi ruang-ruang publik.

Acara ini memperlihatkan bagaimana isu bahasa tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran berbagai tokoh, mulai dari Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR, perwakilan DPD, hingga kepala daerah, menegaskan bahwa penguatan bahasa Indonesia adalah kerja kolektif. Sinergi lintas lembaga menjadi krusial, sebab bahasa bukan hanya urusan pendidikan, tetapi juga menyangkut kebijakan publik, tata pemerintahan, hingga interaksi sosial di akar rumput.

Apresiasi besar patut diberikan kepada Badan Bahasa beserta seluruh unit pelaksana teknisnya di daerah. Di tangan merekalah berbagai kebijakan bahasa digerakkan, mulai dari memperkuat posisi bahasa Indonesia di dokumen resmi, media publik, hingga dunia digital. Upaya ini bukan hanya melanjutkan fondasi yang sudah diletakkan generasi sebelumnya, tetapi juga menyesuaikan dengan tantangan zaman. Tantangan itu jelas: bagaimana membuat bahasa Indonesia tetap relevan, digunakan dengan baik dan benar, sekaligus

tidak terjebak pada sifat kaku yang membuatnya ditinggalkan generasi muda.

Yang menarik, pedoman pengawasan ini tidak hanya berbicara tentang penggunaan bahasa Indonesia, tetapi juga memposisikannya dalam ekosistem bahasa yang lebih luas. Ada kesadaran bahwa bahasa daerah tetap harus dilestarikan sebagai sumber kebijaksanaan lokal dan identitas kultural, sementara penguasaan bahasa asing tetap diperlukan agar bangsa ini tidak terasing dalam pergaulan global. Pendekatan tiga pilar ini—mengutamakan bahasa Indonesia, merawat bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing—merupakan formula ideal untuk memastikan bangsa Indonesia tetap berakar sekaligus terbuka.

Namun, semua pedoman dan kebijakan akan kehilangan makna bila hanya berhenti pada dokumen resmi. Yang lebih penting adalah implementasi nyata: bagaimana sekolah-sekolah konsisten menanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia, bagaimana media massa mengutamakan bahasa yang baik tanpa kehilangan daya tarik, bagaimana ruang publik tidak dipenuhi istilah asing yang menyingkirkan kosakata kita sendiri. Bahasa harus hidup dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar slogan.

BAHASA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

Peluncuran pedoman ini dengan sendirinya memberi pesan kuat: menjaga bahasa adalah menjaga bangsa. Mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti menolak modernitas, melainkan memastikan bahwa kemajuan tidak menghapus akar identitas kita. Globalisasi memang membuka jalan, tetapi bahasa Indonesia adalah rumah yang harus tetap kokoh. Dalam rumah inilah bangsa ini bisa berdiri tegak, percaya diri, dan disegani dunia.

Bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja sebagai bahasa persatuan. Ia hadir melalui perjuangan panjang yang menyatu dengan sejarah kedaulatan bangsa. Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah tonggak pertama. Para pemuda waktu itu berani mengikrarkan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada momen itu pula untuk

pertama kalinya kata “Indonesia” dipakai secara resmi, dipelopori oleh generasi muda yang ingin melampaui sekat-sekat kedaerahan. Itulah kedaulatan budaya: bangsa ini berdiri di atas pondasi bahasa yang menyatukan.

Tonggak berikutnya adalah kedaulatan politik, saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dengan proklamasi itu, bahasa Indonesia juga memperoleh tempat sebagai bahasa negara, menjadi bahasa hukum, bahasa pendidikan, dan bahasa pemerintahan. Lalu, kedaulatan wilayah hadir ketika Insinyur Juanda memperjuangkan konsep negara kepulauan dalam forum-forum internasional, hingga akhirnya Indonesia diakui kedaulatannya sebagai sebuah kesatuan dari Sabang sampai Merauke.

Tiga rangkaian sejarah inilah yang menjelaskan mengapa kata *kedaulatan* digunakan dalam kebijakan bahasa, misalnya melalui Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025. Bahasa adalah bagian dari kedaulatan bangsa, sama pentingnya dengan wilayah dan politik. Banyak negara di dunia yang masih bermasalah dengan bahasa nasionalnya; ada yang kehilangan bahasa ibunya, ada pula yang masih berjuang agar bahasanya diakui. Indonesia beruntung karena sejak awal memiliki bahasa yang tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga simbol kebanggaan, kesetaraan, dan kemuliaan.

Bahasa menunjukkan siapa kita. Ungkapan Jawa mengatakan, *“Ajiningrogo ing busono, ajining diri ono ing lathi.”* Artinya, kehormatan tubuh tampak dari pakaian, tetapi kemuliaan diri ada pada tutur kata. Busana membuat orang dihargai, tetapi bahasa yang baik, santun, dan luhur membuat seseorang—dan juga suatu bangsa—dihormati. Inilah alasan mengapa bahasa bukan hanya persoalan komunikasi sehari-hari, melainkan cermin martabat bangsa.

BAHASA SEBAGAI ALAT POLITIK & DIPLOMASI

Lebih jauh, bahasa juga merupakan alat politik dan diplomasi. Dengan bahasa, bangsa ini hadir di forum-forum dunia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam rapat-rapat UNESCO

adalah bukti nyata. Itu bukan sekadar capaian administratif, melainkan pengakuan internasional bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa besar yang mewakili bangsa besar. Pengakuan ini juga mengingatkan kita bahwa menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga citra dan eksistensi bangsa di tengah arus globalisasi.

Oleh karena itu, merawat bahasa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ia adalah warisan perjuangan, fondasi identitas, dan sekaligus simbol kedaulatan. Menggunakannya dengan benar, mengajarkannya dengan baik, dan membanggakannya di hadapan dunia merupakan bentuk penghormatan kepada sejarah serta perjuangan para pendahulu. Bahasa Indonesia bukan hanya milik generasi masa lalu, melainkan juga tanggung jawab generasi sekarang untuk diwariskan dengan mulia ke masa depan.

Bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar di masa depan: bagaimana ia bisa berkembang bukan hanya sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Banyak karya ilmiah memang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia, namun tantangannya adalah bagaimana menjadikan bahasa ini benar-benar kuat sebagai sarana berpikir, berdiskusi, dan menulis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, bahasa Indonesia memperoleh pengakuan yang lebih luas, karena fungsinya melampaui sekadar alat komunikasi, melainkan juga sebagai pilar kemajuan bangsa.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sering kali kalah pamor dibanding bahasa asing. Kata-kata seperti *upload* dan *download* terdengar lebih praktis dan keren dibanding padanan resminya, “unggah” dan “unduh”. Hal serupa terjadi pada istilah “coffee shop” yang dianggap lebih bergengsi daripada “warung kopi”, padahal substansinya sama. Bahkan ayam goreng bisa menjadi mahal jika diberi label *fried chicken*, meskipun rasa ayam goreng lokal tidak kalah enak. Fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh bahasa terhadap persepsi sosial, nilai ekonomi, dan citra budaya. Ketika istilah asing lebih sering dipilih, perlahan muncul kesan bahwa bahasa Indonesia kurang berkelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik, kecenderungan ini semakin nyata. Di bandara, kata “boarding” dipakai dengan bangga, seakan lebih terhormat dibanding sekadar “naik pesawat”. Sebutan “penumpang” pun sempat diprotes, karena dianggap merendahkan martabat mereka yang sudah membayar tiket. Padahal, istilah itu sudah lama digunakan dan seharusnya tidak dipahami secara sempit. Persoalan kecil seperti ini sebenarnya memperlihatkan pentingnya penerjemahan yang tepat, agar bahasa Indonesia tidak hanya terdengar formal, tetapi juga memberi rasa kebanggaan bagi penuturnya.

Bahasa, pada dasarnya, memang bersifat dinamis. Ia tumbuh sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun dinamika ini tidak boleh membuat bahasa Indonesia tergeser dari ruang-ruang penting, terutama dunia ilmu pengetahuan. Justru di sinilah letak tugas bersama: membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri dan menjadikannya bahasa utama di ranah akademik, teknologi, maupun ruang publik. Dengan cara itu, bahasa Indonesia tidak hanya lestari, tetapi juga naik kelas.

Kebanggaan terhadap bahasa Indonesia seharusnya juga didasari oleh kesadaran sejarah. Bahasa ini bukan hadir begitu saja, melainkan buah perjuangan panjang. Mohammad Tabrani, tokoh asal Madura, adalah salah satu yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sekaligus ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Sayangnya, kiprah seperti ini jarang dikenal luas, karena kepahlawanan sering kali hanya dihubungkan dengan perjuangan bersenjata. Padahal, memperjuangkan bahasa sebagai dasar persatuan bangsa adalah bentuk perjuangan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan.

BAHASA SEBAGAI KEDAULATAN BANGSA

Bahasa Indonesia adalah warisan besar dari perjuangan para pendahulu. Ia bukan bahasa kelas dua, melainkan simbol persatuan, identitas, dan martabat bangsa. Jika kita terus membiasakan diri menggunakannya dengan penuh kebanggaan, baik dalam percakapan

sehari-hari, dunia kerja, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka bahasa ini akan benar-benar menunjukkan keunggulannya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu bukan hanya cita-cita, tetapi sebuah keharusan demi masa depan bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Bahasa Indonesia bukanlah sekadar alat komunikasi. Lebih dari itu, bahasa adalah simbol martabat, identitas, sekaligus peradaban bangsa. Komitmen untuk merawat dan memajukannya harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu. Dengan kebanggaan, keterampilan, serta pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan bahasa pemersatu, bangsa ini bisa semakin tegak dan dihormati.

Kebanggaan itu tentu perlu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui penghargaan bagi pejabat publik yang mampu menampilkan bahasa Indonesia dengan baik, jelas, dan indah. Sebab bahasa pejabat publik adalah cermin bagi masyarakat luas. Dalam bidang seni pun, penghargaan terhadap lirik lagu yang indah dan bermakna juga penting. Kita masih merindukan karya-karya dengan ungkapan yang memikat, seperti syair Ebit G.A.D. yang sederhana namun penuh daya paku. Ia bisa menggambarkan kebingungan hidup dengan kalimat yang tak lekang waktu, “Tanyakan pada rumput yang bergoyang.” Ungkapan ini bukan hanya metafora, melainkan bukti betapa bahasa bisa mengangkat keindahan sekaligus kedalaman jiwa manusia.

Namun, idealisme tentang bahasa tidak bisa hanya berhenti pada tataran wacana. Diperlukan dukungan nyata dalam bentuk kebijakan, termasuk anggaran yang tepat sasaran. Prinsip “money follow program” harus menjadi pedoman agar gerakan memartabatkan bahasa Indonesia benar-benar terwujud dalam aksi nyata. Tanpa keberpihakan anggaran, semua semangat hanya akan berhenti pada pidato dan seremonial.

Maka, memajukan bahasa Indonesia sesungguhnya adalah perjuangan kultural sekaligus politis. Bahasa ini harus menjadi bahasa

ilmu agar kita tidak terus bergantung pada istilah asing. Ia juga harus tetap berfungsi sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman bangsa. Lebih jauh lagi, bahasa Indonesia perlu ditampilkan sebagai bahasa peradaban, bahasa yang mampu membawa bangsa ini berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Pada akhirnya, bahasa Indonesia adalah wujud harga diri kita sebagai bangsa. Dengan menjadikannya pusat ilmu, karya seni, kebijakan, dan percakapan sehari-hari, kita bukan hanya sekadar berbahasa, tetapi juga memuliakan diri. Bahasa Indonesia adalah ruang di mana martabat bangsa ditegakkan, dan di sanalah letak kekuatan kita sebagai bangsa yang berdaulat.

29 Arah Baru Pendidikan Indonesia, Membangun Generasi Emas 2045:

Sambutan Pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan
Dasar & Menengah Tahun 2025

Selasa, 29 April 2025

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi arah perjalanan bangsa. Dalam forum Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, terlihat dengan jelas bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai urusan teknis, melainkan sebagai misi kebangsaan yang menyangkut identitas, masa depan, serta daya saing Indonesia di tengah dunia yang berubah cepat.

Landasan legal konstitusional ditegaskan kembali sebagai pegangan: mulai dari Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu, hingga undang-undang tentang guru, dosen, disabilitas, pendidikan karakter, dan RPJPN serta RPJMN terbaru. Semua regulasi ini bukan sekadar aturan, melainkan pesan politik yang tegas bahwa mutu pendidikan adalah hak fundamental seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan. Tugas pemerintah adalah memastikan amanah itu terlaksana, bukan sekadar dirumuskan di atas kertas.

Lebih jauh, pendidikan dilihat sebagai bekal menghadapi kompleksitas masa depan. Revolusi industri 4.0, kemajuan kecerdasan buatan, ancaman keamanan siber, krisis iklim, transisi energi, hingga kesenjangan ekonomi merupakan tantangan nyata yang menuntut

generasi muda untuk tangguh dan adaptif. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, bangsa ini berisiko tertinggal dan hanya menjadi penonton dalam percaturan global. Namun, jika pendidikan mampu mengantisipasi, kita bisa masuk sebagai pemain yang menentukan arah.

Di sinilah pendidikan ditempatkan dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi konservatif mengingatkan bahwa pendidikan harus tetap menjadi ruang pelestarian nilai-nilai luhur bangsa—Pancasila, demokrasi, gotong royong, dan karakter kebangsaan. Sementara dimensi progresif menuntut keberanian untuk merancang masa depan, bergerak maju menjawab tantangan global dengan inovasi, teknologi, dan keterampilan baru. Perpaduan keduanya adalah kunci: menjaga akar sambil menumbuhkan sayap.

Penting pula disadari, lebih dari 30 persen penduduk Indonesia saat ini berada di usia PAUD hingga pendidikan menengah. Artinya, kualitas pendidikan dasar dan menengah akan sangat menentukan wajah Indonesia di masa depan. Bila fondasi ini rapuh, pembangunan jangka panjang tak akan bertahan lama. Namun, bila fondasi ini kokoh, kita menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing dengan dunia.

Konsolidasi ini memberi pesan kuat: pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum, gedung, atau angka-angka ujian. Pendidikan adalah strategi besar bangsa. Ia menyangkut pilihan kita—apakah hanya berjalan di tempat atau benar-benar menyiapkan anak-anak Indonesia menjadi manusia yang utuh, berakar pada jati diri sekaligus berani melangkah ke panggung global. Visi yang dicanangkan, “pendidikan bermutu untuk semua,” bukan sekadar slogan, tetapi cita-cita kolektif yang menuntut komitmen nyata dari semua pihak: pemerintah, sekolah, guru, orang tua, bahkan masyarakat luas.

Dengan arah ini, pendidikan tidak lagi hanya soal masa kini, melainkan investasi jangka panjang untuk keberlangsungan bangsa. Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaulat dimulai dari kelas-kelas kecil di sekolah dasar hingga menengah, dari guru-guru yang

sabar mendidik, dan dari kebijakan yang berpihak pada mutu dan keadilan. Jalan masih panjang, tetapi kompas sudah ditentukan. Kini yang dibutuhkan adalah langkah konsisten, bersama, dan berkesinambungan.

Membicarakan Indonesia 2045 berarti membicarakan perjalanan panjang bangsa yang kini sedang ditapaki oleh anak-anak kita. Mereka yang hari ini masih duduk di bangku taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas, adalah wajah masa depan Indonesia dua puluh tahun mendatang. Kebijakan makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak usia sekolah adalah sebuah investasi penting. Langkah ini bukan sekadar memberi makan, tetapi menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas agar mampu memikul tanggung jawab besar ketika kelak memimpin negeri ini.

REALITAS SAAT INI

Kalau kita menengok kondisi pendidikan saat ini, gambaran partisipasi sekolah memang terus menunjukkan peningkatan. Angka anak yang bersekolah dari usia dini hingga menengah semakin mendekati universal, meskipun masih ada daerah yang tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa akses sudah semakin terbuka, namun tantangan kesenjangan tetap harus dijawab. Wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak menjadi strategi penting agar semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar sejak usia emas mereka, sebuah langkah yang bisa mempersempit jurang ketidakadilan pendidikan.

Namun pendidikan tidak hanya berbicara soal akses. Fasilitas belajar juga menjadi penentu kualitas. Banyak sekolah, terutama di jenjang dasar, masih menghadapi masalah infrastruktur. Data terbaru memperlihatkan kondisi ruang kelas yang belum semuanya layak untuk proses belajar yang ideal. Inilah sebabnya revitalisasi sekolah harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang kreatif, bukan sekadar

bangunan seadanya yang tidak mendorong semangat belajar.

Lebih jauh, tantangan terbesar justru terletak pada kualitas hasil belajar. Angka-angka dari studi internasional seperti PISA memperlihatkan kenyataan yang memprihatinkan: 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia tidak mampu memahami gagasan utama dalam teks bacaan panjang. Mereka bisa membaca kata demi kata, namun gagal menangkap makna utuh yang ingin disampaikan. Begitu pula dalam matematika, 82 persen anak kesulitan mengaplikasikan konsep dasar ke dalam situasi nyata sehari-hari. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sebuah krisis pemahaman yang bisa berdampak panjang pada daya saing bangsa.

Apa arti semua ini? Kita sedang menghadapi situasi di mana pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan zaman. Anak-anak kita membaca, tetapi tidak memahami. Mereka menghitung, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan hitungan itu dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, pendidikan kita masih banyak berhenti pada hafalan, bukan pemahaman.

MENINGKATKAN KUALITAS

Jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arah pembangunan pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada jumlah murid yang bersekolah. Lebih dari itu, yang harus dikejar adalah kualitas hasil belajar, peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, hingga penyediaan lingkungan belajar yang sehat. Gizi yang cukup, sekolah yang layak, guru yang terlatih, dan kurikulum yang relevan harus berjalan beriringan.

Indonesia tidak boleh hanya bangga karena berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana anak-anak itu benar-benar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kritis, mampu memecahkan masalah, serta siap bersaing di dunia global. Bonus demografi yang sering diagungkan hanya akan menjadi beban jika generasi muda kita tidak dibekali dengan kualitas yang memadai.

Masa depan Indonesia 2045 adalah masa depan anak-anak hari ini. Kita bisa memilih: apakah akan sekadar membiarkan mereka tumbuh tanpa bekal yang cukup, atau sungguh-sungguh berinvestasi pada pendidikan dan gizi mereka sejak dini. Jawaban dari pilihan itu akan menentukan apakah Indonesia akan benar-benar mencapai cita-cita emasnya, atau justru tertinggal dalam perlombaan global yang kian ketat.

Pendidikan di Indonesia selalu menjadi cermin dari kompleksitas bangsa. Di satu sisi, ada wilayah yang menunjukkan capaian cukup baik, tetapi di sisi lain masih banyak daerah tertinggal yang menanggung beban ketimpangan. Data asesmen nasional SMP/MTS tahun 2024 memperlihatkan kesenjangan kualitas hasil belajar antar wilayah yang cukup tajam, terutama di kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini menegaskan bahwa akses pendidikan memang tersedia, tetapi kualitasnya belum merata. Masalah ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar perbedaan statistik, karena di baliknya ada jutaan anak yang masa depannya berpotensi terhambat hanya karena lahir di tempat yang kurang beruntung.

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah sangat penting. Mereka bukan hanya pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga garda depan yang memahami kondisi spesifik di lapangan. Dengan dukungan anggaran, regulasi, dan program prioritas, daerah diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah masing-masing. Landasan konstitusional dan kondisi realistik yang dihadapi bangsa membuat kita tidak bisa menunda lagi upaya pemerataan pendidikan.

Di tengah tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang diterjemahkan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Wajib belajar 13 tahun adalah tonggak penting. Kebijakan ini berupaya memastikan anak-anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, sekaligus memperluas dan memperkuat pemerataan

kesempatan belajar. Langkah lain adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini menjadi keluhan utama di daerah terpencil, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru agar profesi pendidik lebih dihargai, serta penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi, hingga pendidikan karakter. Program ini jelas tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga menekankan pembentukan kepribadian dan daya saing generasi muda.

Selain itu, ada perhatian khusus terhadap pengembangan talenta dan prestasi anak bangsa, serta upaya pelestarian dan pembangunan kebahasaan dan kesusastraan. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin pendidikan Indonesia tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga membentuk manusia yang utuh: cerdas, berkarakter, sekaligus mampu berkompetisi di tingkat global.

Namun, kebijakan besar sering kali diikuti persoalan baru. Salah satunya adalah terkait redistribusi guru. Sejak diberlakukannya seleksi ASN P3K, sebanyak 110 ribu guru swasta telah lulus dan ditempatkan di sekolah negeri. Dampaknya, sekolah swasta mengalami kekurangan tenaga pendidik. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini bisa menimbulkan masalah baru: anak-anak di sekolah swasta berisiko mendapat layanan pendidikan yang tidak memadai.

Sebagai jawaban, pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. Melalui kebijakan ini, guru ASN maupun P3K dapat dipindahkan untuk mengajar di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Skema ini dirancang berlangsung selama empat tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sekali lagi. Kebijakan ini cukup berani, karena untuk pertama kalinya redistribusi guru dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta yang menerima guru ASN tetap diharapkan berusaha memenuhi kebutuhan gurunya sendiri, sehingga redistribusi tidak menjadi solusi tunggal, melainkan jembatan untuk memperkuat ekosistem pendidikan secara lebih menyeluruh.

Memang, implementasi redistribusi tidak akan mudah. Ada persoalan birokrasi, distribusi wilayah, hingga resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi jika dijalankan dengan transparan, berbasis data kebutuhan nyata, serta melibatkan dialog antara pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta, dan masyarakat, kebijakan ini berpotensi menciptakan keseimbangan baru.

Pada akhirnya, inti dari semua kebijakan ini adalah kesadaran bahwa pendidikan tidak boleh menjadi lotere nasib. Anak yang lahir di Papua, Maluku, atau NTT seharusnya memiliki peluang yang sama dengan anak di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Pemerataan kualitas pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa yang adil dan berdaya saing.

Tantangan besar memang menanti: menutup jurang kesenjangan, memperbaiki sistem, dan memastikan program tidak berhenti di atas kertas. Tetapi langkah yang sedang diambil menunjukkan adanya tekad baru. Pendidikan di Indonesia harus berani berubah, berani menata ulang, dan berani memprioritaskan masa depan anak-anak di atas segala kepentingan lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan bangsa ini di masa depan sangat bergantung pada seberapa serius kita membangun fondasi pendidikan hari ini.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Transformasi besar dalam dunia pendidikan tengah berlangsung, dengan semangat menyederhanakan sistem sekaligus memperkuat nilai-nilai dasar. Perubahan ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan yang digulirkan Kemendikdasmen. Salah satunya adalah penyederhanaan sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Jika selama ini pengisian kinerja kerap dianggap rumit dan menghabiskan waktu, kini mekanismenya dipangkas menjadi hanya sekali setahun. Dokumen administrasi cukup diverifikasi langsung oleh atasan, sementara pengembangan kompetensi didorong melalui refleksi diri. Lebih penting lagi, sistem ruang GTK sudah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, sehingga tidak ada lagi duplikasi laporan dan aplikasi. Dengan dukungan MoU bersama BKN, kebijakan ini

tidak hanya sekadar rencana, melainkan telah diimplementasikan. Dampaknya terasa nyata: guru dan kepala sekolah bisa lebih fokus pada kualitas pembelajaran, bukan tenggelam dalam urusan administratif.

Transformasi lain menyentuh aspek yang sering memicu perdebatan publik: penerimaan murid baru. Melalui SPMB, pemerintah berupaya menyempurnakan mekanisme PPDB. Kebijakan ini lahir bukan semata-mata dari keputusan internal kementerian, melainkan dari serangkaian diskusi dengan kepala daerah, pemangku kepentingan, masyarakat, hingga koordinasi lintas kementerian seperti Menko PMK, KSP, dan Kemendagri. Prinsip yang ditekankan adalah pemerataan dan keadilan, agar akses ke sekolah tidak lagi menjadi soal keberuntungan atau kedekatan wilayah semata. Harapannya, mulai tahun ajaran 2025, SPMB dapat berjalan lebih baik dan menjadi jawaban atas keluhan panjang masyarakat tentang ketidakadilan dalam sistem sebelumnya.

Namun, pendidikan sejatinya bukan hanya tentang kinerja dan akses, melainkan juga tentang pembentukan karakter. Untuk itu, lahir gagasan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digagas bersama tiga kementerian: Pendidikan Dasar dan Menengah, Agama, serta Dalam Negeri. Tujuh kebiasaan itu sederhana, tetapi sarat makna: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dengan gerakan ini, sekolah tidak hanya mencetak murid cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara jasmani, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial. Implementasinya pun mulai beragam: ada sekolah yang menuliskan tujuh kebiasaan ini di dinding-dinding kelas, ada pula madrasah yang melantunkannya dalam bentuk sholawat, sementara sekolah-sekolah Muhammadiyah mengadaptasinya dengan cara lain sesuai tradisi mereka. Menariknya, kebiasaan ini juga dijadikan bagian dari lomba memperingati Hari Pendidikan Nasional, memberi dorongan agar sekolah termotivasi untuk benar-benar menerapkannya.

Semua perubahan ini memperlihatkan arah baru dalam pendidikan nasional. Guru tidak lagi terbebani administrasi

yang rumit, murid mendapat kesempatan yang lebih adil dalam mengakses pendidikan, dan sekolah menanamkan kebiasaan baik yang membentuk karakter generasi muda. Lebih dari sekadar kebijakan birokratis, transformasi ini mencerminkan upaya kolektif: kementerian, guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat ikut terlibat. Pendidikan kini dilihat sebagai ekosistem yang hidup, bergerak bersama untuk mencetak manusia Indonesia yang bukan hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga sehat, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Jika konsistensi dapat dijaga, maka arah baru ini bukan hanya menjadi sekadar program sesaat, tetapi fondasi jangka panjang bagi pendidikan yang lebih manusiawi, merata, dan membumi.

Arah baru pendidikan Indonesia mulai terlihat dari langkah-langkah strategis yang sedang disiapkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong lahirnya pendekatan pembelajaran mendalam atau *deep learning*. Konsep ini bukan sekadar soal menyampaikan materi, tetapi tentang menciptakan suasana belajar yang penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran dilihat sebagai proses memuliakan manusia, bukan hanya mengejar angka rapor. Landasan akademiknya sudah disusun, uji publik selesai dilakukan, dan tahap berikutnya adalah menyiapkan pelatih nasional yang bahkan akan dikirim ke Australia untuk memperkuat implementasi melalui kerja sama internasional. Ini menandakan bahwa pendidikan kita mulai berani bergerak melampaui pola lama dan membuka diri pada inovasi global.

Di sisi lain, ada terobosan yang lebih futuristik: pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Literasi digital kini tidak lagi sekadar kemampuan menggunakan perangkat, tetapi meluas ke kemampuan berpikir komputasional, memahami logika program, dan mengelola AI dengan cara yang produktif sekaligus bertanggung jawab. Rancangannya fleksibel: bisa menjadi mata pelajaran pilihan di kelas 5 dan 6 SD, SMP, hingga SMA/SMK; bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain; atau bahkan dijalankan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk belajarnya pun adaptif,

bisa menggunakan perangkat berbasis internet, perangkat keras sederhana (*plug*), atau bahkan tanpa perangkat (*unplugged*). Dengan dukungan besar dari Google yang siap melatih lebih dari satu juta guru, Indonesia berpotensi melahirkan generasi yang bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta dan inovator di dalamnya. Jika berhasil, ini akan menjadi lompatan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang relevan dengan kebutuhan global.

Tidak hanya berhenti di kurikulum dan metode belajar, pemerintah juga menyentuh aspek evaluasi. Melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA), sistem penilaian dirancang ulang agar benar-benar mendorong upaya belajar, bukan sekadar menekan siswa dengan angka-angka. Kajian akademik sudah tuntas, uji publik selesai, dan kebijakan ini telah melalui diskusi panjang dengan DPR, kementerian terkait, hingga masukan publik. Artinya, TKA bukan hanya instrumen teknis, tetapi bagian dari upaya membangun sistem evaluasi yang lebih adil, menstimulasi motivasi, serta membuka ruang untuk mengapresiasi keragaman kemampuan siswa. Bila dijalankan konsisten, TKA bisa menjadi koreksi terhadap budaya ujian yang selama ini sering dianggap kaku dan menakutkan.

Namun, semua terobosan ini tetap bergantung pada faktor kunci: peran pemerintah daerah. UU 23 Tahun 2014 memberi kewenangan besar kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab pada SMA, SMK, dan SLB, sementara pemerintah kabupaten/kota mengelola TK, SD, dan SMP. Beban ini tidak kecil: 51 juta murid, 3,4 juta guru, dan 440 ribu satuan pendidikan berada di bawah tanggung jawab daerah. Anggaran pun menunjukkan betapa strategisnya posisi ini—dari total Rp724,2 triliun anggaran pendidikan nasional, 48 persennya langsung ditransfer ke daerah, sementara Kementerian Dikdasmen hanya mengelola sekitar Rp33,5 triliun atau 4,6 persen. Dengan komposisi demikian, jelas bahwa keberhasilan pendidikan nasional lebih banyak ditentukan oleh bagaimana daerah mengelola dana, tenaga, dan kebijakan yang sudah digulirkan dari pusat.

Semua arah kebijakan ini memberi gambaran bahwa pendidikan Indonesia sedang dipacu ke jalur yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Ada upaya menjadikan proses belajar lebih bermakna, menyiapkan anak-anak menghadapi era digital, menyempurnakan sistem evaluasi, sekaligus menguatkan peran daerah sebagai ujung tombak pengelolaan pendidikan. Namun, pertanyaan penting tetap mengemuka: sejauh mana semua pihak, dari kementerian, mitra internasional, hingga pemerintah daerah, benar-benar berkomitmen menjalankannya dengan serius?

Jika jawaban atas pertanyaan itu adalah kesungguhan yang nyata, maka bukan mustahil kita akan melihat lahirnya generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kreatif, kritis, berdaya saing global, dan tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah daerah perlu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mendukung program-program prioritas nasional. Program-program ini meliputi pendidikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, pengembangan kemampuan coding dan kecerdasan artifisial, tes kemampuan akademik, hingga Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Selain itu, redistribusi guru ASN di sekolah swasta serta pelaporan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi bagian penting agar proses pendidikan berjalan lebih efektif dan terarah.

Rapor pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Dikdasmen menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dan sekolah. Melalui rapor ini, pemda dapat memantau capaian pendidikan secara lebih terukur dan merencanakan program dengan arah yang jelas. Selain itu, rapor pendidikan membantu memastikan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan yang diukur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pemda menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua anak, membuka kesempatan yang lebih merata, dan mendukung terciptanya generasi yang unggul.

Beberapa program yang telah berjalan menunjukkan dampak nyata. Program Senam Anak Indonesia Hebat, misalnya, telah ditayangkan di kanal resmi YouTube Kementerian dan berhasil menarik perhatian lebih dari 60 juta pemirsa. Bahkan, lomba dalam rangka Hari Pendidikan Nasional berhasil melibatkan lebih dari 20 ribu peserta. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa berbagai program yang dikemas dengan kreatif dan inovatif dapat menjangkau masyarakat luas serta membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebugaran, dan pengembangan karakter sejak usia dini.

Keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama lintas lembaga dan partisipasi aktif berbagai pihak. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta kementerian lainnya melalui penandatanganan MoU menjadi fondasi kolaborasi yang kuat. Langkah-langkah kolaboratif ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan program, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pendidikan yang lebih komprehensif.

Semua capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, koordinasi, dan komitmen yang tinggi dari banyak pihak. Apresiasi patut diberikan kepada mereka yang telah mendukung pelaksanaan program, mulai dari bimbingan strategis, fasilitasi teknis, hingga keterlibatan aktif dalam program-program unggulan. Sinergi ini membuktikan bahwa pembangunan kualitas pendidikan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan buah dari kolaborasi dan partisipasi semua elemen bangsa.

Dengan kerja sama yang terus diperkuat dan strategi pelaksanaan yang matang, berbagai program pendidikan ini diharapkan dapat semakin memberi manfaat nyata bagi generasi muda. Pendidikan yang bermutu, inklusif, dan inovatif bukan lagi sekadar target, tetapi menjadi fondasi untuk membentuk anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

30 **Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua:**

Amanat Upacara Peringat Hari Pendidikan Nasional
2025

Jum'at, 2 Mei 2025

Hari Pendidikan Nasional selalu menjadi momen penting untuk merenungkan dan meneguhkan tekad kita dalam memajukan pendidikan. Setiap 2 Mei, kita tidak hanya menandai tanggal di kalender, tetapi juga mengenang perjuangan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang berjuang agar setiap anak pribumi memiliki hak untuk belajar setara dengan kaum priayi dan orang-orang Belanda pada masanya. Semangatnya mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah hak semua anak, bukan sekadar privilese bagi sebagian orang.

Pendidikan sejatinya adalah fitrah manusia. Manusia adalah makhluk belajar, yang secara alami memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan karya yang dapat membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membentuk karakter, membangun watak, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, sehat, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas bukan hanya tugas pemerintah. Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Keterlibatan guru, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas adalah kunci agar pendidikan bermutu bisa dinikmati oleh semua anak. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi kemajuan bangsa, karena hanya dengan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan bermartabat.

Anak-anak adalah harapan bangsa. Menjadi “anak Indonesia hebat” berarti membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan positif: bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, belajar dengan tekun, aktif dalam kegiatan sosial, serta cukup tidur. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini membentuk karakter, disiplin, dan kreativitas, yang pada akhirnya akan menjadikan anak-anak siap menghadapi tantangan masa depan.

Pendidikan yang bermutu memerlukan kolaborasi, kerja sama, dan semangat gotong royong. Ketika pemerintah, masyarakat, dan peserta didik bersatu padu, cita-cita pendidikan yang adil dan merata bisa tercapai. Dengan pendidikan yang berkualitas, bukan hanya generasi penerus yang terbentuk, tetapi juga bangsa yang kuat, maju, dan bermartabat.

Hari Pendidikan Nasional adalah pengingat bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan, dan setiap anak adalah harapan yang harus dijaga, dibimbing, dan diberi kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Mari bergandeng tangan, bekerja sama, dan berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Indonesia maju, berkat generasi yang hebat.

Teknologi sebagai Alat, Pendidikan sebagai Jiwa:

Keynote Speech Seminar Nasional Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 6 Mei 2025

Teknologi telah mengalami transformasi yang sangat fundamental. Pada awalnya, manusia menciptakan teknologi sebagai alat untuk memperluas kemampuan fisik dan intelektualnya. Alat-alat sederhana membantu manusia melakukan hal-hal yang tidak bisa dicapai dengan kekuatan tubuh atau pikirannya sendiri. Namun, perjalanan teknologi tidak berhenti di situ. Seiring waktu, teknologi berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan seakan menjadi organisme tersendiri yang berdiri sendiri. Dalam beberapa hal, manusia mulai bergantung padanya, dan muncul fenomena yang cukup ironis: manusia menjadi hamba teknologi.

Transformasi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi pendidikan di era digital dan kecerdasan buatan. Dunia pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada bagaimana menyiapkan generasi yang mampu berinteraksi secara kritis dan produktif dengan teknologi. Pendidikan harus mampu membentuk calon guru dan pendidik sebagai agen perubahan, yang tidak sekadar menggunakan teknologi, tetapi juga memahami implikasi, peluang, dan tantangan yang ditimbulkannya bagi pembangunan peradaban.

Dalam konteks ini, pemikiran Yuval Noah Harari memberi peringatan yang penting. Menurutnya, manusia dengan teknologi

bisa mencapai posisi yang nyaris setara dengan Tuhan, di mana peran manusia dalam banyak hal dapat digantikan oleh mesin atau algoritma. Hal ini menimbulkan diskursus yang tidak sederhana, terutama ketika kita melihat perkembangan dalam bidang rekayasa genetika, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi teknologi lainnya. Kebergantungan manusia terhadap teknologi semakin nyata, dan pertanyaan moral, etis, serta pendidikan menjadi sangat relevan.

Selain itu, Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang dikenal luas, menekankan bahwa banyak persoalan, termasuk dalam fisika fundamental, kini dapat diselesaikan dengan teknologi. Menurutnya, teknologi dan ilmu pengetahuan telah bersatu menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Ilmu pengetahuan menjadi landasan bagi pengembangan teknologi, sementara teknologi memungkinkan ilmu pengetahuan diterapkan dan dikembangkan lebih jauh. Keduanya membentuk simbiosis yang mendorong kemajuan manusia, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab besar bagi pendidikan: bagaimana menyiapkan individu yang mampu memahami, mengelola, dan memanfaatkan simbiosis ini secara bijak.

Fenomena ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Guru dan pendidik tidak hanya menjadi pengajar atau penyampai materi, tetapi juga menjadi aktor pembangunan peradaban. Mereka harus mampu membekali generasi muda dengan keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat. Pendidikan harus menekankan keseimbangan: mengoptimalkan teknologi sebagai alat pemberdayaan manusia, bukan sebagai pengganti manusia.

Secara keseluruhan, transformasi teknologi menuntut kita untuk merenungkan posisi manusia di tengah kemajuan yang begitu pesat. Pendidikan menjadi arena penting untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan teknologi. Masa depan pendidikan bukan hanya soal menguasai alat dan teknologi, tetapi soal memahami interaksi kompleks antara manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi,

sehingga kemajuan tidak hanya mengagumkan secara teknis, tetapi juga bermakna secara kemanusiaan dan peradaban.

Teknologi lahir dari hasrat manusia untuk melakukan lebih banyak hal dan melakukannya dengan lebih baik. Setiap kemajuan teknologi bermula dari imajinasi manusia—kemampuan untuk membayangkan solusi atas persoalan yang ada, merancang hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, dan menembus batas-batas kemampuan fisik maupun intelektual. Imajinasi ini bukan sekadar mimpi kosong, tetapi fondasi dari inovasi yang akhirnya mengubah kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa setiap penemuan besar selalu diawali oleh dorongan untuk “menjadi lebih baik” dan kemampuan manusia untuk membayangkan sesuatu yang lebih dari apa yang ada.

Contoh paling jelas terlihat dalam bidang transportasi. Pesawat terbang, yang kini menjadi bagian rutin dari kehidupan manusia, pada awalnya hanyalah ide yang lahir dari pengamatan terhadap burung-burung yang terbang. Wright Bersaudara mengubah imajinasi itu menjadi kenyataan—membuktikan bahwa teknologi lahir dari pengamatan alam dan kreativitas manusia. Kemampuan untuk melampaui keterbatasan fisik ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan perwujudan dari ambisi manusia untuk go beyond, melampaui batasan diri, dan memenuhi keinginan yang sebelumnya tampak mustahil.

Lebih jauh lagi, teknologi tidak berdiri sendiri. Ia menyatu dengan ilmu pengetahuan dan budaya, menjadi bagian dari fondasi peradaban manusia. Keadaan sosial, capaian kebudayaan, dan kemajuan teknologi saling berinteraksi, membentuk pola dan struktur kehidupan yang lebih kompleks. Capaian-capaian peradaban yang mengagumkan—dari seni hingga arsitektur, dari sistem pendidikan hingga sistem transportasi—tidak lepas dari kemajuan teknologi yang menjadi salah satu pilar utama fondasinya.

Namun, kagum terhadap teknologi tidak boleh berlebihan hingga membuat manusia kehilangan kontrol. Robot dan otomatisasi,

misalnya, kini menggantikan banyak peran manusia: pelayan restoran, resepsionis rumah sakit, hingga pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Meski begitu, robot tetaplah mesin yang bekerja berdasarkan perintah manusia. Teknologi, seberapa canggih pun, adalah alat. Manusia tetap menjadi aktor utama yang mengendalikan arah dan dampaknya. Kesadaran ini penting agar teknologi tidak berkembang menjadi sesuatu yang mengancam, melainkan menjadi sarana yang memperkaya kehidupan manusia. Di sinilah etika memainkan peran krusial—agar kecerdasan teknologi tidak berubah menjadi malapetaka.

Teknologi membawa dua sisi yang kontras. Di satu sisi, ia memungkinkan manusia melakukan multitasking, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan meningkatkan kapasitas intelektual. Di sisi lain, jika digunakan tanpa kontrol, teknologi bisa mereduksi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, kecerdasan buatan (AI) yang kini begitu populer hanyalah cerminan kecerdasan manusia. AI bisa meniru, memproses, dan memprediksi, tetapi ia tetap mesin—tidak memiliki empati, nilai moral, atau pertimbangan etis. AI tidak mampu menggantikan seluruh aspek kehidupan manusia, dan tidak semua hal bisa dialihkan kepada mesin.

Pada akhirnya, semua tergantung pada manusia: bagaimana manusia memprogram, mengendalikan, dan memanfaatkan teknologi. Ia bisa menjadi sarana pembelajaran, kreativitas, dan produktivitas, atau sebaliknya, menjadi alat yang memperlemah kemanusiaan. Teknologi hanyalah cermin dari imajinasi, kreativitas, dan tanggung jawab manusia. Mengagumi teknologi sah-sah saja, tetapi yang terpenting adalah menempatkan manusia sebagai pengendali, bukan sebaliknya. Kecerdasan manusia, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi yang menuntun bagaimana teknologi digunakan.

Dengan kesadaran ini, manusia tidak akan gagap menghadapi kemajuan teknologi. Alih-alih menjadi subjek pasif yang dikendalikan oleh mesin, manusia tetap menjadi aktor utama—yang mengarahkan,

mengendalikan, dan memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan, peradaban, dan kemanusiaan itu sendiri.

Kecanggihan teknologi, seperti Chat GPT, memang menakjubkan. Dalam hitungan detik, sebuah sambutan atau artikel bisa tersusun rapi, lengkap dengan struktur bahasa yang apik. Tidak heran jika banyak orang, termasuk tokoh-tokoh penting, kagum dengan kemampuan ini. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh teknologi: keunikan cara berpikir manusia. Pilihan kata, nuansa diksi, perspektif, dan cara menafsirkan sebuah gagasan—semua itu adalah jejak personal yang membedakan satu individu dari yang lain. Tidak peduli seberapa canggih sebuah algoritma, teknologi tidak bisa meniru sentuhan khas seorang pemikir, pemimpin, atau pendidik. Di sinilah batas kemampuan kecerdasan buatan terlihat dengan jelas.

Tetapi, di banyak sisi, kemajuan teknologi juga menimbulkan kekhawatiran yang nyata. Kemudahan AI dalam menulis artikel ilmiah atau tulisan populer dengan referensi terkini membuat orisinalitas karya manusia tergerus. Berbagai tulisan dan penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik merasa cemas melihat perubahan ini. Fenomena ini membuat beberapa institusi pendidikan di dunia mulai mengembalikan pendekatan lama: menulis tangan, menekankan proses belajar yang otentik, dan mendorong murid untuk berpikir sendiri. Tujuannya sederhana: menjaga keaslian berpikir, karena orisinalitas adalah aspek manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.

Di sisi lain, fenomena nyontek menjadi cermin dari dampak negatif kemudahan teknologi. Namun, menariknya, hal ini juga memicu kemampuan manusia untuk mendeteksi keaslian sebuah karya. Di sinilah terlihat bahwa teknologi penting, tetapi tidak bisa menjadi segalanya. Kecerdasan buatan hanyalah alat; bagaimana manusia menggunakannya—etika, tujuan, dan kesadaran—menjadi faktor yang menentukan. Penguasaan teknologi harus selalu diimbangi dengan pendidikan nilai-nilai moral dan kritis. Teknologi

tidak boleh memisahkan manusia dari proses berpikir mendalam, atau membuat manusia bergantung secara pasif.

Peran guru, pendidik, dan interaksi manusia dalam proses pendidikan tetap tak tergantikan. Banyak tulisan bahkan menyebutkan bahwa teknologi digital berpotensi membuat manusia menjadi “Cello dan Mellow”—istilah yang digunakan dalam buku berjudul *Cello*, yang menggambarkan kedangkalan berpikir akibat kemudahan teknologi. Teknologi memang mempermudah akses fakta dan informasi. Platform seperti Meta membantu menemukan data dan jawaban faktual dengan cepat. Tetapi fakta semata tidak mampu menggantikan analisis filosofis, refleksi mendalam, atau penalaran kompleks yang menjadi ciri khas manusia.

Kecepatan teknologi dalam menyajikan informasi, di satu sisi, membangkitkan kecemasan lain: munculnya *Scroll Society*. Masyarakat modern cenderung membaca berita hanya dari judul atau potongan singkat, tanpa mencerna keseluruhan isi tulisan. Akibatnya, manusia cenderung berpikir dangkal, terbiasa dengan kepuasan instan, dan jarang merenung. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski teknologi memudahkan hidup, ia juga memanjakan manusia, sehingga kedangkalan berpikir menjadi masalah nyata yang harus diwaspadai.

Kesimpulannya, teknologi adalah alat, bukan pengganti manusia. Orisinalitas, kemampuan berpikir kritis, etika, dan refleksi mendalam tetap menjadi fondasi yang harus dijaga, bahkan di era kecerdasan buatan yang semakin canggih. Penguasaan teknologi penting, tetapi nilai-nilai kemanusiaan dalam menggunakan teknologi jauh lebih menentukan. Di sinilah keseimbangan antara manusia dan teknologi diuji: kemampuan untuk memanfaatkan kemudahan tanpa kehilangan kemampuan berpikir mendalam, kreativitas, dan keunikan personal yang membuat manusia berbeda dari mesin.

Teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kecerdasan buatan, misalnya, mampu menghadirkan informasi secara cepat, menghimpun data dalam jumlah yang luar

biasa, bahkan melakukan analisis awal berdasarkan pola yang ada. Namun, secepat dan sebanyak apapun data yang tersedia, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Penentuan arah, prioritas, dan tujuan penggunaan informasi tetap bergantung pada nilai-nilai dan kepentingan manusia itu sendiri. Teknologi hanyalah alat, bagian dari sistem yang membantu mencapai tujuan, bukan pengganti esensi manusia dalam proses-proses penting.

Dalam dunia pendidikan, peran ini menjadi semakin jelas. Pendidikan bukan sekadar transfer informasi atau kemampuan teknis, tetapi proses memuliakan manusia. Manusia adalah makhluk jasmani sekaligus rohani, yang memiliki potensi *diniyah* (spiritual), *aqliyah* (intelektual), dan *qulubiyah* (emosional atau hati). Ketiga potensi ini yang membentuk manusia menjadi makhluk beragama, berilmu, sekaligus memiliki rasa estetika yang tinggi. Pendidikan sejati menekankan pengembangan potensi-potensi ini agar manusia bisa menjadi utuh, bukan hanya cerdas secara teknis.

AI memang dapat membantu seseorang menciptakan lagu meskipun ia tidak memahami notasi musik, atau menggambar figur seseorang secara cepat meski tidak memiliki kemampuan seni formal. Namun, karya yang dihasilkan oleh mesin tidak bisa menggantikan sentuhan manusia: rasa, emosi, pengalaman, dan kedalaman nuansa tetap unik pada manusia. Lagu yang dibuat AI mungkin terdengar indah secara teknis, tetapi tidak mengandung “rasa” manusia. Gambar yang menyerupai seorang tokoh atau maestro seni tidak akan pernah bisa sepenuhnya menandingi keaslian dan keunikan sang tokoh. Inilah yang menegaskan bahwa teknologi harus ditempatkan pada posisinya: sebagai alat bantu, bukan pengganti.

Di sinilah relevansi teknologi dalam pendidikan muncul: AI dan alat digital dapat mendukung pembelajaran, memperluas akses informasi, dan mempercepat proses kreatif. Namun, fokus utama tetap pada manusia—mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepekaan emosional, dan kemampuan spiritual. Anak-anak harus dibimbing agar bisa memanfaatkan teknologi, tetapi

tidak menjadi tergantung padanya. Jika semua kemampuan manusia diserahkan sepenuhnya kepada mesin, manusia berisiko kehilangan kapasitas untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara mandiri.

Pendidikan modern perlu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pengembangan potensi manusia. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperluas cakrawala, membantu proses kreatif, dan memperkaya pengalaman belajar. Namun, pendidikan harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat: manusia yang berpikir, merasakan, bersikap etis, dan mampu mengembangkan seni serta ilmu pengetahuan dengan integritas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia seutuhnya—yang berjiwa, berakal, dan berperasaan, mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan mulia tanpa kehilangan kemanusiaannya.

Di era digital saat ini, teknologi seperti Google Maps telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan mudah, rute tercepat bisa ditemukan, estimasi waktu tempuh dapat diketahui, bahkan alternatif jalan bisa dipilih hanya dengan beberapa ketukan layar. Namun, kenyataan seringkali mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa sinyal, tanpa akses ke sistem yang mendasarinya, teknologi tidak lagi berfungsi. GPS yang kita kenal—General Positioning Satellite—secara metaforis berubah menjadi “Gunakan Penduduk Setempat”. Kita menjadi bergantung pada intuisi manusia dan pengetahuan lokal, bukan lagi sekadar mengikuti arahan digital.

Pengalaman nyata sering mengilustrasikan hal ini. Dalam sebuah perjalanan menuju lokasi acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di sebuah SD di Bogor, GPS yang menjadi panduan menunjukkan jalan tercepat. Namun, jalan yang dilewati ternyata sempit, tidak berujung, bahkan berakhir di jalan yang putus. Mobil harus berbalik, dan Google tidak memiliki cara untuk mengetahui kondisi jalan tersebut. Situasi ini memperlihatkan satu hal penting: teknologi bisa memandu, tetapi tidak bisa menggantikan keputusan manusia.

Keputusan penting, terutama yang bersifat strategis atau kritis, tetap membutuhkan penilaian manusia yang matang, pengalaman, dan insting.

Pelajaran dari fenomena ini sangat relevan dalam pendidikan, terutama di era AI dan digitalisasi. Pembelajaran tidak boleh sekadar bersifat permukaan, fokus pada pencapaian atau sekadar mengikuti teknologi terbaru. Yang diperlukan adalah pembelajaran yang mendalam—pembelajaran yang memadukan teknologi dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif manusia. Teknologi seharusnya menjadi alat yang disinergikan dengan kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

Tidak semua metode pembelajaran harus lebih canggih dari cara tradisional. Pilihan metode tetap harus didasarkan pada konteks dan tujuan. Yang menjadi pondasi utama adalah menempatkan pendidikan pada aspek manusia: kemampuan *aqliyah* (intelektual), *diniyah* (spiritual), *qulubiyah* (emosional dan hati), serta pembentukan akhlak mulia. Teknologi mendukung proses pendidikan, tetapi tidak boleh mendominasi esensi pembelajaran.

Dengan demikian, penguasaan teknologi memang penting, tetapi bukan satu-satunya yang menentukan kualitas pendidikan. Kunci sebenarnya terletak pada pembelajaran yang mendalam, di mana manusia dibiasakan berpikir kritis, mencerna informasi dengan bijak, dan menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memadukan kecanggihan teknologi dengan kebijaksanaan manusia, sehingga menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia—siap menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangan jati diri manusia.

32 Pendidikan Bermutu Untuk Semua Melalui Teknologi Digital:

Kolaborasi Hardiknas 2025 Mendukung Pendidikan Bermutu dan Aman untuk Semua

Rabu, 7 Mei 2025

Kolaborasi antara pemerintah dan platform teknologi digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua anak Indonesia. Pemberian *Golden Button* dari Google kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi juga pengakuan atas kerja keras dalam menyediakan akses informasi pendidikan yang terpercaya dan bermanfaat. Ini menegaskan bahwa sinergi antara sektor publik dan perusahaan teknologi mampu memperluas jangkauan belajar bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas konten pendidikan digital.

Pendidikan bermutu harus dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang lokasi, kondisi ekonomi, fisik, maupun agama. Namun, tantangan geografis Indonesia yang sangat beragam membuat tujuan ini tidak mudah dicapai. Banyak anak-anak yang berada di wilayah terpencil, atau yang terkendala kondisi sosial dan ekonomi, seringkali belum mendapatkan haknya atas pendidikan sebagaimana mestinya. Di sinilah peran teknologi menjadi sangat strategis: memungkinkan belajar terjadi di mana pun dan kapan pun, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Teknologi menjadi sarana untuk “menjangkau yang tidak terjangkau,” membuka akses bagi mereka yang selama ini tertinggal.

Selain itu, tidak semua anak dapat mengikuti sekolah formal karena berbagai alasan, seperti harus bekerja atau persoalan keluarga lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyediakan alternatif belajar yang lebih fleksibel melalui berbagai media digital. YouTube dan platform sejenis menjadi sarana penting untuk menyediakan konten edukatif yang mudah diakses, menyenangkan, dan informatif. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal, tetapi bisa berlangsung di mana saja, bahkan di luar jam sekolah.

Namun, menghadirkan konten digital yang bermanfaat tidaklah cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas dan keamanan konten tersebut. Kreativitas, penguasaan teknologi, dan kesadaran digital—atau yang disebut “kesalehan digital”—menjadi syarat agar konten yang disajikan mampu mendidik, membuka wawasan, dan meminimalkan risiko penyebaran informasi yang merugikan. Tidak bisa dipungkiri, ada sebagian kreator yang hanya mengejar sensasi atau viralitas semata, tanpa memperhatikan manfaat dan kualitas konten. Fenomena ini dikenal sebagai “virus viralitas,” yang bisa berdampak positif jika diarahkan dengan benar, namun bisa merusak bila isi kontennya negatif atau menyesatkan.

Dengan pendekatan yang tepat, viralitas bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyebarkan kebaikan, ilmu, dan inspirasi secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan digital bukan hanya tentang menyediakan akses atau teknologi, tetapi juga membangun budaya literasi dan tanggung jawab digital. Tujuannya adalah agar setiap anak, dan masyarakat secara umum, dapat belajar dengan aman, menyenangkan, dan bermakna. Pendidikan digital menjadi jembatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menyiapkan generasi yang kreatif, kritis, dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Di era sekarang, pembelajaran tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang sama untuk semua orang. Setiap individu membutuhkan pengalaman belajar yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan ritme mereka sendiri. Konsep pembelajaran terdiferensiasi kini

berkembang menjadi pembelajaran yang lebih individual. Orang ingin belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan cara yang paling mudah diakses. Sarana belajar kini tidak terbatas pada buku atau kelas formal; mereka bisa digenggam di tangan, dibaca saat santai, atau diakses melalui perangkat digital, kapan pun diperlukan. Anak-anak yang bekerja di ladang, misalnya, tetap bisa belajar di tengah aktivitas mereka. Dulu, anak gembala meniup suling di punggung kerbau, kini mereka bisa memegang HP, mengakses Google atau menonton video pembelajaran di YouTube sambil tetap berada di alam sekitar mereka. Teknologi memberi fleksibilitas yang luar biasa, memungkinkan proses belajar tidak lagi terikat ruang dan waktu.

Selain itu, akses pendidikan yang luas membutuhkan kolaborasi. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk platform digital, memungkinkan layanan pendidikan menjadi lebih merata. Digitalisasi pendidikan bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan mendesak. Pendidikan harus aman, bermanfaat, dan dapat diakses di mana pun anak-anak berada. Melalui kolaborasi ini, materi pembelajaran bisa disediakan oleh guru kreatif, edukator, dan komunitas pembelajar, yang kemudian diintegrasikan ke program-program seperti *smart classroom*. Konsep *crowd learning*, yang memanfaatkan kekuatan komunitas untuk pembelajaran, menjadi strategi penting agar partisipasi masyarakat dapat ikut menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua.

Tidak hanya itu, pendidikan juga harus relevan dengan kehidupan nyata. Mendatangi berbagai daerah dan bertemu langsung dengan masyarakat membuka peluang untuk memperlihatkan wajah Indonesia yang beragam. Banyak orang hebat berada di berbagai penjuru negeri, dan kisah mereka dapat menjadi sumber inspirasi. Dengan memanfaatkan video pendek yang rutin dibagikan, informasi yang mencerahkan dan mendidik bisa menjangkau masyarakat luas, tidak hanya menghibur tetapi juga menumbuhkan literasi dan pengetahuan. Program ini bisa dilakukan setiap minggu, sehingga edukasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Intinya, pendidikan modern harus mampu menyatukan teknologi, kreativitas guru, kerja sama lintas pihak, dan relevansi sosial. Tujuannya jelas: menciptakan akses pendidikan yang bermutu, merata, dan mampu mencerdaskan semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, proses belajar menjadi fleksibel, menyenangkan, dan tetap relevan dengan tantangan zaman, sambil memastikan bahwa setiap anak, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar.

33

Membangun Kembali Pembelajaran yang Bermakna

SEMNAS PGSD 2025: Pendekatan *Deep Learning* pada Pembelajaran Sekolah Dasar di Era Abad 21

Kamis, 22 Mei 2025

Pendidikan kita sedang berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, sekolah-sekolah terus beroperasi, murid hadir di kelas, dan kegiatan pembelajaran berjalan secara administratif. Namun di sisi lain, proses belajar yang sesungguhnya kerap tidak terjadi. Fenomena “*schooling without learning*” bukan hanya istilah akademik, tetapi cermin dari kenyataan yang pelan-pelan menjadi budaya. Banyak siswa yang bisa mengeja dan membaca teks, tetapi tidak memahami isi dan maknanya. Mereka belajar matematika, tetapi gagal menguasai logika berpikir dan keterampilan berhitung yang paling dasar. Situasi ini tampak dari rendahnya capaian asesmen global seperti PISA, yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi bukan sekadar soal mengenal simbol, tetapi tentang memahami dan mengolah informasi.

Ironisnya, praktik pembelajaran di sekolah sering terjebak pada mekanisme yang dangkal. Guru memberi tugas atau soal, tetapi tidak selalu memahami isi dan jawabannya secara konseptual. Kunci jawaban menjadi pegangan utama, bukan pemahaman materi. Murid diarahkan untuk memilih opsi benar dalam pilihan ganda, bukan diajak berpikir, menganalisis, atau mengajukan pertanyaan. Di ruang-ruang kelas, pendidikan direduksi menjadi rutinitas teknis, bukan proses intelektual. Akibatnya, anak-anak belajar menghafal, bukan

memahami; mengejar nilai, bukan membangun logika; mengerjakan tugas, bukan menemukan makna.

Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini secara drastis. Sistem pembelajaran daring dianggap sebagai solusi modern, namun kenyataannya sering hanya menciptakan ilusi kehadiran. Kamera menyala, tetapi tidak menjamin keterlibatan murid. Ada murid yang menampilkan foto atau rekaman video agar tampak hadir, sementara pikirannya berada entah di mana. Lebih parah lagi, anak-anak dari keluarga tanpa akses memadai pada perangkat digital tidak belajar sama sekali. Di sinilah istilah *learning loss* menemukan relevansinya: hilangnya kesempatan, keterampilan, dan kebiasaan belajar selama masa kritis.

Dampak dari kehilangan ini mulai terlihat nyata. Kasus siswa SMP yang tidak bisa membaca di beberapa daerah bukan hanya soal disleksia atau kebutuhan khusus, tetapi juga cerminan dari masa belajar yang terputus tanpa intervensi serius. Pemulihannya membutuhkan waktu, tenaga, dan pendekatan yang hati-hati. Bahkan di perguruan tinggi, dosen merasakan penurunan kualitas mahasiswa baru: kemampuan berpikir kritis, pemahaman bacaan, dan kesiapan akademik mereka berada di bawah standar yang diharapkan. Ini bukan kesalahan individu siswa semata, tetapi akibat langsung dari sistem yang kehilangan pijakan.

GURU INSPIRASI

Mengurai persoalan ini tidak bisa dimulai dari hilir. Penyembuhan harus dilakukan dari hulu, dan hulu pendidikan adalah guru. Teknologi, kurikulum, dan kebijakan sebesar apa pun tidak akan berdampak jika guru tidak menjadi titik pusat transformasi. Guru bukan hanya fasilitator, tetapi penentu arah berpikir, pembentuk motivasi, dan penggerak pengalaman belajar. Pandangan bahwa teknologi akan menggantikan peran guru adalah keliru; justru dalam era penuh distraksi digital, kehadiran guru yang bermakna menjadi semakin mendesak.

Membicarakan pembelajaran mendalam berarti berbicara tentang perubahan paradigma. Pendidikan tidak boleh lagi berhenti pada target menyelesaikan materi atau memenuhi administrasi. Pembelajaran harus menyentuh logika, rasa ingin tahu, kepekaan, dan kemampuan menerapkan pengetahuan. Murid perlu didorong untuk memahami, bukan hanya menuntaskan; berdialog, bukan sekadar mendengar; mencari makna, bukan mengumpulkan nilai. Tanpa dorongan ini, sekolah hanya menjadi tempat hadir fisik tanpa pertumbuhan intelektual.

Persoalan terbesar pendidikan kita bukan hanya lemahnya capaian, tetapi rendahnya keberanian untuk meninjau ulang cara belajar dan mengajar. Jika sekolah terus berjalan tanpa menghadirkan belajar yang sesungguhnya, maka kita sedang menyiapkan generasi yang hadir di ruang kelas tetapi absen dalam kesadaran berpikir. Masa depan pendidikan hanya bisa diselamatkan jika pendidikannya disiapkan, diperkuat, dan disadarkan akan peran strategisnya. Guru yang memahami makna pembelajaran mendalam akan melampaui soal-soal ujian dan kunci jawaban—dan mengembalikan pendidikan pada tujuan sejatinya: mencerdaskan, memanusiakan, dan menumbuhkan daya pikir.

Mengajar sejatinya adalah upaya menumbuhkan inspirasi, bukan sekadar memindahkan informasi. Pendidikan kehilangan makna ketika ruang belajar hanya menjadi tempat menjejali siswa dengan materi yang kaku dan hafalan tanpa jiwa. Mengajar yang menghidupkan imajinasi jauh lebih berdampak daripada mengajar yang menuntut jawaban benar semata. Ketika guru hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif yang dingin, pembelajaran berubah menjadi rutinitas yang membosankan dan miskin makna.

Masa remaja—khususnya di akhir SMP dan awal SMA—adalah periode kritis dalam perkembangan kognitif. Pada fase ini, kemampuan berpikir abstrak dan proposisional tumbuh pesat. Di saat itulah gagasan-gagasan besar, cita-cita tinggi, dan imajinasi masa depan mulai

mencari ruang untuk berkembang. Jika masa tersebut tidak dipenuhi dengan bacaan yang menggugah, dialog yang membangkitkan keberanian berpikir, atau pengalaman yang membuka cakrawala, maka potensi intelektual mereka akan menyempit. Sebaliknya, ketika seorang anak remaja membaca karya besar seperti *Di Bawah Bendera Revolusi* di usia SMA, pengalaman itu bisa menjadi benih ideologi, visi, dan keyakinan hidup yang bertahan lama.

Inspirasi dalam pendidikan bisa datang dari berbagai arah: dari seorang guru yang memberi teladan, dari buku yang mengguncang cara pandang, atau dari pengalaman yang tidak direncanakan. Tidak semua inspirasi muncul dari kelas formal. Kadang justru kehidupan nyata, interaksi sosial, petualangan intelektual, dan dialog ringan membuka lebih banyak ruang refleksi dibandingkan teks buku pelajaran.

Ada kisah tentang seorang dosen yang dikenal jarang masuk kelas, tetapi justru dicintai mahasiswa. Bukan karena absensinya, melainkan karena kejujurannya dan kualitas pengalaman yang ia bawa. Ia sejak awal memberi tahu mahasiswanya: jika ia bilang tidak masuk, maka jangan berharap ia hadir; jika ia bilang masuk, tetap cek kepastiannya sendiri. Namun absennya bukan pelarian—ia sering berada di seminar, konferensi, atau forum ilmiah lain. Yang menarik, cerita-cerita dari forum-forum itu justru lebih menggugah mahasiswa dibandingkan materi formal di kelas. Saat ia tiba setelah bepergian, mahasiswa meminta kisah dari perjalanannya: bertemu tokoh siapa, berbicara tentang apa, mendapatkan pelajaran apa. Cerita-cerita ini menghidupkan rasa ingin tahu, membuka bayangan masa depan, dan memberi inspirasi yang tak ditemukan dalam diktat kuliah.

Penghargaan akademik yang sesungguhnya lahir dari pengaruh, bukan jadwal kehadiran. Mahasiswa menjadikannya dosen favorit bukan karena ia mempermudah nilai, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam: motivasi, mimpi, dan relevansi hidup. Nilai akademik tetap baik, tetapi yang lebih penting adalah pengalaman belajar yang terasa otentik dan membekas.

Inspirasi juga punya perjalanan panjang. Dua puluh tahun setelah menyelesaikan pendidikan di Flinders University, ia diundang kembali sebagai “*Outstanding Alumni*.” Bukan karena gelarnya, tetapi karena peran dan kiprahnya di ruang publik: memimpin Badan Standar Nasional Pendidikan, menjadi Sekretaris Umum Muhammadiyah, dan hadir dalam wacana kebangsaan. Penghargaan itu membuktikan bahwa pembelajaran sejati tidak berhenti di ruang kuliah, melainkan tumbuh dalam perjalanan hidup yang dinamis.

Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan yang mengubah seseorang tidak tumbuh dari tekanan administratif atau kedisiplinan teknis semata. Ia tumbuh dari teladan yang menggerakkan, pengalaman yang membuka visi, dan inspirasi yang menghidupkan harapan. Mengajar yang menginspirasi adalah mengajak orang melihat dunia secara lebih luas, membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru, dan menemukan dirinya dalam proses itu

Ada satu peristiwa yang dengan sangat jelas menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan inspirasi dalam pendidikan. Seorang pemuda yang baru saja diwisuda, masih mengenakan toga dan pakaian kelulusannya, tiba-tiba memeluk sosok yang pernah menjadi dosennya. Bukan karena basa-basi, bukan pula karena formalitas. Ia melakukannya sebagai bentuk terima kasih yang lahir dari pengalaman batin yang mengubah jalan hidupnya.

Pemuda itu bercerita bahwa ia berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Sejak awal, cita-citanya adalah masuk Fakultas Kedokteran. Ia mencoba, tapi gagal. Agar tidak pulang kampung dan dianggap menyerah, ia memilih kuliah sementara di IAIN, sekadar “mengisi waktu” sebelum mencoba lagi. Tahun berikutnya ia ikut tes kedokteran untuk kedua kalinya, tetapi tetap tidak lolos. Di masa transisi itu, ia mengikuti mata kuliah dari salah satu dosen yang kini ia peluk dalam kebanggaan. Bukan materi tentang teori atau hafalan yang menyentuhnya, tapi kisah hidup sang dosen, perjalanan akademiknya, dan pengalaman belajar di luar negeri. Dari sanalah muncul kalimat kecil yang mengubah arah nasib: *yes, I can*.

Kalimat itu bukan sekadar slogan motivasi. Ia menjadi titik balik. Ia berhenti mengejar kedokteran dan memilih istiqamah menyelesaikan studi di kampus agamanya. Diam-diam ia menyimpan tekad: harus bisa seperti gurunya, harus bisa kuliah di luar negeri, harus bisa meraih kesempatan yang tampak jauh. Dan keyakinan itu akhirnya menjadi kenyataan. Ia diterima di Flinders University, Australia—di jurusan yang sama, dengan beasiswa penuh, bukan biaya orang tua. Kisah ini mengingatkan bahwa mengajar bukan soal mendikte atau menjejali murid dengan teori, melainkan menggerakkan hati dan menghidupkan keberanian.

TIGA PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Dari titik inilah refleksi lebih dalam tentang pendidikan menemukan konteksnya. Masalah terbesar dunia pendidikan kita sering bukan terletak pada kurangnya materi, tetapi pada dangkalnya pendekatan. Banyak orang membaca tanpa paham, belajar tanpa mengerti, dan menghafal tanpa pernah menikmati prosesnya. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena orientasi belajarnya hanya menyentuh permukaan. Pemahaman tentang *cognitive psychology* membuka sudut pandang baru. Ilmu ini membedakan pembelajaran kuantitatif dan kualitatif, mengingatkan bahwa cara belajar memengaruhi cara berpikir, dan cara berpikir menentukan kualitas hidup seseorang.

Dalam literatur pendidikan, dikenal tiga pendekatan utama: *surface learning*, *achievement learning*, dan *deep learning*. Yang pertama adalah pembelajaran dangkal—sebatas ikut kelas, menghafal seperlunya, mengejar kelulusan tanpa makna. Yang kedua berorientasi pada hasil, bukan proses. Tapi yang ketiga—*deep learning*—adalah inti dari pendidikan sejati: memahami dengan kedalaman, menghubungkan pengetahuan dengan realitas, dan menemukan makna dari apa yang dipelajari. Gagasan ini diperkuat oleh tulisan-tulisan seperti John Biggs dalam *The Process of Learning* dan kajian Martin Säljö tentang pendekatan kualitatif dalam pembelajaran. Dari situlah kesadaran muncul bahwa problem pendidikan bukan pada

kurangnya teori, tetapi pada hilangnya kedalaman.

Sayangnya, budaya belajar kita sering berhenti di tahap permukaan. Anak-anak membaca tanpa mengerti karena sejak awal mereka hanya diajarkan untuk lulus, bukan memahami. Sistem yang membuat semua siswa naik kelas tanpa evaluasi bermakna memperparah keadaan. Kita meniru negara seperti Finlandia hanya dari sisi kebijakan, bukan dari keseriusan belajar dan kedalaman budayanya. Akibatnya, kelas menjadi tempat hadir tanpa tujuan, bukan tempat tumbuhnya pemahaman.

Karena itu, inspirasi lebih kuat daripada instruksi. Teladan lebih menggugah daripada perintah. Ruang batin murid lebih mudah disentuh oleh pengalaman hidup dan kehangatan nilai daripada tumpukan teori. Pendidikan menemukan rohnya bukan ketika murid dijejali, tetapi ketika mereka diyakinkan bahwa mereka mampu. Momen kecil, kalimat sederhana, atau cerita personal kadang lebih berpengaruh daripada satu semester kuliah. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan transformasi cara pandang. Mengajar seharusnya menciptakan keberanian untuk tumbuh, bukan rasa takut gagal. Dan ketika seorang guru berhasil menyalakan keyakinan itu dalam diri muridnya—sekali saja—maka ia telah menunaikan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan materi.

Pembelajaran di banyak negara maju seperti Finlandia, Swedia, Australia, Kanada, dan Amerika telah bergerak ke arah *deep learning*. Pergeseran ini bukan sekadar mengikuti tren istilah baru, melainkan perubahan orientasi belajar secara fundamental. Sistem pendidikan mereka menyadari bahwa hafalan semata tidak cukup. Mengingat tetap penting, tetapi hanya jika disertai pemahaman dan konteks. Hafalan yang bermakna membuat pengetahuan hidup, bukan sekadar tumpukan kata yang diulang tanpa arti. Di masa lalu, beberapa pengalaman belajar agama misalnya, menunjukkan bahwa menghafal bisa menghasilkan pemahaman jika disertai penerapan, bukan sekadar menelan informasi mentah.

Masalah utama pendidikan kita hari ini adalah orientasinya masih terfokus pada angka, bukan pada ilmu. Sistem ini menilai siswa berdasarkan skor dan kesalahan, bukan kemampuan dan kemajuan. Pola pikir yang melihat dua kesalahan lebih besar daripada delapan jawaban benar menciptakan budaya mencari kekeliruan, bukan menguatkan kelebihan. Cara pandang seperti ini ikut membentuk masyarakat yang gemar mengkritik tanpa menghargai capaian, bahkan di luar lingkungan sekolah. Tidak mengherankan jika praktik mencontek menjadi hal biasa: siswa hanya diajari mencari jawaban benar, bukan memahami persoalan. Jika soal-soal disajikan dalam format hitam-putih, benar-salah, maka mencontek menjadi jalan pintas yang logis dalam sistem yang keliru.

Arah pendidikan kita memang perlu mengalami pergeseran mendasar. *Shift* di sini bukan berarti mengganti total, tetapi mengubah orientasi agar lebih bermakna. Selama ini, hafalan masih dianggap fondasi utama belajar. Padahal, menghafal tanpa memahami hanya menghasilkan kemampuan mengulang tanpa makna. Hafalan tetap dibutuhkan, tetapi harus menjadi menghafal yang bermakna, bukan sekadar *menghafal sing hafal tapi ora ngerti karepe*. Belajar Tajwid, iqra', atau mengenal *fiil madhi* dan *fiil mudhari* misalnya, memiliki makna ketika disertai pemahaman dan penerapan, bukan cuma sekadar melafalkan.

Budaya evaluasi pendidikan kita juga bermasalah. Sistem penilaian masih terjebak pada angka dan kesalahan, bukan pada proses dan capaian positif. Ketika seseorang menjawab benar delapan dari sepuluh soal, perhatian justru tertuju pada dua kesalahan seolah keberhasilan tak berarti. Semua yang benar diabaikan, sementara yang salah *diuyek-uyek*. Pola ini terbawa sampai ke ruang publik: prestasi pejabat yang besar bisa tertutup oleh satu kekeliruan kecil. Cara pandang seperti ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga membunuh semangat dan menyuburkan budaya menghakimi.

Dari kebiasaan melihat salah itulah lahir perilaku lain yang lebih serius, seperti nyontek. Ketika soal-soal hanya mengukur jawaban

benar atau salah, orang terdorong mencari jalan pintas. Temuan survei tentang tingginya praktik menyontek—hingga mendekati 98% mahasiswa—tidak bisa dilihat sebagai masalah moral belaka. Sistem pendidikan yang menekankan hasil ketimbang proses, kepatuhan ketimbang pemahaman, ikut menyumbang kondisi itu. Jika orientasi penilaian hanya soal benar-salah, integritas akan selalu berada di ruang abu-abu.

Karena itu, *shifting* dalam pendidikan bukan sekadar slogan. Ia menuntut perubahan cara melihat pengetahuan, cara memahami belajar, dan cara menghargai usaha. Tanpa pergeseran ini, kita akan terus menghasilkan generasi yang pandai menghafal tetapi tidak memahami, cepat menghakimi tetapi abai pada potensi, serta terbiasa mencari jawaban alih-alih membangun pengertian.

PENDEKATAN *DEEP LEARNING*

Dunia pendidikan perlu bergeser dari orientasi angka menuju orientasi ilmu. *Deep learning* menawarkan jalan keluar: belajar tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan dan membangun pengetahuan—*construction of knowledge*. Paradigma ini selaras dengan teori konstruktivisme, yang melihat belajar sebagai proses aktif mengolah informasi secara mendalam (*deep information processing*). Proses seperti ini membuat peserta didik mampu mengaitkan gagasan, memberi makna, dan menghasilkan pemahaman baru.

Sebagian orang kerap menyamakan *deep learning* dengan kecerdasan buatan karena istilahnya digunakan dalam konteks teknologi. Memang benar AI mengadopsi konsep serupa—mengumpulkan data, memberi makna, dan menghasilkan jawaban cepat. Namun teknologi tetap terbatas oleh input yang diterima. Tidak ada mesin yang bisa menggantikan guru dalam memberi konteks budaya, bahasa, motivasi, atau nilai. Ketika diminta menghasilkan pidato dalam bahasa Jawa, AI tak mampu menjawab karena tidak memiliki data yang cukup. Ini menunjukkan bahwa guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi pemberi arah makna.

Paradigma transformasi juga mengubah cara kita memandang materi pembelajaran. Mengajar bukan lagi soal menjejali murid dengan sebanyak mungkin informasi, tetapi memberikan materi esensial yang bisa dikembangkan dalam berbagai konteks. Fungsi guru tidak berhenti pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge, skill, and value*), tetapi bergerak ke proses transformasi. Dalam model ini, apa yang diterima siswa tidak harus keluar dalam bentuk yang sama. Informasi yang “masuk sebagai A” bisa dipahami sebagai B atau C setelah diolah, karena peserta didik diajak mengontekstualisasi pengetahuan sesuai pengalaman dan kebutuhan.

Belajar yang transformatif menjadikan materi sedikit tetapi hasil belajarnya luas. Ketika murid diberi kesempatan untuk membaca dan mengeksplorasi, mereka bisa menemukan hal-hal yang tidak ada di buku teks. Contohnya, membaca pemikiran Bung Karno atau Sjahrir mungkin tidak tercantum dalam silabus, tetapi murid yang diberi ruang dan motivasi bisa memperluas pengetahuan mereka secara mandiri. Di sinilah letak kekuatan *deep learning*: pendidikan tidak membatasi, tetapi membuka kemungkinan.

Jika pendidikan diarahkan ke bentuk yang lebih bermakna, budaya menyalahkan, mencontek, dan mengejar nilai sebagai tujuan utama akan perlahan memudar. Pembelajaran yang mengutamakan proses, konteks, dan kemampuan berpikir akan menghasilkan generasi yang tidak semata-mata mencari skor, tetapi mencari arti. Dan di titik itulah guru tetap menjadi aktor sentral—bukan sebagai pengisi kepala, tetapi sebagai pembuka jalan pengetahuan.

Gagasan penerapan *deep learning* dalam pendidikan tidak semestinya dipahami sebagai upaya mengurangi materi pelajaran. Yang perlu direduksi bukanlah isi materi, melainkan jumlah pokok bahasan agar pendalaman konsep menjadi lebih mungkin. Selama ini materi sering padat tetapi dangkal, sehingga siswa menghafal tanpa memahami. Dengan pembelajaran mendalam, pengetahuan tidak dipersempit, melainkan diurai agar inti konseptualnya dapat ditangkap secara lebih kuat dan berlapis.

Yang kerap luput disadari adalah bahwa tradisi pendidikan lokal sebenarnya telah lama mengembangkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip *deep learning*. Metode seperti **pe-nadhom-an**—membuat syair berstruktur rima untuk menghafal—merupakan contoh konkret bagaimana penguatan memori dan kedalaman pemahaman dibangun melalui bahasa, ritme, dan asosiasi. Dalam praktik ini, penghafalan bukan sekadar repetisi kosong, melainkan proses pembentukan rangkaian informasi yang saling terkait.

Contoh sederhana bisa dilihat pada cara hafalan urutan Nabi dan Rasul. Syair-syair seperti “*Hum Adamun, Idris, Nuh...*” disusun dalam pola bunyi tertentu, sehingga informasi tersimpan tidak hanya sebagai kata, tetapi sebagai alur, ritme, dan urutan. Ketika sebagian hafalan terlupa, rima dan alunan syair itu otomatis memicu ingatan. Inilah yang dalam teori kognitif modern disebut *retrieval clues*: petunjuk untuk memanggil kembali informasi yang tersimpan. Perbedaannya, tradisi lokal mengemasnya dalam bentuk nadham, bukan terminologi akademik.

Hal yang sama tampak dalam hafalan tajwid. Rumusan seperti “*wadrim bighunatin biyanmula...*” bukan sekadar nyanyian, tetapi formula pengetahuan yang sistematis. Di dalamnya terkandung aturan fonetik beserta contoh aplikasinya. Huruf-huruf seperti *ya’, nun, mim*, dan *ba’* tidak dikenalkan secara abstrak, tetapi dirajut dalam lirik yang mudah diingat. Ini menunjukkan bahwa tradisi pendidikan Islam Nusantara telah menggunakan teknik asosiasi, bunyi, dan struktur naratif jauh sebelum teori memori modern memberi istilah teknisnya.

Ironinya, warisan edukatif semacam ini sering tidak dihargai karena dianggap tidak modern. Banyak yang langsung menuduh pembelajaran mendalam sebagai konsep impor dari Barat, padahal akar praktiknya justru sudah eksis di lingkungan lokal. Yang hilang adalah pemaknaan dan pengembangan, bukan substansi. Ketika teori modern datang, masyarakat sering merasa asing terhadap sesuatu yang sebenarnya pernah mereka praktikkan dalam bentuk berbeda.

Keraguan sering muncul ketika referensi pendidikan modern mengutip literatur klasik dari dunia Islam. Ada anggapan bahwa mengutip teori Barat boleh, tetapi mengambil gagasan dari teks Arab seolah menyalahi kaidah akademik. Padahal, jika teori dari berbagai negara sah untuk diadopsi, maka warisan pedagogi Islam pun layak ditempatkan sejajar. Tradisi pendidikan di dunia Muslim memiliki sejarah panjang tentang metode hafalan, dialog, kreativitas linguistik, sampai pembelajaran berbasis makna. Menolak warisan ini hanya karena bentuknya tradisional menunjukkan bias yang menghambat kemajuan.

Dalam pengembangan dokumen akademik modern, rujukan pada karya seperti *Ta'lim al-Muta'allim* sesungguhnya memberi kekayaan perspektif. Penyebutan pemikiran para ulama dan tokoh pendidikan lokal menjembatani masa lalu dengan masa kini. Begitu pula pemikiran tokoh pendidikan nasional yang menekankan pendalaman karakter, keterkaitan pengalaman belajar, dan pembentukan kesadaran diri. Semua itu sejajar dengan semangat pembelajaran mendalam: menguatkan konsep, mengintegrasikan makna, dan menjadikan pengetahuan sebagai pengalaman hidup.

Karena itu, istilah “*deep learning*” sebaiknya tidak diposisikan sebagai label asing. Pilihan penyebutan ganda—pembelajaran mendalam dengan padanan *deep learning*—menegaskan bahwa konsep ini bisa ditanamkan dalam kerangka budaya sendiri. Identitas istilah tidak menjadi soal selama substansinya dikembangkan secara relevan dan berpijak pada kekayaan pengetahuan yang telah ada.

Tantangan terbesar bukan pada kurangnya tradisi, tetapi pada kegagalan memahami dan mengembangkannya. Dibutuhkan keberanian epistemologis untuk menghubungkan khazanah lokal dengan kerangka konseptual modern. Dengan begitu, pembaruan pendidikan bukan sekadar meniru, melainkan mengartikulasikan kembali apa yang pernah hidup dalam pengalaman belajar masyarakat. Pembelajaran mendalam tidak lahir dari kekosongan, melainkan bertumbuh dari kesadaran bahwa apa yang kita anggap lama bisa

menjadi landasan bagi masa depan jika dimaknai kembali dengan cara yang tepat.

MENINGKATKAN MUTU

Peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dilakukan di hilir dengan mengejar hasil belajar semata. Perubahan harus dimulai dari hulu: memperkuat kualitas guru dan membenahi pendekatan pengajaran. Pelatihan guru bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk membangun metode yang membuat peserta didik memahami, bukan sekadar menghafal. Ada pepatah Arab yang relevan: *At-Thariqah Ahammu Mina-l-Maddah*—metode lebih penting daripada materi. Sebab, ilmu yang diajarkan tanpa pemahaman tujuan hanya akan melahirkan kebingungan dan jarak antara murid dan realitas hidup mereka. Di sinilah pembelajaran mendalam menjadi penting untuk menciptakan murid yang terus belajar bahkan setelah keluar dari kelas, bukan hanya penampung informasi sementara.

Pengajaran seharusnya tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menjadi cara untuk menghubungkan ilmu dengan pengalaman dan konteks kehidupan. Pembelajaran mendalam memberi ruang bagi integrasi antardisiplin, menjadikan pelajaran relevan dan bermakna. Dengan model ini, murid memahami bahwa pelajaran bukan benda mati dalam buku ajar, tetapi alat untuk membaca dunia.

Ada kritik implisit terhadap cara lama mendidik melalui pengalaman masa kecil yang dikenang. Ketika seorang murid mendapatkan nilai jelek, misalnya nilai lima dalam matematika, respons gurunya justru bukan motivasi, melainkan hiburan yang menyepelekan pentingnya pelajaran itu. Niatnya mungkin baik, ingin mengurangi kesedihan murid, tetapi dampaknya jauh lebih dalam: pelajaran tertentu dianggap tidak berarti. Padahal, pendekatan seperti ini menutup pintu perbaikan. Jika menggunakan kacamata *growth mindset* ala Carol Dweck, kegagalan seharusnya dibingkai sebagai bagian dari proses belajar, bukan alasan untuk menyerah atau meremehkan ilmunya. Murid perlu diyakinkan bahwa mereka

bisa lebih baik, bahwa kesalahan adalah bagian dari kemajuan, bukan akhir dari kemampuan.

Matematika kemudian diangkat sebagai contoh paling konkret tentang bagaimana ilmu yang tampak teknis sebenarnya terjalin erat dengan kehidupan sosial, budaya, bahkan spiritual. Dalam praktik keberagamaan saja, matematika hadir dalam banyak bentuk: menghitung arah kiblat, menentukan derajat kemiringan arah salat, hingga penghitungan warisan yang diatur secara eksplisit dalam teks-teks hukum agama. Bahkan dalam gambaran eskatologis, analogi perhitungan amal menjadi simbol bahwa berpikir matematis tidak sepenuhnya asing dari kehidupan beragama. Pesan pentingnya jelas: pembelajaran mendalam memungkinkan murid melihat bahwa satu cabang ilmu punya keterkaitan dengan banyak bidang lainnya, sehingga pelajaran menjadi hidup dan tidak lagi terasa asing.

Dari sudut pandang kebijakan, pendekatan ini tidak bergantung pada kurikulum tertentu. Baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka tetap bisa dijalankan tanpa harus dipertentangkan atau diganti. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara mengajar, bukan sekadar perubahan dokumen kurikulum. Pembelajaran tematik dalam K-13, misalnya, dapat diperdalam dengan integrasi lintas ilmu, sementara Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi penerapan konsep dalam bentuk tugas atau proyek. Keduanya bisa dipadukan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman, relevansi, dan keberlanjutan belajar.

Jika metode dikuatkan, pelajaran akan berhenti menjadi beban administratif dan berubah menjadi pengalaman intelektual yang transformatif. Inilah inti dari membangun pendidikan yang tidak hanya mencetak nilai, tetapi membentuk cara berpikir. Pembelajaran yang baik bukan yang paling banyak memberi materi, tetapi yang menyalakan keingintahuan dan membuat murid terus belajar bahkan tanpa diminta.

Upaya memperbaiki kualitas pendidikan tidak akan pernah berhasil jika pembelajaran masih terjebak pada pola lama: guru sibuk

mengejar jam mengajar, murid ditinggalkan tanpa pendampingan, dan proses belajar direduksi menjadi aktivitas mekanis. Gagasan pembelajaran mendalam hadir sebagai koreksi terhadap realitas itu. Titik tolaknya jelas: ketika pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, hasilnya akan mengikuti; dan ketika kualitas proses meningkat, maka kualitas hasil belajar pun membaik. Karena itu, perbaikan tidak dimulai dari kurikulum atau jargon metodologis, tetapi dari manusianya—guru.

Kesejahteraan dan beban kerja guru menjadi prioritas yang akhirnya disentuh secara konkret. Sertifikasi telah dijadikan instrumen peningkatan pendapatan, sementara tunjangan guru honorer yang semula hanya satu setengah juta rupiah dinaikkan menjadi dua juta per bulan. Guru yang baru diangkat pun langsung menerima angka yang sama. Untuk guru PNS, sistem penyaluran hak tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah, tetapi langsung ditransfer ke rekening masing-masing agar tidak muncul keterlambatan atau potongan yang tidak jelas. Ini bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk keberpihakan.

Pembenahan juga menyentuh problem klasik: kewajiban mengajar tatap muka selama 24 jam per minggu. Beban seperti itu membuat guru kesulitan menyisihkan waktu untuk mendampingi murid secara emosional dan akademik. Kini, ketentuan minimum 16 jam membuka ruang bagi bentuk kerja lain—menjadi wali kelas, mengikuti pelatihan, dan aktif dalam kegiatan sosial—yang dapat dikonversi sebagai bagian dari jam kerja. Dengan langkah ini, guru tidak harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain hanya demi memenuhi angka jam. Murid akhirnya punya figur pendidik yang hadir dan fokus, bukan sosok yang sekadar datang lalu bergegas pergi.

Namun masalah guru tidak hanya soal beban, melainkan juga soal jarak dan distribusi. Tidak sedikit yang harus menempuh puluhan kilometer untuk mengajar, bahkan merangkap jabatan kepala sekolah di dua tempat sekaligus. Kondisi semacam ini tidak dapat lagi diterima sebagai kewajaran. Penempatan guru—baik PNS

maupun P3K—harus disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal agar efektivitas dan kemanusiaan berjalan seiring. Penugasan ke sekolah negeri maupun swasta sudah dimungkinkan melalui regulasi, tinggal implementasinya yang perlu memastikan guru tidak dikorbankan oleh sistem.

Di tengah pembenahan itu, muncul anggapan bahwa pembelajaran mendalam hanya istilah asing atau kurikulum impor. Padahal, esensinya bukan pada nama, melainkan pada misi: menghidupkan kembali praktik belajar yang memberi ruang bagi pemahaman, kreativitas, dan pengalaman bermakna. Teknologi menjadi penguat, bukan pengganti. Kehadiran Interactive Flat Panel (IFP) sebagai media ajar memberi peluang bagi guru untuk mengakses, mengunduh, dan menampilkan materi secara cerdas dan terarah. Pembelajaran bisa dibuat lebih produktif, tetapi prinsip dasar seperti menulis tangan tidak dihapus, melainkan dimodifikasi agar tetap relevan.

Transformasi metode belajar pun menjadi bagian penting. Jika penugasan hanya berupa soal benar-salah atau hafalan, maka peluang mencontek semakin besar dan nalar kritis tidak tumbuh. Tugas yang berbasis problem solving, analisis teks, dan penalaran kontekstual lebih mendorong murid memahami daripada menyalin. Ketika murid diminta membaca bacaan tertentu, lalu merangkumnya dalam bahasa sendiri dan menuliskannya dengan tangan, mereka tidak sekadar mengulang isi, tetapi mengolah dan menginterpretasi. Bahkan ketika membuka buku diperbolehkan, jawaban tidak tersedia secara eksplisit, sehingga murid tetap harus memahami isi bacaan, bukan mencarinya secara instan.

Permasalahan literasi dasar juga muncul ke permukaan. Ternyata tidak semua guru SD memahami cara mengajarkan membaca fungsional. Selama ini membaca sering dipahami hanya sebagai aktivitas melafalkan kata dengan suara keras, bukan memahami makna, menghubungkan informasi, dan menggunakan teks sebagai sumber penalaran. Karena itu, pelatihan guru Bahasa Indonesia dan

guru kelas awal menjadi krusial. Cara mengajarkan membaca terbukti menentukan minat dan kemampuan literasi anak. Tanpa intervensi, murid akan terus bergerak naik kelas tanpa pernah benar-benar mampu membaca secara fungsional.

Pembelajaran mendalam juga menantang pola lama dalam pemberian pekerjaan rumah. PR tidak lagi wajib berupa lembar soal atau hafalan, tetapi bisa berbentuk membaca buku, menulis cerita, atau aktivitas kreatif yang relevan dengan kehidupan sosial murid. Dengan pendekatan ini, kreativitas, imajinasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi tumbuh tanpa memutus keterhubungan anak dengan lingkungannya. Murid tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosialnya.

Jika semua elemen ini berjalan serentak—kesejahteraan guru, penataan distribusi, teknologi yang memadai, metode yang kontekstual, dan literasi yang diperkuat—maka pembelajaran mendalam tidak berhenti sebagai slogan. Ia menjadi ekosistem baru yang menghidupkan kembali pengalaman belajar sebagai sesuatu yang bermakna. Murid diurus, guru dimanusiakan, dan teknologi diarahkan, bukan dipuja. Pendidikan tidak lagi bergerak setengah hati, tetapi melangkah dengan tujuan yang disadari: menghadirkan proses belajar yang hidup, relevan, dan membebaskan.

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan posisi yang semakin strategis dan dipercaya berbagai kalangan. Banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, turut memberikan dukungan melalui kemitraan yang bersifat konstruktif, bukan sekadar seremonial. Dukungan ini bukan berbentuk pinjaman, melainkan kolaborasi yang mendorong penguatan kapasitas pendidikan, termasuk pengembangan *deep learning* sebagai fondasi pembelajaran masa depan.

Salah satu langkah penting yang tengah diarahkan adalah peningkatan kompetensi guru sekolah dasar melalui pelatihan bimbingan dan konseling. Gagasan bahwa setiap guru SD harus memiliki kemampuan dasar dalam pendampingan psikososial

menunjukkan kesadaran baru: pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membimbing perkembangan emosional dan karakter peserta didik. Jika terealisasi secara konsisten, pendekatan ini akan menjadi terobosan yang relevan dengan tantangan zaman.

Harapan besarnya adalah agar kebijakan-kebijakan ini menjadi pijakan menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas bukan hanya persoalan teknis birokrasi, tetapi juga komitmen moral untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih tercerahkan. Dengan dukungan yang tepat dan arah kebijakan yang jelas, peluang menuju perubahan yang lebih baik semakin terbuka.

34

Menyelamatkan Pendidikan dari Krisis Nilai:

Tusiyah Pendidikan Hari Pendidikan Nasional
Muhammadiyah Temanggung

Kamis, 22 Mei 2025

Pendidikan hari ini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan kurikulum dan administrasi. Upaya membangun generasi yang sehat lahir batin tidak cukup hanya dengan menghadirkan siswa di kelas, tetapi menuntut integrasi antara pembiasaan hidup sehat, penguatan karakter, dan nasionalisme sejak awal hari. Kegiatan seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu kebangsaan, dan doa bersama sebelum pelajaran bukan sekadar seremoni, melainkan fondasi pembentukan mental, kedisiplinan, dan rasa kebangsaan.

Pembelajaran yang berkualitas tidak bisa lagi didefinisikan sebagai proses yang berorientasi pada nilai, ujian, atau kelulusan. Di era disrupsi, orientasi pendidikan harus beralih pada penguasaan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter abad ke-21. Pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) bukanlah kurikulum baru, melainkan cara berpikir baru yang menekankan kemampuan berpikir kritis, pemaknaan, dan relevansi ilmu dalam kehidupan. Karena itu, perbedaan penerapan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka tidak boleh menjadi sumber kegelisahan, sebab esensinya bukan pada nama kurikulumnya, melainkan bagaimana proses belajar dijalankan.

TATANTANGAN PENDIDIKAN

Tantangan terbesar pendidikan saat ini justru datang dari konteks sosialnya: dunia yang penuh turbulensi, ketidakpastian, kompleksitas, dan kontradiksi. Era yang sering disebut VUCA atau TUNA menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya cepat, tetapi juga mengguncang cara lama dalam melihat realitas. Banyak nilai lama ditinggalkan, sementara nilai baru belum menemukan bentuknya. Kehidupan digital memperlebar jurang antargenerasi—ketika generasi yang dibesarkan dalam analog mencoba mendidik generasi digital dengan pola pikir masa lalu. Ketegangan ini terasa bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, di mana pola pendidikan tradisional sering berbenturan dengan karakter generasi muda yang tumbuh dalam dunia serba cepat dan cair.

Dalam suasana seperti ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan pola lama. Ia harus hadir sebagai ruang yang menjembatani perbedaan generasi, memperkuat identitas, dan menyiapkan anak-anak menghadapi masa depan yang tak pasti. Bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi membentuk manusia yang tangguh menghadapi perubahan dan tetap berpijak pada nilai-nilai yang memberi arah.

Tantangan dalam mendidik generasi masa kini tidak lagi dapat dijawab dengan cara lama. Banyak orang tua dari generasi sebelumnya—terutama generasi *baby boomer*—merasa heran ketika nilai-nilai yang ingin mereka wariskan justru disambut dingin atau bahkan ditolak oleh anak-anak mereka. Ketika orangtua menceritakan pengalaman masa kecil yang penuh keterbatasan—bersekolah dengan bersepeda puluhan kilometer, membantu orang tua di sawah, atau merawat ternak sejak pagi—yang mereka ingin sampaikan sebenarnya bukan romantisasi penderitaan, tetapi spirit perjuangan: bahwa kemajuan lahir dari keberanian menghadapi kesulitan. Namun, generasi muda kerap menjawab dengan sinis: “Apakah kami harus seperti itu juga?” Di titik ini, pesan yang diniatkan sebagai motivasi berubah menjadi kesan beban. Perbedaan tafsir inilah yang disebut sebagai *lost in translation*—pesan disampaikan dengan niat tertentu,

tetapi ditangkap dalam makna berbeda karena perubahan konteks dan cara pandang.

Di balik itu, ada kegelisahan yang lebih mendalam: cara mendidik yang diwariskan turun-temurun tak lagi sejalan dengan dunia yang dihadapi anak-anak. Kompleksitas masa kini bukan sekadar perbedaan zaman, tetapi perubahan struktur kehidupan yang disebut era VUCA atau TUNA—dunia yang serba tidak pasti, bergejolak, ambigu, dan sulit diprediksi. Di tengah perubahan ini, pendidikan sering terjebak dalam masa lalu, mengajarkan hal-hal yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hidup generasi mendatang. Harari dalam *21 Lessons for the 21st Century* bahkan menegaskan bahwa sebagian besar yang kita ajarkan hari ini mungkin tidak lagi berguna saat anak-anak itu dewasa. Pendidikan akhirnya terancam menjadi museum pengetahuan: penuh benda bernilai sejarah, tetapi tidak fungsional bagi masa depan.

Padahal, dalam tradisi Islam sendiri, telah lama ada kesadaran bahwa setiap generasi hidup dalam zamannya sendiri. Pesan populer yang sering dikaitkan dengan sahabat Nabi—“didiklah anakmu karena mereka hidup bukan di zamanmu”—menjadi peringatan agar pendidikan tidak mengulang masa lalu, tetapi menyiapkan masa depan. Jika kita bicara tentang visi Indonesia Emas 2045, maka yang sedang kita persiapkan bukan generasi sekarang yang sudah dewasa, tetapi anak-anak yang hari ini duduk di TK, SD, SMP, dan SMA. Dua puluh tahun lagi, mereka akan menjadi pemimpin, pekerja profesional, dan warga negara yang menentukan arah bangsa. Pertanyaannya: apakah pendidikan hari ini sudah membekali mereka untuk hidup dalam dunia yang belum kita kenal?

DUA BEKAL MENDASAR PENDIDIKAN

Untuk itu, pendidikan harus memberikan dua bekal mendasar. Pertama, kemampuan bertahan dan beradaptasi dalam realitas saat ini—baik secara emosional, intelektual, maupun sosial. Kedua, kapasitas untuk tetap bermakna dan memberi kontribusi pada masyarakat di masa depan. Dua bekal ini membutuhkan

keseimbangan antara konservasi nilai dan inovasi keterampilan. Kita tidak bisa hanya memproduksi tenaga kerja, tetapi juga manusia yang berkarakter dan berorientasi masa depan.

Di sinilah peran pendidikan sebagai penjaga keberlanjutan nilai menjadi penting. Ada hal-hal yang tidak boleh hilang: nilai-nilai agama, kebudayaan lokal, dan identitas kebangsaan. Nilai-nilai ini bukan sekadar dogma, tetapi penuntun moral dan perekat sosial yang mencegah keterputusan antar generasi. Tanpa pewarisan nilai, maka yang muncul bukan sekadar *generation gap*, tetapi *degenerasi*—terputusnya mata rantai karakter dan jati diri bangsa. Fenomena ini telah terjadi di banyak negara, di mana generasi muda hidup dalam dunia global tetapi kehilangan akar budaya dan spiritualitas.

Kisah para nabi dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa pendidikan nilai telah menjadi inti pembentukan generasi sejak dahulu. Nabi Yakub menanyakan kepada anak-anaknya: "Siapa yang akan kalian sembah setelah aku tiada?" Sebuah pertanyaan eksistensial yang menegaskan pentingnya pewarisan keyakinan dan arah hidup. Lukman menasihati anaknya agar tidak mempersekutukan Tuhan karena itu adalah bentuk kezaliman terbesar. Nilai-nilai semacam ini tidak hadir sebagai dogma masa lampau, melainkan panduan lintas zaman yang menjaga manusia dari kekosongan makna.

Tantangannya kini adalah bagaimana menyampaikan nilai-nilai tersebut dalam bahasa yang bisa diterima generasi digital. Bukan sekadar memaksa mereka meniru masa lalu, tetapi menerjemahkan hikmah lama dalam konteks baru. Pendidikan tidak boleh berhenti pada nostalgia, tetapi juga tidak boleh melepaskan jangkar identitas. Hanya dengan memadukan keduanya—nilai yang diwariskan dan keterampilan yang relevan—kita dapat memastikan bahwa generasi masa depan tidak sekadar hidup, tetapi juga berperan, bermakna, dan tetap menjadi dirinya sendiri di tengah perubahan yang tak terhindarkan.

Perubahan pola keberagamaan generasi masa kini semakin nyata dan terukur. Riset-riset kontemporer menunjukkan bahwa

agama tidak lagi menempati posisi sentral bagi sebagian besar anak muda. Jean M. Twenge dalam *iGen* menegaskan bahwa hanya sekitar 60 persen Generasi Z yang masih menganggap agama penting dalam hidup mereka. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cermin dari pergeseran cara pandang terhadap makna religiusitas. Bagi mereka, agama bukan lagi identitas yang melekat secara otomatis, melainkan sesuatu yang dinegosiasikan kembali sesuai nilai, pengalaman, dan logika hidup modern.

Di tengah fenomena ini, survei global Pi Research Development Centre (PiRDC) tahun 2015 mengingatkan bahwa realitas global keberagaman tidak bergerak seragam. Secara demografis, umat Kristiani masih menjadi kelompok agama terbesar di dunia jika kategori Kristen dan Katolik digabung seperti dalam sensus internasional. Namun tren pertumbuhan umat Islam tidak bisa diabaikan. Proyeksi hingga tahun 2050 menunjukkan bahwa jumlah umat Islam akan mendekati bahkan menyamai jumlah pemeluk Kristen. Ini bukan sekadar persoalan populasi, tetapi juga menandai pergeseran peta pengaruh budaya, politik, dan identitas global.

Dalam membaca pertemuan antaragama dan antarbudaya tersebut, para pemikir dunia menggambarannya dengan perspektif yang beragam. Samuel Huntington melihatnya sebagai panggung besar “benturan peradaban,” sementara Kishore Mahbubani menawarkan pandangan yang lebih dialektis: pertemuan budaya menghasilkan “konvergensi besar,” tetapi juga membuka ruang benturan nilai ketika perbedaan tidak terkelola. Konvergensi dapat terjadi ketika nilai-nilai bersama tumbuh dari perjumpaan, tetapi konflik muncul ketika nilai-nilai itu saling meniadakan atau tidak mampu bernegosiasi.

Mahbubani mencatat fenomena menarik yang mencerminkan perbedaan antara identitas nominal dan praktik keagamaan. Di beberapa negara Barat, terutama Eropa, banyak orang yang tetap mengaku beragama tetapi tidak lagi mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Prancis, hanya sekitar tiga persen penduduk yang rutin beribadah ke gereja. Inggris menunjukkan

tren serupa. Bahkan Italia—yang dikenal religius dan menjadi pusat tradisi Katolik—hanya mencatat sekitar 19 persen umat yang masih aktif ke gereja. Identitas agama di sana mulai bergeser menjadi simbol kultural, bukan praksis spiritual.

Sebaliknya, umat Islam menunjukkan dinamika yang berbeda. Tingkat ketaatan dalam praktik keagamaan masih sangat tinggi, bahkan di negara-negara minoritas. Masjid-masjid di Eropa dipadati jamaah, dan banyak gereja yang tutup kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Fenomena ini bukan semata simbol perubahan fungsi bangunan, tetapi juga menandai pergeseran pusat spiritualitas. Pengalaman di Den Haag, Belanda, menjadi ilustrasi konkret: Masjid Al-Hikmah yang kini digunakan oleh komunitas muslim sebelumnya adalah gereja, dan ornamen lamanya masih terpampang sebagai penanda sejarah peralihan simbol keagamaan.

Rangkaian fakta ini membuka perenungan yang lebih dalam. Keberagamaan global sedang menempuh jalur baru: di satu sisi, generasi muda mengalami distansi terhadap agama dalam makna tradisionalnya; di sisi lain, pertumbuhan komunitas yang tetap menjaga praktik kepercayaannya menunjukkan vitalitas yang berbeda. Identitas religius tidak lagi diukur dari pengakuan semata, tetapi dari keterikatan pada ajaran, ruang ibadah, dan komunalitas spiritual.

Di masa depan, ukuran kekuatan agama tidak hanya ditentukan oleh statistik populasi, tetapi oleh kemampuan tiap komunitas untuk merawat relevansi nilai, membangun kedekatan generasional, dan menafsirkan ulang ajaran tanpa kehilangan inti makna. Pergulatan antara konvergensi dan benturan nilai akan terus berjalan, dan bagaimana umat beragama merespons perubahan inilah yang akan menentukan wajah keberagamaan dunia ke depan.

Tantangan kehidupan beragama di era modern semakin kompleks, terutama ketika praktik keagamaan bersentuhan dengan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat Barat. Di sejumlah negara Eropa, penyembelihan hewan kurban bukan lagi soal keterbatasan jumlah hewan atau kesiapan komunitas Muslim,

melainkan tentang akses dan izin menjalankan ritual itu. Penolakan datang dari kelompok pembela hak hewan yang kini tidak hanya memperjuangkan *animal welfare*, tetapi juga *animal rights*—yakni gagasan bahwa binatang memiliki hak dasar yang harus dihormati layaknya manusia. Ketegangan muncul ketika keyakinan religius dipandang bertentangan dengan konsep etika baru yang berorientasi pada perlindungan makhluk hidup secara total. Di sinilah kebebasan beragama diuji dalam konteks masyarakat liberal yang sangat peka terhadap isu etis non-manusia.

Persoalan kurban ini sesungguhnya tidak eksklusif milik umat Islam. Yudaisme juga memiliki ajaran pengorbanan yang merujuk pada peristiwa Nabi Ibrahim. Perbedaan naratif antara Islam dan Yahudi, terutama soal siapa yang hendak dikurbankan—Ismail atau Ishak—telah berlangsung lama. Namun dari sudut kronologi sejarah, tradisi Islam menempatkan Ismail sebagai sosok yang diperintahkan untuk dikurbankan karena ia lahir lebih dahulu dibanding Ishak. Riwayat perjalanan Nabi Ibrahim menuju Mekah turut menguatkan narasi ini. Dalam versi yang berkembang di kalangan Yahudi, perpindahan itu digambarkan sebagai akibat kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Namun dalam pandangan Islam, hijrah ke Mekah adalah perintah Ilahi untuk memulai peradaban baru.

Jejak peristiwa itu kini terabadikan dalam ritual haji. Melontar jumrah bukan sekadar simbol melawan setan, tetapi juga penanda lokasi historis tempat Ismail dibaringkan sebelum perintah pengorbanan diganti oleh Allah. Artinya, praktik kurban bukan hanya seremoni, melainkan bagian dari kontinuitas sejarah, spiritualitas, dan identitas keagamaan. Justru karena itu, pembatasan terhadap ritual tersebut di ruang publik Barat mengandung dimensi yang lebih dalam: benturan antara akar tradisi dan penafsiran baru atas moralitas.

Namun persoalan agama kontemporer tidak berhenti pada urusan ritual. Ada tantangan yang bahkan lebih mendasar: krisis keterikatan terhadap institusi agama. Fenomena agnotisme semakin menonjol, terutama di kalangan generasi muda Eropa dan Amerika.

Mereka percaya kepada Tuhan, atau setidaknya pada dimensi spiritual tertentu, tetapi menolak menjadi bagian dari agama formal. Keyakinan ini dikenal sebagai *believing without belonging*—percaya tanpa ingin terikat. Mereka menolak doktrin, struktur kelembagaan, dan batas identitas keagamaan, karena agama dipandang terlalu normatif, eksklusif, atau tidak relevan dengan kehidupan modern.

Bersamaan dengan itu, ateisme juga tumbuh, tetapi tidak seagresif agnotisme. Kaum agnostik modern membentuk semacam spiritualitas baru yang cair, personal, dan bebas komitmen. Mereka bukan orang yang kehilangan iman, melainkan orang yang memilih menjaga jarak dari sistem keyakinan yang mapan. Di sinilah muncul ironi zaman: agama tetap hidup sebagai pengalaman batin, tetapi melemah sebagai institusi sosial.

Jika kondisi ini terus berkembang, agama menghadapi dua tantangan sekaligus: pengekanan terhadap ekspresi lahiriah dari luar, dan pengikisan keterikatan dari dalam. Di satu sisi, ritual-ritual keagamaan ditekan oleh debat etika baru seperti hak hewan. Di sisi lain, generasi muda menciptakan pola keberagamaan tanpa komunitas, tanpa simbol, dan tanpa loyalitas. Pertanyaan besar pun lahir: mampukah agama merespons tekanan modernitas tanpa kehilangan ruhnya, serta beradaptasi pada dunia yang memberi ruang bagi iman, tetapi tidak lagi peduli pada keanggotaan?

Dalam lanskap seperti ini, persoalan bukan hanya soal pembelaan hak menjalankan ritual, tetapi juga bagaimana agama menjaga relevansi dan kedekatannya dengan manusia yang kini lebih memilih kebebasan personal daripada keterikatan komunal.

Ada kegelisahan yang semakin nyata ketika menyaksikan bagaimana generasi muda kini berhadapan dengan ketidakpastian dan kerancuan makna tentang agama, identitas, dan masa depan. Kisah ringan dalam sebuah jamuan makan malam di Helsinki justru mampu memotret kegoyahan itu secara halus namun kuat. Seorang diplomat Finlandia pernah mengalami turbulensi hebat saat terbang

dari Eropa ke Afrika. Dalam momen genting itu, ia berdoa dengan menyebut nama Tuhan dari semua agama yang ia tahu. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab enteng: barangkali dari sekian banyak Tuhan itu, ada satu yang bersedia mengabulkan doanya. Jawaban sederhana itu menggambarkan bukan sekadar sikap lucu, tetapi keadaan batin yang gamang—sebuah bentuk agnostisisme cair yang lahir bukan dari penolakan, melainkan dari ketercerabutan makna. Keimanan menjadi sesuatu yang relatif, dan keyakinan berubah menjadi cadangan darurat ketika hidup terasa mengancam.

Situasi seperti ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang semakin dipenuhi ketidakpastian. Generasi muda tumbuh dalam zaman yang menjanjikan masa depan tetapi tidak memberi pegangan yang jelas. Ambiguitas memperlebar jarak mereka dari tradisi spiritual maupun kebudayaan. Di sinilah warisan nilai—agama, budaya, dan kebangsaan—menjadi kebutuhan yang bukan lagi simbolik, tetapi eksistensial.

Pengalaman lain di Brussel memberi perspektif sebaliknya: justru orang luar melihat kelebihan yang sering diabaikan anak bangsa. Dua puluh remaja dari Uni Eropa datang ke Indonesia dalam kunjungan dua minggu melalui program pemerintah. Setelah berkeliling dan bertemu berbagai komunitas, mereka menyampaikan kesan-kesan mereka. Dua di antaranya berkata ingin memiliki sesuatu seperti Pancasila di negara mereka—sebuah pedoman nilai yang bisa mempersatukan masyarakat yang majemuk. Pernyataan ini menarik karena lahir dari pengamatan langsung, bukan doktrin. Mereka melihat Pancasila bukan sebagai slogan, tetapi sebagai realitas hidup yang menghadirkan keteraturan di tengah keberagaman.

Ironinya, di dalam negeri justru muncul suara-suara yang menuduh nasionalisme bertentangan dengan agama. Padahal jika menengok khazanah agama itu sendiri, teks suci berbicara tentang tanah, negeri, dan ruang hidup manusia. Al-Qur'an mengenal istilah balad, dar, dan qariah—semuanya merujuk pada wilayah, komunitas, atau negara. Bahkan ada surat Al-Balad yang menegaskan kaitan

spiritual dengan tanah tempat manusia berpijak. Cinta tanah air bukanlah produk sekuler, melainkan bagian dari fitrah keberagamaan.

Bogor Message—hasil pertemuan seratus ulama dunia—juga menegaskan hal ini. Dari tujuh nilai utama wasatiyah Islam yang dirumuskan, yang ketujuh adalah wathoniyah: kecintaan pada tanah air dan masyarakat tempat seseorang hidup. Artinya, pengabdian pada bangsa bukan pelengkap, melainkan bagian dari praktik keagamaan itu sendiri.

Muhammadiyah telah lama memberi teladan konkret. Dengan mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial, mereka tidak sekadar berdakwah, tetapi membangun peradaban. Cita-cita *baladatun tayyibatun wa rabbun ghafur*—negeri yang baik, maju, bersih, sehat, dan dirahmati—diwujudkan melalui kerja nyata. Nilai agama dan kebangsaan tidak ditempatkan sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan dua simpul yang saling menguatkan.

PENDIDIKAN: PEWARISAN DAN PEMAJUAN

Dalam konteks itulah pendidikan harus memikul dua mandat besar. Pertama, sebagai wahana pewarisan. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan teknis, tetapi harus menanamkan nilai dasar yang membentuk karakter dan jati diri kolektif. Tanpa itu, generasi masa depan hanya akan tumbuh sebagai individu kompeten yang kehilangan akar.

Kedua, pendidikan harus bersifat progresif. Kita tidak sedang mendidik anak untuk hidup di masa kini, tetapi untuk bertahan dan berperan di tahun 2035, 2045, bahkan melampaui itu. Akan seperti apa alam, teknologi, ekonomi, dan relasi sosial pada masa itu? Apa bekal yang harus dimiliki agar mereka tidak menjadi korban zaman, melainkan aktor yang mampu memberi arah? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih fundamental daripada sekadar mengejar kurikulum atau angka kelulusan.

Warisan nilai dan orientasi masa depan bukan dua agenda yang terpisah, tetapi satu kontinum yang menentukan keberlanjutan

sebuah bangsa. Tanpa nilai, masa depan kehilangan arah. Tanpa pandangan ke depan, nilai hanya menjadi nostalgia. Pendidikan hari ini harus mampu menjembatani keduanya jika kita ingin generasi mendatang tumbuh bukan sekadar hidup, tetapi memimpin.

Membaca masa depan bukan sekadar menebak arah dunia, tetapi memahami perubahan besar yang kini sudah terlihat jejaknya. Pergeseran demografi global, misalnya, memperlihatkan bagaimana India kini menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia, menyalip Tiongkok. Realitas ini tidak muncul tiba-tiba. Tidak adanya kebijakan keluarga berencana, tingginya angka aborsi selektif terhadap janin perempuan, serta budaya sosial yang masih bias gender membentuk struktur kependudukan yang unik. Perempuan di India dianggap sebagai beban karena tradisi lama menempatkan mereka sebagai pihak yang melamar dan membiayai dalam pernikahan, sementara laki-laki menjadi pihak yang menikmati hasil. Rumor bahwa India mempertimbangkan kembali sistem kasta menunjukkan bahwa negara itu tengah menghadapi kesulitan sosial yang kompleks.

Di sisi lain, pertumbuhan populasi muslim di India yang tidak mengalami penurunan karena minim kebijakan pembatasan kelahiran diperkirakan akan membuat negara tersebut memiliki jumlah muslim terbesar di dunia pada 2050, menggeser posisi Indonesia. Pergeseran ini bukan semata soal statistik, tetapi juga cerminan lemahnya regenerasi keagamaan di negeri ini. Dua faktor disebut sebagai penyebab: keberhasilan keluarga berencana dan terjadinya kemunduran spiritual atau keterputusan generasi muda dari tradisi agama. Tantangan pendidikan hari ini bukan hanya mencetak murid cerdas, tetapi memastikan anak-anak tumbuh dengan iman, akhlak mulia, dan relevansi spiritual yang tidak tergerus zaman.

Pada saat yang sama, muncul fenomena generasi yang secara emosional rapuh meski hidup dalam fasilitas yang lebih baik. Istilah “generasi stroberi” menggambarkan anak muda yang terlihat kuat dari luar, tetapi mudah retak ketika menghadapi tekanan. Lebih jauh, muncul fenomena “generasi barcode”, yaitu anak-anak yang melukai

diri sebagai bentuk ekspresi duka atau jalan keluar dari masalah yang tak mampu mereka kelola. Angka bunuh diri di kalangan remaja terus meningkat di beberapa wilayah perkotaan, menjadi pertanda bahwa sekolah dan keluarga gagal menjadi ruang perlindungan emosional.

Dalam situasi semacam ini, pendidikan tidak bisa lagi dipersempit menjadi urusan kurikulum, RPP, dan ujian. Guru tidak boleh berhenti pada tugas administratif seperti menyampaikan materi, membuat perangkat pembelajaran, dan memberi nilai. Undang-undang sebenarnya telah menetapkan lima tugas utama: menyiapkan materi, mengajar, menilai, membimbing, dan mengembangkan diri. Namun yang sering berjalan hanya tiga yang pertama. Karena itu, kebijakan pendidikan terbaru mendorong perubahan cara kerja guru: RPP tidak lagi perlu dibuat rumit, laporan tidak harus diunggah sendiri, dan jam mengajar tatap muka tidak harus 24 jam. Guru cukup mengajar minimal 16 jam per minggu, sementara delapan jam lainnya bisa dipenuhi dengan kegiatan pendampingan murid, pelatihan, atau keterlibatan sosial.

Pendekatan baru ini menggeser paradigma guru dari sekadar pengajar menjadi pendamping kehidupan. Candaan tentang “guru Ebiet G. Ade” yang berpindah dari pintu ke pintu demi memenuhi jam mengajar menjadi kritik atas sistem lama yang memaksa guru mengejar angka, bukan makna. Ke depan, yang lebih dibutuhkan adalah guru yang hadir untuk murid: mendengar, membimbing, dan menjadi tempat berbagi masalah. Apalagi riset menunjukkan bahwa anak-anak generasi Z lebih banyak mencurahkan persoalan mereka kepada teman sebaya. Masalahnya, jika teman sebaya juga tidak siap secara mental, curhat hanya menjadi gema dari kebingungan bersama.

Ketika dunia berubah cepat, agama, karakter, dan kesehatan mental tidak boleh menjadi pelengkap, tetapi menjadi inti dari pendidikan. Tugas besar pendidikan hari ini adalah membuat agama kembali menarik dan relevan, bukan sekadar doktrin. Anak-anak perlu dituntun agar tetap merasa terhubung secara spiritual, sosial, dan emosional. Jika bangsa ingin kuat menghadapi masa depan,

sekolah tidak boleh hanya menjadi ruang belajar, tetapi rumah kedua tempat murid merasa ditumbuhkan, bukan diarahkan mekanis. Dunia 2050 mungkin penuh perubahan, tetapi masa depan tidak pernah meninggalkan mereka yang disiapkan secara utuh—akalnya, imannya, dan keberaniannya menghadapi hidup.

Tantangan pendidikan masa kini tidak lagi sesederhana mengajarkan pengetahuan dan memastikan peserta didik lulus ujian. Ada kebutuhan mendesak untuk menata ulang orientasi pembelajaran agar selaras dengan perubahan sosial, teknologi, dan dunia kerja. Penanaman karakter tetap menjadi fondasi penting, tetapi tidak boleh berdiri sendiri tanpa ditopang keterampilan yang relevan. Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pribadi berakhlak, mereka juga harus mampu bertahan dan bersaing di tengah derasnya transformasi global.

HARD & SOFT SKILL

Di tengah dinamika itu, muncul perbedaan mendasar antara hard skill dan soft skill. Hard skill dipandang sebagai keterampilan teknis yang relatif mudah dipelajari, bahkan tanpa pendidikan formal. Contohnya, seseorang bisa menjadi montir atau teknisi tanpa harus menempuh pendidikan di SMK. Pelatihan singkat, pengalaman langsung, atau belajar mandiri sering kali cukup untuk menguasai aspek teknis. Jika sekolah hanya fokus pada keterampilan jenis ini, maka eksistensinya mudah tergeser oleh kursus, lembaga pelatihan kilat, atau bahkan pembelajaran daring. Artinya, lembaga pendidikan tidak bisa hanya menjadi “pabrik keterampilan teknis” yang mudah digantikan.

Justru soft skill yang menjadi pembeda utama. Kemampuan ini mencakup kecakapan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan keberhasilan individu: komunikasi, kerja sama, empati, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan adaptasi. Menanamkan soft skill jauh lebih sulit dibanding mengajarkan keterampilan teknis, karena membutuhkan pembiasaan, pengalaman sosial, kedewasaan emosional, dan lingkungan belajar yang suportif. Inilah alasan

mengapa sekolah, guru, dan kurikulum harus memberi ruang bagi pembelajaran yang lebih reflektif, partisipatif, dan kolaboratif.

Pentingnya soft skill juga tercermin dari daftar keterampilan masa depan yang disusun World Economic Forum. Selama lima tahun terakhir, ada empat kemampuan yang selalu muncul sebagai kebutuhan utama: kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Keempatnya disebut sebagai keterampilan abad ke-21—modal dasar menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat. Namun memasuki periode 2020–2025, muncul tambahan tuntutan yang lebih kompleks. Cognitive flexibility menjadi penting karena individu harus mampu berpindah cara berpikir mengikuti konteks. Problem solving—terutama dalam situasi yang rumit dan tidak terduga—menjadi tuntutan tak terhindarkan. Kemampuan negosiasi juga semakin dibutuhkan karena interaksi sosial, ekonomi, dan politik semakin berlapis. Selain itu, keterampilan menyelesaikan masalah sosial muncul sebagai dimensi baru akibat kompleksitas kehidupan komunitas yang tidak bisa lagi dijawab dengan logika teknis semata.

Semua ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di sekolah tidak akan pernah cukup jika pembelajaran hanya bersifat repetitif dan kuratif. Sekolah harus menjadi ruang untuk menyiapkan murid melampaui apa yang tertulis di buku teks, bukan hanya menyelesaikan materi. Kenyataan dunia industri dan teknologi jauh lebih cepat berubah dibanding ritme kurikulum formal.

Perubahan perangkat teknologi menjadi gambaran konkret tentang lompatan perkembangan zaman. Dua dekade lalu, telepon genggam hanya bisa menelepon dan menyimpan sedikit kontak. Kini, smartphone menjadi pusat komando kehidupan. Dalam hitungan detik, seseorang bisa mencari rumah makan terbaik di suatu daerah hanya dengan bertanya pada aplikasi atau asisten digital. Rekomendasi, penilaian, peta, dan pengalaman orang lain semua tersedia. Bahkan keputusan sederhana seperti mencari makanan atau menentukan lokasi bergantung pada teknologi. Hal yang dulu

mengandalkan interaksi langsung kini bermigrasi ke layar dan sinyal.

Namun ketergantungan pada teknologi tetap memiliki celah. Internet, GPS, dan perangkat digital bergantung pada sinyal dan satelit. Saat layanan terganggu, manusia dipaksa kembali pada keterampilan dasar: bertanya, berkomunikasi, membaca situasi, dan memahami lingkungan sekitar. Artinya, kecerdasan digital saja tidak cukup tanpa kecakapan sosial dan kemampuan adaptif.

Pada akhirnya, arah pendidikan masa depan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan. Pembelajaran harus menumbuhkan kemampuan melampaui apa yang dipelajari secara formal. Dunia berubah lebih cepat dari kurikulum mana pun, dan manusia hanya bisa bertahan jika mampu bernegosiasi dengan perubahan itu. Soft skill, kreativitas, fleksibilitas kognitif, dan pemecahan masalah sosial bukan sekadar pelengkap, tetapi inti dari pendidikan yang visioner. Sekolah harus menjadi tempat untuk menempa manusia yang utuh: berkarakter, adaptif, kritis, dan siap menghadapi dunia yang tidak bisa ditebak.

Dalam membangun generasi masa depan, teknologi memang tidak bisa dipinggirkan. Tetapi fokus tunggal pada kecakapan teknis sering membuat kita lupa bahwa kemampuan sosial adalah pilar penting yang menopang kehidupan manusia. Pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak anak-anak yang mahir menggunakan gawai, tetapi juga pribadi yang mampu berinteraksi, berempati, dan bekerja sama. Dari situlah kreativitas tumbuh—bukan dari ruang tertutup yang hanya berisi perangkat teknologi, tetapi dari pertemuan antara ide, pengalaman, dan kepekaan sosial.

Jika ditarik dari kacamata teologis, manusia sejatinya telah diberi teladan untuk menjadi makhluk kreatif. Allah digambarkan sebagai *fatir*, Tuhan yang mencipta dengan kekayaan imajinasi yang tak terbatas. Alam semesta membuktikan itu: ragam tumbuhan, jenis hewan, dan keunikan ciptaan tak pernah berulang dalam bentuk yang sama. Setiap daun, burung, dan biji memiliki karakternya sendiri. Keberagaman itu bukan hanya tanda kekuasaan Tuhan, tetapi juga

“kurikulum diam” yang mengajari manusia tentang pentingnya orisinalitas dan kreasi.

Manusia dibekali akal dan hati—dua instrumen utama yang memungkinkan lahirnya peradaban. Akal membimbing proses berpikir, merancang, dan menalar. Hati membantu merasakan, memahami, dan menjaga keseimbangan. Dari sinilah kreativitas mendapat roh. Sesuatu yang sederhana seperti singkong pun bisa berubah menjadi berbagai bentuk makanan bernilai jika disentuh oleh imajinasi. Tanpa kreativitas, ia hanya direbus, digoreng, atau dijadikan gethuk. Tetapi ketika nalar bekerja, singkong bisa menjadi pangan olahan, produk ekonomi, bahkan simbol budaya.

Namun kreativitas tidak cukup tanpa sikap kritis. Al-Quran secara tegas mengajak manusia berpikir dan tidak menjadi peniru buta. Ajakan untuk menggunakan akal—dalam bentuk pertanyaan, perenungan, dan teguran—muncul berulang kali. Pesan ini memberi fondasi bahwa pendidikan tidak boleh mencetak manusia yang hanya “membebek” atau mengikuti tanpa memahami. Anak-anak perlu diasah agar mampu bertanya, menguji, dan melihat dunia lebih jauh dari permukaannya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk melampaui kebiasaan, bukan sekadar mengafirmasi apa yang sudah ada.

Di sisi lain, Al-Quran juga memberi pelajaran penting tentang relevansi konteks dalam pembelajaran. Unta dijadikan objek refleksi bukan karena hewan itu paling istimewa, melainkan karena ia hidup dalam lanskap sosial orang Arab. Kurma disebut, bukan mangga, sebab itulah yang tumbuh di tanah mereka. Pesan yang ingin disampaikan jelas: pendidikan harus menyentuh realitas hidup peserta didik. Apa yang mereka lihat, alami, dan kenali harus menjadi pintu masuk pengetahuan.

Sayangnya, praktik pendidikan kita sering berjalan berlawanan arah. Anak-anak yang tinggal di dataran tinggi dipaksa mempelajari jaringan komputer, sementara kehidupan mereka berputar di ladang dan hutan. Mereka yang tumbuh di kebun teh diarahkan masuk

jurusan otomotif, bukan pengolahan komoditas lokal. Sekolah kejuruan lebih sering mengikuti tren industrialisasi kota daripada kebutuhan ekologis wilayahnya. Akibatnya, pendidikan kehilangan daya relevan dan terasa menggantung di udara.

Membekali anak-anak dengan keterampilan kreatif dan nalar kritis berarti memberi mereka kemampuan bertahan dan berkembang. Tetapi itu tidak cukup jika pendidikan terlepas dari tanah tempat mereka berdiri. Lingkungan hidup, budaya lokal, dan potensi ekonomi daerah harus menjadi bagian dari desain pembelajaran. Jika tidak, sekolah hanya akan mencetak generasi yang pandai secara administratif tetapi gagap menghadapi kenyataan.

FITRAH MANUSIA: KREATIF

Tantangan pendidikan hari ini bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menumbuhkan manusia yang utuh: kreatif, kritis, kontekstual, dan adaptif. Mereka harus mampu membaca zaman tanpa lupa membaca lingkungan. Sebab peradaban tidak pernah hadir dari tiruan, melainkan dari keberanian mengolah apa yang dekat, memikirkan yang jauh, dan mencipta yang baru.

Dalam membekali generasi masa depan, teknologi memang patut diajarkan, tetapi keterampilan sosial tidak boleh ditinggalkan. Anak-anak membutuhkan bukan hanya kecakapan mengoperasikan perangkat modern, tetapi juga kemampuan berinteraksi, memahami lingkungan, dan mengembangkan daya cipta. Kreativitas lahir ketika akal, imajinasi, pengalaman sosial, dan kepekaan batin saling bertemu.

Jika dilihat dengan pendekatan teologis, manusia sejatinya diajari untuk menjadi makhluk yang kreatif. Allah adalah *Al-Fāṭir*, Tuhan yang Maha Mencipta dengan keluasan daya cipta yang tak terbatas. Alam semesta menjadi saksi keberagaman kreativitas tersebut: tidak ada tumbuhan yang benar-benar sama, tidak ada burung yang sepenuhnya identik. Ragam ciptaan itu bukan hanya tanda kebesaran-Nya, tetapi juga isyarat bahwa manusia—sebagai hamba-Nya—didorong untuk meniru jejak kekreatifan itu dalam kehidupannya.

Allah membekali manusia dengan akal dan hati—dua instrumen dasar yang menjadi fondasi peradaban. Lewat akal, manusia berpikir, merancang, dan menemukan. Dengan hati, manusia merasakan, menyadari, dan mempertimbangkan. Dari kombinasi keduanya lahir kreativitas yang nyata. Hal sederhana seperti singkong bisa menjadi beragam olahan makanan ketika disentuh oleh ide-ide kreatif. Tanpa itu, singkong hanya menjadi rebusan, gorengan, atau sekadar blanggem. Kreativitas memungkinkan sesuatu yang biasa berubah menjadi bernilai dan bermakna.

Namun kreativitas tidak berdiri tanpa nalar kritis. Al-Qur'an berkali-kali mengingatkan manusia agar tidak menjadi peniru tanpa pertimbangan. Sikap "mem-bebek" atau "mem-beo" adalah kebalikan dari kemuliaan akal. Karena itu muncul seruan tajam untuk berpikir, merenung, dan menelaah. Salah satu pengingat yang kuat berbunyi: "tidakkah kau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat." Pertanyaan ini merupakan dorongan untuk mengamati, memahami, dan menggali hikmah dari ciptaan. Setelah itu, muncul lanjutan pesan: "*fadzakir inama anta muzakir*" — ingatkanlah, karena tugasmu memang mengingatkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesadaran harus ditularkan, dan pemikiran harus dihidupkan dalam masyarakat.

Salah satu contoh penting adalah perintah untuk memperhatikan ciptaan Allah: "*afalā yanzurūna ilal-ibili kaifa khuliqat, wa ilas-samā'i kaifa rufi'at*". Perintah ini bukan sekadar kontemplasi spiritual, tetapi pelajaran metodologis: berpikir harus berangkat dari realitas yang dikenali. Unta menjadi objek refleksi karena ia bagian dari kehidupan masyarakat Arab. Begitu pula kurma disebut dalam Al-Qur'an karena itulah yang tumbuh di tanah mereka. Tidak ada pembahasan tentang mangga atau tembakau karena keduanya berada di luar konteks budaya dan ekologi saat itu.

Pelajaran ini sangat relevan bagi dunia pendidikan kita. Jika Al-Qur'an saja memberikan contoh pendidikan yang kontekstual, maka sekolah mestinya mengikuti prinsip yang sama. Pendidikan seharusnya

mengakar pada lingkungan sosial dan alam di mana anak-anak hidup. Ironinya, banyak sekolah hari ini justru menjauh dari keseharian peserta didiknya. Anak-anak di pegunungan dipaksa mempelajari jaringan komputer, sementara lingkungan hidup mereka berputar pada hasil bumi. Mereka yang tinggal di perkebunan teh diarahkan ke jurusan otomotif, bukan pada pengolahan atau pengembangan komoditas lokal.

Jika pendidikan ingin menguatkan kemandirian, maka ia harus membekali anak-anak dengan kreativitas, nalar kritis, dan kedekatan dengan realitas. Membentuk generasi yang bisa tafakkur dan berkreasi berarti membebaskan mereka dari budaya meniru buta. Mereka harus diajak melihat potensi lingkungan, memahami kebutuhan zaman, dan mencipta dari apa yang ada di sekeliling mereka. Peradaban tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari keberanian berpikir, membaca konteks, dan mencipta sesuatu yang baru. Pendidikan yang sejati bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menghidupkan akal, mengasah hati, dan menghubungkan manusia dengan dunia tempat ia berpijak.

Korea Selatan pernah dianggap negara kecil yang tak punya masa depan karena posisinya terjepit antara dua raksasa: Jepang dan Cina. Namun negara yang dulu diremehkan—atau istilahnya “diprank”—itu justru melesat menjadi kekuatan ekonomi dan budaya dunia karena menempatkan pendidikan sebagai poros utamanya. Di Pulau Jeju, pendidikan tidak dipisahkan dari konteks alam dan tradisi. Anak-anak belajar apa yang ada di sekitar mereka, bukan hanya menghafal kurikulum yang abstrak. Gubernur Jeju bahkan menekankan bagaimana pendekatan pendidikan yang dekat dengan alam telah menjadi basis penguatan identitas lokal.

Hasilnya terlihat nyata. Korea Selatan mampu mengeksport produk yang akarnya berasal dari tradisi: **ginseng dan kimchi**. Ginseng tidak hanya dijual sebagai tanaman; ia diolah, dicampur madu, dikemas modern, dan dipromosikan sebagai komoditas kesehatan global. Begitu pula dengan kimchi, yang berbahan dasar cabbage (kol yang disuir, bukan kol bulat), diolah melalui fermentasi,

lalu dipasarkan sebagai makanan yang melancarkan pencernaan dan mencegah kegemukan. Branding ini diperkuat dengan fakta sosial: masyarakat Korea dikenal berpostur tubuh langsing, atletis, dan jarang ditemukan yang gemuk. Tradisi mereka bukan hanya dipertahankan, tetapi diindustrikan melalui pendidikan yang visioner.

Kontras dengan itu, Indonesia memiliki **jahe**—potensi besar dari alam sendiri. Namun kita tidak mampu menyebut diri sebagai “negara jahe”, apalagi mengolahnya menjadi identitas ekonomi. Salah satu produk minuman merek **Jahmer** justru mengakui bahwa bahan bakunya masih **impor dari Cina** karena suplai lokal tidak mencukupi. Ini mengindikasikan keterputusan antara pendidikan, keterampilan, dan alam tempat masyarakat hidup. Anak-anak tidak dilatih mengenali nilai ekonomis dari potensi lokal, apalagi mengembangkannya menjadi kebanggaan bangsa.

Potensi itu semakin tergerus ketika strategi pemasaran tidak diajarkan secara tepat. Anekdota tentang secangkir kopi menunjukkan ironi ini: ketika dijual di warung seharga **Rp50.000**, orang akan mengeluh “*kopi sak uplik ngene kok seket?*”. Tetapi harga yang sama dianggap wajar jika ditawarkan di coffee shop bergaya modern—karena dibungkus dengan citra dan pengalaman baru. Ini menandakan bahwa keterampilan branding dan pemasaran harus menjadi bagian dari pendidikan, bukan pelengkap belakangan.

PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Pada level institusi, **Muhammadiyah memegang 10% lembaga pendidikan di Indonesia**. Dari seluruh siswa nasional—misalnya jika ada **10 juta murid**—maka sekitar **1.058.000 di antaranya** belajar di sekolah Muhammadiyah. Ini kekuatan besar yang dapat mengubah arah pendidikan nasional. Namun potensi itu bisa kehilangan daya dorong jika pengelolanya tidak memiliki visi. Masih ada sekolah Muhammadiyah yang berdiri di atas tanah luas, berusia lama, tetapi **tidak memiliki murid**. Ketika ditanya alasannya, pengelolanya justru menjawab santai sambil “*cengengesan*”: “karena kami sudah berhasil, Pak.” Sikap seperti ini menunjukkan absennya motivasi dan

kepemimpinan transformasional di sebagian pengelola.

Pendidikan seharusnya mengajarkan keterampilan hidup berbasis potensi alam dan tradisi. Jika Korea bisa mengangkat ginseng dan kimchi menjadi ikon global, mengapa Indonesia tidak mampu melakukan hal yang sama terhadap jahe, kopi, rempah, atau pangan lokal lainnya? Pertanyaannya bukan lagi soal sumber daya, tetapi soal bagaimana pendidikan membangun kesadaran, kebanggaan, dan keterampilan untuk mengolahnya.

Selama sekolah mencetak lulusan yang tidak mengenal tanahnya sendiri, kita akan terus menjadi pasar bagi produk bangsa lain—bahkan untuk bahan yang tumbuh di halaman sendiri. Sebaliknya, jika pendidikan dikaitkan dengan alam, tradisi, dan pemasaran modern, maka kekayaan lokal bisa menjadi sumber kemandirian dan identitas global. Korea sudah membuktikannya. Indonesia baru akan menyusul jika kesungguhan menggantikan kelalaian, dan visi menggantikan cengengesan.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak boleh berjalan dengan cara yang biasa-biasa saja. Di tengah banyaknya pilihan pendidikan, bertahan hanya mungkin jika sekolah punya **distingi**—ciri pembeda yang nyata dan relevan. Distingi bukan sekadar kata pemanis, tetapi keunikan yang membuat masyarakat merasa perlu datang. Sama seperti istilah *high distinction* dalam dunia akademik, sekolah Muhammadiyah tidak dituntut untuk sempurna dalam segala hal, tetapi harus berada di atas rata-rata. Menjadi “*above average*” adalah syarat minimum agar tidak tenggelam dalam arus kesamaan yang mematikan.

Ada banyak contoh sekolah yang fasilitasnya megah, gratis biaya, seragam disediakan, bahkan sepeda pun dikasih, tapi tetap tidak diminati. Persoalannya bukan pada materi, melainkan karena tidak ada karakter yang membedakan. Sekolah Muhammadiyah akan kehilangan daya tarik jika hanya menjadi sekolah yang lazim—serupa dengan yang lain dan tidak menawarkan nilai lebih. Maka setiap sekolah harus membaca kebutuhan masyarakatnya: apa yang mereka

cari, apa yang bisa dipenuhi, dan bagaimana menjadikannya sebagai identitas. Karena itu, sekolah Muhammadiyah tidak perlu seragam dalam format; justru keberagaman distingsi bisa menjadi kekuatan ketika dibangun dari konteks lokal.

Distingsi juga menjadi jalan keluar dari apa yang disebut sebagai *tragedy of the common*—keadaan di mana semua tampak biasa karena terlalu mirip sampai akhirnya tidak dianggap penting. Kreativitas menjadi mutlak. Sekolah Muhammadiyah harus mampu melahirkan ide-ide yang menjawab kebutuhan zaman dan harapan orang tua, sekaligus membentuk generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil. Bukan cukup menyelenggarakan pendidikan, tapi menghadirkan keunikan yang hidup dan dicari.

Semangat ini sejalan dengan pelajaran dari masa kebangkitan nasional. Para elit Budi Utomo adalah kelompok terdidik, tetapi mereka bukan elit yang elitis. Mereka tidak menjadi golongan yang merasa tinggi lalu enggan bersentuhan dengan rakyat kecil. Dengan bahasa Jawa yang lugas pernah disindir: *“nek serawung, iki ra gelem serawung karo sing ngisore”*—ada elit yang merasa tak pantas bergaul dengan yang dianggap di bawahnya. Bahkan ada ungkapan sindiran, *“serawung karo Abdul Mu’ti waelah, ora level.”* Sikap seperti itu menggambarkan elit yang elitis: tinggi hati dan tercerabut dari tanggung jawab sosial.

Para pendiri Budi Utomo justru menunjukkan kebalikannya. Mereka punya keistimewaan pendidikan, tetapi memaknainya sebagai amanah untuk melayani kaum alit. Itulah jiwa kebangkitan yang relevan bagi Muhammadiyah: menjadi unggul tanpa menjauh, berbeda tanpa menyombongkan diri, maju tanpa kehilangan rasa kepedulian.

Karena itu, sekolah Muhammadiyah tidak boleh menjadi ruang pencetak generasi elitis. Distingsi bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memastikan kebermaknaan sosial. Sekolah Muhammadiyah harus menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter kuat, peka pada lingkungan, dan siap melayani masyarakat.

Selama distingsi itu tumbuh dari kebutuhan riil dan semangat pengabdian, Muhammadiyah akan terus punya tempat, pengaruh, dan harapan.

Ada satu kisah yang menunjukkan bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang dianggap tidak menjanjikan. Dulu ada sebuah SD Muhammadiyah di Temanggung yang nyaris tak dilirik. Sekolah itu dianggap “gak mutu” dan tidak diminati. Namun suatu saat muncul gagasan sederhana tetapi kuat: sekolah itu harus di-*branding* ulang menjadi SD unggulan. Perubahan bukan dimulai dari gedung atau kurikulum, tetapi dari keberanian membayangkan masa depan yang berbeda.

Langkah pertama yang diambil sangat tidak biasa. Kepala sekolah baru dipilih dari orang yang bukan guru, melainkan mantan staf *humas* hotel. Latar belakang ini justru membawa perspektif segar. Ia paham pentingnya *marketing*, citra, dan kepercayaan publik. Pertanyaan mendasar yang ia ajukan bukan soal kurikulum, tetapi soal kebutuhan masyarakat: “sekolah ini kurang apa? masyarakat perlu apa?” Jawabannya mengerucut pada kebutuhan fasilitas antar-jemput siswa—sesuatu yang di daerah dianggap mewah dan belum lazim.

Masalahnya, PDM “ora duwe duit”. Keinginan menyediakan mobil antar-jemput terbentur anggaran. Tetapi kepercayaan sosial menjadi kunci. Mereka mendatangi sebuah bengkel milik warga Tionghoa yang memiliki mobil bekas. Ketika pihak Muhammadiyah menyampaikan niatnya, pemilik bengkel merespons dengan penuh keyakinan, “Ya sudah, bawa aja kalau Muhammadiyah.” Saat ditanya “bayare piye?”, ia menjawab, “ora usah mikir, pokoke Muhammadiyah aku yakin ora bakal ngemplang.” Mobil itu pun dibawa tanpa transaksi rumit. Inilah bentuk *social capital* yang bekerja lebih kuat daripada dana bantuan formal.

Dengan hadirnya mobil itu, citra sekolah berubah total. Di sebuah kota kecil seperti Temanggung, sekolah antar jemput terdengar “keren”. Kepala sekolahnya pun berpenampilan rapi dan penuh percaya diri, selayaknya mantan *public relations* hotel. Dari

situ, antusiasme warga mulai tumbuh. Branding bukan jadi slogan kosong, tetapi tampilan yang dapat dilihat dan dirasakan.

Semangat untuk tumbuh kemudian berlanjut pada dorongan prestasi. Salah satu murid dikirim mengikuti olimpiade matematika. Tak hanya ikut, siswa ini berhasil masuk final tingkat nasional. Namun proses menuju sana bukan hanya soal latihan soal. Suasana yang tercipta memperlihatkan perpaduan ikhtiar akademik dan spiritual. Gurunya mengajarkan cara menjawab pertanyaan, sementara di rumah orang tuanya mengadakan tahlilan dan istighosah supaya sang anak diberi kelancaran. Di titik ini, ikhtiar dan doa berjaln dalam harmoni.

Yang menarik, murid tersebut berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU), tetapi ia menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Kepercayaan lintas ormas Islam muncul secara alami, tanpa perlu deklarasi kerjasama formal. Orang tua NU menitipkan anaknya kepada sekolah Muhammadiyah tanpa rasa canggung, karena yang dicari bukan label, tapi masa depan.

Pada akhirnya, menang atau tidak di olimpiade menjadi hal sekunder. Yang lebih penting adalah martabat sekolah yang terangkat, rasa percaya masyarakat yang tumbuh, dan terbukanya jalan baru bagi anak-anak desa untuk bermimpi lebih tinggi. Dari situ muncul kesadaran bahwa membangun pendidikan tidak harus selalu dimulai dari fasilitas mewah atau bantuan negara, tetapi dari keberanian untuk berimajinasi dan mengambil risiko.

Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana relasi NU dan Muhammadiyah bisa bergerak secara produktif. Jika keduanya diibaratkan dua sayap burung garuda, maka keduanya harus mengepak bersama agar bangsa ini bisa terbang tinggi. Di level nasional, gambaran ini juga tercermin di kabinet sekarang—ada Gus Ipul sebagai representasi NU dan Abdul Mu'ti sebagai Sekum Muhammadiyah. Bahkan disebut bahwa dalam rapat-rapat kabinet, Presiden atau pejabat tinggi sering menanyakan, “Gus Ipul mana? Muhammadiyah mana?” sebagai tanda bahwa kehadiran kedua unsur

ini dipandang penting.

Harapannya sederhana tapi fundamental: umat Islam rukun, Muhammadiyah dan NU saling menguatkan, dan semua agama di Indonesia berjalan harmonis. Persatuan bukan berarti menyeragamkan, melainkan merayakan kebhinekaan dengan saling percaya. Kekuatan bangsa ini tidak terletak pada satu kelompok, tetapi pada kemampuannya menjadikan keberagaman sebagai modal kolektif.

Dari satu sekolah kecil di Temanggung, kita belajar bahwa perubahan sosial besar bisa dimulai dari langkah yang tampak sepele. Selama ada keberanian, kolaborasi, dan kepercayaan, sesuatu yang dulu dianggap “gak mutu” pun bisa menjadi kebanggaan bersama.

Melestarikan Bahasa Ibu, Memperkuat Kebudayaan Bangsa:

Nesia dan Tiga Sahabat Berpetualang di Negeri Garuda

Senin, 26 Mei 2025

Bahasa ibu bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga jiwa yang menghidupkan kebudayaan bangsa. Di dalamnya tersimpan rasa, kekuatan, dan kedalaman makna yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh bahasa lain. Setiap kata, setiap ungkapan, dan bahkan setiap intonasi, membawa “rasa bahasa” atau *dhauk* yang lahir dari sejarah panjang, nilai-nilai, dan pengalaman kolektif masyarakat penuturnya. Inilah sebabnya bahasa ibu layak ditempatkan sebagai bagian penting dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia.

Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, kita menghadapi paradoks. Banyak orang mulai merasa bahwa menggunakan bahasa daerah adalah tanda keterbelakangan, sementara bahasa asing justru dipandang sebagai simbol kemajuan dan status sosial. Fenomena ini, bila dibiarkan, dapat mengikis akar budaya kita. Padahal bangsa yang kehilangan bahasa ibunya akan kesulitan menjaga jati dirinya. Bahasa bukan hanya alat tukar kata, tetapi juga wadah ekspresi yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan memahami dunia.

Prinsip *Trigatra Bahasa*—mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing—sesungguhnya menawarkan keseimbangan. Bahasa Indonesia menjadi perekat bangsa, bahasa asing membuka jendela menuju dunia global,

dan bahasa daerah menjaga akar budaya kita. Jika salah satunya terabaikan, maka keseimbangan itu runtuh. Kita bisa menjadi bangsa yang pandai berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi kehilangan kedalaman rasa dalam rumah kita sendiri.

Contoh konkret bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah ungkapan Jawa seperti *“oyo ngunuta wong menteri kok dianggo dolanan”* bukan hanya kalimat biasa; di dalamnya ada rasa humor, kritik sosial, sekaligus kearifan yang hanya hidup dalam konteks budaya Jawa. Demikian pula lagu daerah Papua, *Apuse kokon dao, Yarabe soren doreri*, ketika dinyanyikan dalam bahasa aslinya menghadirkan getaran yang menyatu dengan sejarah dan tanahnya. Tetapi begitu diterjemahkan ke bahasa lain, nuansa emosionalnya lenyap. Sama halnya dengan pertunjukan wayang kulit yang bila dibawakan bukan dalam bahasa Jawa, seakan kehilangan ruhnya.

KEKAYAAN BAHASA DAERAH

Kekayaan bahasa daerah juga menegaskan kehebatan bangsa Indonesia. Ribuan bahasa yang kita miliki adalah bukti keberagaman sekaligus kekuatan. Namun kekayaan ini hanya akan berarti jika kita mampu merawatnya. Tidak cukup sekadar menganggapnya sebagai warisan; bahasa ibu harus dihidupkan dalam percakapan sehari-hari, dalam pendidikan, dalam karya seni, dan dalam ruang-ruang publik. Tanpa itu, bahasa akan perlahan terkikis hingga akhirnya punah.

Melestarikan bahasa ibu bukan tugas individu semata, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui kebijakan, sekolah melalui pendidikan, tokoh masyarakat melalui teladan, dan generasi muda melalui kreativitasnya harus bersatu dalam menjaga bahasa daerah tetap hidup. Jika kita mampu membangun kesadaran kolektif, bahasa ibu tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang di era digital dan global saat ini.

Bahasa adalah rasa. Dan rasa itu hanya hadir dalam bahasa aslinya. Maka menjaga bahasa ibu berarti menjaga rasa, menjaga warisan, dan menjaga jati diri bangsa. Jika kita benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar di mata dunia, langkah pertama adalah

tidak melupakan bahasa ibu kita sendiri.

Bahasa daerah di Indonesia kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan: sebagian mulai punah, sebagian lagi terancam kehilangan penuturnya. Persoalan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan jargon pelestarian. Bahasa tidak cukup untuk disimpan dalam buku dokumentasi atau sekadar dikenang di acara seremoni. Bahasa harus tetap hidup, digunakan, dan berkembang dalam ruang ekspresi masyarakat. Di sinilah pentingnya menjadikan bahasa daerah hadir dalam bentuk-bentuk kreatif yang dekat dengan kehidupan, misalnya melalui lagu daerah, cerita rakyat modern, atau media populer yang disukai generasi muda. Dengan begitu, bahasa tidak hanya dilestarikan, tetapi juga benar-benar dicintai dan diteruskan.

Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan yang luar biasa: 718 bahasa daerah yang membentuk mosaik kebudayaan Nusantara. Kekayaan ini tidak dimiliki bangsa lain manapun di dunia. Inilah fondasi yang membuat semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* nyata adanya, bukan sekadar slogan. Bahasa daerah adalah puncak peradaban dan hasil kebudayaan yang tumbuh dari setiap wilayah di tanah air. Ia adalah identitas lokal sekaligus pilar kebangsaan. Jika bahasa daerah punah, hilang pula sebagian dari jati diri Indonesia.

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Karena itu, peran pendidikan menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara serius, baik melalui kurikulum muatan lokal di sekolah maupun melalui jalur *hidden curriculum*. Jika kurikulum formal tidak memungkinkan, maka ruang informal bisa dimanfaatkan. Anak-anak, misalnya, bisa diajak menggunakan bahasa daerah di luar kelas: saat istirahat, di kantin, atau saat bermain. Bahasa juga dapat diekspresikan dalam perilaku, bukan sekadar ungkapan lisan. Dengan cara ini, bahasa daerah hadir bukan hanya sebagai kata, tetapi juga sebagai laku dan perbuatan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat*: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu.

Dari tujuh kebiasaan itu, aspek “bermasyarakat” membuka peluang luas untuk mengintegrasikan nilai-nilai kedaerahan. Contoh konkret sudah ditunjukkan di Yogyakarta, di mana kebiasaan bermasyarakat diterjemahkan dalam konteks budaya lokal, sehingga nilai dan identitas daerah tetap diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah bisa masuk ke ruang pendidikan bukan hanya sebagai pelajaran, tetapi juga sebagai praktik kehidupan sehari-hari anak-anak.

Pelestarian bahasa daerah tidak bisa berhenti pada simbol atau acara peringatan. Ia harus dikuatkan dengan kebijakan daerah yang menjadikan bahasa ibu bagian dari ekosistem sekolah, kegiatan masyarakat, dan ruang kebudayaan. Dengan begitu, anak-anak tetap tumbuh sebagai bagian dari komunitas global, namun tanpa kehilangan identitas daerahnya. Justru dari kedaerahan inilah Indonesia menjadi semakin kuat.

Menjaga bahasa daerah berarti menjaga jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah alat untuk memperkokoh persatuan tanpa menghapus perbedaan. Jika kita sungguh berkomitmen pada *Bhinneka Tunggal Ika*, maka pelestarian bahasa ibu harus dipahami sebagai upaya memperkuat keindonesiaan itu sendiri. Sebab, bahasa daerah bukan sekadar warisan, melainkan ruh kebudayaan yang membuat Indonesia tetap kokoh, beragam, dan bermartabat.

Meneguhkan Fondasi Masa Depan Pendidikan Indonesia:

Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional

Senin, 26 Mei 2025

Hari Pendidikan Nasional tahun ini terasa istimewa karena memberi ruang untuk melihat kembali langkah-langkah yang telah ditempuh dan arah besar yang hendak dituju. Dalam enam bulan terakhir, upaya membangun pendidikan dasar dan menengah mulai menunjukkan hasil. Fondasi awal sudah ditanam, apresiasi mulai berdatangan, dan yang lebih penting, ada keyakinan bahwa perjalanan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah gerakan yang sungguh-sungguh berusaha melahirkan perubahan.

Namun, pendidikan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Capaian yang ada hari ini lahir dari gotong-royong lintas sektor: kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, bahkan masyarakat sipil. Kolaborasi ini memberi arti bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab birokrat, tetapi kerja bersama seluruh elemen bangsa. Justru di titik inilah kita melihat modal sosial paling penting: kesediaan untuk menanggung pekerjaan besar secara kolektif, agar apa yang dirintis bisa terus berlanjut dan berakar kuat.

Perjalanan ini, tentu, bukan tanpa hambatan. Kadang langkah cepat menimbulkan kegelisahan, kadang gagasan baru dipandang kontroversial. Tetapi semangat yang dibawa adalah keberanian untuk bergerak. Seperti pepatah Jawa, *alon-alon waton kelakon*, setiap langkah kecil yang konsisten akan mengantarkan kita pada tujuan. Di

saat yang sama, ada kalanya kita harus melangkah lebih cepat, *cepat-cepet nanging tetep prayitna*—bergerak gesit, tetapi tetap hati-hati, penuh perhitungan. Perpaduan antara kesabaran dan keberanian inilah yang membuat gerak pendidikan tidak hanya responsif, tetapi juga berjangka panjang.

Apa yang paling penting dari enam bulan pertama ini bukan sekadar apresiasi yang diterima, melainkan *pondasi kang ora kena obah*—landasan yang tidak boleh goyah. Pondasi inilah yang akan menentukan apakah pendidikan Indonesia mampu berdiri kokoh menghadapi tantangan zaman. Dari sini lahir visi jangka panjang: membangun sumber daya manusia unggul, mengembangkan sains dan teknologi, dan menumbuhkan bangsa yang berprestasi. Semua itu bukan proyek semalam, melainkan warisan untuk generasi mendatang.

Malam tasyakuran ini tidak bisa dibaca hanya sebagai seremoni belaka. Ia adalah pengingat bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang harus terus ditempuh dengan semangat sukacita, kerja sama, dan dedikasi. Bekerja dengan gembira ternyata bukan hanya menambah energi, tetapi juga mengubah suasana kerja menjadi ladang inspirasi. Dan dari situlah lahir keyakinan bahwa meski jalan masih panjang, fondasi sudah kokoh, dan arah sudah jelas. Tinggal bagaimana kita menjaga semangat itu agar tak lekang oleh waktu. Pendidikan adalah janji, dan janji itu harus ditepati bagi anak-anak Indonesia yang berhak atas masa depan yang lebih baik.

Bulan Mei dijadikan sebagai bulan pendidikan, sebuah langkah simbolis namun sarat makna untuk mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah atau pemerintah, melainkan sebuah agenda kolektif yang membutuhkan partisipasi semua kalangan. Dengan menjadikannya bulan khusus, berbagai kegiatan pun digelar untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam menciptakan pendidikan yang bermutu bagi semua anak bangsa. Momentum ini juga menjadi ruang refleksi: sejauh mana pendidikan kita telah berjalan, siapa saja yang sudah berkontribusi, dan bagaimana upaya

ini bisa terus diperkuat di masa depan.

Di sela perayaan tersebut, hadir kisah inspiratif tentang Profesor Wardiman Djojonegoro, seorang tokoh pendidikan yang sebentar lagi akan menginjak usia 91 tahun. Cerita ini mengalir hangat ketika ia ditanya bagaimana bisa tetap segar bugar meski usia sudah lanjut. Jawabannya sederhana tetapi penuh makna: karena ia menjadi pembina Yayasan Putri Indonesia. Ada nuansa humor sekaligus filosofi di balik cerita itu—bahwa pengabdian, kerja ikhlas, dan interaksi yang membahagiakan bisa memberi energi panjang umur. Kisah ini bukan sekadar anekdot, tetapi sebuah pengingat bahwa semangat melayani dan memberi makna pada hidup adalah kunci kebugaran dan keteguhan hati.

Apresiasi juga diberikan kepada para mitra lintas kementerian dan lembaga yang selama ini ikut menopang program pendidikan. Dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, BKN, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kementerian Perhubungan, Kominfo, hingga berbagai kementerian lainnya menjadi bukti bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Semua pihak bekerja bersama, berlandaskan arahan presiden yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Retret kabinet di Magelang menjadi penegasan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan kerja kolektif adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan program pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan.

Tidak kalah penting, penghargaan yang diberikan kepada para pemenang malam itu menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi nyata yang telah mereka persembahkan. Mungkin penghargaan yang disampaikan kementerian tampak sederhana, namun maknanya sangat besar karena menjadi simbol penghormatan terhadap kerja keras yang tidak ternilai. Lebih dari sekadar seremoni, penghargaan ini adalah pesan bahwa setiap sumbangsih dalam dunia pendidikan, sekecil apa pun, adalah bagian penting dari perjalanan besar bangsa.

Semua ini merangkai satu pesan yang kuat: pendidikan adalah kerja bersama. Ia membutuhkan pengabdian pribadi yang tulus,

sinergi antar-lembaga, apresiasi atas kerja keras, serta komitmen untuk terus melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dirintis. Harapannya, kerja sama yang ada tidak berhenti pada batas waktu atau momen tertentu, melainkan berlanjut dan menguat agar pendidikan Indonesia bisa semakin maju, merata, dan berkualitas.

ARAH BARU PENDIDIKAN

Pendidikan kita sedang bergerak menuju arah baru yang lebih ambisius dan penuh terobosan. Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah program wajib belajar 13 tahun. Tidak lagi sebatas sembilan atau dua belas tahun, program ini menegaskan bahwa pendidikan harus dimulai sejak taman kanak-kanak dan berlanjut hingga tuntas di sekolah menengah atas. Ini adalah amanat besar dari Presiden, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk menempuh jalur pendidikan yang lebih panjang dan lebih matang. Dengan demikian, kesempatan anak-anak Indonesia untuk memperoleh bekal hidup yang memadai semakin terjamin.

Di sisi lain, peningkatan kualitas dan kualifikasi guru menjadi agenda yang benar-benar strategis. Kita semua tahu bahwa sehebat apa pun kurikulum atau fasilitas, kualitas pembelajaran tetap ditentukan oleh guru. Karena itu, tahun depan direncanakan pelatihan besar-besaran untuk guru PPG, dengan target luar biasa: lebih dari 806 ribu guru akan mengikuti pelatihan pada tahun 2025. Ini bukan angka kecil, dan jika benar-benar terlaksana, akan menjadi salah satu langkah pembaruan paling masif dalam sejarah pendidikan kita. Tujuannya jelas: menghadirkan guru yang lebih profesional, lebih adaptif, dan lebih siap mendidik generasi muda di tengah tantangan zaman.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembangunan fisik sekolah. Melalui program revitalisasi, ada rencana pembangunan dan perbaikan lebih dari 10.440 sekolah, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Mekanisme transfer langsung ke sekolah dipilih

agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat sekaligus menghemat anggaran. Cara ini sekaligus menegaskan semangat efisiensi: pendidikan tidak hanya soal visi besar, tetapi juga bagaimana mengelola dana publik secara tepat dan efektif untuk kepentingan siswa dan guru.

Transformasi lain yang tak kalah penting adalah digitalisasi pendidikan. Pemerintah mulai melangkah dengan konsep *smart classroom*, yang direncanakan secara bertahap akan hadir di sekitar 315 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Meskipun tidak semuanya bisa diwujudkan sekaligus pada tahun ini, fondasi awal sudah mulai dibangun. Digitalisasi ini akan menjadi pintu masuk bagi sekolah-sekolah untuk masuk ke dunia pembelajaran modern, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu agar siswa lebih siap menghadapi tantangan global.

Reformasi juga menyentuh proses penerimaan murid baru. Sistem baru, yakni SPMB, sudah diperkenalkan dan mulai diuji coba di beberapa daerah. Model ini diharapkan memberi peluang penerimaan siswa yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di samping itu, pemerintah menyiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk menggantikan Ujian Nasional. Perubahan ini mencerminkan arah baru: penilaian tidak lagi sekadar menjadi ujian kelulusan, melainkan alat ukur yang lebih bermakna untuk melihat kemampuan siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun untuk menyiapkan diri masuk dunia kerja.

Ke depan, arah pembelajaran pun akan bergeser. Program pembelajaran mendalam atau *deep learning* mulai diluncurkan pada tahun ajaran 2025–2026. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami secara mendalam, mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, dan melatih keterampilan berpikir kritis. Saat ini, para guru sudah mulai disiapkan melalui berbagai pelatihan, sehingga ketika tiba waktunya mereka siap menerapkan metode baru ini.

Yang lebih menarik, kurikulum kini mulai berani memasukkan mata pelajaran masa depan: coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Kedua bidang ini akan diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan, dan beberapa sekolah yang sudah siap akan mulai melaksanakannya. Persiapan teknis, naskah akademik, uji publik, hingga pelatihan guru telah dilakukan. Ini langkah visioner: Indonesia tidak boleh tertinggal dalam arus globalisasi teknologi. Jika generasi muda sejak dini sudah terbiasa dengan coding dan AI, maka mereka akan lebih percaya diri bersaing di era digital.

Rangkaian program ini bukan sekadar daftar kegiatan rutin pemerintah. Ia mencerminkan sebuah arah besar: pendidikan yang lebih panjang, guru yang lebih profesional, sekolah yang lebih modern, sistem yang lebih transparan, metode belajar yang lebih relevan, dan kurikulum yang lebih futuristik. Semua ini adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi tangguh, siap menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, sekaligus tidak kehilangan akar nilai-nilai kebangsaan.

Tantangan tentu tidak kecil. Skala program ini sangat luas, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, guru, maupun masyarakat. Namun jika semua langkah ini dijalankan dengan konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak didik, maka kita bisa berharap akan lahir lompatan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Bukan hanya sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi juga memimpin di bidang-bidang yang menentukan masa depan bangsa.

Penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu hal yang terus didorong agar tumbuh dan melekat pada anak-anak Indonesia. Melalui gerakan “tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat,” semangat ini semakin luas gaungnya. Bukti nyatanya, video yang memperkenalkan kebiasaan tersebut telah ditonton lebih dari 52 juta kali, sebuah angka yang tidak hanya mencerminkan antusiasme masyarakat, tetapi juga kepercayaan pada pentingnya pendidikan karakter. Bahkan, apresiasi datang dari berbagai pihak, termasuk penghargaan Golden Button

dari Google untuk kanal pendidikan dengan lebih dari 1,2 juta pelanggan.

Dukungan publik, akademisi, dunia usaha, media, hingga jurnalis menjadi energi penting untuk menjaga dan mengembangkan inisiatif ini. Apresiasi terhadap berbagai pihak yang ikut mendukung juga menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendirian, melainkan butuh kerja sama lintas sektor. Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional, tema “partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu” terasa semakin relevan—bahwa kualitas pendidikan hanya bisa terwujud bila semua pihak terlibat aktif di dalamnya.

Pencapaian ini memang patut disyukuri, tetapi lebih dari itu, ia harus dilihat sebagai langkah awal untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Harapan ke depan jelas: agar gerakan penguatan karakter dan partisipasi bersama ini benar-benar menjadi fondasi kokoh dalam mencetak generasi hebat Indonesia.

37 Transformasi Pendidikan Indonesia:

Pelantikan Pejabat Manajerial JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Non-Manajerial

Rabu, 28 Mei 2025

Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bukan hanya seremonial rutin, tetapi sebuah momentum untuk menegaskan arah besar transformasi pendidikan Indonesia. Pendidikan selalu disebut sebagai cermin kehidupan bangsa, dan di balik ungkapan itu tersimpan pesan sederhana namun mendalam: kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Visi Indonesia Emas 2045—menjadi negara maju tepat di usia seabad kemerdekaan—tidak akan pernah tercapai jika sektor pendidikan tertinggal. Karena itu, setiap penugasan baru di kementerian ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari perjalanan panjang untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan bermutu, setara, dan berkemajuan.

Kementerian telah merumuskan sejumlah program prioritas yang sifatnya bukan tambal sulam, melainkan fondasi bagi lompatan jangka panjang. Revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan karakter, hingga penyediaan makan bergizi gratis bukan sekadar daftar program, tetapi wujud dari upaya menyeluruh agar pendidikan tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga sehat, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, ada pula agenda penjaminan mutu yang menjadi

poros utama. Mutu inilah yang akan memastikan bahwa layanan pendidikan tidak berhenti pada akses semata, tetapi juga terukur dari segi kualitas.

Pejabat yang dilantik untuk memimpin Balai Besar Penjaminan Mutu di Sulawesi Selatan, misalnya, memikul amanah untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut di daerah. Tugas mereka tidak ringan: menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, guru, hingga masyarakat agar setiap program prioritas kementerian benar-benar hidup di ruang kelas dan tidak hanya berhenti di atas kertas. Demikian pula pejabat yang memimpin balai besar di bidang vokasi seni, budaya, bisnis, dan pariwisata. Mereka ditantang untuk membangun jembatan yang kokoh antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Relevansi lulusan dengan pasar kerja menjadi tolok ukur, dan itu hanya bisa dicapai jika ada pengembangan model kompetensi yang adaptif sekaligus evaluasi mutu yang konsisten.

Namun, keberhasilan transformasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pejabat tinggi. Justru birokrasi menengah—administrator dan pengawas—sering kali menjadi titik krusial. Mereka adalah garda depan yang menentukan bagaimana kebijakan diturunkan menjadi pelayanan publik. Jika mereka bekerja dengan disiplin, efektif, dan efisien, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Tetapi jika langkah mereka tersendat oleh prosedur yang kaku atau mentalitas birokrasi lama, maka sebaik apa pun kebijakan di pusat, hasilnya tidak akan sampai kepada siswa dan guru.

Peran pejabat fungsional pun tak kalah vital. Para perencana, analis anggaran, hingga pranata keuangan memegang kendali dalam memastikan setiap rupiah dari APBN dipakai sesuai dengan prioritas dan janji pemerintah. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, program pendidikan mudah terjebak pada pemborosan atau bahkan penyalahgunaan. Para analis kebijakan dituntut untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), bukan sekadar kebijakan populis yang tidak berakar pada realitas. Sementara

para statistisi bertanggung jawab menyediakan data yang akurat dan berkualitas, sebab data adalah fondasi dari semua keputusan besar di sektor pendidikan. Tanpa data yang sahih, arah kebijakan bisa melenceng dan mengorbankan generasi penerus.

Jika semua peran ini dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, maka jelaslah bahwa transformasi pendidikan adalah kerja kolektif. Pimpinan tinggi memberikan arah dan visi, pejabat menengah memastikan pelaksanaan yang rapi, dan pejabat fungsional mengawal mutu serta akuntabilitas. Semua saling terkait, semua saling menopang. Pertanyaan pentingnya: apakah kita siap menjadikan pendidikan sebagai batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045?

Jawaban itu tentu tidak sederhana. Tetapi momentum pelantikan pejabat hari ini memberi harapan bahwa perubahan bukan hanya retorika. Selama ada kesadaran bahwa setiap kebijakan harus diterjemahkan menjadi pelayanan nyata, selama birokrasi bekerja dengan nurani publik, dan selama pendidikan ditempatkan sebagai prioritas, maka cita-cita besar itu bukan mustahil. Pendidikan adalah jalan panjang, dan pelantikan pejabat hari ini adalah langkah kecil namun penting dalam memastikan kita tidak tersesat di jalan menuju masa depan bangsa.

Transformasi birokrasi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekadar jargon, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur dituntut untuk bergerak menuju sistem yang lebih modern, berbasis talenta, dan terkoneksi secara digital. Manajemen talenta ASN dan digitalisasi di lingkungan pendidikan dasar dan menengah harus benar-benar terjamin agar setiap kebijakan dapat dijalankan dengan efektif.

Di sisi lain, pengelolaan pengetahuan melalui sistem digital menjadi kunci penting. Arsip tidak lagi hanya berfungsi sebagai dokumen yang disimpan, tetapi harus menjadi sumber pengetahuan yang hidup, mampu mempercepat pengambilan keputusan, memicu inovasi, memperkuat kolaborasi tim, dan bahkan menekan anggaran. Demikian pula para widya prada memegang tanggung jawab strategis:

memastikan mutu pendidikan tidak hanya terjaga di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan sesuai standar.

Transformasi digital juga tidak akan berjalan tanpa peran krusial para pranata komputer. Mereka menjadi penggerak utama dalam mengelola sistem informasi, data, dan penerapan teknologi yang efektif. Para penerjemah pun memiliki andil besar, bukan sekadar mengalihkan bahasa, tetapi menjaga makna, konteks, dan mendukung program kebahasaan yang menguatkan identitas bangsa sekaligus membuka akses ke dunia internasional. Tak kalah penting, peran tenaga medis memastikan aparatur tetap sehat agar pelayanan publik tidak terganggu, karena tubuh yang bugar adalah fondasi dari pelayanan yang optimal.

Pelantikan pejabat baru bukan hanya formalitas pengisian jabatan, tetapi momentum untuk meneguhkan ikhtiar membangun layanan pendidikan yang lebih bermutu dan berdampak nyata. Keberhasilan tugas ini tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, melainkan juga oleh karakter dan budaya kerja yang kuat. Budaya ramah—responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis—serta profil insan santun—setia, amanah, negarawan, teladan, unggul, dan ngemong—harus benar-benar dihidupi, bukan sekadar slogan.

Dengan mengamalkan nilai ramah dan santun secara konsisten, lingkungan kerja yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil dapat tercipta. Fondasi pendidikan bermutu untuk semua akan semakin kokoh. Tugas besar ini adalah amanah yang hanya bisa dijalankan dengan integritas, kerja keras, dan kolaborasi. Semoga ikhtiar bersama ini mampu menghadirkan pendidikan dasar dan menengah yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menjadi warisan terbaik bagi generasi mendatang.

Sadar Tertib Arsip sebagai Fondasi Merawat Memori Kolektif Bangsa:

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip GNSTA 2025-2029

Rabu, 4 Juni 2025

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 2025–2029 hadir sebagai jawaban atas persoalan lama yang kerap diabaikan: bagaimana bangsa ini memperlakukan arsip. Selama bertahun-tahun, arsip sering dianggap hanya sebagai kumpulan berkas kertas yang menumpuk di lemari-lemari kantor. Pandangan sempit ini membuat arsip sering dikelola secara asal-asalan, sekadar memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Padahal, di balik arsip terkandung memori kolektif bangsa, catatan autentik perjalanan negara, serta bukti tanggung jawab yang menentukan kualitas demokrasi dan pemerintahan itu sendiri.

Jika kita mau jujur, betapa sering kita mendengar arsip hilang, rusak, atau bahkan sulit ditemukan ketika dibutuhkan. Ketidaktertiban ini membuat proses pencarian informasi menjadi lambat, tidak efisien, dan bahkan menimbulkan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun negara. Bayangkan seorang warga yang hak perdatanya tertunda karena dokumen arsip tak lagi tersedia, atau lembaga negara yang kesulitan membuktikan kebijakan di masa lalu karena dokumennya tercecer. Semua itu terjadi karena arsip dipandang remeh. Inilah titik tolak mengapa GNSTA menjadi

krusial: untuk mengubah cara pandang terhadap arsip, dari sekadar kertas usang menjadi tulang punggung pemerintahan modern.

GNSTA membawa misi besar yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah amanat undang-undang, sekaligus tanggung jawab negara untuk melindungi identitas bangsa. Melalui gerakan ini, arsip ditempatkan pada posisi strategis: sebagai bukti sah yang melindungi kepentingan negara, sebagai instrumen akuntabilitas kinerja birokrasi, sebagai alat hukum yang memiliki kekuatan, dan sebagai penopang manajemen pemerintahan yang sehat. Dengan demikian, arsip tidak lagi dipandang statis, melainkan dinamis, hidup, dan menjadi bagian dari denyut birokrasi yang sehat.

Agar misi tersebut tercapai, GNSTA dirancang untuk bergerak pada enam aspek penting: kebijakan, organisasi, sumber daya manusia kearsipan, sarana-prasarana, pengelolaan arsip, serta pendanaan. Keenam aspek ini menjadi kerangka kerja yang memastikan kearsipan tidak dikelola sekadarnya, melainkan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang jelas dibutuhkan agar kearsipan memiliki arah yang pasti; organisasi harus dibangun agar ada kelembagaan yang bertanggung jawab; sumber daya manusia harus disiapkan dengan kapasitas profesional; sarana dan prasarana harus memadai agar arsip aman dan mudah diakses; pengelolaan harus modern dan sistematis; sementara pendanaan menjadi penopang agar semua itu berjalan berkesinambungan.

Yang menarik, GNSTA juga tidak terlepas dari semangat transformasi digital. Arsip bukan lagi hanya dokumen fisik yang mudah rusak, tetapi juga bagian dari sistem digital yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Transformasi digital ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat. Dengan kearsipan digital, memori bangsa tidak hanya tersimpan, tetapi juga bisa diakses lebih luas sebagai bahan pembelajaran, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban di ruang publik.

Pada akhirnya, tertib arsip bukan semata urusan administrasi internal lembaga, melainkan urusan peradaban bangsa. Arsip adalah cermin yang merekam perjalanan sejarah, kebijakan, dan praktik sosial kita. Hilangnya arsip berarti hilangnya memori kolektif, yang bisa membuat kita kehilangan pijakan dalam melangkah ke depan. GNSTA 2025–2029 hadir untuk memastikan itu tidak terjadi, untuk menegakkan kesadaran bahwa arsip adalah aset nasional yang harus dijaga dengan serius.

Gerakan ini, jika dijalankan konsisten, bisa menjadi momentum penting bagi bangsa ini: meninggalkan budaya abai terhadap arsip, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya. Dengan kata lain, GNSTA adalah gerakan membangun kesadaran kolektif—bahwa arsip adalah identitas bangsa, memori sejarah, sekaligus warisan yang akan menentukan bagaimana Indonesia dikenang di masa depan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola arsip hari ini tidak bisa lagi dipandang sebagai opsi tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar. Birokrasi yang modern tidak mungkin bertumpu pada sistem manual yang lambat, rapuh, dan rentan hilang. Di sinilah transformasi digital menjadi kata kunci untuk menghadirkan tertib administrasi, efisiensi kerja, dan transparansi publik. Melalui langkah konkret seperti implementasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE), yang kini tengah dipersiapkan untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), pemerintah sedang membangun fondasi keterpaduan arsip. Integrasi ini penting, karena tanpa keterhubungan antar sistem, digitalisasi hanya akan melahirkan pulau-pulau data yang terfragmentasi dan sulit dimanfaatkan secara optimal.

Meski begitu, transformasi ini tentu membawa tantangan yang tidak sederhana. Kunci keberhasilannya terletak pada manusia yang mengelola sistem. Sumber daya manusia di bidang kearsipan harus mampu keluar dari zona nyaman cara kerja lama dan berani beradaptasi dengan teknologi baru. Kapasitas mereka dalam menguasai aplikasi,

memelihara database, hingga menjaga keamanan informasi menjadi penentu utama. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran birokrasi, melainkan juga keamanan data yang berisi rekam jejak lembaga dan bahkan sejarah bangsa. Bayangkan jika arsip penting hilang karena kelalaian, terhapus oleh virus, atau dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab—kerugian yang ditimbulkan tidak hanya administratif, melainkan juga strategis. Oleh karena itu, komitmen menjaga keamanan dan privasi arsip harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Lebih dari sekadar deklarasi atau seremoni penandatanganan piagam, GNSTA mengingatkan bahwa komitmen harus diwujudkan dalam aksi nyata. Penetapan kebijakan, penyusunan program kerja, hingga pembinaan kearsipan harus dirancang bukan untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi untuk membangun budaya tertib arsip di setiap lini. Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya hanya akan tercapai jika setiap orang dalam birokrasi memahami bahwa arsip bukan sekadar dokumen, melainkan basis akuntabilitas. Arsip yang membuktikan kinerja, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki jejak yang bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, digitalisasi arsip tidak hanya berdampak pada internal birokrasi, tetapi juga pada kualitas layanan publik. Dengan arsip yang tertata, masyarakat bisa mengakses informasi dengan lebih cepat, akurat, dan sah. Layanan publik pun menjadi lebih ramah, responsif terhadap kebutuhan, serta adaptif mengikuti perkembangan zaman. Inilah esensi pemerintahan yang melayani: akuntabel dalam pelaporan, melayani dalam akses data, adaptif terhadap teknologi, dan harmonis dalam kolaborasi lintas lembaga. Ketika arsip dikelola secara baik, kepercayaan publik terhadap birokrasi akan meningkat, dan inilah modal sosial yang berharga dalam membangun legitimasi negara di mata rakyat.

Ke depan, GNSTA harus menjadi motor penggerak lahirnya ekosistem kearsipan digital yang berkelanjutan. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu menjadikan kearsipan sebagai agenda prioritas, bukan sekadar pekerjaan administratif yang dipinggirkan. Arsip yang dikelola secara digital dan terintegrasi akan membuka ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan, memperkaya kebudayaan bangsa, dan memperkuat daya guna pemerintahan. Kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua lini bergerak seirama dalam visi besar ini.

Pada akhirnya, kearsipan bukanlah hal teknis semata, melainkan investasi jangka panjang bangsa. Arsip digital yang tertata adalah memori kolektif yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, sebuah harta tak ternilai yang menjaga kesinambungan pengetahuan dan identitas bangsa. Jika GNSTA dijalankan dengan penuh kesungguhan, bukan mustahil Indonesia akan memiliki sistem kearsipan yang modern, aman, dan bermanfaat luas bagi publik. Dengan semangat itulah, mari kita gaungkan komitmen bersama: arsip bukan sekadar tumpukan data, melainkan nadi birokrasi, roh transparansi, dan penopang peradaban. *Salam Arsip.*

Peran Guru Menyiapkan Generasi Emas di Era Disrupsi:

**Orasi Ilmiah dalam acara Upacara Dies Natalis ke-60
UNNES**

Minggu, 8 Juni 2025

Dies Natalis ke-60 Universitas Negeri Semarang menjadi momen penting untuk menegaskan kembali arah besar pendidikan di Indonesia. Perayaan ini bukan hanya tentang usia institusi, melainkan juga tentang bagaimana perguruan tinggi mampu melahirkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendidikan, dalam hal ini, bukan sekadar transfer ilmu, tetapi sebuah proses panjang untuk menyiapkan manusia yang utuh—yang mampu melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

Generasi emas yang kita dambakan bukanlah istilah kosong. Ia memiliki makna yang kuat, berakar pada nilai Pancasila dan cita-cita UUD 1945. Generasi itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa, yang menjunjung tinggi akhlak mulia, serta yang mampu menjaga harkat martabat sesama manusia. Lebih dari itu, mereka harus tumbuh dengan kecintaan mendalam pada tanah air, siap merawat persatuan di tengah keragaman yang menjadi kekuatan bangsa ini.

Indonesia emas bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang kedewasaan demokratis dan kesadaran sosial. Generasi ini dituntut mampu berperan aktif dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian, tidak hanya di lingkup nasional, tetapi juga dalam pergaulan dunia. Tugas besar ini jelas bukan perkara mudah, namun menjadi keharusan agar Indonesia

benar-benar hadir sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan mampu memberi kontribusi penting bagi dunia.

Maka, pendidikan harus dipandang sebagai instrumen strategis. Ia bukan sekadar ruang kelas atau kurikulum kaku, melainkan sebuah arena pembentukan karakter dan pematangan visi kebangsaan. Di sinilah universitas seperti UNNES mengambil peran krusial: bukan hanya mencetak sarjana, tetapi melahirkan manusia Indonesia yang paripurna. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia emas ada di tangan generasi yang sedang ditempa hari ini.

Kita hidup di sebuah era yang oleh banyak ahli disebut sebagai era disrupsi. Kata ini tidak lagi asing, karena hampir setiap aspek kehidupan manusia hari ini berubah dengan cepat dan sering kali tidak bisa diprediksi. Para pakar menyebut kondisi ini dengan istilah TUNA—*turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity*—atau VUCA—*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*. Walaupun berbeda istilah, keduanya sama-sama menegaskan bahwa kita menghadapi zaman yang penuh guncangan, ketidakpastian, kerumitan, sekaligus hal-hal baru yang tak selalu mudah dipahami.

Turbulensi, misalnya, tampak jelas dalam dinamika politik dan ekonomi global. Konflik, perang dagang, hingga krisis energi membuat peta dunia terus bergeser. Volatilitas pasar dan hubungan antarnegara sering kali membuat masyarakat berada dalam ketidakpastian. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga menyentuh sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Ketika harga pangan melonjak, ketika pekerjaan lama tergantikan mesin, atau ketika sebuah aturan berubah dalam semalam, semua itu adalah wajah nyata dari turbulensi dan ketidakpastian.

Kita juga hidup dalam dunia yang semakin kompleks. Masalah tidak lagi bisa disederhanakan dengan cara lama, karena satu isu sering terkait dengan isu lain. Perubahan iklim, misalnya, bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, politik, kesehatan, bahkan migrasi penduduk. Kompleksitas ini menuntut kita untuk tidak melihat persoalan dari satu kacamata saja.

Kita harus mau membuka diri terhadap berbagai perspektif dan cara pandang baru.

Novelty—atau kebaruan—menjadi ciri lain dari era ini. Teknologi digital membawa hal-hal baru yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, bahkan beribadah. Dunia maya menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, internet mempermudah akses informasi, mempercepat transaksi, dan membuka lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, ia juga melahirkan ketergantungan, hoaks, dan bahkan krisis identitas. Nilai-nilai lama perlahan ditinggalkan, sementara nilai baru belum sepenuhnya mapan. Ambiguitas pun menjadi keniscayaan. Kita sering kali berjalan dalam kabut, di mana arah ke depan tidak sepenuhnya jelas.

Dalam pusaran perubahan ini, salah satu krisis yang paling mencolok adalah krisis intelektual. Nichols menyebut fenomena ini sebagai *the death of expertise*—matinya kepakaran. Otoritas pengetahuan kini semakin dipertanyakan. Dahulu, seorang profesor atau ulama memiliki posisi yang dihormati karena kedalaman ilmu dan perjalanan panjang dalam menekuni bidangnya. Hari ini, muncul “Profesor Google” atau “Ustaz Google” yang dianggap mampu menjawab semua pertanyaan hanya dalam hitungan detik.

Masalahnya, jawaban instan dari mesin pencari bukanlah hasil dari penelitian yang mendalam, melainkan sekadar rangkuman dari apa yang sudah ada di dunia digital. Ia bisa membantu, tetapi tidak bisa menggantikan kerja ilmiah dan tanggung jawab moral seorang pakar. Akibatnya, masyarakat kerap terjebak pada ilusi pengetahuan. Merasa tahu, padahal hanya mengutip potongan informasi. Merasa paham, padahal tidak benar-benar memahami konteks.

Krisis intelektual ini bukan sekadar soal siapa yang lebih pintar menjelaskan, tetapi soal arah peradaban. Jika manusia lebih percaya pada informasi yang instan ketimbang pengetahuan yang teruji, maka fondasi berpikir kritis akan rapuh. Lebih jauh lagi, ini bisa berimbas pada krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan, terhadap otoritas agama, bahkan terhadap sains itu sendiri.

Maka, tantangan terbesar kita di era disrupsi bukan hanya bagaimana memanfaatkan teknologi, tetapi bagaimana tetap menjaga kedalaman ilmu, menghargai kepakaran, dan membangun literasi kritis. Kita membutuhkan keseimbangan antara kecepatan informasi dan kedalaman pemahaman. Jika tidak, kita akan terseret arus perubahan tanpa arah, kehilangan pijakan nilai, dan pada akhirnya terjebak dalam kebingungan yang berkepanjangan.

Era disrupsi memang menghadirkan banyak peluang. Ia membuka ruang kreativitas, mempercepat inovasi, dan memperluas konektivitas. Namun di balik itu, ada tanggung jawab besar: menjaga agar manusia tetap menjadi subjek, bukan sekadar objek dari perubahan. Yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, mendalam, dan bertanggung jawab. Karena tanpa itu, perubahan hanya akan meninggalkan kerusakan, bukan peradaban yang lebih baik.

Di era digital hari ini, kita sedang menyaksikan paradoks besar. Teknologi yang semula diyakini sebagai penopang kemajuan manusia, ternyata justru membuka ruang bagi kemunduran akal sehat dan etika. Ada sebuah anekdot yang menggambarkan fenomena ini: seorang petugas kebersihan pesawat membaca manual penerbangan, lalu berhasil menerbangkan pesawat. Namun, manual itu tidak memberi tahu bagaimana cara mendaratkannya. Akhirnya pesawat melayang di udara tanpa kepastian bisa turun dengan selamat. Anekdot ini bukan sekadar lelucon, melainkan potret “kematian keahlian” —ketika orang merasa mampu melakukan sesuatu hanya dengan modal informasi di permukaan, tanpa pemahaman mendalam.

Di tengah banjir informasi seperti sekarang, manusia memang bisa mengakses hampir segala hal hanya dengan satu ketukan jari. Namun, akses informasi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Nicole, dalam tulisannya tentang *the death of expertise*, menekankan bahwa keahlian sejati justru terpinggirkan ketika semua orang merasa dirinya tahu. Orang lebih percaya pada pencarian instan di mesin pencari daripada nasihat pakar. Akibatnya, kita punya banyak “pilot

dadakan” yang bisa menerbangkan pesawat, tapi tidak tahu cara mendarat.

Krisis ini semakin parah ketika bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai “matinya akal sehat”. Alih-alih membuat manusia makin cerdas, teknologi digital seringkali justru menjadikan kita makin culas. Frankenfur dalam bukunya *World Without Mind* mengingatkan bahwa teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (AI), tidak otomatis membawa manusia ke arah kebijaksanaan. Sebaliknya, ia bisa mendorong kita menjadi lebih dangkal, terburu-buru, bahkan manipulatif. Kita tidak semakin arif, justru makin lihai dalam mencari celah, menipu, dan mengakali sistem.

Salah satu gejala paling kentara dari kemerosotan ini adalah munculnya *virality virus*, atau virus viralitas. Obsesi untuk menjadi viral kini merasuki hampir setiap aspek kehidupan. Konten apa pun, selama bisa menarik perhatian, akan diunggah tanpa peduli nilai etika atau dampaknya. Lahir adagium baru yang seolah mewakili zaman ini: *no viral, no justice*. Seakan-akan kebenaran dan keadilan hanya akan direspons jika sesuatu sudah meledak di media sosial. Ini bukan sekadar perubahan cara berkomunikasi, melainkan pergeseran nilai yang sangat berbahaya.

Di saat yang sama, ada juga gejala *conformity*, yakni dorongan untuk merasa nyaman dengan ikut arus mayoritas. Dalam banyak grup WhatsApp misalnya, ruang yang awalnya dibangun untuk komunikasi dan kebersamaan, malah sering berubah menjadi arena perundungan. Satu suara berbeda saja bisa dianggap mengganggu kenyamanan kolektif, lalu diserang habis-habisan atau bahkan dikeluarkan dari grup. Media sosial yang diharapkan memperlerat persaudaraan, pada praktiknya sering menjadi ruang penuh tekanan, mematikan keberagaman, dan melahirkan perilaku asosial.

Masalah berikutnya adalah runtuhnya *digital civility*, atau keadaban digital. Riset Microsoft menyingkap bahwa interaksi manusia di dunia maya semakin dipenuhi kebiadaban, bukan kesantunan. Fenomena buzzer menjadi contoh nyata. Kini, opini

publik bisa dikendalikan dengan uang. Ribuan akun bayaran dapat dikerahkan untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Bahkan ada hitungan matematis: berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengerahkan seratus ribu buzzer, untuk mengorbitkan tokoh tertentu, atau untuk menghancurkan reputasi lawan politik. Tidak sedikit pejabat atau tokoh publik yang memilih menutup akses media sosial pribadinya karena takut diserang. Dari sini kita menyaksikan bagaimana ruang digital yang mestinya memperluas partisipasi, justru menjadi ajang pembunuhan karakter dan intimidasi massal.

Semua fenomena ini menunjukkan bahwa dunia digital yang kita bangun tidak bebas dari risiko besar. Kecanggihan teknologi telah memberi manusia “sayap” untuk terbang tinggi, tetapi tanpa kesadaran moral dan kebijaksanaan, kita hanya melayang di udara tanpa arah. Teknologi memang bisa mempercepat distribusi informasi, tetapi jika informasi itu hanya melahirkan narsisme, konformitas, dan kebiadaban, maka yang kita hadapi bukanlah kemajuan, melainkan bencana sosial yang terbungkus kemewahan digital.

Karena itu, tantangan utama kita bukan lagi sekadar meleak teknologi, tetapi bagaimana menjaga akal sehat dan keadaban di tengah derasnya arus digital. Kita perlu belajar kembali membedakan pengetahuan dari sekadar informasi, kebijaksanaan dari sekadar kecerdikan, dan kebenaran dari sekadar viralitas. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam paradoks zaman: semakin canggih alat yang kita miliki, semakin dangkal nilai yang kita hidupi.

Hari ini, kita hidup dalam zaman yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa begitu banyak kemudahan. Namun di sisi lain, kita menghadapi krisis besar yang mengancam fondasi kehidupan: krisis moral dan krisis lingkungan. Keduanya berjalan beriringan, saling memantulkan wajah manusia yang kehilangan arah dan rasa tanggung jawab.

Krisis moral tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Jawa mengajarkan, “*sing salah seleh*”—jika bersalah, orang seharusnya mengakui, menundukkan kepala, dan bersikap rendah hati. Tetapi

yang terjadi kini justru sebaliknya. Orang yang bersalah tidak lagi merasa malu. Rasa salah yang semestinya menjadi rem moral telah terkikis. Bahkan, alih-alih introspeksi, banyak orang memilih menyerang balik, menutup kesalahan dengan kesalahan lain. Ruang publik pun dipenuhi dengan sikap defensif, arogansi, dan permainan citra, yang pada akhirnya hanya semakin menodai integritas. Hilangnya rasa malu inilah yang memperlihatkan bagaimana krisis moral sedang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, ada krisis lingkungan yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dunia menghadapi ancaman kerusakan ekosistem dalam skala yang sulit dibayangkan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi persoalan generasi mendatang, tetapi persoalan kita hari ini. Buku *A World in 2050* misalnya, menggambarkan bahwa kenaikan suhu bumi hingga 5 derajat Celcius bisa menjadi bencana global. Gunung-gunung es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan banjir permanen mengancam berbagai wilayah pesisir. Tidak hanya manusia yang terdampak, tetapi juga seluruh ekosistem yang menopang kehidupan.

Saya teringat pengalaman sederhana pada tahun 2005 ketika mengikuti kursus singkat di Birmingham University. Saat itu, di dalam angkutan umum, saya membaca koran gratis yang memuat artikel tentang ancaman krisis lingkungan. Tulisannya tegas: bumi akan memanas hingga 5 derajat, laut akan pasang, dan banjir akan menjadi kenyataan permanen. Gambaran itu seakan jauh, tetapi kini tanda-tandanya sudah nyata. Banjir tahunan yang semakin parah, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi alarm keras bagi kita semua.

Menghadapi krisis moral dan krisis lingkungan, pertanyaan besar muncul: kecerdasan macam apa yang kita butuhkan untuk masa depan? Selama ini, pendidikan cenderung mengagungkan kecerdasan akademik—nilai ujian, prestasi intelektual, gelar, dan penghargaan. Namun kenyataan dunia menegaskan bahwa intelektualitas semata tidak cukup.

Howard Gardner, dalam teorinya tentang *multiple intelligences*, menunjukkan bahwa manusia memiliki beragam kecerdasan. Tidak hanya logika dan bahasa, tetapi juga kecerdasan spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, hingga naturalistik. Belakangan Gardner menambahkan dua kecerdasan penting: kecerdasan eksistensial dan kecerdasan moral. Kecerdasan eksistensial memberi ruang bagi manusia untuk bertanya tentang makna kehidupan, kematian, dan eksistensi dirinya. Sementara kecerdasan moral berhubungan dengan kemampuan memahami prinsip etika dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Di tengah krisis yang kita hadapi, dua kecerdasan ini terasa semakin relevan. Manusia tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepintaran logika, tetapi juga harus mampu melakukan kontemplasi mendalam, serta menegakkan moralitas sebagai panduan bertindak. Tanpa kecerdasan moral, kepintaran justru bisa berubah menjadi bumerang: teknologi dipakai untuk manipulasi, kekayaan digunakan untuk eksploitasi, dan kekuasaan dimanfaatkan untuk menindas.

Selain itu, Daniel Goleman mengingatkan pentingnya *ecological intelligence*—kecerdasan ekologis. Dalam bukunya *Ecological Intelligence: Knowing the Hidden Impact of What We Buy*, Goleman menegaskan bahwa gaya hidup konsumtif modern punya dampak besar pada kerusakan lingkungan. Barang-barang yang kita beli, kosmetik yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi, hingga pakaian yang kita kenakan, semua memiliki jejak ekologis. Sayangnya, kita jarang menyadarinya. Goleman mengajak manusia untuk lebih jernih melihat konsekuensi dari pilihan konsumsi sehari-hari, agar tidak terjebak dalam pola hidup yang merusak bumi.

Krisis yang kita hadapi sebenarnya membuka mata: masa depan membutuhkan manusia yang cerdas secara menyeluruh. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara moral, eksistensial, dan ekologis. Dunia tidak akan selamat hanya dengan ilmuwan yang pandai menghitung, insinyur yang mampu merancang, atau politisi yang lihai berretorika. Dunia membutuhkan manusia yang mampu

mengintegrasikan kecerdasan dengan nurani, dengan kesadaran mendalam akan keberlanjutan hidup bersama di bumi.

Inilah pekerjaan besar pendidikan kita: melahirkan generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga beretika; tidak hanya kritis, tetapi juga berempati; tidak hanya konsumtif, tetapi juga sadar ekologis. Pendidikan yang hanya menekankan kecerdasan akademik tanpa membangun kesadaran moral dan lingkungan hanya akan melahirkan individu-individu pintar yang justru bisa memperparah krisis.

Pada akhirnya, moralitas dan keberlanjutan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kehilangan rasa malu membuat manusia berani melanggar batas etika, sementara kehilangan kesadaran ekologis membuat manusia berani merusak bumi tanpa pikir panjang. Jika keduanya dibiarkan, masa depan hanya akan dipenuhi kerusakan. Tetapi jika kita berani mengubah arah, menumbuhkan kecerdasan moral, eksistensial, dan ekologis, maka dunia masih punya harapan.

Masa depan ada di tangan manusia yang bukan hanya pintar, tetapi juga bijak. Manusia yang sadar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, setiap tindakan meninggalkan jejak, dan setiap keputusan harus dipandu oleh moralitas dan kepedulian terhadap bumi. Tanpa itu, semua kepintaran hanya akan menjadi sia-sia.

Kesadaran untuk membangun *better world order*—tata dunia yang lebih baik—kian menuntut keseriusan dari semua pihak. Dunia yang hijau (*green world*), bersih (*clean life*), dan berkelanjutan (*sustainable*) bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan moral dan spiritual. Dalam Islam, hal ini sudah ditegaskan sejak lama. Ibrahim Abdul Matin, seorang penulis muslim di Amerika, melalui bukunya *Green Deen: What Islam Teaches Us about Protecting the Planet*, menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan sejatinya adalah bagian dari iman. Al-Qur'an secara jelas menolak segala bentuk kerusakan di bumi—*"Do not spread corruption on earth, for Allah does not love corrupters"*—sebuah pesan spiritual yang sekaligus menjadi etika lingkungan (*environmental ethics*). Maka, melindungi bumi tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas sosial, melainkan ibadah

yang memiliki konsekuensi moral.

Kesadaran ini kini diterjemahkan ke dalam berbagai gerakan nyata: *green campus* yang ramah lingkungan, *green school* melalui program *sekolah wisata*, hingga *green mosque* yang berupaya menjadi tempat ibadah ramah lingkungan. Lebih jauh, konsep *green culture* dan *green economy* menegaskan bahwa budaya bersih dan praktik ekonomi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari peradaban modern. Semua ini menunjukkan bahwa membangun *civilization* tidak bisa dilepaskan dari kepedulian pada lingkungan, karena peradaban sejati bukan hanya soal teknologi tinggi, melainkan juga kemampuan menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Namun, menjaga bumi tidak akan berhasil jika pendidikan masih berkuat pada hal-hal teknis semata. Pendidikan seharusnya tidak hanya menanamkan *technical skills*, tetapi juga *soft skills* yang bersifat transformatif. Kita membutuhkan generasi yang memiliki *future-oriented competence*, mampu menghadapi (*cope with change*) sekaligus mengelola perubahan (*manage the change*). Generasi seperti ini disebut *agile generation*—generasi yang luwes, adaptif, dan resilien. Sebaliknya, yang menjadi tantangan kita hari ini adalah fenomena *fragile generation* atau yang populer disebut *strawberry generation*: muda-mudi yang tampak sehat dan kuat secara fisik, tetapi rapuh secara mental dan moral (*mentally fragile* dan *morally fragile*).

Dalam menghadapi tantangan global, *World Economic Forum* menekankan sepuluh *transformative soft skills* yang harus dimiliki generasi masa depan. Pertama, *analytical thinking and innovation*, kemampuan berpikir analitis dan berinovasi. Kedua, *active learning and learning strategies*, yakni pembelajar aktif dengan strategi belajar yang tepat. Ketiga, *complex problem solving*, keterampilan menyelesaikan masalah rumit. Keempat, *critical thinking and analysis*. Kelima, *creativity, originality, and initiative*. Keenam, *leadership and social influence*. Ketujuh, *technology use, monitoring, and control*. Kedelapan, *technology design and programming*. Kesembilan, *resilience, stress tolerance, and flexibility*. Dan kesepuluh, *reasoning*,

problem-solving, and ideation.

Semua keterampilan itu bukan hanya jargon internasional, melainkan kebutuhan nyata di tengah krisis global: krisis lingkungan, krisis moral, bahkan krisis kemanusiaan. Pendidikan yang hanya fokus pada *hard skills* tidak akan cukup. Kita membutuhkan generasi dengan *adaptive mindset*, yang tidak hanya sanggup mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi *change maker*.

Dengan demikian, membangun dunia hijau dan beradab bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi internasional, melainkan tanggung jawab kolektif. Setiap individu—guru, orang tua, tokoh agama, mahasiswa, hingga masyarakat luas—harus berkontribusi. Pendidikan yang mengintegrasikan *sustainability values* dengan *transformative skills* akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab.

Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita hari ini sudah cukup visioner untuk menyiapkan *agile generation*? Ataukah kita masih sibuk mencetak lulusan yang sekadar bisa bekerja, tanpa benar-benar membekali mereka untuk menjaga bumi dan membangun masa depan? Jika jawabannya belum, maka sudah saatnya kita berani melakukan *paradigm shift*—pergeseran paradigma—agar pendidikan benar-benar menjadi motor lahirnya peradaban hijau yang adil, bersih, dan berkelanjutan.

Pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar jargon, melainkan amanah konstitusi yang harus diwujudkan secara nyata. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, undang-undang tersebut tidak hanya menekankan hak, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab bersama. Pendidikan bukan urusan pemerintah semata, melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat luas, termasuk orang tua, keluarga, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha.

Di sinilah pentingnya memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan. Lebih jauh, pendidikan harus mampu membentuk kepemimpinan, karakter, dan kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia global. Sekolah dan kurikulum memang penting, tetapi keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang tidak kalah besar dalam menanamkan nilai, moral, serta semangat kebangsaan. Maka, ketika kita berbicara tentang layanan pendidikan bermutu, sesungguhnya kita berbicara tentang sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak.

Prinsip partisipasi semesta menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah memang berkewajiban menjamin program wajib belajar, minimal di jenjang pendidikan dasar, tanpa pungutan biaya. Namun, tanggung jawab itu tidak berhenti hanya pada soal teknis pembiayaan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dasar bagi anaknya, serta berhak memilih satuan pendidikan dan memantau perkembangan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak bisa digantikan oleh negara. Pendidikan yang bermutu hanya bisa terwujud apabila ada gotong royong yang menyeluruh, di mana sekolah, pemerintah, dan masyarakat saling menopang.

Isu mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu terakhir kembali menegaskan posisi negara dalam menyediakan pendidikan tanpa biaya. Putusan tersebut memang mewajibkan negara menyediakan layanan pendidikan gratis, tetapi dengan catatan: semua itu tetap bergantung pada kemampuan finansial pemerintah. Di sisi lain, lembaga pendidikan swasta maupun lembaga yang diselenggarakan masyarakat tetap diperbolehkan memungut biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pendidikan gratis 100 persen tidak selalu dapat diterapkan, kecuali apabila pihak penyelenggara memilih untuk melakukannya.

Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Banyak yang mengartikan pendidikan gratis sebagai bebas biaya sepenuhnya,

padahal sesungguhnya terdapat diferensiasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola swasta. Kejelasan ini penting, agar publik memahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan tetap memiliki ruang dan justru dibutuhkan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas, peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat hadir dalam bentuk sumber daya, pelaksana, maupun pengguna hasil pendidikan. Artinya, pendidikan adalah kerja kolektif, bukan monopoli negara.

Maka, cita-cita pendidikan bermutu untuk semua tidak seharusnya direduksi hanya pada aspek “gratis” atau tidaknya biaya sekolah. Yang lebih esensial adalah bagaimana sistem pendidikan kita mampu menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global. Pendidikan harus membekali anak-anak dengan keterampilan berpikir kritis, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan semangat kolaborasi.

Dengan pandangan ini, jelas bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua, dan semua elemen bangsa harus berjalan beriringan. Pemerintah menyediakan regulasi, pembiayaan, dan infrastruktur. Sekolah menjalankan fungsi pedagogis dan pengembangan keterampilan. Orang tua mendampingi anak-anaknya, memastikan nilai dan karakter tumbuh seimbang. Sementara masyarakat luas ikut mendukung melalui peran sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan.

Pada akhirnya, pendidikan bermutu untuk semua hanya bisa terwujud jika dipahami sebagai tanggung jawab kolektif. Ia bukan hanya proyek pemerintah, bukan pula sekadar kewajiban sekolah, melainkan hasil dari gotong royong sebuah bangsa yang sungguh-sungguh ingin mencetak generasi penerus yang berdaya saing, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Pendidikan bermutu lahir dari kesadaran bersama bahwa anak-anak adalah aset bangsa, dan masa depan mereka adalah cerminan dari keseriusan kita hari ini.

Unes telah lama menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan bangsa. Selama lebih dari enam puluh tahun, universitas

ini tidak hanya berdiri sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat lahirnya ribuan guru yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam catatan sejarah, kontribusi guru-guru lulusan Unes begitu nyata: mereka tersebar di berbagai pelosok tanah air, mengabdikan diri di ruang-ruang kelas, dan menyalakan api pengetahuan bagi generasi yang akan datang.

Namun, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu. Guru tidak cukup disebut sebagai *agent of learning*, melainkan juga sebagai *agent of civilization*. Peran ini lebih dalam dan lebih bermakna. Guru adalah arsitek peradaban, mereka yang tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, atau berhitung, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan menyiapkan generasi untuk menghadapi perubahan zaman. Sebuah bangsa akan kuat jika memiliki guru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara integritas dan kepedulian sosial.

Tantangan yang kita hadapi hari ini masih besar. Fakta bahwa ada lebih dari 249.000 guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 adalah pekerjaan rumah serius. Bagaimana mungkin pendidikan berkualitas bisa dicapai jika para pendidiknya sendiri belum memiliki dasar akademik yang memadai? Di sisi lain, kompetensi guru yang sudah ada pun perlu terus diperbarui agar sejalan dengan tuntutan zaman. Pendidikan tidak bisa statis, ia bergerak seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks inilah, berbagai program peningkatan kualitas guru menjadi sangat relevan. Upaya pemenuhan kualifikasi pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi. Pelatihan bimbingan konseling, misalnya, menjadi sangat penting. Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran, mereka juga pendamping tumbuh kembang murid, termasuk dalam membentuk akhlak dan karakter mulia. Lalu, pelatihan coding dan kecerdasan buatan menandai langkah maju dalam menyiapkan guru menghadapi era digital yang kian tak terbendung. Sementara itu, pelatihan pembelajaran mendalam hadir untuk memperbaiki kualitas interaksi di kelas, agar

proses belajar tidak sekadar formalitas, tetapi sungguh-sungguh membekas pada peserta didik.

Semua langkah ini tentu tidak bisa dijalankan sendirian oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi nyata dengan perguruan tinggi, salah satunya Unes. Melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditargetkan akan diikuti lebih dari 800 ribu guru, diharapkan kualitas tenaga pendidik bisa meningkat secara signifikan. Kehadiran Unes dalam program ini bukan hanya sebagai mitra administratif, melainkan mitra strategis dalam membangun fondasi pendidikan yang kokoh untuk masa depan bangsa.

Meski teknologi berkembang pesat, ada batas yang tidak bisa ditembus. Artificial intelligence, aplikasi digital, hingga platform pembelajaran daring dapat membantu proses belajar, tetapi tidak pernah bisa menggantikan sentuhan manusiawi seorang guru. Guru adalah figur yang menginspirasi, memberi teladan, dan menyalakan semangat belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa memang prinsip yang benar, tetapi tanpa guru yang mumpuni, prinsip itu tidak akan pernah bisa diwujudkan. Guru tetaplah “segala-galanya”, sebagaimana diingatkan dalam literatur klasik pendidikan.

Maka, jika kita bicara tentang cita-cita Indonesia Emas 2045, sejatinya kita sedang bicara tentang kualitas guru hari ini. Generasi emas tidak mungkin lahir dari ruang-ruang kelas yang miskin inspirasi. Mereka hanya bisa lahir jika ada guru yang berdaya, guru yang mampu memadukan kecerdasan akademik, kemampuan teknologi, serta kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Unes, dengan sejarah panjangnya, memiliki tanggung jawab moral untuk terus menghadirkan guru-guru berkualitas seperti itu.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat seketika, tetapi dampaknya menentukan wajah bangsa di masa depan. Karena itu, guru harus dilihat bukan sekadar profesi, melainkan panggilan untuk membangun peradaban. Jika kita gagal memperhatikan kualitas guru, maka semua wacana besar tentang kemajuan bangsa hanya akan berhenti di atas kertas. Tetapi jika guru

diperkuat, dihormati, dan diberdayakan, maka Indonesia bukan hanya bermimpi tentang kejayaan 2045, melainkan benar-benar mewujudkannya.

Tantangan Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua:

Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh

Jum'at, 20 Juni 2025

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Hal ini bukan sekadar janji moral, melainkan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dari dasar inilah lahir visi besar: *pendidikan bermutu untuk semua*. Visi ini menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, pendidikan harus dapat diakses oleh siapa pun tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi atas dasar ekonomi, letak geografis, kondisi fisik, agama, maupun hambatan kultural. Kedua, pendidikan yang diberikan tidak boleh asal ada, melainkan harus benar-benar berkualitas.

Namun, perjalanan menuju cita-cita itu bukan perkara mudah. Fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan yang masih lebar. Ada ribuan anak Indonesia yang belum bisa menikmati hak pendidikannya secara layak. Alasan klasik terus muncul: kemiskinan, jauhnya jarak sekolah, keterbatasan sarana, dan stigma budaya yang membatasi akses belajar, khususnya bagi anak perempuan di beberapa daerah. Lebih dari itu, masalah kualitas juga menjadi pekerjaan besar.

Realitas nasional memperlihatkan bahwa mutu pendidikan kita masih belum merata. Pulau Jawa, dengan segala fasilitas dan

konsentrasi sumber daya, relatif lebih maju dibandingkan kawasan timur Indonesia. Di luar Jawa, banyak sekolah masih tertinggal, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun akses terhadap kurikulum yang memadai. Kesenjangan lain juga tampak pada perbandingan sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta elit, dengan biaya masuk puluhan juta, mampu menghadirkan kualitas pendidikan yang sulit disaingi oleh sekolah negeri. Namun di sisi lain, banyak sekolah swasta kecil—bahkan juga sekolah negeri—masih bergelut dengan kondisi seadanya: gedung yang usang, fasilitas minim, guru yang kurang kompeten, dan manajemen sekolah yang tidak terkelola dengan baik. Situasi inilah yang sering membuat pendidikan kita berjalan setengah hati: ada sekolah yang luar biasa, tapi ada juga yang nyaris tanpa harapan.

Persoalan tidak berhenti pada soal akses dan sarana. Substansi pendidikan sendiri menghadapi tantangan yang serius. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh pembentukan karakter. Inilah dua sisi yang seharusnya berjalan beriringan. Namun, saat ini kedua aspek itu sama-sama menghadapi problem. Kemampuan akademik siswa Indonesia masih banyak tertinggal dalam standar global, sementara persoalan karakter tidak kalah memprihatinkan.

Fenomena kenakalan remaja, atau *children delinquency*, semakin sering kita temui dalam berbagai bentuk: perundungan, penyalahgunaan teknologi, perilaku menyimpang, hingga pudarnya rasa hormat pada guru dan orang tua. Perubahan budaya akibat derasnya arus informasi digital membuat anak-anak kita lebih rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif. Ini bukan sekadar masalah perilaku individual, melainkan sinyal bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk manusia berkarakter. Padahal, salah satu tujuan utama pendidikan nasional adalah mencetak generasi yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan mampu menjaga peradaban bangsa.

Di sinilah pentingnya mengingat kembali agenda besar pendidikan: membangun generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga kokoh jiwanya. Kita tidak bisa membiarkan generasi muda tumbuh pintar tetapi rapuh, modern tetapi kehilangan akar. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral di tengah derasnya arus globalisasi, sekaligus menjadi landasan untuk melahirkan generasi emas yang berdaya saing tinggi.

Dengan semua tantangan ini, visi “pendidikan bermutu untuk semua” seharusnya tidak hanya berhenti sebagai slogan. Ia harus diwujudkan melalui langkah konkret: pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum berbasis karakter, serta keberpihakan nyata kepada sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi sekolah atau nilai ujian nasional, tetapi juga tentang kualitas manusia yang dihasilkan.

Memang, jalan menuju pendidikan yang benar-benar bermutu untuk semua warga bangsa masih panjang. Tetapi sejarah menunjukkan, bangsa yang maju selalu menaruh pendidikan sebagai prioritas utama. Indonesia tidak boleh ragu. Jika ingin menyongsong generasi emas 2045, maka pendidikanlah yang harus menjadi fondasi terkuat. Karena hanya dengan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu, kita dapat memastikan lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan siap memimpin peradaban dunia.

Berbicara tentang pendidikan Indonesia sering kali membuat kita kembali pada satu ritual yang berulang: menyebut skor PISA yang rendah. Literasi dan numerasi anak-anak Indonesia selalu menjadi bahan diskusi, namun sayangnya lebih sering berhenti pada pengulangan masalah ketimbang merumuskan jalan keluar. Padahal, yang jauh lebih penting dari sekadar mengulang-ulang kegagalan adalah mencari solusi konkret: apa langkah berikutnya? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita?

Masalah ini tidak berdiri sendiri. Jika kita menelisik lebih jauh, pendidikan bukan hanya soal menguasai matematika, sains, atau

membaca. Ia juga soal bagaimana generasi muda memiliki kecakapan hidup yang sesuai dengan zamannya, termasuk dalam ruang digital. Survei Microsoft menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *digital civility* terendah di ASEAN. Fakta ini mengejutkan, meskipun dalam keseharian kita sebenarnya sudah akrab dengan fenomenanya. Cobalah membaca kolom komentar di portal berita daring, terutama yang terkait isu pendidikan. Di sana, sumpah serapah dan kata-kata kasar bertebaran dengan begitu mudahnya. Keadaan ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah keadaban digital kita.

Jika keadaban di ruang publik saja sudah rapuh, bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan moralitas? Persoalan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. Karena itu, pemerintah mencoba menghadirkan kebijakan penguatan pendidikan karakter dengan gagasan “tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.” Pendekatan ini berangkat dari teori behavioristik dalam psikologi: membentuk kebiasaan melalui pembiasaan. Bangun pagi, disiplin beribadah, dan mengembangkan kebiasaan baik lainnya menjadi pintu masuk untuk mencetak karakter yang lebih kokoh.

Namun, tantangan yang kita hadapi tidak berhenti pada soal kebiasaan sehari-hari. Lebih dalam dari itu, ada persoalan serius terkait keberagamaan generasi muda. Penelitian mutakhir menunjukkan penurunan signifikan dalam komitmen keagamaan di kalangan generasi Z dan generasi alfa. Bahkan, tren ateisme dan agnostisisme mulai meningkat, termasuk di kalangan anak muda muslim. Data global menunjukkan bahwa setelah Kristen dan Islam, kelompok ateis dan agnostik kini menjadi salah satu yang terbesar. Fenomena ini menjadi alarm bagi bangsa yang selama ini menjadikan agama sebagai salah satu pilar utama kehidupan sosialnya.

Keterputusan nilai keagamaan antar-generasi bukanlah hal sepele. Ia bisa memunculkan krisis identitas, kegaman moral, bahkan potensi konflik dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai fondasi, keterputusan ini juga

berarti renggangnya ikatan kebangsaan. Apalagi di daerah dengan identitas religius yang kuat seperti Aceh, tantangan ini bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga tanggung jawab moral.

Jika semua tantangan ini kita hubungkan, akan tampak benang merah yang jelas: pendidikan Indonesia membutuhkan paradigma baru. Bukan lagi pendidikan yang semata mengejar angka akademik, melainkan pendidikan yang menyentuh tiga ranah utama: kecerdasan intelektual, kecakapan sosial-digital, dan spiritualitas. Tiga ranah ini ibarat tiga kaki penopang. Jika salah satunya rapuh, bangunan pendidikan akan timpang.

Karena itu, langkah perbaikan harus dilakukan secara komprehensif. Pertama, capaian akademik harus diperbaiki dengan metode pengajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa terjebak pada pola lama yang hanya menekankan hafalan. Kedua, pendidikan karakter perlu diperkuat, termasuk literasi digital yang berfokus pada keadaban. Generasi muda harus diajarkan bahwa menjadi pintar tanpa etika hanyalah melahirkan manusia-manusia egois yang merusak ruang publik. Ketiga, spiritualitas generasi harus dirawat. Bukan dengan indoktrinasi yang kaku, melainkan dengan pendekatan yang membumi dan sesuai realitas anak muda hari ini.

Pendidikan adalah cermin bangsa. Jika hari ini kita masih bergulat dengan skor PISA yang rendah, komentar digital yang kasar, dan generasi muda yang menjauh dari agama, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam cara kita mendidik. Namun, semua itu bukan alasan untuk pesimis. Justru inilah momentum untuk membangun paradigma baru pendidikan: pendidikan yang mencetak manusia cerdas, beradab, dan berakar pada nilai spiritual yang kuat. Hanya dengan jalan itu, kita bisa berharap Indonesia tidak sekadar menghasilkan generasi pintar, tetapi juga generasi yang bermartabat—siap menghadapi tantangan zaman sekaligus menjaga warisan nilai luhur bangsa.

Membicarakan masa depan anak-anak berarti membicarakan arah bangsa. Kita sering terjebak pada angka-angka nilai, ranking, dan pencapaian akademik, padahal yang jauh lebih penting adalah

bagaimana membentuk kebiasaan hidup yang sehat, karakter yang kuat, serta relasi sosial yang bermakna. Semua itu tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui pembiasaan sehari-hari yang konsisten.

Kenyataannya, anak-anak kita hari ini menghadapi tantangan gaya hidup yang serius. Mereka cenderung malas bergerak, terjebak dalam dunia digital yang membuat aktivitas fisik berkurang drastis. Olahraga pun bergeser dari gerakan tubuh menjadi sekadar gerakan jempol di layar gawai. Bila dibiarkan, kebiasaan ini jelas akan berdampak buruk, bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga pada daya tahan mental mereka. Karena itu, membiasakan olahraga sejak dini bukan pilihan, melainkan kebutuhan.

Begitu juga dengan pola makan. Makanan sehat dan bergizi kini kian tersisih oleh budaya *junk food*. Bahkan makanan tradisional yang kaya rasa dan bernilai budaya pun sering dianggap tidak cukup “nendang” bagi generasi muda. Lebih jauh, makanan kini juga terkait dengan gaya hidup. Ada yang memakannya sekadar untuk kenyang (*food for fit*), ada pula yang menjadikannya ajang gaya atau kesenangan semata (*food for fun*). Inilah yang harus diubah. Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah sejalan dengan kebutuhan itu: memastikan anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapat asupan yang layak, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa makanan bukan sekadar soal kenyang atau gaya, tetapi fondasi kesehatan.

Kebiasaan lain yang juga penting adalah belajar. Generasi saat ini cenderung ingin serba instan: hasil tinggi tanpa usaha berarti. Ini membuat proses belajar kehilangan maknanya. Padahal belajar bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membangun ketekunan, rasa ingin tahu, dan karakter yang tidak mudah menyerah. Jika pola instan ini dibiarkan, maka lahirlah generasi yang pintar di atas kertas, tetapi rapuh menghadapi tantangan nyata.

Di tengah itu semua, kita juga menghadapi gejala yang tak kalah mengkhawatirkan: *social disengagement*. Anak-anak kita makin jauh dari lingkungan sosialnya, makin asing dengan nilai dan tradisi budaya yang seharusnya mereka warisi. Identitas lokal memudar,

sementara ikatan kebangsaan pun melemah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu daerah atau satu bangsa, tetapi hampir di seluruh dunia. Namun bagi Indonesia yang kaya budaya, kehilangan identitas berarti kehilangan salah satu kekuatan utama dalam berbangsa.

Ada juga kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, yaitu tidur lebih awal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tidur sebelum pukul 10 malam memberi kualitas istirahat yang lebih baik dibanding tidur larut. Bangun pagi pun memberi energi berbeda: lebih segar, lebih siap menjalani aktivitas, dan lebih fokus belajar. Kebiasaan tidur sehat ini harus ditanamkan agar menjadi bagian dari disiplin hidup anak-anak.

Untuk menjadikan semua kebiasaan itu nyata, diperlukan program yang konkret. Salah satunya adalah **Pagi Ceria**—kegiatan yang sederhana tetapi penuh makna: senam, menyanyikan Indonesia Raya, dan berdoa sebelum belajar. Aktivitas ini menanamkan tiga hal sekaligus: kesehatan fisik, kecintaan pada tanah air, dan kesadaran spiritual. Di siang hari, ada juga gagasan *senam otak* untuk menyegarkan pikiran anak setelah jeda istirahat. Dengan cara ini, suasana belajar dibuat lebih gembira, tidak hanya menekan dan membebani.

Namun semua program tidak akan berjalan tanpa peran guru. Di sinilah letak masalah yang sering diabaikan. Selama ini, tugas membimbing siswa seolah hanya dibebankan pada guru *BK*. Akibatnya, guru *BK* sering dipersepsikan sebagai “polisi sekolah”—hanya muncul untuk menghukum murid bermasalah. Tidak heran bila banyak anak justru takut atau tidak suka pada guru *BK*. Padahal, menurut undang-undang, membimbing adalah tugas semua guru, bukan hanya guru *BK*.

Karena itu, gagasan *guru wali* menjadi relevan. *Guru wali* bukan wali kelas, melainkan guru yang mendampingi anak secara personal, mendengarkan curhatan mereka, memahami minat dan bakat, sekaligus memberi arahan. Peran ini bahkan bisa diakui sebagai bagian dari jam mengajar, sehingga guru tidak sekadar menghabiskan

waktu di depan kelas, tetapi juga hadir sebagai figur yang dekat dengan murid. Mengapa ini penting? Karena banyak anak sekarang tidak punya tempat aman untuk berbagi. Mereka lebih memilih curhat ke teman sebaya ketimbang guru atau orang tua. Bahkan orang tua pun sering gagal memahami anak karena merasa “lebih modern,” sementara anak justru merasa tidak didengar.

Membangun kebiasaan-kebiasaan baik bagi anak-anak bukan perkara sepele. Ia membutuhkan pendekatan sistematis, dukungan keluarga, sekolah, dan negara. Dari olahraga hingga pola makan, dari belajar hingga keterlibatan sosial, dari tidur yang sehat hingga suasana belajar yang gembira, semua harus diikat oleh pendampingan yang penuh perhatian.

Intinya, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu. Pendidikan adalah proses panjang menyiapkan manusia yang utuh: sehat, berkarakter, beridentitas, dan siap menghadapi masa depan. Jika kita berhasil membangun fondasi ini, maka generasi mendatang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh, berakar pada budaya, dan mampu membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Pendidikan karakter tidak bisa berhenti pada wacana. Ia harus hidup dalam keseharian siswa, dibangun melalui pengalaman yang nyata, bukan sekadar lewat teori di kelas. Karena itu, gagasan menjadikan kepanduan atau pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan langkah penting. Di sana siswa ditempa untuk mencintai tanah air, melatih disiplin, mengasah kepemimpinan, hingga menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Nilai-nilai seperti ini akan sulit tumbuh jika hanya diajarkan di ruang kelas. Justru melalui aktivitas lapangan, kerja sama tim, dan kepemimpinan di kegiatan kepanduan, karakter itu terbentuk secara alami.

Namun, sebaik apa pun program karakter yang disusun, keberhasilannya tetap bertumpu pada kualitas guru. Selama ini, banyak guru justru terjebak dalam urusan administratif yang tidak ada habisnya. Laporan demi laporan harus diunggah, bahkan sampai begadang semalaman. Padahal, energi besar mereka seharusnya

dicurahkan untuk mendidik, bukan untuk pekerjaan birokratis yang melelahkan. Kini, beban itu mulai dikurangi. Laporan cukup dibuat setahun sekali dan hanya dikirim ke kepala sekolah. Langkah sederhana, tapi dampaknya besar: guru punya ruang bernapas untuk benar-benar mengajar dengan sepenuh hati.

Selain mengurangi beban administratif, guru juga diberi kesempatan untuk berkembang. Ada kebijakan “satu hari guru belajar” yang memungkinkan mereka mengikuti pelatihan tanpa mengganggu jam mengajar. Hari khusus ini bukan untuk beristirahat, melainkan untuk memperkaya diri dengan pengetahuan baru, baik dalam bidang bimbingan konseling maupun metode pembelajaran. Pelatihan bisa disambungkan dengan akhir pekan, sehingga efektif dan tidak mengurangi waktu siswa di kelas. Lebih dari itu, pelatihan dihitung sebagai bagian dari jam kerja resmi, sehingga guru tidak perlu khawatir kehilangan haknya. Inisiatif ini penting agar guru tidak terjebak pada rutinitas lama. Guru harus terus belajar, karena dunia terus berubah. Guru yang enggan beradaptasi hanya akan menghasilkan pola ajar yang kering dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

Reformasi berikutnya menyentuh hal yang lebih mendasar: cara kita memahami pembelajaran itu sendiri. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan terlalu menekankan angka, skor ujian, dan ranking. Pendidikan menjadi sekadar lomba kuantitatif, bukan proses mendalam untuk memahami makna. Akibatnya terlihat jelas dalam skor PISA yang rendah, mencerminkan betapa sistem ini gagal menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman esensial. Karena itulah diperkenalkan pendekatan *deep learning* atau pembelajaran mendalam. Ini bukan kurikulum baru, melainkan cara pandang baru dalam mengajar: menekankan pemahaman, analisis, refleksi, dan kualitas, bukan sekadar hafalan atau angka. Targetnya ambisius, yakni 3,5 juta guru dilatih agar mampu menerapkan pendekatan ini. Dananya ditopang dari BOS, yang kini dikelola lebih transparan, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa investasi ini betul-betul untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tantangan terbesar datang dari karakter generasi yang sedang kita hadapi. Generasi Z dan generasi alfa tumbuh dalam dunia digital dengan rentang konsentrasi yang semakin pendek. Mereka tidak terbiasa mendengarkan ceramah panjang. Ketika diberi bacaan, yang diakses hanya judulnya, sementara isi sering diabaikan. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut *scroll culture*—budaya menggulir cepat tanpa mendalami. Dari sekadar membaca judul, mereka sering langsung mengambil kesimpulan, padahal tidak jarang judul justru menyesatkan. Kebiasaan ini berbahaya, karena melatih pola pikir serba instan dan dangkal.

Di sinilah urgensi *deep learning* benar-benar terasa. Pendidikan harus melawan arus budaya instan dengan melatih siswa berpikir kritis, mengolah informasi secara utuh, dan memahami perbedaan antara fakta dan opini. Guru harus bisa mengajak siswa masuk lebih dalam ke inti persoalan, bukan hanya menghafal permukaan. Dengan begitu, mereka tidak mudah terseret oleh informasi palsu, tidak gampang terprovokasi, dan mampu mengambil keputusan dengan nalar yang sehat.

Semua langkah ini—dari kependuan sebagai ekstrakurikuler wajib, penyederhanaan administrasi guru, kebijakan “satu hari guru belajar”, hingga implementasi pembelajaran mendalam—merupakan bagian dari upaya besar menata ulang arah pendidikan. Tujuannya sederhana tetapi penting: menyiapkan generasi masa depan yang berkarakter kuat, cerdas secara mendalam, dan relevan dengan tantangan zamannya. Pendidikan tidak boleh berhenti pada formalitas dan simbol-simbol. Ia harus hadir nyata dalam kualitas guru, metode belajar, serta karakter siswa yang terbentuk.

Jika konsistensi kebijakan ini dijaga, pendidikan Indonesia akan bergerak keluar dari jebakan angka-angka semu menuju substansi yang sejati. Dan pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya melahirkan lulusan dengan ijazah, tetapi generasi yang siap berpikir kritis, berkarakter tangguh, dan mampu membawa Indonesia melangkah percaya diri ke masa depan.

Pendidikan Indonesia sedang memasuki fase baru yang menantang sekaligus menjanjikan. Salah satu gebrakan penting adalah dimasukkannya coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah. Kurikulum telah disiapkan, pelatihan bagi guru sudah dimulai, dan model pembelajaran pun beragam—ada yang berbasis internet, ada yang unplug tanpa perangkat digital, bahkan ada yang manual. Meskipun belum semua sekolah siap menerapkannya, langkah ini patut diapresiasi karena menjadi bekal dasar anak-anak untuk menghadapi era teknologi digital. Tidak hanya soal keterampilan teknis, pendidikan ini juga menekankan pada etika penggunaan teknologi, sebuah aspek yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk inovasi.

Di era AI seperti sekarang, kita sering terpesona oleh kecerdasan mesin yang kadang tampak lebih pintar dari manusia, terutama dalam menyajikan informasi. Namun, ada garis batas yang tidak boleh dilupakan: analisis, kebijaksanaan, dan intuisi manusia tidak bisa digantikan oleh algoritma. AI hanya sebaik data yang dimasukkan, dan ketika data itu keliru, hasilnya bisa menyesatkan. Bahaya terbesar justru muncul ketika masyarakat tidak kritis dan menganggap AI sebagai kebenaran absolut. Karena itu, pendidikan harus mengambil peran strategis: bukan hanya menyiapkan generasi yang melek teknologi, tetapi juga generasi yang mampu memilah, menimbang, dan memberi makna pada informasi yang mereka temui.

Dukungan terhadap transformasi pendidikan tidak hanya berhenti di kurikulum. Dari sisi infrastruktur, pemerintah berencana merevitalisasi 10.440 sekolah di seluruh Indonesia. Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga menyiapkan sarana modern agar pembelajaran lebih interaktif. Salah satunya melalui penyediaan 300 ribu smartboard untuk mendukung konsep smart classroom. Bayangkan suasana belajar tanpa lagi papan kapur, melainkan papan digital interaktif yang membuka ruang bagi pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Ini merupakan simbol perubahan besar: dari sekolah yang serba konvensional menuju ruang belajar yang relevan dengan kebutuhan abad 21.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang selama ini sering mendapat stigma sebagai penyumbang pengangguran. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Sejak awal, SMK sebenarnya dirancang untuk tiga tujuan: bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha—yang sering disingkat BMW. Namun, praktik di lapangan memang menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi dan realitas. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mulai menerapkan sejumlah strategi.

Pertama, ada SMK dengan masa belajar empat tahun, di mana tahun terakhir difokuskan sepenuhnya pada persiapan masuk dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan P2MI, telah dibangun untuk memfasilitasi penyaluran lulusan. Kedua, siswa SMK kini bisa melaksanakan praktik di Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga mereka tidak hanya mengandalkan fasilitas sekolah yang sering kali terbatas. Dari BLK, mereka bisa memperoleh sertifikat pelatihan resmi yang diakui, selain ijazah SMK. Dengan kombinasi ini, peluang mereka untuk diterima di pasar kerja menjadi lebih besar. Ketiga, jalur wirausaha tidak diabaikan. Mata pelajaran kewirausahaan diwajibkan di SMK agar siswa terbiasa berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko membangun usaha sendiri.

Pembenahan juga menyentuh aspek kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah kini tidak lagi dibatasi hanya dari kalangan guru penggerak. Semua guru berkesempatan, selama memenuhi syarat tertentu, misalnya bagi PNS minimal golongan 3C agar wibawa dan otoritasnya terjaga. Kebijakan ini sangat penting karena sebelumnya lebih dari 50 ribu sekolah di Indonesia sempat tidak memiliki kepala sekolah definitif akibat aturan yang terlalu sempit. Padahal, kepala sekolah memegang peran vital, mulai dari menandatangani ijazah hingga memastikan arah kebijakan sekolah berjalan baik.

Tidak berhenti di situ, peran pengawas sekolah juga diperkuat kembali. Meski regulasi formalnya masih dalam proses, pengawas

direncanakan dihidupkan kembali sebagai jabatan fungsional yang bertugas mendampingi sekolah, memastikan mutu pembelajaran, serta memperkuat pendidikan karakter. Kehadiran pengawas bukan hanya soal administrasi, melainkan menjadi mitra strategis bagi guru dan kepala sekolah dalam mengawal kualitas pendidikan.

Jika ditarik benang merah, semua langkah ini menunjukkan bahwa arah pendidikan kita bergerak ke titik yang lebih progresif. Pendidikan tidak lagi semata-mata mengandalkan metode lama, tetapi berusaha menjawab kebutuhan zaman: teknologi, kemandirian, kreativitas, dan etika. Di satu sisi, generasi muda dibekali dengan keterampilan teknis yang membuat mereka relevan di dunia kerja global. Di sisi lain, mereka juga dilatih untuk menjadi manusia yang kritis, berkarakter, dan mampu berdiri tegak menghadapi tantangan moral yang lahir dari perkembangan teknologi.

Harapan besar itu kini sedang diuji. Apakah sekolah, guru, siswa, dan seluruh ekosistem pendidikan siap melangkah bersama ke arah baru ini? Tantangan tentu tidak sedikit: keterbatasan infrastruktur di daerah, kesiapan guru, hingga kesenjangan digital yang masih lebar. Namun, dengan niat memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, dari kurikulum hingga kepemimpinan, kita punya peluang besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, berdaya saing, dan beretika. Pendidikan pada akhirnya bukan soal mengikuti arus teknologi semata, melainkan tentang membangun manusia yang lebih utuh.

Salah satu terobosan penting dalam pendidikan kita hari ini adalah hadirnya tes kemampuan akademik. Jika dulu kita mengenalnya dengan nama Ujian Nasional, kini bentuknya lebih sederhana dan sekaligus lebih manusiawi. Kata “ujian” sering kali memunculkan rasa takut dan tekanan, sehingga proses belajar hanya menjadi beban. Tes kemampuan akademik hadir untuk mengubah cara pandang itu: bukan lagi soal lulus atau tidak lulus, melainkan soal seberapa jauh kemampuan yang sudah dimiliki siswa.

Yang menarik, tes ini tidak bersifat wajib. Artinya, siswa diberi ruang untuk menentukan kesiapan mereka sendiri. Bagi yang ingin ikut, silakan, dan bagi yang belum merasa siap, tidak perlu terpaksa. Mekanisme ini terasa lebih adil sekaligus mendidik, karena menekankan prinsip bahwa pendidikan adalah proses, bukan sekadar ritual tahunan untuk menentukan nasib.

Lebih jauh, hasil tes ini pun tidak digunakan sebagai penentu kelulusan. Undang-undang sudah jelas menegaskan bahwa yang berwenang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan, bukan pemerintah pusat. Namun, nilai dari tes ini tetap sangat penting. Ia menjadi instrumen seleksi untuk banyak hal, terutama ketika siswa ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.

Logika yang dipakai bisa disamakan dengan tes TOEFL. Semua orang yang ikut tes TOEFL akan mendapatkan skor, hanya saja tingginya skor menentukan peluang apa yang bisa diraih. Skor 350 atau 400 tetap berarti, hanya saja mungkin cukup untuk kepentingan dalam negeri. Namun, untuk beasiswa ke luar negeri, misalnya Amerika, minimal dibutuhkan skor 550. Jadi bukan berarti skor rendah tidak berguna, tetapi kegunaannya berbeda. Begitu pula dengan tes kemampuan akademik: setiap nilai punya arti, hanya konteks pemanfaatannya yang tidak sama.

Pendekatan ini sebenarnya mengajarkan satu hal mendasar: belajar itu bukan untuk menghindari kegagalan, tetapi untuk mengukur seberapa jauh usaha kita. Sistem pendidikan selama ini, dengan semua siswa naik kelas dan semua lulus, menimbulkan kesan bahwa rajin atau malas sama saja hasilnya. Tidak ada konsekuensi nyata bagi mereka yang tidak serius belajar. Pada akhirnya, semangat belajar pun memudar.

Di sinilah tes kemampuan akademik hadir sebagai solusi. Ia bukan cambuk yang menakutkan, melainkan cermin yang jujur. Siswa yang sungguh-sungguh belajar akan melihat hasil usahanya tercermin dalam nilai, dan nilai itu kelak akan membuka pintu ke lebih banyak kesempatan. Sebaliknya, mereka yang malas akan menyadari bahwa

tanpa kerja keras, jalan menuju kesempatan itu menjadi lebih sempit.

Jika dipandang lebih luas, tes kemampuan akademik bisa menjadi langkah penting untuk menggeser paradigma pendidikan kita. Selama ini, pendidikan sering kali dipersepsikan hanya sebagai jalan menuju kelulusan formalitas. Dengan adanya tes ini, arah pendidikan diarahkan kembali ke esensi awalnya: membentuk manusia yang mau belajar, mau berusaha, dan menyadari bahwa setiap pencapaian datang dari keseriusan, bukan dari sistem yang memanjakan.

Dengan demikian, tes kemampuan akademik bukan sekadar instrumen teknis. Ia adalah simbol perubahan, sebuah ajakan agar generasi muda kita lebih serius menyiapkan diri menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, dunia tidak menanyakan kita lulus atau tidak, tetapi sejauh mana kemampuan kita bisa diandalkan dalam menghadapi tantangan nyata.



Transformasi Kepemimpinan Sekolah:

Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah

Senin, 23 Juni 2025

Peluncuran Program Kepemimpinan **Sekolah** pada 23 Juni 2025 bukan sekadar agenda formal, melainkan penanda bahwa pendidikan di Indonesia tengah diarahkan menuju pembenahan yang lebih menyeluruh. Pendidikan yang bermutu untuk semua anak bangsa memang tidak dapat hadir hanya dengan wacana, tetapi membutuhkan kombinasi antara kebijakan, infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan dukungan seluruh ekosistem pendidikan.

Salah satu fokus utama yang ditegaskan adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah menyiapkan langkah besar melalui program revitalisasi dan rehabilitasi lebih dari **10.440 satuan pendidikan** di berbagai wilayah. Angka ini berpotensi bertambah karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, sebuah langkah yang patut diapresiasi mengingat kebutuhan sekolah di Indonesia begitu beragam dan mendesak. Tidak hanya soal memperbaiki gedung yang rusak, melainkan juga menyiapkan ruang-ruang belajar baru yang relevan dengan tantangan era digital. Di sinilah konsep *smart classroom* hadir, sebuah terobosan yang menandai transisi menuju pembelajaran berbasis teknologi, sejalan dengan arahan prioritas Presiden.

Namun, mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan gedung yang baik dan perangkat digital yang canggih. Jantung pendidikan tetap ada pada guru. Karena itu, kebijakan yang diarahkan untuk

peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru menjadi sorotan penting. Sertifikasi guru dijalankan bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dan dedikasi mereka. Di sisi lain, program pendidikan lanjutan dibuka untuk ribuan guru yang belum menyelesaikan kuliah S1 atau D4. Bahkan, ada program khusus untuk mereka yang sebenarnya sudah menempuh kuliah tetapi terhenti di tahap akhir, sekadar karena skripsi yang tertunda. Lewat **program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** yang bekerja sama dengan LPTK di seluruh Indonesia, guru-guru ini diberi kesempatan nyata untuk meraih gelar akademik dan meningkatkan kualifikasi.

Upaya peningkatan kapasitas guru juga dijalankan melalui **Pendidikan Profesi Guru (PPG)**, di mana tahun ini ditargetkan sekitar **806.000 guru** akan ikut serta. Angka ini menunjukkan skala kebijakan yang ambisius sekaligus mendesak, karena peningkatan kompetensi guru berarti memperkuat kualitas pembelajaran yang dirasakan langsung oleh murid di kelas. Dengan guru yang lebih profesional, sistem pendidikan akan punya fondasi yang jauh lebih kuat.

Dari keseluruhan rangkaian kebijakan ini, tampak bahwa pemerintah berusaha menyentuh dua hal sekaligus: membenahi struktur fisik pendidikan dan memperkuat sumber daya manusianya. Perpaduan keduanya menjadi syarat mutlak untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar bermutu. Gedung yang nyaman tanpa guru yang mumpuni akan sia-sia, sementara guru yang hebat tanpa dukungan fasilitas yang memadai juga akan kesulitan menjalankan perannya.

KEPEMIMPINAN SEKOLAH

Program Kepemimpinan Sekolah menjadi simpul yang menghubungkan semua upaya tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan administrasi, tetapi juga kepemimpinan yang kuat di tingkat sekolah. Kepala sekolah, guru, dan pengawas perlu diberdayakan bukan

sekadar sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai motor penggerak perubahan di lapangan.

Dengan arah kebijakan seperti ini, ada optimisme baru yang bisa kita tangkap. Pendidikan di Indonesia memang menghadapi tantangan besar: kesenjangan kualitas antarwilayah, jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi, hingga keterbatasan infrastruktur. Namun, langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya keseriusan untuk menutup celah tersebut. Jika konsistensi kebijakan ini terus dijaga dan pengawasan dilakukan dengan ketat, cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua bukan lagi sebatas slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan langsung oleh jutaan siswa di seluruh Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan selalu bertumpu pada kualitas guru. Namun, peran guru tidak bisa hanya dipandang dari sisi teknis mengajar di kelas, melainkan juga bagaimana mereka terus dibekali dengan kemampuan baru agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Tahun ini, berbagai pelatihan telah digulirkan dengan tujuan memberi bekal yang lebih luas bagi para pendidik. Salah satunya adalah pelatihan khusus bagi guru coding dan kecerdasan artifisial yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Kehadiran pelatihan ini tidak sekadar formalitas, tetapi sebuah pengakuan bahwa masa depan pendidikan membutuhkan literasi digital yang kuat, dan guru harus menjadi garda terdepan untuk itu.

Selain itu, pelatihan pembelajaran mendalam atau *deep learning* juga mulai diperkenalkan. Tidak berhenti pada ruang kelas lokal, beberapa guru bahkan diberi kesempatan berharga untuk melakukan observasi langsung ke Australia. Mereka belajar bagaimana praktik pembelajaran mendalam diterapkan di sana, lalu membawa pulang wawasan baru yang bisa dijadikan referensi bagi konteks Indonesia. Pengalaman ini bukan hanya soal melihat metode pengajaran, melainkan juga soal bagaimana menanamkan kebiasaan reflektif dalam dunia pendidikan kita: belajar dari pengalaman luar negeri tanpa kehilangan jati diri nasional.

Di sisi lain, pendidikan karakter juga mendapat porsi penting melalui penguatan peran guru bimbingan konseling (BK). Namun gagasan yang muncul lebih besar dari sekadar memperkuat guru BK. Setiap guru, apapun bidang ajarnya, seharusnya juga memiliki tanggung jawab bimbingan konseling. Dengan cara ini, nilai dan karakter tidak hanya diajarkan dalam sesi khusus, tetapi melekat dalam setiap mata pelajaran. Pendidikan tidak lagi semata-mata mengejar penguasaan pengetahuan, melainkan juga membentuk pribadi yang tangguh, beretika, dan berkarakter. Inilah esensi tujuan pendidikan nasional yang sering terabaikan: membangun manusia seutuhnya.

Upaya penguatan kapasitas juga tidak terbatas pada guru. Kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, bahkan tenaga pendukung seperti penjaga sekolah juga termasuk dalam lingkaran peningkatan kapasitas. Kesadaran ini membuat nomenklatur lembaga pelatihan berubah: bukan lagi sekadar “balai guru penggerak”, tetapi menjadi “balai guru, pendidik, dan tenaga kependidikan.” Perubahan sederhana dalam nama ini sebenarnya mencerminkan pandangan besar: keberhasilan pembelajaran adalah kerja kolektif dari seluruh ekosistem sekolah. Pendidikan yang baik tidak mungkin lahir hanya dari guru yang hebat, tetapi juga dari sistem pendukung yang kokoh.

Selain program pelatihan, kebijakan administratif terhadap guru juga mulai lebih fleksibel. Guru tidak lagi diwajibkan mengajar penuh 24 jam tatap muka. Kini, 16 jam mengajar sudah dianggap cukup, sementara sisanya dapat dipenuhi dengan aktivitas lain yang juga bermanfaat, seperti pelatihan, bimbingan konseling, atau keterlibatan dalam organisasi masyarakat. Bahkan, satu hari dalam sepekan ditetapkan sebagai hari belajar guru. Kebijakan ini bukan sekadar memberi waktu luang, tetapi sebuah langkah strategis agar guru benar-benar punya ruang untuk mengembangkan diri. Jika pelatihan dilakukan pada akhir pekan, misalnya Sabtu dan Minggu, maka guru mendapat hari Jumat untuk belajar, sehingga bisa memiliki tiga hari penuh untuk meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, mereka bisa melanjutkan pendidikan formal, mengikuti kursus, atau

memperdalam keterampilan tanpa harus mengorbankan kewajiban mengajar.

GURU: PEMIMPIN PEMBELAJAR

Semua langkah ini sebenarnya berpangkal pada sebuah kesadaran sederhana: guru juga manusia yang harus terus belajar. Pendidikan nasional tidak akan pernah bisa maju jika guru diperlakukan hanya sebagai pengajar yang tugasnya menyampaikan kurikulum semata. Mereka perlu ruang untuk berinovasi, kesempatan untuk memperbarui diri, serta dukungan sistem yang memberi mereka penghargaan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jika guru dibiarkan terus berada dalam sistem lama yang kaku dan penuh beban administratif, mustahil mereka bisa menghasilkan generasi yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menghadirkan pendidikan yang bermakna memang tidak bisa ditempuh dengan langkah instan. Namun, pelatihan-pelatihan, kebijakan baru, serta perluasan ruang lingkup peningkatan kapasitas adalah fondasi yang baik untuk perubahan jangka panjang. Guru yang terus belajar akan menumbuhkan murid yang terus berkembang. Dan jika murid tumbuh dengan bekal pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang kuat, maka bangsa ini pun akan bergerak menuju masa depan yang lebih cerah.

Pendidikan selalu menjadi ruang yang sarat dengan harapan, dan di dalamnya peran guru, pendidik, tenaga pendidikan, hingga kepala sekolah adalah kunci yang tak tergantikan. Betapa pun kita sering menggaungkan istilah *student-centered learning* atau pembelajaran yang berpusat pada murid, tetap saja semua itu tidak akan bermakna bila guru tidak hadir sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Guru bukan sekadar sosok yang memberi instruksi, melainkan pemimpin orkestra yang menjaga harmoni dalam kelas. Tanpa tangan yang mengarahkan, irama belajar bisa sumbang: murid mungkin tampak aktif, tetapi arah dan kedalaman proses belajarnya tidak jelas.

Di sinilah kesalahpahaman sering muncul. Ada yang mengira bahwa karena pembelajaran sudah berbasis murid dan menekankan

active learning, guru bisa mundur ke pinggir panggung, bahkan sibuk dengan hal-hal lain di luar proses belajar. Pandangan semacam ini berbahaya. Pendidikan rusak bukan karena murid terlalu aktif, melainkan ketika guru kehilangan perannya sebagai penggerak. *Student-centered* bukan berarti guru pasif; justru sebaliknya, ia menuntut guru untuk semakin terlibat, memastikan energi belajar terjaga, menginspirasi arah berpikir, dan memelihara semangat setiap murid agar pembelajaran benar-benar hidup.

Namun, gagasan tentang pembelajaran yang bermakna tidak berhenti pada tataran konsep. Ada langkah konkret yang sedang ditempuh melalui kebijakan internal. Naskah mengenai pembelajaran mendalam telah dirampungkan, pelatihan untuk para guru juga sudah dijalankan. Semua ini bukan wacana kosong, melainkan persiapan sistematis agar pada waktunya, metode tersebut bisa diterapkan secara bertahap. Tidak semua sekolah dipaksa sekaligus, melainkan dimulai dari yang benar-benar siap, agar implementasi berjalan efektif dan tidak menjadi sekadar formalitas.

Pendekatan ini penting karena kualitas pembelajaran harus diperbaiki dari hulunya, bukan hanya di hilir. Selama ini, perhatian pendidikan sering kali tersedot pada hasil akhir, seperti nilai ujian atau prestasi yang tampak di permukaan, padahal akar persoalannya justru ada pada proses. Dengan membenahi hulu melalui pembelajaran mendalam, kita sedang menanam pondasi baru: membangun pola pikir kritis, membentuk rasa ingin tahu, dan menumbuhkan kemampuan belajar yang berkelanjutan pada murid.

Inilah upaya menjawab masalah pendidikan dengan inovasi, bukan sekadar tambal sulam. Harapannya, langkah ini bisa membawa pendidikan kita keluar dari jebakan rutinitas lama dan mengantarkannya menuju ekosistem belajar yang lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih relevan dengan tantangan zaman. Pendidikan yang berpusat pada murid tetap memerlukan guru, dan pembelajaran aktif tetap membutuhkan arahan. Di tengah perubahan, guru selalu

menjadi pusat gravitasi yang menjaga agar arah pendidikan tidak kehilangan makna dasarnya.

TANTANGAN PENDIDIKAN: KUALITAS

Persoalan mendasar pendidikan kita hari ini bukan lagi sekadar ada atau tidaknya sekolah, atau berapa lama anak-anak duduk di bangku kelas. Tantangan sesungguhnya terletak pada kualitas: apakah sekolah betul-betul membuat anak belajar. UNESCO sudah lama mengingatkan adanya fenomena *schooling without learning*—sekolah tanpa pembelajaran yang bermakna. Di Indonesia, realitas ini makin terasa akibat pandemi COVID-19 yang meninggalkan warisan pahit berupa *learning loss*. Kita dihadapkan pada generasi yang bersekolah, tetapi tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana mestinya.

Maka, tugas utama kita adalah memperbaikinya dari hulu, bukan hanya tambal sulam di hilir. Strategi pembelajaran perlu diubah secara mendasar, dan salah satu kuncinya adalah memperluas pemahaman tentang *deep learning*. Penting untuk ditegaskan bahwa *deep learning* bukanlah kurikulum baru yang membebani, melainkan pendekatan pembelajaran. Sayangnya, masih banyak kesalahpahaman yang beredar, terutama di media sosial, seolah-olah pemerintah sedang mengganti kurikulum dengan istilah baru. Narasi keliru seperti ini berbahaya, karena bisa mereduksi upaya serius memperbaiki kualitas pembelajaran menjadi sekadar isu viral yang menyesatkan.

Selain soal strategi pembelajaran, ada hal lain yang tak kalah penting: kepemimpinan sekolah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kepala sekolah memegang peran sentral. Memang benar, mereka bukan satu-satunya faktor, tetapi peran kepala sekolah sering kali menjadi kunci yang menentukan arah ekosistem belajar di sekolah. Selama ini, kepemimpinan kepala sekolah kerap dipandang sebatas fungsi administratif, padahal tuntutan zaman menghendaki lebih dari itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan transformatif: kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru, menginspirasi siswa, menjalin kolaborasi dengan pengawas, pemerintah daerah,

dan stakeholder lain, serta mendorong inovasi. Kepala sekolah harus hadir bukan sebagai birokrat pendidikan, melainkan sebagai motor penggerak perubahan.

Namun, kepemimpinan yang kuat tidak mungkin muncul tanpa pelatihan yang tepat. Di sinilah letak persoalan lain. Selama ini, pelatihan sering kali hanya formalitas, dijalani sekadar untuk memenuhi kewajiban. Ada yang berlangsung secara daring tetapi tidak benar-benar menyentuh kebutuhan, atau bahkan sifatnya “on-off”—bergairah sebentar lalu redup tanpa kesinambungan. Padahal, yang kita butuhkan adalah pelatihan yang dirancang dengan pendekatan integratif dan transformatif, sehingga benar-benar melahirkan pemimpin pendidikan yang berkepribadian tangguh, memiliki kompetensi utuh, dan berani melakukan terobosan. Dengan begitu, pelatihan bukan hanya menjadi ajang belajar di atas kertas, tetapi menjadi ruang penguatan kapasitas nyata yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing.

Di luar soal kepemimpinan, distribusi guru juga menjadi tantangan besar. Selama ini banyak yang berasumsi bahwa kita kekurangan guru, padahal kenyataannya jumlah guru secara nasional relatif cukup. Persoalannya adalah distribusi yang timpang. Ada sekolah yang muridnya menumpuk hingga kekurangan tenaga pengajar, sementara di sisi lain ada sekolah negeri yang justru kekurangan murid. Fenomena absurd bahkan terjadi: ada SD negeri dengan hanya 19 murid, tetapi memiliki 11 guru. Dari sudut pandang teori pembelajaran, ini kondisi yang ideal karena rasio guru-murid sangat kecil, tetapi dari sisi keuangan jelas membebani negara. Di sisi lain, ada pula sekolah negeri yang harus digabung karena minim peminat.

Kondisi timpang ini mendorong lahirnya kebijakan baru, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, yang memungkinkan guru PNS maupun P3K ditugaskan di sekolah swasta. Langkah ini bukan hanya soal pemerataan beban mengajar, melainkan juga bagian dari membangun

ekosistem pendidikan yang sehat. Negeri dan swasta tidak boleh dipandang sebagai dua dunia yang terpisah, melainkan harus saling melengkapi. Komunikasi antarpengelola pendidikan perlu diperkuat, sehingga solusi bisa lahir bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Semua ini menunjukkan bahwa perbaikan pendidikan bukanlah urusan satu pihak. Pemerintah pusat hanya bisa membuat kebijakan, tetapi implementasinya sangat bergantung pada peran kepala daerah, karena merekalah yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan penempatan guru maupun kepala sekolah. Kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, daerah, kepala sekolah, guru, asosiasi, hingga masyarakat luas adalah syarat mutlak. Tanpa itu, perubahan hanya berhenti di atas kertas.

Pendidikan bermutu bukan sekadar janji manis di pidato atau visi misi di dokumen resmi. Ia adalah kerja kolektif yang menuntut komitmen, kolaborasi, dan konsistensi. Perubahan strategi pembelajaran, penguatan kepemimpinan sekolah, pemerataan distribusi guru, hingga penyempurnaan pelatihan hanyalah bagian dari jalan panjang menuju tujuan itu. Tantangannya memang kompleks, tetapi kita tidak punya pilihan selain menjalaninya. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa bergantung pada satu hal: apakah sekolah benar-benar menjadi tempat anak-anak belajar, tumbuh, dan bertransformasi, atau hanya sekadar gedung yang ramai setiap pagi tapi hampa makna.

42 Konvergensi Peradaban dan Pesantren Masa Depan:

International Conference on the Transformation of
Pesantren DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Selasa, 24 Juni 2025

Dunia hari ini sedang bergerak ke arah yang kian kompleks. Globalisasi, teknologi, dan interaksi antarbudaya telah mengubah cara manusia memahami dirinya dan orang lain. Jika di masa lalu narasi besar yang sering digaungkan adalah “benturan peradaban” ala Huntington, kini tanda-tanda menunjukkan bahwa yang lebih dominan justru bukan benturan, melainkan pertemuan. Inilah yang oleh Kishore Mahbubani disebut sebagai *The Great Convergence*: titik temu baru yang lahir dari keterhubungan dunia.

Dalam realitas Indonesia, konvergensi ini terlihat jelas di banyak bidang. Pertama adalah konvergensi keagamaan. Dahulu, perbedaan antara kelompok tradisionalis dan modernis begitu tegas. NU dengan tradisinya, Muhammadiyah dengan modernismenya, sering diposisikan sebagai dua kutub yang berseberangan. Namun kini batas-batas itu kian kabur. Banyak santri dari keluarga NU bersekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah, begitu juga anak-anak Muhammadiyah menempuh studi di UIN atau pesantren NU. Mereka belajar pada guru yang sama, mengakses literatur yang serupa, dan berinteraksi dalam ruang akademik yang terbuka. Akibatnya, lahirlah identitas-identitas baru yang lebih cair.

Fenomena yang oleh Munir Mulkan pernah dipetakan ke dalam beberapa varian Muhammadiyah—seperti Muhammadiyah

Ikhlas, Muhammadiyah Ahmad Dahlan, MUNU (Muhammadiyah-NU), hingga Marmud (Marhaenis Muhammadiyah)—menunjukkan bahwa garis batas ideologis kini tidak lagi kaku. Ada Muhammadiyah yang tetap tegas dengan puritanismenya, ada yang rasional dan terbuka, ada pula yang NU tapi berkhidmat di Muhammadiyah, bahkan ada yang tetap Muhammadiyah namun secara politik dekat dengan PDI Perjuangan. Semua ini adalah gambaran nyata bahwa agama, organisasi, dan ideologi kini lebih banyak bertemu ketimbang bertabrakan.

Kedua adalah konvergensi politik. Jika dulu partai Islam dan partai nasionalis dipisahkan oleh jurang ideologis, kini realitasnya berbeda. Partai-partai Islam tampil lebih terbuka, tidak eksklusif hanya untuk kalangan muslim. Sebaliknya, partai-partai nasionalis juga menampung aspirasi keagamaan. Ini menandakan bahwa dikotomi politik berbasis agama makin kehilangan relevansi. Yang lebih penting bukanlah apakah sebuah partai membawa label “Islam” atau tidak, melainkan apakah ia mampu menjawab kebutuhan publik dengan adil dan terbuka.

Ketiga adalah konvergensi sosial. Perubahan ekonomi sejak tahun 1990-an memperlihatkan mobilitas sosial yang begitu cepat. Banyak masyarakat dari kelas bawah kini menjelma menjadi kelompok elit, memimpin bisnis, memegang jabatan strategis, atau mengisi ruang publik yang dulu hanya dikuasai kalangan tertentu. Struktur sosial yang semakin cair ini membuat interaksi lintas kelas lebih mudah terjadi. Pertemuan-pertemuan lintas latar belakang sosial melahirkan jejaring baru, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa perbedaan bukanlah pemisah, melainkan peluang untuk kolaborasi.

Tentu, bukan berarti tidak ada benturan. Mahbubani sendiri mengakui bahwa *clash* tetap ada, namun lebih sering berupa benturan kebudayaan, bukan peradaban. Peradaban besar, pada dasarnya, memuat nilai-nilai universal yang bisa diterima siapa saja: keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itulah, meski perbedaan budaya bisa memicu gesekan, nilai-nilai

peradaban memungkinkan manusia mencari titik temu.

Dalam konteks inilah pesantren memainkan peran penting. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga membentuk karakter bangsa. Pesantren memiliki potensi besar menjadi jembatan konvergensi. Di dalamnya, santri belajar agama sekaligus berinteraksi dengan realitas sosial. Di pesantren juga tertanam nilai-nilai inklusif: hidup sederhana, saling menghormati, serta keterbukaan terhadap perbedaan.

Lebih jauh, pesantren bisa berperan sebagai “ruang tengah” yang mempertemukan berbagai arus pemikiran. Dalam situasi dunia yang penuh keterhubungan ini, pesantren tidak cukup hanya menjadi penjaga tradisi, melainkan juga harus menjadi penghubung peradaban. Santri harus mampu membaca literatur klasik sekaligus menguasai isu global. Mereka perlu mendalami kitab kuning sekaligus akrab dengan diskursus modern, mulai dari sains, teknologi, hingga politik global.

Konvergensi bukan berarti hilangnya identitas, melainkan transformasi identitas menuju bentuk yang lebih matang. Bagi pesantren, ini adalah peluang untuk menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil ‘alamin bukanlah slogan kosong, melainkan kenyataan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Justru di era globalisasi inilah pesantren semakin relevan: ia bisa menawarkan kebijaksanaan lokal yang berpadu dengan nilai-nilai universal, menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam yang inklusif, moderat, dan berakar kuat pada tradisi.

Maka, alih-alih takut pada benturan, kita perlu menyambut konvergensi dengan kesiapan. Pesantren dapat menjadi motor penggerak pertemuan peradaban, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Dari bilik-bilik pesantren, dari doa para kiai dan nyai, lahir generasi yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan akarnya. Inilah jalan panjang yang akan memastikan bahwa konvergensi peradaban bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang menguatkan persaudaraan umat manusia.

Fenomena sosial di Eropa belakangan ini memperlihatkan sebuah dinamika besar yang sulit diabaikan. Ketegangan yang kadang muncul bukan semata lahir dari kebencian yang mendalam, melainkan lebih banyak disebabkan oleh ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menghadapi perubahan. Perubahan itu nyata, terukur, dan semakin terasa dari waktu ke waktu: Islam tumbuh menjadi agama dengan perkembangan paling pesat di benua tersebut.

Di banyak kota, masjid-masjid kini penuh sesak. Salat Jumat tidak cukup dilaksanakan sekali, bahkan ada yang harus dibagi menjadi dua atau tiga gelombang. Pada momentum besar seperti Iduladha, jamaah bisa sampai tiga kali bergelombang. Pemandangan ini kontras dengan kondisi gereja yang kian kosong, sebagian ditutup, bahkan dijual dan kemudian dibeli umat Islam untuk dijadikan masjid. Salah satunya Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda, yang sebelumnya adalah sebuah gereja. Ornamen gerejanya masih ada, tetapi kini bangunan itu hidup kembali sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam. Fenomena ini bukan sekadar simbol kehadiran, tetapi juga cermin bagaimana komunitas Muslim mampu berakar dan bertumbuh di tanah baru.

Generasi baru Muslim di Eropa juga semakin terlihat di ruang publik. Dari lapangan sepak bola misalnya, wajah Prancis modern sudah berubah. Nama-nama besar seperti Karim Benzema atau Ousmane Dembélé menunjukkan bahwa meski lahir dan besar di Eropa, identitas keislaman tetap melekat kuat. Sementara itu, masyarakat Eropa tradisional justru menghadapi persoalan demografi. Tingkat kelahiran rendah, bahkan di sejumlah negara angkanya negatif. Populasi kian menua, dan secara perlahan ruang-ruang sosial diisi oleh komunitas Muslim yang jumlah anaknya relatif lebih banyak. Tidak berlebihan bila ada yang melihat ini sebagai manifestasi dari hadis Nabi: menikahlah dengan pasangan yang penyayang dan subur, agar umat semakin banyak.

Kota-kota besar seperti Birmingham, Bradford, hingga London kini mencerminkan wajah baru Inggris: lebih beragam, lebih berwarna.

Komunitas dari India, Pakistan, Bangladesh, hingga generasi Muslim Eropa sendiri menjadikan Inggris berbeda dari wajah klasiknya. Bahkan ada yang menyebut sebagian kawasan sebagai miniatur desa-desa asal, lengkap dengan budaya dan kekhasan masing-masing. Identitas Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan penuh militansi, bukan dalam arti keras, melainkan dalam komitmen yang kuat untuk mempertahankan keyakinan.

Yang menarik, generasi Muslim baru ini bukanlah generasi yang menutup diri dari zaman. Mereka menjaga tradisi, membaca kitab, melestarikan nilai, tetapi pada saat yang sama juga percaya diri memasuki dunia modern. Inilah yang disebut sebagai *traditional Muslim in the modern world*. Mereka bukan kelompok yang merasa terasing di tengah arus globalisasi, justru tampil dengan keyakinan bahwa tradisi yang kuat menjadi modal untuk berinteraksi dalam dunia modern. Dari sini lahir konvergensi: Islam dan modernitas tidak lagi selalu dipandang berseberangan, melainkan bisa saling melengkapi.

Fenomena ini bahkan menjangkau gaya hidup sehari-hari. Kesadaran halal kini semakin luas. Umat Islam di Eropa tidak lagi berhenti pada pemahaman bahwa halal sekadar berarti tidak mengandung babi. Lebih dari itu, halal juga mencakup proses penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang menarik, restoran halal kini banyak dikunjungi bukan hanya oleh Muslim, melainkan juga non-Muslim. Para penggemar kuliner menilai daging halal terasa lebih segar dan lezat karena darahnya keluar sempurna saat disembelih. Hal ini menambah nilai lebih yang justru memperkuat eksistensi halal sebagai standar kualitas, bukan hanya identitas agama.

Dalam kerangka besar, semua dinamika ini membuat Eropa berada dalam fase transisi. Ya, kadang ada ketegangan, bahkan terasa seperti “benturan peradaban.” Tetapi jika dilihat lebih jauh, justru yang terjadi adalah sebuah proses konvergensi yang luar biasa. Kehadiran Islam di Eropa tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai

fenomena migrasi atau sekadar pertumbuhan demografis. Ia adalah proses sosial yang menandai bagaimana tradisi dan modernitas dapat bersinergi.

Islam tampil bukan untuk menyingkirkan, melainkan untuk mengisi kekosongan spiritual yang ditinggalkan masyarakat Barat. Gereja-gereja yang sepi menjadi masjid yang hidup; keluarga-keluarga Muslim yang subur menjadi jawaban atas krisis demografi; tradisi yang kokoh berpadu dengan keterbukaan modern; halal menjadi simbol kualitas dan kepercayaan. Semua ini menandakan bahwa Islam di Eropa bukan sekadar “ada,” melainkan “berakar.”

Pada akhirnya, yang tampak jelas adalah bahwa masyarakat Eropa tengah berhadapan dengan sebuah kenyataan baru. Realitas ini mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian orang, tetapi tidak bisa diingkari bahwa arah perubahan sudah berjalan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Islam bisa diterima, melainkan bagaimana Islam dan Eropa bersama-sama membentuk wajah baru peradaban global.

Pesantren hari ini bukan sekadar lembaga pendidikan tradisional, tetapi benteng moral sekaligus laboratorium peradaban. Keyakinan bahwa pesantren siap menghadapi masa depan tidaklah berlebihan. Tradisinya sudah berakar kuat, identitasnya jelas, dan daya tahannya terbukti sepanjang sejarah. Semboyan yang populer di kalangan Nahdlatul Ulama, *berhati Mekkah, berotak Amerika*, mencerminkan harmonisasi yang unik: hati yang tertambat pada nilai-nilai spiritual, sementara otak terbuka pada rasionalitas modern. Dari sini lahir generasi santri yang tidak tercerabut dari akarnya, namun tetap mampu mengikuti perkembangan zaman.

Pesantren bukanlah entitas yang anti modernitas. Sejarah mencatat bagaimana para kiai mendorong putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di sekolah umum dan perguruan tinggi ternama di luar lingkungan IAIN. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan ilmu-ilmu modern tidak pernah dianggap ancaman, melainkan pelengkap yang memperkaya khazanah keilmuan

pesantren. Contoh nyata dapat dilihat dari tokoh-tokoh nasional yang berasal dari tradisi pesantren tetapi menempuh pendidikan di universitas sekuler, lalu tampil menjadi pemimpin dengan kapasitas luar biasa. Inilah bukti nyata keterbukaan pesantren terhadap dinamika ilmu pengetahuan.

Kekuatan pesantren terletak pada sinergi antara tradisi dan inovasi. Basis turats, kitab-kitab klasik, serta pembiasaan spiritual menjadi pondasi yang meneguhkan jati diri santri. Namun, di atas pondasi itu, dibangun pula penguasaan sains, teknologi, seni, dan matematika. Konsep STEAM—yang memadukan ilmu eksakta dengan kreativitas seni—memberikan jalan untuk mewujudkan mimpi besar: lahirnya kembali sosok-sosok jenius seperti Ibnu Rusyd dan Ibnu Sina di era modern. Pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kelahiran ulama sekaligus ilmuwan, yang ilmunya bersumber dari ayat-ayat Tuhan dan aplikasinya diarahkan bagi kemaslahatan manusia.

Cara pandang seperti ini menghapus dikotomi kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemikiran klasik Al-Ghazali tentang fardhu 'ain dan fardhu kifayah tetap relevan, tetapi perlu ditafsir ulang sesuai kebutuhan zaman. Ilmu-ilmu yang dulu dikategorikan sebagai fardhu kifayah, seperti teknologi atau kedokteran, kini dapat naik derajat menjadi fardhu 'ain ketika menyangkut kepentingan besar umat dan bangsa. Sebab, tanpa penguasaan pada bidang-bidang strategis tersebut, mustahil kita dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain di panggung global.

Lebih jauh, pandangan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah membuka ruang dialog antara wahyu dan fenomena alam. Ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya sesungguhnya saling melengkapi. Sains, jika dipahami dengan ruh spiritual, tidak akan menjadi ancaman, melainkan penopang keberlangsungan hidup yang bermartabat. Inilah yang menjadikan pesantren unik: ia melahirkan ilmuwan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakal sehat dan berhati jernih.

Kesadaran ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah menginginkan lahirnya sekolah-sekolah unggul yang mampu mencetak generasi *satu persen*—segelintir orang dengan keunggulan luar biasa yang dapat menjadi cahaya bagi yang lain. Gagasan ini menemukan resonansinya di pesantren, yang sejak awal mendidik santri bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk membawa manfaat bagi umat dan bangsa. Apalagi dengan kolaborasi lintas organisasi masyarakat keagamaan—NU, Muhammadiyah, dan lain-lain—serta dukungan negara, jalan menuju transformasi pendidikan ini semakin terbuka.

Karena itu, peran pesantren di masa depan tidak bisa hanya dipandang sebagai pelestari tradisi keagamaan. Ia adalah pusat inovasi, ruang dialog peradaban, dan kawah candradimuka yang melahirkan generasi unggul. Dengan hati yang tertambat pada nilai-nilai Mekkah dan akal yang terasah oleh ilmu modern, pesantren berpotensi menjadi pilar utama bagi lahirnya Indonesia yang cerdas, berdaya saing, dan tetap berakar pada kemuliaan spiritual.

Ada satu gagasan menarik yang sering terlewat dalam diskusi tentang pendidikan: bagaimana mencetak generasi unggul yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berakar kuat pada tradisi. Pendiri Samsung pernah menyebut bahwa hanya satu persen manusia yang pada akhirnya akan menjadi penggerak bagi 99 persen lainnya. Pandangan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah unggulan seperti Garuda, yang tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berpijak pada budaya dan nilai keindonesiaan.

Jika dibawa ke ranah pesantren, visi besar semacam ini akan membuka jalan bagi lahirnya fikih-fikih baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Pesantren, dengan tradisi keilmuan yang panjang, sebenarnya punya basis kuat untuk menjawab persoalan kontemporer. Bayangkan suatu saat ada santri yang menjadi astronot. Ia tentu dihadapkan pada pertanyaan sederhana namun fundamental: bagaimana shalat di ruang angkasa? Pertanyaan semacam ini mungkin

terdengar remeh atau bahkan absurd hari ini, tetapi sejatinya ia menandakan kesiapan pesantren untuk menghadirkan jawaban-jawaban baru atas problem kemanusiaan di era teknologi tinggi. Inilah dinamika tradisi yang tidak kaku, melainkan lentur menghadapi realitas baru.

Contoh lain bisa kita lihat dari tokoh-tokoh pesantren yang mampu menembus panggung internasional. Ada yang fasih berbahasa Inggris dengan nama yang sama sekali tidak berbau Arab, tetapi tetap memegang teguh identitasnya sebagai santri. Ini menandakan sebuah keberanian baru: santri tidak lagi dibatasi oleh stereotip, melainkan bebas bergerak dalam ruang global. Nama “Robert” sekalipun bisa lekat dengan identitas santri, dan justru hal itu menghadirkan daya tarik tersendiri. Pesantren dengan demikian sedang membuka babak baru: menjadi bagian dari percakapan global tanpa harus kehilangan akarnya.

Namun, keberanian ini tidak lahir begitu saja. Dunia sains, misalnya, masih sering dianggap asing di kalangan sebagian santri. Ada kisah sederhana tentang seorang murid yang mendapat nilai jelek di matematika, lalu gurunya menenangkan dengan berkata bahwa matematika tidak penting untuk akhirat. Sekilas ucapan itu menghibur, tetapi jika dipikir ulang, ia justru menyesatkan. Sebab, matematika sesungguhnya adalah bagian dari akhirat itu sendiri. Hari perhitungan, yaumul hisab, adalah hari matematika. Setiap perbuatan sekecil zarrah akan dihitung dan ditimbang secara presisi, persis seperti hukum keseimbangan dalam fisika. Jadi, ilmu eksakta bukanlah ilmu “duniawi” yang terpisah dari spiritualitas, melainkan bagian integral dari pemahaman agama itu sendiri.

Dari sini kita bisa melihat bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium peradaban baru. Tradisi keilmuan klasik bisa berpadu dengan eksplorasi sains dan teknologi modern. Pesantren bukan lagi hanya tempat tafaquh fiddin, tetapi juga pusat pencarian solusi atas persoalan zaman. Jika visi besar ini digarap serius, bukan mustahil dari pesantren lahir ilmuwan, teknokrat, bahkan

astronot yang membawa perspektif spiritual ke dalam ruang-ruang global yang serba rasional.

Tantangan utama adalah keberanian untuk melangkah. Banyak santri yang masih terjebak dalam zona nyaman: puas dengan status quo, takut gagal, atau merasa sains bukan bagian dari dirinya. Padahal sejarah Islam justru mencatat bahwa para ulama besar di masa lalu adalah ilmuwan sekaligus ahli agama. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, semua menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan iman tidak pernah bertentangan. Justru di situlah kekuatan Islam: menyatukan akal dan hati, tradisi dan inovasi, bumi dan langit.

Karena itu, masa depan pesantren tidak boleh hanya berhenti pada menjaga tradisi, tetapi juga harus berani membangun jembatan menuju masa depan. Dengan fondasi spiritual yang kokoh, pesantren bisa menjadi motor peradaban baru yang melahirkan generasi unggul—generasi satu persen yang akan menghidupi dan menggerakkan 99 persen lainnya.

Agama Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga menuntut ketelitian intelektual. Dalam banyak hal, Al-Qur'an memberikan aturan yang begitu jelas dan terperinci. Salah satu contohnya adalah hukum waris. Ayat-ayat di surat An-Nisa maupun Al-Ma'idah secara eksplisit menyebut pembagian harta: bagian anak, bagian istri, bahkan perhitungan ketika ahli warisnya banyak. Dari sini lahirlah ilmu faraidh, sebuah disiplin tersendiri yang menunjukkan betapa seriusnya perintah ini. Menghitung warisan bukanlah perkara sederhana, salah sedikit saja bisa berimplikasi pada pelanggaran hak dan pada akhirnya menyalahi ketentuan agama.

Pentingnya akurasi dalam berhitung juga terlihat pada zakat. Banyak orang mungkin menganggap zakat sekadar ritual tahunan, padahal substansinya adalah keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Di sinilah peran matematika menjadi nyata. Tanpa kemampuan berhitung, nisab zakat tidak bisa ditentukan dengan tepat. Lebih parah lagi, ada yang justru memanfaatkan celah dengan cara “mengakali” angka. Misalnya, ketika seseorang punya 40 kambing—jumlah yang

seharusnya sudah terkena zakat—ia menjual satu agar turun menjadi 39 dan terbebas dari kewajiban. Secara hitungan memang lolos, tetapi secara moral jelas keliru. Inilah yang dimaksud bahwa hukum itu selalu terkait dengan ilat, alasan dan tujuan yang mendasarinya. Menghindari zakat dengan cara manipulatif sama saja mengkhianati pesan keadilan yang terkandung di dalamnya.

Urusan arah kiblat pun memperlihatkan hal yang sama. Shalat adalah ibadah yang paling dasar, tetapi akurasi tidak bisa dilepaskan dari sains. Menentukan arah ke Ka'bah membutuhkan pengetahuan tentang sudut, peta, hingga astronomi. Dahulu, mungkin umat Islam masih bisa berdalih dengan niat mustaqbil al qiblah—asal kira-kira menghadap. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, tuntutan presisi semakin kuat. Bahkan, tokoh besar seperti Ahmad Dahlan pernah ditentang karena mengutamakan akurasi arah kiblat. Ironisnya, semangat yang dulu dianggap kontroversial itu kini justru dijalankan oleh lembaga resmi seperti Kementerian Agama. Tanpa penguasaan matematika, seseorang bisa saja yakin sedang menghadap ke Ka'bah, padahal sesungguhnya menghadap ke arah lain, bahkan sejauh Suriname.

Semua ini memberi pelajaran penting: matematika dan sains bukanlah sesuatu yang asing dari agama. Justru sebaliknya, ia adalah instrumen untuk mengamalkan perintah agama secara benar. Karena itu, pendidikan Islam seharusnya tidak menempatkan sains hanya sebagai pelengkap. Pesantren, madrasah, maupun lembaga pendidikan keagamaan harus memberikan ruang besar bagi ilmu pasti dan teknologi. Lebih jauh, pengajar pun perlu dipersiapkan agar dapat menyampaikan pelajaran dengan cara yang menyenangkan, sehingga matematika tidak lagi menjadi momok, melainkan sarana untuk memahami kehidupan dan ibadah secara lebih mendalam.

Ketika membicarakan tokoh-tokoh besar Islam seperti Ibn Rusyd, kita sering terjebak pada romantisme sejarah. Kita bangga menyebutnya sebagai filosof besar, pemikir liberal, atau penghubung filsafat Yunani dengan Islam. Tetapi yang jarang

disoroti adalah kedisiplinannya sebagai seorang Muslim yang tidak pernah meninggalkan tahajud, meskipun hidup di Spanyol yang dingin. Dengan kata lain, penguasaan ilmu baginya tidak pernah membuatnya abai terhadap ibadah. Inilah pelajaran yang jauh lebih penting: keilmuan yang mendalam harus selaras dengan spiritualitas yang kokoh.

Maka, tantangan kita hari ini adalah bagaimana membangun tradisi keilmuan yang tidak berhenti pada kebanggaan sejarah. Barat boleh menguasai teknologi modern, tetapi sumber-sumber keilmuan itu pernah tumbuh subur di dunia Islam. Jika ingin mengulang kejayaan, bukan sekadar nostalgia yang kita perlukan, melainkan kerja nyata: membekali generasi muda dengan iman yang kuat, ilmu yang luas, dan keterampilan yang relevan dengan zamannya. Agama dan sains bukanlah dua jalan yang berlawanan. Keduanya justru saling melengkapi. Tanpa ilmu, ibadah bisa kehilangan akurasi; tanpa iman, ilmu bisa kehilangan arah. Keseimbangan inilah yang seharusnya menjadi cita-cita pendidikan Islam ke depan.

Pesantren sejak awal dikenal sebagai pusat pembentukan karakter religius, tempat lahirnya generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan kuat dalam ibadah. Namun, pesantren masa depan tidak boleh berhenti di sana. Ia dituntut melahirkan sosok seperti Ibn Rusyd: seorang ulama yang teguh menjaga spiritualitas, rajin beribadah, tetapi sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dunia. Figur semacam inilah yang dibutuhkan agar Islam benar-benar tampil sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, pesantren harus menanamkan semangat hijrah dalam arti luas. Bumi Allah terbentang luas, mengajak manusia untuk berani menjelajah, melintasi batas-batas geografis dan kultural. Sikap mental inilah yang penting ditanamkan kepada generasi santri: keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menjelajah dunia, dan berkiprah di tingkat global. Kita bisa melihat contoh nyata dari saudara-saudara Nahdliyin di Amerika. Mereka

mampu menjaga tradisi pesantren, tetap teguh dalam nilai-nilai Islam, tetapi juga berhasil menempatkan diri di tengah masyarakat yang berbeda. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi warna.

Transformasi pesantren harus bergerak ke arah ini. Tidak boleh lagi ada dikotomi ilmu, seolah-olah pengetahuan agama terpisah dari pengetahuan umum. Pandangan semacam ini justru mempersempit ruang gerak santri. Pesantren masa depan harus menjadi ruang di mana ilmu agama dan ilmu modern bersinergi, saling memperkuat, bukan saling menegasikan. Tidak boleh ada sikap anti terhadap pengetahuan, karena justru dengan keterbukaan pada ilmu, peradaban Islam akan kembali menemukan kejayaannya.

Kini sudah terlihat generasi baru yang berani keluar dari sekat-sekat lama. Ada banyak santri yang tetap berpegang teguh pada identitas keislamannya—berjilbab, menjaga akhlak—namun tidak canggung mengekspresikan diri di ranah modern. Mereka fasih berbahasa Inggris, mampu bernyanyi lagu-lagu internasional, bahkan terjun ke ruang-ruang kreatif yang sebelumnya dianggap asing. Perbedaan identitas tidak lagi menjadi penghalang, melainkan modal untuk berdiri percaya diri di hadapan dunia.

Pesantren harus menumbuhkan visi ini sejak awal. Santri tidak cukup hanya bercita-cita untuk tinggal di kampung halamannya atau mengulang peran-peran lama yang terbatas. Mereka harus berani bermimpi besar: menjadi warga dunia yang mampu menerangi peradaban dengan ilmunya, menyumbangkan keahliannya untuk memperkuat peradaban Islam, sekaligus mengharumkan nama bangsanya. Dengan cara ini, santri akan menjadi global citizen yang tetap berpijak pada nilai tradisi, tetapi mampu bergerak di panggung dunia.

Di sinilah peran politik menjadi krusial. Tanpa dukungan kebijakan yang berpihak, transformasi pesantren hanya akan tinggal wacana. Partai politik seperti PKB memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan pro-pesantren benar-benar berjalan. Dukungan politik yang kuat akan memastikan program-program

pengembangan pesantren, mulai dari kurikulum, fasilitas, hingga akses internasional, dapat diwujudkan dengan baik.

Kita sudah melihat hasil pendidikan yang luar biasa. Kini, ada tokoh-tokoh bangsa yang tidak hanya cerdas dan amanah, tetapi juga fasih berbahasa Arab, bahkan hafal Al-Qur'an. Sesuatu yang dulu sulit dibayangkan hadir di lingkaran pejabat tinggi negara, kini menjadi kenyataan. Ini menunjukkan buah dari pendidikan yang terus berkembang. Ke depan, kepercayaan diri kaum santri harus terus ditumbuhkan, agar mereka tidak ragu tampil di ruang publik, berkontribusi bagi bangsa, dan menjadi bagian dari wajah Indonesia yang membanggakan.

Jika semua ini terwujud, maka pesantren akan benar-benar menjadi pusat lahirnya generasi yang memadukan kesalehan spiritual dengan keluasan wawasan. Generasi yang mampu menjaga akarnya, tetapi juga menjulang ke langit dunia. Generasi yang siap menerangi dunia dengan ilmu, sekaligus membangun Indonesia sebagai *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*—negeri yang baik dengan limpahan ampunan Allah.

Bahasa Indonesia sebagai Jembatan Logika dan Kedaulatan Bangsa:

Pak Menteri Menyapa Guru Indonesia

Selasa, 24 Juni 2025

Persoalan literasi di Indonesia bukan hal baru. Data dari UNESCO yang sering dikutip menunjukkan betapa rendahnya posisi bangsa ini dalam hal kemampuan membaca. Namun, mengulang-ulang data itu tanpa menghadirkan solusi justru membuat kita terjebak dalam ritual keluhan. Masalah sesungguhnya bukan pada kemampuan mengeja atau melafalkan aksara, sebab masyarakat Indonesia secara umum sudah bisa membaca dalam arti teknis. Yang jauh lebih mendesak adalah kemampuan memahami bacaan—kemampuan untuk mengaitkan informasi, menganalisis makna, serta memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai literasi fungsional, dan di sinilah kita masih tertinggal.

Jika literasi dipahami hanya sebatas keterampilan teknis, maka perbaikan yang terjadi akan dangkal dan tidak menyentuh akar persoalan. Padahal, literasi fungsional adalah fondasi bagi keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, hingga membangun kreativitas. Tanpa itu, peserta didik hanya akan menjadi penghafal, bukan pembelajar sejati. Mereka bisa membaca paragraf demi paragraf, namun gagal menangkap maksud, konteks, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kondisi inilah yang pada akhirnya menciptakan jurang besar antara kemampuan akademik

formal dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja.

Peran guru, khususnya guru bahasa Indonesia, menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya pengajar tata bahasa atau penjaga aturan ejaan, melainkan fasilitator yang membimbing siswa untuk mengolah informasi dan membangun makna. Tantangan ini tentu tidak ringan, sebab guru sering kali juga terjebak dalam tuntutan administratif atau kurikulum yang terlalu padat. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan nyata dari pemerintah: mulai dari pelatihan yang relevan, penyediaan bahan ajar yang mendorong pemahaman kritis, hingga ruang bagi guru untuk berinovasi di kelas.

Namun, meningkatkan literasi fungsional tidak cukup hanya mengandalkan sekolah. Budaya membaca dan menghargai ilmu harus hidup di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin literasi bisa berkembang jika buku tidak mudah diakses, atau jika media sosial lebih dominan membanjiri ruang pikir dengan informasi dangkal yang cepat dilupakan? Di sinilah peran keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi penting. Anak-anak yang tumbuh di rumah dengan kebiasaan membaca, berdiskusi, dan bertanya akan lebih siap mengembangkan literasi kritis dibandingkan mereka yang hanya diperintahkan untuk menghafal tanpa memahami.

BAHASA SEBAGAI PEMERSATU

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seharusnya menjadi alat utama untuk membangun kesadaran literasi ini. Bahasa bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan pintu masuk bagi masyarakat untuk memahami dunia, mengasah logika, serta mengekspresikan gagasan. Jika bahasa Indonesia bisa diposisikan sebagai ruang untuk melatih nalar, memperluas imajinasi, dan menghubungkan realitas, maka peningkatan literasi bukan hanya soal target angka, tetapi juga transformasi budaya berpikir bangsa.

Oleh karena itu, momentum pertemuan dan dialog antara pemerintah dengan para guru tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial. Harus ada keberlanjutan yang konkret, berupa komitmen

bersama untuk membongkar akar persoalan dan membangun strategi kolektif. Solusi tidak mungkin datang dari satu pihak saja; ia lahir dari gotong royong antara pembuat kebijakan, pelaku pendidikan, dan masyarakat luas.

Jika akar persoalan literasi fungsional ini berhasil digarap dengan sungguh-sungguh, maka cerita kelam tentang rendahnya kemampuan membaca bisa berbalik arah. Kita bisa menulis narasi baru tentang bangsa yang tidak hanya mampu membaca kata, tetapi juga memahami makna, merumuskan gagasan, dan mencipta pengetahuan. Dan dari sanalah, masa depan pendidikan Indonesia dapat berdiri lebih kokoh, melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara intelektual dan kritis menghadapi tantangan zaman.

Masalah literasi di Indonesia sering kali dibicarakan hanya sebatas kemampuan membaca. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, persoalannya jauh lebih kompleks. Literasi bukan hanya tentang bisa mengeja kata atau memahami bacaan sederhana, tetapi juga tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai medium untuk menyampaikan gagasan, bahkan sebagai sarana untuk merawat seni dan kebudayaan. Di titik inilah kita menghadapi masalah serius: kemampuan masyarakat menggunakan bahasa sebagai sarana berpikir kritis dan logis masih lemah.

BAHASA DAN CARA BERPIKIR

Bahasa dan cara berpikir memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang mampu berbahasa dengan baik biasanya juga menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih runtut dan sistematis. Sebaliknya, lemahnya penguasaan bahasa sering beriringan dengan kaburnya cara berpikir. Hal ini terlihat jelas ketika seseorang kesulitan menyusun argumen, melompat dari satu ide ke ide lain tanpa benang merah yang jelas, atau gagal menyampaikan gagasan inti dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Karena itu, membaca (reading) dan berpikir (thinking) sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Bahasa adalah jendela yang memperlihatkan sejauh mana logika seseorang terasah.

Sayangnya, praktik pendidikan bahasa kita selama ini sering terjebak dalam ranah teknis belaka—tata bahasa, kosakata, dan aturan penulisan. Padahal, mengajarkan bahasa semestinya juga berarti mengajarkan logika. Bahasa seharusnya membantu menata alur berpikir agar runtut, jelas, dan mudah dipahami. Ironisnya, bahkan dalam dunia akademik, standar penulisan kita sering kali lemah. Perbandingan sederhana bisa dilihat antara teks berbahasa Inggris dan teks berbahasa Indonesia. Banyak orang mengaku lebih mudah memahami bacaan berbahasa Inggris, bukan karena kemampuan bahasa asingnya lebih baik, tetapi karena struktur penulisannya lebih disiplin dan logis. Tulisan berbahasa Inggris biasanya mengikuti alur yang jelas: gagasan utama ditampilkan di awal, argumen dikembangkan secara runtut, dan kesimpulan mengikat semua poin. Hal ini membuat metode membaca cepat (*speed reading*) dapat diterapkan dengan mudah.

Sebaliknya, dalam banyak buku atau tulisan berbahasa Indonesia, gagasan utama sering kabur. Pembaca sulit menemukan inti pemikiran penulis karena alurnya meloncat-loncat, argumennya tidak terhubung dengan baik, dan logika yang digunakan tidak konsisten. Akibatnya, membaca menjadi pekerjaan melelahkan, bukan proses menyenangkan yang mencerahkan pikiran. Situasi ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan: kita mengajarkan bahasa, tetapi lupa mengajarkan cara berpikir.

Jika ingin membenahi masalah literasi, kita perlu mereformasi cara pandang terhadap bahasa. Pengajaran bahasa Indonesia tidak boleh berhenti pada soal formalitas gramatikal. Bahasa harus ditempatkan sebagai sarana berpikir, membangun argumen, dan menyampaikan gagasan dengan jelas. Literasi sejati baru tercapai ketika bahasa digunakan untuk menata nalar, bukan sekadar untuk berkomunikasi seadanya.

Dengan demikian, memperbaiki kemampuan literasi bukan hanya tugas meningkatkan kebiasaan membaca, melainkan juga memastikan bahwa bahasa benar-benar berfungsi sebagai jembatan

logika. Bahasa yang terlatih akan melahirkan pikiran yang jernih, argumen yang logis, dan gagasan yang mudah dipahami. Sebaliknya, jika bahasa terus diajarkan tanpa logika, kita hanya akan mencetak generasi yang fasih berbahasa, tetapi gagap dalam berpikir.

BAHASA DAN KEADABAN

Keadaban berbahasa kini menghadapi tantangan yang semakin serius di tengah perkembangan teknologi digital. Jika dulu ruang publik kita lebih terbatas dan relatif mudah dikendalikan, kini komentar-komentar di media online menjadi bukti nyata bahwa kesantunan bahasa mulai luntur. Di bawah berita resmi yang seharusnya memantik diskusi sehat, justru kerap ditemukan kata-kata kasar, kotor, dan penuh hujatan. Fenomena ini tidak hanya sekadar persoalan komunikasi, melainkan gambaran bagaimana empati dan penghargaan terhadap orang lain semakin pudar. Padahal, dalam tradisi kita ada pepatah lama, “bahasa menunjukkan bangsa”. Artinya, cara kita berbahasa adalah representasi jati diri, identitas, sekaligus kualitas keadaban sebuah bangsa.

Masalahnya, kebebasan berpendapat di era digital sering dipahami secara keliru. Kebebasan itu ditafsirkan sebagai hak untuk bicara apa saja, tanpa mempertimbangkan etika maupun dampaknya bagi orang lain. Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi oleh kegaduhan. Alih-alih menjadi wadah bagi suara yang bermakna (*voice*), ia justru dikuasai oleh riuh rendah yang tak berisi (*noise*). Parahnya, sebagian besar kegaduhan ini lahir dari hal-hal sepele—sekadar remeh-temeh atau “kaleng-kaleng”—yang tidak penting, tetapi mampu memicu pertengkaran dan memperbesar polarisasi.

Lebih jauh, kecanggihan teknologi membuat persoalan keadaban ini semakin rumit. Dunia digital kini bukan hanya membanjiri kita dengan opini yang tak berujung, tetapi juga membaurkan batas antara fakta dan kebohongan, antara kebenaran dan hoaks. Kondisi ini mempersulit publik untuk memilah mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang sekadar manipulasi. Dalam situasi seperti ini, kesantunan berbahasa seharusnya menjadi benteng terakhir.

Sayangnya, justru di titik inilah kelemahan kita paling terlihat: sopan santun dalam bertutur kata dianggap kuno, sementara yang lebih dihargai adalah kecepatan berkomentar meski tak bermakna.

Jika tren ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya merusak kualitas percakapan publik, tetapi juga merusak sendi-sendi keadaban kolektif bangsa. Bahasa yang dulunya menjadi perekat, kini berubah menjadi pemecah. Identitas bangsa yang tercermin melalui kehalusan budi pekerti dalam bahasa semakin tergerus oleh budaya digital yang permisif dan dangkal. Kita perlu menyadari kembali nilai sederhana yang diajarkan dalam pepatah lama: “diam itu emas.” Artinya, tidak semua hal harus direspons dengan kata-kata, apalagi dengan kata-kata yang melukai. Hanya dengan mengembalikan kesadaran akan makna bahasa sebagai wujud empati dan keadaban, kita bisa keluar dari jebakan trivialitas dan kegaduhan digital yang kian menggerogoti jati diri bangsa.

BAHASA DAN KEDAULATAN

Bahasa Indonesia tidak hanya lahir sebagai alat komunikasi praktis, tetapi juga sebagai wujud kedaulatan bangsa. Ia adalah simbol historis yang lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa untuk mencari titik temu di antara beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Pilihan untuk mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda adalah keputusan yang visioner sekaligus revolusioner. Para tokoh bangsa sadar betul bahwa perpecahan dapat dengan mudah tumbuh dari sentimen primordial, apalagi ketika masing-masing kelompok merasa lebih nyaman dengan identitas kebahasaan sendiri. Maka, keberanian mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebuah langkah politik yang cerdas, yang hingga kini terus menjadi dasar kebersamaan kita. M. Tabrani dari Madura, yang memperjuangkan bahasa persatuan ini, adalah contoh nyata bagaimana gagasan besar itu diperjuangkan secara konsisten hingga akhirnya diakui sebagai bagian dari sejarah bangsa.

Namun, bila dibandingkan dengan kondisi dunia saat ini, pilihan itu semakin terasa berharga. Masih banyak bangsa di berbagai belahan dunia yang tidak memiliki bahasa pemersatu, sehingga hidup mereka terfragmentasi oleh sekat bahasa etnis. Ada juga kelompok yang kehilangan hak untuk menggunakan bahasa daerahnya sendiri, terpinggirkan oleh kekuasaan atau sistem politik yang lebih dominan. Tidak sedikit pula yang akhirnya tidak memiliki bahasa nasional karena masing-masing suku menolak untuk saling mengakomodasi. Di sinilah keberuntungan Indonesia tampak jelas: kita memiliki bahasa Indonesia yang diterima secara luas dan mampu menjadi fondasi persatuan. Maka, kesadaran untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan bangsa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ia adalah amanah historis yang harus terus dipelihara oleh generasi kini dan mendatang.

Jika menengok sejarah, kedaulatan bangsa Indonesia ditopang oleh beberapa tonggak penting. Pertama, kedaulatan budaya yang lahir dari Sumpah Pemuda 1928, saat bangsa ini dengan sadar menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedua, kedaulatan politik yang ditegaskan melalui Proklamasi Kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Ketiga, kedaulatan wilayah yang dipertegas melalui Deklarasi Juanda, yang diakui dunia internasional dan menetapkan batas negara kepulauan Indonesia. Dalam barisan tonggak sejarah ini, kedaulatan bahasa menjadi satu unsur yang tak kalah penting. Tanpa bahasa yang menyatukan, bangsa ini mungkin tidak akan memiliki fondasi kuat untuk melangkah bersama.

Oleh karena itu, disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia bukan sekadar soal tata krama linguistik atau formalitas peraturan. Lebih jauh, ia adalah wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan simbol identitas nasional. Dalam era globalisasi, di mana bahasa asing kian mendominasi ruang digital, ruang akademik, bahkan ruang kerja, kesadaran untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia perlu terus ditumbuhkan. Bahasa Indonesia bukan berarti menutup diri dari pergaulan global, melainkan menjadi pijakan kokoh agar kita tetap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, tanpa

kehilangan jati diri. Dengan begitu, bahasa Indonesia bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga alat strategis untuk merawat persatuan, menjaga martabat, dan meneguhkan kedaulatan bangsa di tengah arus perubahan dunia.

BAHASA CERMIN BANGSA

Bahasa adalah wajah bangsa. Ia bukan hanya medium untuk menyampaikan pikiran, melainkan juga cermin dari identitas dan martabat kolektif. Namun, ada kecenderungan yang menggelisahkan: banyak orang merasa lebih percaya diri ketika menyelipkan istilah asing dalam percakapan. Bahasa Arab dipakai untuk memberi kesan religius, sementara bahasa Inggris digunakan untuk tampak lebih modern dan cerdas. Kebiasaan ini secara tidak langsung membuat bahasa Indonesia berada di posisi yang tersisih, seolah kurang bergengsi dibanding bahasa lain.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam ruang-ruang publik, bahkan di institusi negara yang seharusnya menjadi teladan. Alih-alih menuliskan “ruang rapat” atau “ruang pertemuan”, yang terpampang justru “meeting room”. Daripada “tempat berkumpul”, lebih sering kita jumpai “assembly point”. Bahkan toilet umum pun cukup diberi label “men” dan “women”, seakan bahasa Indonesia tidak layak dipakai di ruang yang bersifat formal maupun praktis. Jika fenomena semacam ini terus dibiarkan, bagaimana mungkin kita bisa membangun kedaulatan bahasa di negeri sendiri?

Di sinilah prinsip *Trigatra Bangun Bahasa*—utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing—menjadi sangat relevan. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kita masih jauh dari konsisten. Bahasa Indonesia seakan selalu berada di persimpangan antara kebanggaan nasional dan inferiority complex terhadap bahasa asing. Padahal, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol keberadaan dan kedaulatan suatu bangsa.

Lebih jauh lagi, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal pemakaian bahasa di ruang domestik, melainkan juga bagaimana

mendorong bahasa Indonesia diakui secara internasional. Kita patut bangga bahwa setelah perjuangan panjang, bahasa Indonesia telah menjadi salah satu bahasa resmi rapat di UNESCO. Namun, capaian ini belum cukup untuk menegaskan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Ironisnya, di negara tetangga seperti Australia, bahasa Indonesia memang diajarkan secara luas, tetapi pengajarnya justru banyak berasal dari Malaysia. Akibatnya, ada perbedaan pemahaman yang cukup mendasar. Contoh sederhana bisa dilihat dari kata “pusing” yang dalam bahasa Indonesia berarti sakit kepala, sementara dalam bahasa Melayu diartikan “memutar”. Perbedaan kecil semacam ini menunjukkan betapa krusialnya posisi Indonesia dalam memperjuangkan bahasa sendiri agar tidak sekadar dipahami sebagai variasi dari bahasa lain.

Tantangan kelima yang perlu kita renungkan adalah bagaimana menjadikan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa persatuan, tetapi juga bahasa kejayaan. Ia harus hadir sebagai bagian dari peradaban luhur, tercermin dalam karya sastra, penelitian ilmiah, kebijakan publik, hingga capaian di kancah internasional. Bahasa Indonesia harus bertransformasi dari sekadar bahasa nasional menjadi bahasa yang mampu membawa pengaruh global, sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia lainnya.

Untuk itu, internasionalisasi bahasa Indonesia bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan kerja kolektif bangsa. Bahasa harus dipakai dengan penuh kesadaran di ruang publik, dihargai dalam karya akademik, dan dipopulerkan melalui diplomasi budaya. Jika kita sendiri masih ragu menempatkan bahasa Indonesia di tempat terhormat, bagaimana mungkin dunia akan mengakuinya? Bahasa bukan hanya soal tata kata, melainkan juga tentang kepercayaan diri suatu bangsa terhadap dirinya sendiri.

Maka, tugas kita jelas: mengangkat bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai simbol identitas dan martabat. Kedaulatan bahasa adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Selama kita masih menyepelekan bahasa sendiri, selama itu pula

pengakuan dunia akan tetap setengah hati. Sebaliknya, ketika kita mampu menunjukkan kebanggaan pada bahasa Indonesia di negeri sendiri, saat itulah jalan menuju internasionalisasi bahasa akan terbuka lebih lebar.

Bahasa Indonesia kerap dipandang hanya sebagai alat komunikasi, sekadar pelajaran wajib yang harus ditempuh dari SD hingga perguruan tinggi. Padahal, lebih dari itu, bahasa Indonesia harus diperlakukan sebagai ilmu dengan karakteristik dan metodologi yang khas. Sama halnya seperti matematika yang melatih struktur berpikir numerik, bahasa Indonesia pun memiliki fondasi ilmu yang membentuk struktur berpikir logis dan kritis. Fonologi, morfologi, sintaksis, hingga semantik seharusnya tidak dianggap sebagai beban hafalan belaka, melainkan sebagai bagian dari pembentukan cara berpikir yang sistematis. Dengan kata lain, pengajaran bahasa tidak boleh berhenti pada kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga membekali siswa dengan kerangka berpikir yang melekat pada bahasa itu sendiri.

Namun, jika melihat praktik di lapangan, pengajaran bahasa Indonesia sering kali masih terjebak pada romantika masa lalu. Dari teks klasik “ini Budi, ini Bapak Budi” hingga narasi sederhana tentang Amir dan Kadir yang berbaris di depan tiang bendera, pembelajaran sering kali lebih menekankan pada aspek membaca literal ketimbang pemahaman mendalam. Padahal, inti dari pembelajaran bahasa justru terletak pada bagaimana siswa mampu menangkap makna, baik tersurat maupun tersirat, serta menalar teks dengan logika yang sehat. Bahasa seharusnya hadir dengan cara yang menyenangkan sekaligus menantang, bukan sekadar rutinitas membaca tanpa pemahaman.

PENGUATAN BAHASA MELALUI DEEP LEARNING

Transformasi yang mendesak dibutuhkan adalah menghadirkan *deep learning* dalam pengajaran bahasa Indonesia. Siswa tidak hanya harus bisa membaca, tetapi juga memahami apa yang dibaca, menafsirkan, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis melalui bahasa. Pengalaman dalam tes bahasa asing

seperti TOEFL memberi pelajaran penting. Dalam *reading test*, misalnya, siswa diminta menangkap ide pokok atau melengkapi kata yang sengaja dihilangkan. Dalam *listening test*, peserta harus bisa memahami konteks percakapan meski ucapannya tidak jelas. Semua ini melatih keterampilan menebak, menalar, dan mengisi celah dengan logika. Pendekatan semacam ini sangat mungkin diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa terbiasa berpikir lebih dalam, bukan sekadar membaca permukaan.

Di tengah kebutuhan akan pembelajaran bahasa yang lebih bermakna, hadir pula tantangan dari teknologi kecerdasan buatan. Buku *Chat GPT and the Future of AI* menyingkap bagaimana perkembangan *Large Language Models* (LLM) seperti ChatGPT mengubah cara kita berinteraksi dengan bahasa. AI kini tidak hanya memprediksi kata dalam pesan teks, tetapi bahkan mampu membangun struktur kalimat yang terasa lebih rapi daripada tulisan manusia. Ketika kita menulis “buku”, misalnya, mesin bisa salah menebak menjadi “budi” karena algoritme prediksinya. Namun, justru dari keterbatasan dan keunggulan inilah kita belajar: teknologi bisa membantu, tetapi juga berpotensi mendikte cara kita menggunakan bahasa.

Fenomena ini menjadi alarm sekaligus peluang bagi pengajaran bahasa Indonesia. Jika mesin sudah mampu menyusun teks dengan tata bahasa yang nyaris sempurna, maka manusia seharusnya melampaui sekadar keterampilan teknis itu. Yang harus diasah adalah kemampuan yang tak bisa digantikan mesin: berpikir kritis, menalar secara logis, membaca makna tersirat, hingga mengembangkan kreativitas melalui bahasa. Guru bahasa Indonesia perlu memposisikan pelajaran ini sebagai arena pembentukan kecerdasan berpikir, bukan sekadar keterampilan menulis atau membaca.

Akhirnya, bahasa Indonesia perlu diajarkan dengan cara yang mampu membuat siswa jatuh cinta pada proses berpikir melalui bahasa. Ia harus menjadi wahana untuk mengasah logika, mengembangkan nalar kritis, dan memahami dunia dengan lebih dalam. Sebab, bahasa

bukan hanya medium komunikasi, melainkan jendela bagi manusia untuk menafsirkan pengalaman, menghubungkan gagasan, dan menemukan makna hidup. Dan dalam era AI yang semakin canggih, justru kemampuan inilah yang membedakan manusia dari mesin.

Kehadiran kecerdasan buatan seperti ChatGPT bukan sekadar pesaing, melainkan cermin yang mengingatkan kita bahwa bahasa bukan hanya urusan algoritma. Bahasa adalah ilmu sekaligus keterampilan hidup. Ia tidak berhenti pada struktur tata bahasa atau kosakata, melainkan menyentuh cara manusia berpikir, membangun karakter, dan menjaga martabat dalam kehidupan bersama. Justru di situlah letak keunggulan bahasa manusia: bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi membentuk peradaban.

Salah satu hal yang kian terasa hilang di ruang publik kita adalah keluhuran dalam berbahasa. Padahal, bahasa yang baik mampu menyampaikan kritik tanpa kehilangan santun. Buya Syafii Ma'arif menjadi teladan dalam hal ini. Kritiknya keras, tetapi tidak pernah kasar. Ia bisa menyindir politisi yang wawasannya “tak lebih luas dari halaman rumahnya”, atau menyebut pemimpin rabun ayam karena gagal membedakan yang benar dan yang salah. Ungkapan itu bukan hanya kritik, tetapi juga karya bahasa yang penuh makna, yang menyampaikan pesan dengan cara elegan. Bandingkan dengan gaya komunikasi kita hari ini, yang seringkali lebih menekankan kebisingan ketimbang kedalaman. Peribahasa seperti “air beriak tanda tak dalam” atau “tong kosong nyaring bunyinya” jarang terdengar, seolah sudah tidak relevan lagi, padahal sesungguhnya itulah kekayaan yang bisa memperhalus jiwa.

Kekosongan ini juga terasa dalam seni populer. Lagu-lagu kita banyak yang hanya mengulang-ulang ungkapan dangkal tanpa imajinasi. Bahasa dalam musik sering kali berhenti pada pernyataan langsung: “peluk aku”, “cium aku”, “banting aku”, dan seterusnya. Hampir tak ada ruang untuk perenungan atau imaji yang menggugah. Bandingkan dengan karya-karya Ebiat G. Ade, yang lebih layak disebut puisi ketimbang lagu. Ia menghadirkan bahasa yang tidak

hanya bernada indah, tetapi juga sarat makna. Melalui bait-baitnya, orang diajak menyelami ketidakpastian hidup, keresahan batin, sekaligus keindahan yang lahir dari refleksi. Tak heran, Ebiet lebih suka menyebut dirinya penyair ketimbang penyanyi. Karya semacam itu kini semakin langka, padahal justru di sanalah bahasa bekerja membentuk keadaban dan kepekaan sosial.

Kekhawatiran ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan? Pertama, kita harus menyadari bahwa bahasa dan kemampuan berpikir adalah dua hal yang tumbuh beriringan. Keterampilan berbahasa tidak hanya membuat seseorang pandai berbicara, tetapi juga melatihnya untuk berpikir jernih dan runtut. Bahasa yang kuat akan melahirkan pikiran yang dalam. Kedua, metode pengajaran bahasa tidak boleh berhenti pada hafalan kaidah atau sekadar kemampuan teknis menulis. Kita memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam—*deep learning*—yang mengajak siswa mengalami bahasa, merasakan kekuatannya, dan menggunakannya secara kreatif dalam berbagai konteks. Ketiga, bahasa harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan bangsa. Dari cara kita menggunakan bahasa, dunia bisa menilai seberapa tinggi peradaban kita.

Tugas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga para guru dan calon guru bahasa Indonesia. Mereka adalah garda terdepan dalam menanamkan kepekaan bahasa. Bukan hanya agar siswa bisa menulis dengan benar, melainkan agar mereka belajar menyampaikan kritik dengan santun, mengekspresikan perasaan dengan halus, dan membangun karakter melalui kata-kata. Bahasa seharusnya menjadi sarana memperkuat kelembutan hati, bukan melahirkan kekasaran.

Masa depan bahasa Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menghidupkan kembali tradisi kesusastraan, mempopulerkan kembali peribahasa, menjaga estetika bahasa dalam seni, dan menjadikan bahasa sebagai ruang tumbuhnya adab. Di tengah dunia yang serba cepat dan instan, bahasa yang berakar pada

kebijaksanaan akan menjadi penuntun agar kita tidak kehilangan arah. Teknologi mungkin bisa menghasilkan kalimat, tetapi hanya manusia yang bisa memberi jiwa pada bahasa.



Sekolah sebagai Rumah Kedua:

Peluncuran MPLS Ramah bersama Penerima Beasiswa
ADEM

Jum'at, 11 Juli 2025

Peluncuran **MPLS Ramah 2025** menghadirkan semangat baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Nama ini bukanlah sekadar kosmetik kebijakan, tetapi merepresentasikan perubahan paradigma yang mendalam. Selama ini, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kerap diasosiasikan dengan praktik perpeloncoan, hierarki senioritas, atau sekadar formalitas yang dilalui siswa baru. Melalui penegasan *ramah*, MPLS kini diarahkan menjadi pengalaman menyenangkan yang benar-benar menyambut anak-anak ketika melangkah ke dunia baru: sebuah lingkungan belajar yang penuh kawan, semangat, dan kesempatan.

MPLS RAMAH

Perubahan ini penting karena sekolah seharusnya bukan tempat yang menumbuhkan rasa takut, melainkan ruang aman bagi lahirnya rasa ingin tahu dan keberanian untuk bertumbuh. MPLS Ramah hadir untuk menggeser praktik lama menuju tradisi baru: mengenalkan siswa pada lingkungan sekolah dengan cara yang menghargai martabat mereka, membangun interaksi yang sehat, serta menumbuhkan kebiasaan belajar yang positif. Dengan begitu, hari-hari pertama masuk sekolah bukan lagi memori kelam, melainkan titik awal yang membangkitkan antusiasme.

Lebih dari sekadar pengenalan, MPLS Ramah dirancang sebagai bagian dari strategi besar pendidikan nasional: memperkuat karakter,

menyalurkan bakat dan minat, serta menanamkan kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kehadiran program pendukung seperti **Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat** dan **Pagi Ceria** semakin menegaskan orientasi itu. Kedua program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan upaya menanamkan nilai-nilai disiplin, keceriaan, kesehatan emosional, dan daya juang sejak dini.

Ada pesan penting yang bisa dibaca dari kebijakan ini: pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas pencapaian akademik, melainkan pembangunan manusia seutuhnya. MPLS Ramah mencoba menjembatani kebutuhan siswa untuk merasa diterima dan dihargai, sembari mendorong mereka untuk beradaptasi dengan budaya belajar yang sehat.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat. Tantangan besar ada pada implementasi di lapangan. Praktik perpeloncoan misalnya, sudah berakar lama di sejumlah sekolah sebagai bagian dari “tradisi” yang dianggap wajar. Mengubah budaya membutuhkan kerja keras: tidak cukup dengan surat edaran, tetapi perlu keteladanan guru, komitmen kepala sekolah, serta keterlibatan orang tua. Selain itu, penguatan kapasitas guru untuk mengelola MPLS dengan metode kreatif dan menyenangkan menjadi kunci agar semangat *ramah* tidak berhenti di atas kertas.

Meski begitu, potensi positif dari MPLS Ramah sangat besar. Jika dijalankan konsisten, ia bisa menjadi pintu masuk untuk membangun budaya sekolah yang lebih humanis. Anak-anak akan merasakan sejak awal bahwa sekolah adalah rumah kedua yang aman, menyenangkan, dan penuh dukungan. Dari sana, akan tumbuh generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan berdaya secara sosial.

Singkatnya, MPLS Ramah adalah simbol pergeseran penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati tidak pernah lahir dari rasa takut, melainkan dari kasih, penghargaan, dan dorongan untuk menjadi lebih baik.

Pertanyaannya kini: apakah sekolah-sekolah di seluruh Indonesia siap untuk sungguh-sungguh menerjemahkan semangat *ramah* ini dalam tindakan nyata?

Sekolah seharusnya tidak dipandang hanya sebagai ruang formal untuk mengejar nilai atau menyelesaikan kurikulum, tetapi sebagai tempat yang mampu menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan bagi seluruh warganya. Lingkungan belajar yang menyenangkan akan menumbuhkan semangat, menciptakan rasa aman, dan menyalakan motivasi untuk terus berkembang. Karena itulah muncul gagasan untuk membangun atmosfer baru di sekolah dengan mengintegrasikan tiga pilar pembelajaran utama: *Mindful Learning*, yang menekankan kesadaran penuh dalam belajar; *Meaningful Learning*, yang menuntut keterkaitan ilmu dengan kehidupan nyata; serta *Joyful Learning*, yang menghadirkan keceriaan dalam setiap proses belajar.

Unsur tambahan berupa “**Jeda Ceria**” menjadi inovasi yang patut diapresiasi. Alih-alih memaknai jeda hanya sebagai waktu istirahat pasif, konsep ini mendorong jeda sebagai ruang untuk menyegarkan pikiran dan tubuh melalui aktivitas bermanfaat. Hal ini penting di era digital, ketika anak-anak kerap terjebak pada kebiasaan menatap gawai, menggulir berita tanpa henti, atau bahkan tenggelam dalam distraksi dunia maya. Dengan jeda yang dirancang sehat, siswa dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, sekaligus mengasah kesadaran diri agar lebih fokus saat kembali belajar.

Kebaruan lain yang patut dicatat adalah **penyesuaian kurikulum**. Meskipun tidak sepenuhnya dirombak, hadirnya mata pelajaran baru seperti *coding* dan **kecerdasan artifisial** menandai langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan besar di era digital. Kehadiran dua mata pelajaran ini menegaskan bahwa sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada warisan pengetahuan klasik, tetapi juga harus memberi ruang bagi keterampilan masa depan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Namun, kurikulum tidak bisa berdiri sendiri. Kehadiran **bimbingan konseling yang diperkuat** menjadi jantung penting, karena pembelajaran sejati tidak hanya melatih kecerdasan kognitif, tetapi juga mendampingi perkembangan emosional dan sosial siswa. Sejak hari pertama, anak-anak perlu ditanamkan kesadaran bahwa menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan berharga—bukan sekadar kewajiban formal, melainkan jalan menuju masa depan yang penuh harapan.

Dalam konteks ini, **MPLS** memperoleh makna baru. MPLS tidak boleh berhenti pada seremonial pengenalan atau kegiatan formalitas, melainkan dirancang sebagai gerbang awal untuk membangun kesadaran kritis siswa terhadap tantangan hidup yang nyata. Karena itulah program MPLS kini diwarnai oleh berbagai agenda yang menyentuh isu-isu krusial: pemahaman tentang bahaya **judi online** yang semakin marak, pencegahan penyalahgunaan **NAPZA**, hingga penegasan sikap menolak segala bentuk **kekerasan**—baik fisik, verbal, rasial, maupun keagamaan. Pendidikan yang humanis harus berani memastikan bahwa sekolah adalah zona aman, inklusif, dan jauh dari praktik diskriminatif.

Selain itu, sejak minggu pertama, sekolah juga diarahkan untuk mulai melakukan **penelusuran bakat dan minat siswa**. Pendekatan ini membuka ruang bagi anak-anak untuk menemukan jati diri, passion, dan arah pengembangan diri yang sesuai dengan potensi mereka. Jika dijalankan dengan baik, penelusuran ini akan membantu sekolah menuntun siswa pada jalur yang tepat, bukan hanya dalam akademik, tetapi juga dalam bidang seni, olahraga, keterampilan vokasional, maupun pengembangan karakter.

Semua inisiatif tersebut menyampaikan pesan yang kuat: sekolah seharusnya menjadi **rumah kedua**. Sebuah tempat di mana anak-anak menemukan kawan baru, pengalaman baru, dan semangat baru untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sekolah yang demikian bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan komunitas hidup yang menumbuhkan solidaritas, kesehatan mental, dan harapan

bersama.

Namun, di balik semangat ini, ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. **Pertama**, soal **kesiapan sumber daya guru**. Tidak semua pendidik memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan coding atau kecerdasan artifisial. Tanpa pelatihan intensif dan dukungan infrastruktur, kebijakan ini berisiko berhenti sebagai jargon. **Kedua**, penerapan “Jeda Ceria” menuntut perubahan budaya yang tidak mudah. Di banyak sekolah, kebiasaan jeda masih identik dengan penggunaan gawai; membentuk kebiasaan baru membutuhkan konsistensi, kreativitas kegiatan, dan teladan dari guru. **Ketiga**, penguatan MPLS yang ramah, edukatif, dan bebas kekerasan menuntut komitmen bersama, karena praktik perpelonconan masih menjadi bayangan di sebagian sekolah.

Karena itu, meskipun kebijakan-kebijakan ini menghadirkan angin segar, keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan implementasi. Sekolah tidak cukup hanya diberi instruksi, tetapi perlu ekosistem dukungan: guru yang terlatih, fasilitas yang memadai, kurikulum yang fleksibel, serta komitmen orang tua yang ikut mengawal.

Jika semua itu berjalan selaras, maka sekolah benar-benar bisa menjadi ruang hidup yang membahagiakan. Sebuah ruang di mana belajar bukan beban, melainkan pengalaman bermakna yang memberi arah bagi generasi muda untuk melangkah ke masa depan dengan penuh percaya diri, keterampilan yang relevan, dan hati yang kuat.

BEASISWA ADEM

Basiswa ADEM bukan hanya sekadar fasilitas pendidikan, melainkan sebuah simbol tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan negara kepada generasi muda Indonesia. Setiap penerimanya tidak cukup hanya merasa bangga karena terpilih, melainkan juga ditantang untuk menjadi semakin “adem”—tenang dalam pikiran, jernih dalam pandangan, dan bersemangat dalam menapaki masa depan. Esensi beasiswa ini adalah menghadirkan keyakinan bahwa

keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemantik yang dapat melahirkan daya juang luar biasa.

Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak merata, tempat tinggal yang jauh dari pusat pembangunan, serta berbagai kesulitan lain, sering kali menjadi alasan banyak anak berhenti bercita-cita. Namun justru di situlah makna beasiswa ini hadir: memberi pesan bahwa segala kendala itu bisa dijadikan bahan bakar untuk bangkit. Dengan kesempatan yang difasilitasi negara, anak-anak Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi, melainkan didorong untuk benar-benar meraihnya.

Penerima ADEM adalah wajah harapan bangsa. Mereka dipandang sebagai calon penerus yang akan membawa Indonesia menuju cita-cita besar: menjadi negara yang maju, hebat, dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan gagasan yang berulang kali ditegaskan Presiden dalam Asta Cita, khususnya poin keempat, yaitu tentang pentingnya melahirkan sumber daya manusia unggul. Generasi unggul yang dimaksud bukanlah sekadar berprestasi di bidang akademik, melainkan juga memiliki ketahanan, kepercayaan diri, serta semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan zaman.

Momentum mendapatkan beasiswa ini harus digunakan sebaik mungkin. Lebih dari sekadar dukungan finansial, ADEM adalah dorongan moral, sebuah pengingat bahwa bangsa menaruh harapan di pundak generasi muda. Karenanya, setiap penerimanya diajak untuk menjaga semangat, menyambut hari-hari baru di sekolah dengan antusias, serta meyakinkan diri bahwa mereka mampu. Keyakinan ini tidak hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi energi yang menguatkan keyakinan kolektif bangsa bahwa masa depan Indonesia berada di tangan anak-anak yang percaya pada dirinya.

Dengan demikian, Beasiswa ADEM bukan sekadar program. Ia adalah investasi jangka panjang dalam membangun bangsa. Ia adalah undangan untuk bermimpi besar, sekaligus peringatan agar tidak menyerah. Ia adalah jalan yang menghubungkan cita-cita pribadi

dengan visi besar Indonesia. Dan pada akhirnya, setiap penerima beasiswa ini dituntut untuk bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pembawa perubahan—bagi diri, bagi keluarga, dan bagi negeri.

4.5 Jalan Tengah Evaluasi Pendidikan Nasional:

Webinar Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Jum'at, 11 Juli 2025

Rencana pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada November 2025 patut dilihat sebagai salah satu langkah serius untuk memperkuat mutu pendidikan nasional. Bukan sekadar menambah daftar kebijakan baru, kehadiran tes ini merefleksikan upaya untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia benar-benar memiliki arah, relevansi, dan dampak nyata bagi generasi muda.

Pendidikan tidak boleh dipahami sebatas rutinitas administratif: anak masuk sekolah, mengikuti kurikulum, lalu lulus. Pandangan sempit seperti itu justru melahirkan sistem yang kaku dan kehilangan makna. Yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan mampu mencetak generasi yang unggul, tidak hanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam karakter, akhlak, serta kecakapan hidup. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai rapor atau kelulusan semata, tetapi dari sejauh mana ia membentuk manusia yang siap menghadapi tantangan zaman.

Di sinilah gagasan “pendidikan untuk semua” menemukan relevansinya. Pendidikan harus inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Baik melalui jalur formal di sekolah, maupun lewat pendidikan non-formal dan informal, setiap anak berhak memperoleh akses dan dukungan yang sama. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh eksklusif hanya untuk mereka yang berada di kota besar atau memiliki

kemampuan finansial yang baik, melainkan harus menjangkau hingga ke pelosok desa dan lapisan masyarakat yang rentan.

Namun, membuka akses saja tidak cukup. Kualitas adalah tantangan berikutnya. Pendidikan yang hanya berfokus pada kuantitas—berapa banyak siswa yang terdaftar, berapa banyak sekolah yang dibangun—akan kehilangan makna jika tidak dibarengi dengan mutu. Mutu inilah yang menjadi inti dari kebijakan TKA. Tes ini hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan sesuai dengan standar nasional, sekaligus relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Relevansi pendidikan berarti anak-anak tidak hanya dijejali teori, melainkan juga dibekali keterampilan praktis, kecakapan personal, dan kemampuan adaptif yang memungkinkan mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Lebih jauh, pendidikan harus membentuk kesadaran kolektif bahwa generasi muda bukan hanya belajar demi dirinya sendiri, tetapi juga demi kontribusinya pada bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi bukan hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.

Tes kemampuan akademik yang akan segera dijalankan perlu dipahami dalam kerangka itu. Ia bukan beban tambahan, bukan pula sekadar ujian formal, melainkan bagian dari mekanisme evaluasi untuk menjaga kualitas. Jika dijalankan dengan baik, TKA akan membantu kita melihat peta kekuatan dan kelemahan pendidikan di berbagai wilayah, sehingga pemerintah dan sekolah dapat mengambil langkah perbaikan yang lebih terarah.

Tentu, tantangan akan muncul. Ada kekhawatiran soal kesenjangan, terutama bagi sekolah di daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Ada pula kritik bahwa tes bisa mendorong orientasi “teaching to the test” dan mengurangi kreativitas. Namun, di sinilah pentingnya kebijakan ini dilihat secara komprehensif: tes hanyalah salah satu instrumen, bukan tujuan akhir. Keberhasilan pendidikan tetap ditentukan oleh bagaimana guru mengajar, bagaimana

kurikulum disusun, dan bagaimana masyarakat mendukung proses belajar anak-anaknya.

Dengan demikian, kebijakan TKA pada November 2025 mestinya dibaca sebagai langkah untuk membangun sistem pendidikan yang lebih bermutu, relevan, dan inklusif. Ia adalah cerminan komitmen bahwa pendidikan Indonesia tidak boleh berhenti pada formalitas, melainkan harus menjadi proses transformatif. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencetak lulusan, melainkan tentang menyiapkan manusia Indonesia yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya menghadapi masa depan.

Selama bertahun-tahun, kita disodori hasil tes yang menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak Indonesia masih jauh dari harapan. Angka-angka itu sering dianggap sekadar statistik, padahal sesungguhnya ia adalah cermin dari masalah mendasar yang belum terpecahkan. Pendidikan kita menghadapi kenyataan pahit: kesenjangan mutu antarwilayah, minimnya layanan pendukung, hingga pola pikir masyarakat yang kerap menganggap keberhasilan hanya sebatas nilai akademik. Namun, realitas ini tidak seharusnya membuat kita pesimis. Justru inilah titik awal untuk melahirkan kebijakan yang lebih realistis, yang mampu menyeimbangkan antara harapan besar dan kapasitas nyata di lapangan.

Perbaikan pendidikan tidak dapat ditempuh lewat langkah instan. Ia membutuhkan proses panjang yang menyentuh dua ranah sekaligus: teknis dan kultural. Dari sisi teknis, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan yang menguatkan layanan pendidikan dan memperbaiki sistem evaluasi. Namun, lebih penting lagi adalah aspek kultural: bagaimana membangun pola pikir, kesadaran kolektif, serta budaya kolaborasi yang mengakui bahwa kemajuan hanya bisa dicapai bila semua pihak terlibat. Inilah yang disebut sebagai *partisipasi semesta*—sebuah gagasan bahwa pendidikan tidak mungkin berhasil jika hanya dibebankan pada sekolah, guru, atau pemerintah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam kerangka itu, lahirlah gagasan TKA yang belakangan menjadi perdebatan publik. Penyelenggaraannya bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil kajian panjang yang melibatkan berbagai pihak: praktisi pendidikan, akademisi, orang tua, hingga pengambil kebijakan. Hasil diskusi itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang tajam.

Di satu sisi, ada kelompok yang menolak ujian dengan argumen kuat: mutu pendidikan di Indonesia masih timpang, sehingga ujian hanya akan mempertegas kesenjangan. Mereka juga mengingatkan risiko psikologis, tekanan mental, bahkan potensi pelanggaran hak anak. Argumen ini tidak bisa diremehkan karena bukti riset internasional menunjukkan bahwa ujian berisiko tinggi (*high-stakes testing*) kerap menimbulkan stres akademik, memperlebar ketidakadilan, dan gagal memotret kemampuan siswa secara utuh.

Namun, di sisi lain, terdapat kelompok yang justru melihat ujian sebagai instrumen penting. Menurut mereka, evaluasi terstandar bisa menjadi pemacu motivasi, alat ukur kualitas, dan instrumen pengendali mutu pendidikan. Tanpa bentuk evaluasi semacam itu, ada kekhawatiran bahwa sekolah hanya berfokus pada kelulusan tanpa standar kompetensi yang jelas.

Berangkat dari tarik-menarik dua pandangan tersebut, keputusan akhirnya jatuh pada jalan tengah: TKA tetap diselenggarakan, tetapi dengan aturan yang lebih lentur. Tes ini tidak bersifat wajib, tidak menjadi penentu kelulusan, dan hanya diikuti oleh siswa yang memang siap. Dengan begitu, mereka yang ingin mengukur diri dapat memperoleh pengalaman evaluasi, sementara yang belum siap tidak dipaksa. Sistem ini juga dimaksudkan untuk menggeser fungsi ujian: bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan sarana refleksi untuk mendorong motivasi belajar.

Tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Selalu ada pertanyaan: apakah dengan menjadikannya opsional, TKA masih bisa berfungsi sebagai tolok ukur mutu? Apakah siswa dari kelompok sosial-ekonomi lemah akan semakin tertinggal karena lebih banyak

memilih untuk tidak ikut? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Namun di luar itu, kebijakan ini menunjukkan keberanian untuk mencari keseimbangan di antara dua kutub yang berbeda: kebutuhan akan evaluasi dan perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis anak.

Lebih jauh, TKA bisa dipahami sebagai simbol transisi. Kita sedang berusaha keluar dari paradigma lama pendidikan yang menekankan penyeragaman hasil belajar menuju paradigma baru yang lebih humanis dan partisipatif. Jika dikaitkan dengan praktik internasional, kebijakan ini serupa dengan pergeseran yang terjadi di negara-negara Nordik, di mana evaluasi lebih difokuskan pada *formative assessment*—evaluasi yang membimbing proses belajar, bukan semata menentukan kelulusan.

Pendidikan pada akhirnya bukan hanya soal angka atau skor, melainkan proses membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan kebijakan seperti TKA, kita sedang mencoba menata ulang prioritas: menjadikan evaluasi sebagai alat pembelajaran, bukan alat hukuman. Namun, untuk mencapai hasil yang benar-benar signifikan, TKA hanya bisa berfungsi optimal bila didukung partisipasi semesta—kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat, dan negara.

Di sinilah letak optimisme kita: bahwa kebijakan pendidikan tidak harus kaku, tidak harus mengikuti satu pola baku, melainkan bisa lentur dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Jalan tengah bukan tanda kompromi yang lemah, tetapi cerminan kecerdasan kolektif untuk menjaga keseimbangan antara kualitas dan keadilan, antara standar dan kemanusiaan.

TKA hadir bukan sekadar formalitas ujian tambahan, melainkan sebagai bagian dari upaya serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak pihak, terutama dari kalangan perguruan tinggi, menekankan pentingnya mendorong semangat belajar siswa sejak di tingkat SMP dan SMA. Meskipun bukan penentu kelulusan, tes ini memiliki fungsi strategis: memberikan

jaminan mutu pendidikan nasional sekaligus memastikan capaian akademik peserta didik lebih terukur.

Di tengah keresahan masyarakat, muncul pertanyaan tentang konsekuensi bagi siswa yang tidak ikut tes ini. Jawabannya jelas, meski tidak langsung memengaruhi kelulusan, absennya siswa akan menutup peluang penting, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun ketika mereka memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, TKA menjadi pintu yang memperluas akses, bukan sekadar penilaian administratif.

Lebih jauh, TKA dirancang untuk menghadirkan peta pendidikan nasional yang lebih otentik. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat menelurkan kebijakan yang realistis, menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini menjadi penting karena realitas pendidikan di tiap daerah tidak sama. Melalui TKA, ruang partisipasi diberikan kepada pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—untuk turut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan tes.

TKA diharapkan menjadi instrumen bersama: mengukur, memperbaiki, sekaligus menyatukan arah pendidikan nasional agar lebih bermutu. Forum-forum diskusi seperti seminar dan webinar yang membahas TKA menjadi ruang krusial, bukan hanya untuk sosialisasi, tetapi juga sebagai wadah kritik, masukan, dan kolaborasi. Hanya dengan cara itulah TKA dapat benar-benar menjadi alat perubahan yang berpihak pada kualitas pendidikan seluruh anak Indonesia.

Tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Setiap sistem, sebesar apa pun niat baik di baliknya, pasti menyimpan kekurangan sekaligus kelebihan. Namun yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut dijalankan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, upaya ini tercermin melalui penyelenggaraan tes kemampuan akademik yang bukan hanya dimaksudkan sebagai instrumen seleksi, melainkan juga sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan.

Tes ini diharapkan mampu menghadirkan iklim belajar yang lebih sehat, menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif, sekaligus mendorong adanya perbaikan layanan pendidikan di berbagai tingkatan. Dengan demikian, ujian tidak semata-mata dipandang sebagai pengukur angka atau pencapaian kognitif, tetapi juga sebagai sarana yang menggerakkan perubahan dan inovasi. Dari proses itu, muncul dorongan bagi sekolah, pendidik, maupun peserta didik untuk terus berbenah dan menyesuaikan diri dengan standar mutu yang lebih tinggi.

Namun, hal yang lebih penting dari sekadar keberhasilan teknis penyelenggaraan tes adalah arah besar yang hendak dituju: pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan materi atau pencapaian akademis belaka, melainkan harus melahirkan generasi yang kuat, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Generasi inilah yang kelak diharapkan membawa bangsa Indonesia menuju martabat yang lebih tinggi, tidak lagi bergantung pada capaian semu, melainkan pada kekuatan nyata yang dibangun dari kualitas manusia.

Dengan demikian, setiap langkah kecil dalam perbaikan sistem pendidikan, termasuk pelaksanaan tes kemampuan akademik, sejatinya adalah bagian dari upaya panjang untuk menyiapkan masa depan bangsa. Jalan ini mungkin berliku, prosesnya tidak instan, tetapi keyakinan bahwa perubahan bertahap akan berbuah pada peningkatan kualitas membuat usaha ini layak terus diperjuangkan. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, melainkan tentang warisan yang akan ditinggalkan bagi generasi yang akan datang.



Dari Kebiasaan Kecil Lahir Karakter Hebat:

Pak Menteri Menyapa Murid dan Guru di Awal Tahun Ajaran Baru 2025-2026

Senin, 14 Juli 2025

Awal tahun ajaran baru selalu membawa suasana penuh semangat. Bagi para murid, hari pertama di kelas yang lebih tinggi bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, melainkan momen penting yang menandai sebuah perjalanan baru. Ada rasa bangga yang patut dirayakan, sebab setiap langkah maju dalam pendidikan adalah investasi bagi masa depan pribadi sekaligus bagi bangsa. Dari ruang-ruang kelas inilah, sesungguhnya masa depan Indonesia perlahan sedang dibentuk.

Tersimpan makna yang dalam bahwa setiap anak adalah bagian dari generasi emas Indonesia 2045. Sebuah visi besar yang diletakkan bukan hanya pada prestasi akademik, tetapi juga pada penguatan jasmani, rohani, dan karakter. Pendidikan diharapkan melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Pesan ini penting, sebab keberhasilan bangsa tidak pernah ditentukan oleh satu bidang semata, melainkan oleh keberagaman potensi yang bergerak bersama.

Dalam konteks ini, suasana belajar menjadi kunci. Pendidikan tidak seharusnya terjebak dalam rutinitas yang kaku atau hanya berorientasi pada capaian angka. Yang dibutuhkan adalah ruang belajar yang ceria, penuh energi, namun tetap mendalam. Kebijakan *pembelajaran mendalam* yang diperkenalkan menjadi jawaban atas

kebutuhan ini: bagaimana murid tidak hanya menyerap pengetahuan, tetapi juga merasakannya sebagai pengalaman bermakna. Belajar dengan sungguh-sungguh sekaligus dengan perasaan gembira adalah kombinasi yang dapat menghidupkan sekolah sebagai pusat tumbuhnya kreativitas dan kemandirian.

Selain itu, langkah-langkah sederhana yang dibiasakan setiap hari justru menjadi fondasi bagi lahirnya generasi unggul. Pagi Ceria yang dimulai dari senam, menyanyikan Indonesia Raya, hingga doa bersama setiap pagi bukanlah kegiatan seremonial belaka. Pagi Ceria adalah bentuk pendidikan karakter yang meresap melalui kebiasaan. Rutinitas kecil yang konsisten ini melatih murid untuk disiplin, menghargai kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Seperti pesan yang disampaikan, prestasi besar sesungguhnya berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara rutin dengan penuh kesungguhan.

Lebih jauh, gagasan *Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat* menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak lahir dalam sekejap. Ia adalah proses panjang yang dimulai dari hal-hal sederhana—dari cara anak-anak menyapa pagi, bersikap terhadap teman, hingga kegigihan mereka mengejar cita-cita. Di sinilah pendidikan menemukan hakikatnya: bukan sekadar ruang akademis, tetapi juga sarana pembentukan manusia seutuhnya.

Tahun ajaran baru ini, dengan segala kebijakan dan semangat yang menyertainya, memberi pesan yang kuat kepada kita semua. Bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Mereka adalah tumpuan harapan bangsa yang kelak akan memimpin Indonesia menuju kemerdekaan sejati di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan peradaban.

Optimisme ini tentu tidak boleh berhenti pada seremonial awal tahun ajaran. Ia harus dijaga oleh seluruh ekosistem pendidikan: guru yang membimbing dengan hati, orang tua yang mendampingi dengan kesabaran, serta negara yang hadir dengan kebijakan yang berpihak

pada masa depan anak. Karena pada akhirnya, cita-cita generasi emas Indonesia 2045 hanya bisa terwujud jika kita semua menunaikan tanggung jawab bersama dalam mendidik, mendampingi, dan menginspirasi anak-anak kita.

Dengan demikian, awal tahun ajaran baru ini bukan sekadar penanda kalender akademik, melainkan sebuah pengingat akan janji besar bangsa ini. Dari langkah kecil di sekolah-sekolah yang sederhana, kita sedang menyiapkan lompatan besar menuju masa depan. Dari wajah-wajah ceria murid yang bersemangat, kita melihat bayangan Indonesia yang lebih hebat di tahun 2045.

47 Mengawali Hari Pertama Masuk Sekolah:

Pelaksanaan MPLS Ramah bersama Mendikdasmen di Sumbawa

Senin, 14 Juli 2025

Awal tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang penuh makna, bukan hanya bagi murid-murid yang memasuki jenjang kelas baru, tetapi juga bagi seluruh ekosistem pendidikan. Tahun 2025 ini, suasana itu semakin istimewa dengan peluncuran konsep **MPLS Ramah**, sebuah pendekatan baru yang diharapkan mampu menghadirkan wajah pendidikan yang lebih hangat, manusiawi, dan benar-benar berpihak pada anak.

MPLS Ramah hadir bukan sekadar sebagai program penyambutan murid baru, melainkan sebagai simbol transformasi pendidikan. Di balik istilah “ramah” terkandung sebuah tekad untuk menanamkan budaya saling menghormati dan memuliakan setiap murid. Tidak boleh ada lagi sekat yang membedakan anak berdasarkan kondisi ekonomi, keadaan fisik, latar agama, atau tingkat kecerdasan. Pendidikan ditujukan untuk semua, dan setiap anak berhak merasakan kenyamanan, kegembiraan, serta semangat kebersamaan di lingkungan sekolah.

Dengan semangat ini, sekolah diidealkan menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tempat di mana mereka tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga menempa karakter dan kepribadian. Lingkungan belajar harus membangun rasa percaya diri, solidaritas, serta penghargaan antar sesama. Inilah esensi MPLS Ramah:

menjadikan pendidikan bukan sekadar aktivitas formal, melainkan pengalaman hidup yang membentuk manusia seutuhnya.

Selain itu, konsep ini mengingatkan bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan. Tanggung jawab pendidikan bukan hanya soal memberikan ilmu, tetapi juga mendampingi, menyemangati, dan membantu mereka tumbuh sesuai dengan potensi terbaiknya. Generasi yang dibayangkan adalah generasi yang sehat jasmani dan rohani, kuat secara mental, cerdas dan mandiri, serta memiliki rasa cinta yang mendalam pada tanah air.

MPLS Ramah menjadi pijakan awal untuk mewujudkan generasi tersebut. Di dalamnya terkandung harapan bahwa setiap murid merasa diterima tanpa kecuali, setiap guru mampu mengajar dengan hati, dan setiap orang tua percaya bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan membahagiakan bagi anak-anak mereka. Dengan cara ini, pendidikan tidak lagi sekadar instrumen menuju masa depan, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang penuh martabat dan kebersamaan.

Penguatan pendidikan karakter yang kini menjadi prioritas tidak lagi ditempatkan sebatas wacana, melainkan dijalankan melalui serangkaian program yang menyentuh kehidupan sehari-hari anak-anak. Program **Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat** misalnya, dirancang sebagai bentuk nyata untuk membiasakan anak sejak dini menjalani pola hidup yang sehat, religius, disiplin, dan penuh semangat belajar. Kebiasaan sederhana—seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, berinteraksi dengan masyarakat, hingga tidur tepat waktu—sebenarnya adalah hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, tetapi justru menjadi pondasi kokoh dalam pembentukan karakter.

Program ini tidak berhenti pada satu ruang pendidikan saja, melainkan ditanamkan melalui **empat pusat pendidikan**: keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Artinya, kebiasaan baik tidak boleh berhenti di rumah atau hanya berlaku di sekolah, melainkan harus saling menopang di setiap ruang kehidupan anak. Dengan begitu, anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang konsisten, di mana perilaku

baik bukan sekadar aturan, tetapi sudah menjadi bagian dari jati diri mereka. Lebih penting lagi, tujuh kebiasaan tersebut lahir dari kekayaan budaya bangsa dan nilai-nilai keagamaan yang selama ini telah hidup di tengah masyarakat. Sehingga, apa yang diajarkan bukanlah hal asing, melainkan penguatan dari akar tradisi dan kepercayaan yang kita yakini bersama.

Selain program tujuh kebiasaan, hadir pula konsep **pagi ceria**, yakni pembiasaan positif sebelum pembelajaran dimulai. Ada tiga rangkaian kegiatan yang dijalankan: Senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa. Senam melatih fisik agar anak-anak terbiasa bergerak dan hidup sehat. Menyanyikan lagu kebangsaan menumbuhkan kecintaan pada bangsa, menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia yang besar. Sementara doa menjadi pegangan spiritual, membiasakan anak untuk memulai aktivitas dengan landasan iman dan takwa.

Di balik kesederhanaan rangkaian ini, ada nilai mendasar yang ingin ditanamkan: **keseimbangan antara jasmani, rohani, dan kebangsaan**. Sehat tubuhnya, kuat imannya, dan teguh cintanya pada tanah air. Inilah kombinasi yang diperlukan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara karakter. Lebih jauh, program ini juga menekankan pentingnya **kepemimpinan sejak dini**. Anak-anak diberi kesempatan untuk memimpin senam, memimpin doa, atau mengambil peran dalam upacara. Dengan cara ini, mereka belajar keberanian, tanggung jawab, serta kemampuan mengarahkan orang lain. Latihan kecil ini sangat berharga untuk menumbuhkan jiwa pemimpin yang percaya diri, terbiasa mengambil keputusan, dan berani tampil di depan umum.

Namun, tentu saja program seperti ini tidak bebas dari tantangan. Pertama, konsistensi penerapan di empat pusat pendidikan tidak mudah dijaga. Ada kalanya sekolah menekankan disiplin, tetapi keluarga longgar dalam mendukung kebiasaan yang sama. Atau sebaliknya, keluarga sudah membiasakan pola hidup sehat, namun lingkungan masyarakat justru memaparkan anak pada kebiasaan

negatif. Kedua, media sebagai pusat pendidikan keempat justru sering menjadi distraksi, dengan konten yang tidak mendukung nilai karakter, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra.

Meski demikian, arah yang diambil melalui program ini patut diapresiasi. Di tengah tantangan globalisasi, derasnya arus digital, dan kompetisi dunia yang semakin ketat, penguatan karakter menjadi fondasi yang tak bisa ditawar. Anak-anak tidak cukup hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga perlu dibekali keteguhan moral, kepekaan sosial, dan ketahanan mental. Program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria adalah ikhtiar kolektif untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh tidak sekadar pintar, tetapi juga berkarakter kuat, sehat, religius, dan cinta tanah air.

Apabila dilihat lebih jauh, inisiatif ini sejalan dengan gagasan pendidikan karakter di banyak negara maju, yang menekankan pentingnya *holistic education*—pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kognisi, tetapi juga afeksi dan tindakan nyata. Indonesia dengan kekayaan nilai budaya dan agama memiliki modal besar untuk menjalankan hal ini. Tantangan kita bukanlah pada kekurangan nilai, melainkan pada konsistensi implementasi.

Penguatan pendidikan karakter hari ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang cepat, sekolah tidak bisa hanya berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan. Ia harus menjadi ruang tumbuh kembang kepribadian, moral, dan jati diri anak. Karena itulah setiap guru kini diberi amanat tambahan untuk mendampingi murid melalui fungsi bimbingan konseling, meskipun mereka bukan guru BK secara formal. Pendampingan ini adalah bentuk kesadaran baru bahwa setiap anak memerlukan perhatian personal, agar semangat belajarnya terjaga, bakat dan minatnya terbimbing, serta perjalanan tumbuh kembangnya tidak berlangsung sendirian.

Peran guru wali dalam kebijakan ini ditempatkan lebih luas: bukan sekadar penjaga kedisiplinan, melainkan penghubung komunikasi yang sehat antara sekolah dan orang tua. Dengan

begitu, pendidikan tidak lagi berjalan sepotong-sepotong di ruang kelas, melainkan menjadi proses kolektif yang melibatkan keluarga. Menariknya, fungsi ini tidak dianggap beban tambahan, melainkan dapat dikonversi sebagai bagian dari jam mengajar. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma bahwa membimbing dan mendampingi murid adalah inti profesi guru. Dengan cara ini, tidak ada anak yang terabaikan, karena perhatian personal diposisikan sebagai salah satu dari lima tugas utama guru dalam kerangka penguatan pendidikan karakter.

Tahun ajaran baru 2025 juga menandai dimulainya transformasi penting: penerapan **pembelajaran mendalam** (*deep learning*). Langkah ini sejalan dengan kritik global terhadap pendidikan yang terlalu menekankan hafalan, tetapi kurang mengasah pemahaman dan kreativitas. Deep learning berorientasi pada upaya agar anak belajar dengan sungguh-sungguh, menginternalisasi nilai, dan mengembangkan keterampilan hidup. Fondasinya jelas: *mindful learning* yang menumbuhkan kesadaran penuh dalam belajar, *meaningful learning* yang membuat pelajaran relevan dengan kehidupan nyata, serta *joyful learning* yang menjaga kegembiraan di dalam proses belajar. Tiga pendekatan ini bersama-sama membentuk pola belajar reflektif, bermakna, dan menyenangkan, yang bukan hanya menghasilkan siswa pintar, melainkan juga berkarakter kuat, kreatif, komunikatif, dan mampu bekerja sama.

Selain aspek karakter dan metode belajar, ada pula dimensi baru yang mulai masuk ke ruang kelas: literasi teknologi. Secara bertahap, anak-anak akan diperkenalkan pada **coding dan kecerdasan artifisial**. Langkah ini menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak boleh tertinggal dari perkembangan global. Dunia kini bergerak menuju otomasi dan kecerdasan buatan, sehingga penguasaan dasar-dasar teknologi sejak dini menjadi keharusan. Namun, kebijakan ini juga memuat pesan penting: teknologi bukan hanya untuk dikuasai, tetapi juga untuk dicintai dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Di sinilah terletak keseimbangan yang ingin dicapai: menggabungkan kekuatan karakter dengan kecakapan digital.

Arah kebijakan ini selaras dengan tren pendidikan internasional. UNESCO, misalnya, sejak lama menekankan empat pilar pendidikan: *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Pembelajaran mendalam dan literasi teknologi yang digerakkan di Indonesia beresonansi dengan keempat pilar ini. *Learning to know* tercermin dalam pemahaman yang bermakna; *learning to do* dalam penguasaan coding dan AI; *learning to live together* dalam peran guru wali sebagai jembatan komunikasi dan pembinaan karakter; serta *learning to be* dalam penumbuhan kesadaran diri, kreativitas, dan tanggung jawab.

Namun, tantangan nyata tidak bisa diabaikan. Penerapan pembelajaran mendalam dan pengenalan teknologi canggih memerlukan kesiapan guru, kurikulum, dan sarana. Pelatihan guru menjadi kunci utama agar kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai wacana. Tanpa pendampingan dan peningkatan kapasitas, guru bisa terjebak pada rutinitas lama yang mengandalkan hafalan, sementara target besar deep learning tidak tercapai. Demikian juga, literasi teknologi harus diimbangi dengan literasi digital kritis agar anak-anak tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta yang etis dan bertanggung jawab.

Di balik semua rencana dan kebijakan ini, ada satu faktor fundamental yang tak bisa digantikan: dedikasi guru. Dengan penuh semangat, merekalah yang setiap hari mendampingi murid, memandu, dan memberi teladan. Sesungguhnya, para guru sedang mengerjakan pekerjaan peradaban. Sebab, anak-anak yang kini duduk di bangku prasekolah, dasar, dan menengah, merekalah yang akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045, saat negeri ini merayakan seratus tahun kemerdekaan. Amanat ini sungguh mulia dan besar. Oleh karena itu, tugas mendidik harus dilakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa, agar lahir generasi Indonesia yang hebat dan kuat, yang mampu membawa bangsa ini berdiri sejajar dengan negara lain di era global.

Kebijakan ini adalah undangan bersama: bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk menata kembali cara pandang kita tentang

pendidikan. Bukan sekadar menghasilkan lulusan yang pintar di atas kertas, tetapi menyiapkan manusia yang utuh — cerdas, berkarakter, kreatif, dan tangguh menghadapi masa depan.

Awal tahun ajaran baru selalu membawa energi yang berbeda. Di tengah riuh langkah anak-anak memasuki ruang kelas, kita kembali diingatkan bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang kerap disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan. Pendidikan bukan semata jalan keluar dari kemiskinan menuju kesejahteraan, melainkan juga sarana untuk mengangkat martabat bangsa. Dengan pendidikan, Indonesia tidak hanya berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia, tetapi juga berpeluang memimpin arah peradaban global.

Komitmen Presiden untuk menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna diwujudkan melalui kebijakan makan bergizi gratis. Program ini bukan sekadar bantuan logistik, melainkan strategi membangun fondasi kesehatan generasi sejak dini. Anak-anak yang terbiasa makan sehat akan tumbuh kuat, memiliki energi untuk belajar, dan berkesempatan mengembangkan potensi terbaiknya. Di balik kebijakan itu tersimpan pesan penting: pembangunan manusia tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar untuk tumbuh sehat.

Namun, keberhasilan pendidikan tidak berhenti pada kebijakan pemerintah. Hari pertama sekolah memperlihatkan betapa besar peran orang tua dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak. Kehadiran mereka mendampingi anak di gerbang sekolah memberi makna mendalam, menghadirkan rasa sukacita, dan menanamkan keyakinan bahwa perjalanan pendidikan adalah sesuatu yang berharga. Anak-anak yang beranjak dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar, atau dari SMP ke SMA, merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Kehangatan keluarga meneguhkan tekad mereka untuk menapaki jenjang baru dengan penuh semangat.

Komunikasi yang terjalin erat antara orang tua dan guru menjadi jembatan penting. Pendidikan di rumah harus bersinergi dengan pendidikan di sekolah, sementara lingkungan sosial di sekitar anak

harus mendukung. Pendidikan adalah ekosistem; ia akan berhasil ketika seluruh unsur, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, saling memperkuat.

Momentum tahun ajaran baru ini seharusnya kita maknai sebagai penanda fase baru, bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi bangsa. Setiap kenaikan jenjang pendidikan membawa misi baru: memperkuat cita-cita, menumbuhkan semangat, dan merawat tekad agar kelak lahir generasi yang tangguh, berakarakter, serta siap menghadapi tantangan global.

Upaya ini tentu tidak bisa dijalankan sendirian. Dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga para guru di lapangan adalah bagian dari gotong royong besar membangun masa depan. Semua ini sejalan dengan visi Presiden untuk mencetak generasi Indonesia yang kuat jasmani, sehat rohani, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab.

Tahun ajaran baru adalah momen refleksi kolektif. Kita ditantang untuk tidak hanya menyekolahkan anak-anak, tetapi juga memastikan mereka tumbuh dalam sistem pendidikan yang mampu mengasah kecerdasan, menanamkan nilai, dan membentuk kepribadian. Seperti yang kerap ditegaskan Presiden, pendidikan adalah investasi terbesar bangsa. Ia bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi jalan panjang menuju Indonesia yang lebih maju, bermartabat, dan siap mengambil peran kepemimpinan di panggung dunia.

Pengembangan Kurikulum dengan Pembelajaran Mendalam sebagai Pendekatan:

Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025

Selasa, 22 Juli 2025

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tiba-tiba menjadi bahan perbincangan, dan itu wajar — regulasi baru pasti menimbulkan rasa ingin tahu. Namun, ada hal sederhana tapi krusial yang sering terlupakan: judul bukanlah keseluruhan cerita. Menyimpulkan makna sebuah peraturan hanya dari judulnya sama saja dengan menilai sebuah buku dari sampulnya—berisiko menimbulkan salah paham yang tak perlu.

Regulasi yang lahir dari Kementerian seharusnya dibaca secara seksama agar tujuan dan ruang lingkupnya dipahami. Jika tujuan bersama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, maka pertama-tama perlu dipastikan bahwa interpretasi terhadap peraturan itu seragam. Bukan sekadar tahu ada permen baru, melainkan memahami apa yang berubah, apa yang dikuatkan, dan apa yang **tidak** berubah — misalnya, hal yang ditegaskan di sini: peraturan itu **bukan** kurikulum baru. Kejelasan semacam ini penting supaya langkah-langkah implementasi tidak meleset.

Budaya membaca cepat—atau yang disebut “scroll culture”—menyuburkan kesimpulan prematur. Dalam konteks kebijakan pendidikan, dampaknya bisa luas: kebijakan yang dimaknai keliru bisa memicu kebingungan di tingkat sekolah, guru, maupun orang

tua. Karena itu, ajakan untuk membaca isi peraturan hingga detail dan menganalisis kata demi kata bukan sekadar formalitas birokratis, melainkan langkah praktis agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat di lapangan.

Lebih jauh lagi, kesiapan implementasi harus dipandang sebagai pekerjaan kolektif: memahami peraturan hanyalah langkah awal; menyiapkan sosialisasi yang efektif, pelatihan untuk pelaksana, dan monitoring pelaksanaan adalah bagian yang tak kalah penting. Jika pemahaman sudah sama dan implementasi direncanakan matang, peluang untuk benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan menjadi jauh lebih besar.

Permendikdasmen 13 tahun 2025 hadir sebagai salah satu tonggak penting dalam arah pendidikan nasional. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu rangkaian kebijakan yang saling terkait: standar kompetensi lulusan, standar isi, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jika dilihat dari susunannya, kebijakan ini dirancang untuk menyatukan gambaran besar pendidikan di Indonesia. Standar lulusan mengatur profil yang ingin dihasilkan, standar isi memberi arah materi yang harus disampaikan, coding dan kecerdasan artifisial memperkenalkan keterampilan masa depan, sementara Permendikdasmen 13 menjadi landasan penerapan pembelajaran mendalam. Semua ini membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Salah satu penekanan utama dari kebijakan ini adalah penerapan *deep learning* atau pembelajaran mendalam. Konsepnya sederhana tetapi sarat makna: lebih sedikit, tetapi lebih dalam. Prinsip *less but more* ini seakan mengajak kita keluar dari jebakan sistem lama, yang terlalu menekankan keluasan materi namun dangkal dalam pemahaman. Dengan pembelajaran mendalam, siswa diajak menyelami inti pengetahuan, menghubungkan konsep lintas topik, bahkan lintas mata pelajaran. Bayangkan sebuah tema sederhana yang kemudian ditautkan dengan berbagai disiplin: sains, sosial, bahasa, hingga seni. Dari satu pintu masuk, lahirlah pemahaman yang

menyeluruh, bukan sekadar hafalan terpisah.

Pendekatan ini juga memperlihatkan kesinambungan dengan kurikulum yang sudah ada. Ada irisan dengan K-13, juga dengan Kurikulum Merdeka. Bedanya, pembelajaran mendalam lebih menekankan integrasi dan relevansi. Ia tidak menutup ruang bagi apa yang sudah berjalan, tetapi justru mencari titik temu dan memperdalamnya. Dengan begitu, kurikulum tidak lagi sekadar menjadi daftar mata pelajaran, melainkan pengalaman belajar yang utuh, bermakna, dan kontekstual bagi murid.

Namun yang paling menarik adalah penekanan bahwa pendidikan tidak hanya soal *written curriculum*—dokumen resmi yang berisi standar isi dan kompetensi. Ada satu lapisan lain yang tak kalah penting, yakni *hidden curriculum*. Inilah dimensi pendidikan yang tidak tertulis, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sekolah. Di sinilah sikap, pandangan, dan nilai hidup siswa dibentuk. Dari interaksi sehari-hari dengan guru dan teman, dari cara sekolah menumbuhkan budaya kerja sama, hingga dari kegiatan non-akademik seperti kepanduan, ekstrakurikuler, atau pengembangan bakat-minat. Semua itu menghadirkan *experiential learning*, pembelajaran yang tumbuh dari pengalaman nyata.

Dengan *hidden curriculum*, pendidikan tidak berhenti pada kognisi semata. Murid belajar tentang disiplin bukan hanya dari peraturan tertulis, tetapi dari pengalaman menepati jadwal kegiatan. Mereka belajar kepemimpinan bukan hanya dari teori, tetapi dari kesempatan memimpin kelompok dalam pramuka atau lomba. Mereka belajar empati bukan dari definisi dalam buku, tetapi dari momen membantu teman yang kesulitan. Inilah wajah pendidikan yang lebih menyeluruh—yang menyiapkan siswa bukan hanya untuk menjawab soal ujian, tetapi juga untuk hidup di tengah masyarakat.

Kebijakan ini pada akhirnya memberi pesan bahwa pendidikan tidak boleh lagi berhenti pada sekadar mentransfer pengetahuan. Ia harus memberi ruang bagi pemaknaan, integrasi, dan pengalaman. Murid tidak lagi diperlakukan sebagai wadah kosong yang harus diisi,

melainkan sebagai individu yang perlu diarahkan untuk menyelami pengetahuan, membentuk sikap, dan menumbuhkan nilai.

Permendikdasmen 13 tahun 2025 adalah bagian dari usaha besar untuk menata ulang arah pendidikan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dipelajari, melainkan seberapa dalam siswa mampu memahami dan menghayati ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah pendidikan menemukan maknanya yang sesungguhnya: membentuk generasi yang utuh—cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Dalam dunia pendidikan, kita sering terjebak pada rutinitas mengajar: menyampaikan materi, memberi tugas, lalu menilai hasil akhir. Padahal, esensi pembelajaran sejati jauh lebih luas daripada sekadar transfer pengetahuan. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ruang yang membuat anak merasa ingin tahu, berani bertanya, dan terdorong untuk berpikir lebih jauh daripada sekadar menghafal.

Pendidikan yang bermakna selalu memberi kesempatan pada murid untuk mengembangkan pemikiran tingkat tinggi. Mereka diajak untuk melakukan kontekstualisasi—menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan cara itu, ilmu pengetahuan tidak lagi berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam pengalaman sehari-hari. Lebih dari itu, setiap murid membutuhkan perhatian yang sama dari guru. Perhatian bukan hanya soal siapa yang pintar atau aktif, melainkan bagaimana setiap anak, dengan segala latar belakangnya, merasa dilibatkan dan dihargai.

Di sinilah peran *mindfulness* menjadi sangat relevan. *Mindfulness* dalam pendidikan bukan sekadar refleksi atau mengajak murid berpikir kritis. Ia lebih dalam dari itu. *Mindfulness* adalah sikap menghadirkan ruang yang adil, memberi kesempatan yang setara, serta menghargai setiap keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Saat guru mampu menghadirkan *mindfulness*, kelas tidak lagi menjadi ruang kompetisi yang menekan, tetapi ruang

kolaborasi yang menghidupkan.

Lebih jauh, *mindfulness* terhubung erat dengan apa yang sering disebut *hidden curriculum* dan *experiential learning*. Kita sadar bahwa murid datang ke sekolah tidak dengan kepala kosong. Mereka membawa pengalaman keluarga, kehidupan pribadi, interaksi sosial, hingga cara pandang tertentu terhadap dunia. Semua itu adalah modal berharga yang seharusnya mendapatkan ruang dalam pembelajaran. Maka, pendidikan tidak boleh menutup mata pada realitas yang dibawa murid, melainkan justru menjadikannya sebagai titik awal membangun pengetahuan.

Dalam praktiknya, *mindfulness* melahirkan pembelajaran yang tidak hanya reflektif, tetapi juga apresiatif dan partisipatif. Reflektif karena mendorong murid berpikir kritis, mencari makna, dan memecahkan masalah. Apresiatif karena setiap suara dan kontribusi murid dihargai, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Partisipatif karena murid tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi ikut serta membangun dan mewarnai proses belajar.

Bayangkan sebuah kelas di mana semua murid merasa diperhatikan. Tidak ada yang terpinggirkan karena dianggap kurang pandai, dan tidak ada yang terabaikan karena terlalu pendiam. Semua diberi ruang untuk berbicara, bereksperimen, bertanya, bahkan salah sekalipun. Dari suasana seperti inilah lahir semangat belajar yang autentik—sebuah dorongan dari dalam diri, bukan sekadar karena tuntutan nilai atau ujian.

Pendidikan yang berlandaskan *mindfulness* juga menekankan bahwa belajar bukan hanya persoalan hasil, melainkan proses. Ia tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi melatih murid menjadi manusia yang utuh: kritis, terbuka, empatik, dan mampu berkontribusi pada lingkungannya. Dengan cara itu, sekolah bukan hanya pabrik nilai, melainkan ruang hidup yang membentuk karakter dan kesadaran.

Karena itu, *mindfulness* seharusnya dipandang sebagai bagian penting dari arah pembelajaran masa depan. Ia bukan tambahan,

bukan pula sekadar metode alternatif, melainkan fondasi. Tanpa *mindfulness*, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif tetapi miskin empati. Sebaliknya, dengan *mindfulness*, kita bisa membentuk murid yang tidak hanya pintar, tetapi juga manusiawi, mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah.

Pembelajaran yang mendalam bukanlah sekadar istilah indah dalam dunia pendidikan. Ia merupakan sebuah pendekatan yang menekankan makna, kegembiraan, serta dukungan ekosistem yang kuat bagi tumbuhnya semangat belajar. Ada tiga pilar utama yang menjadi fondasi dari konsep ini.

Pertama adalah *meaningful learning*. Belajar harus menghadirkan makna. Murid tidak hanya diminta menghafal atau menyelesaikan soal, tetapi diajak untuk menyadari bahwa apa yang dipelajari benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Pengetahuan yang bermakna akan menjadi fondasi penting, baik untuk melanjutkan proses pembelajaran di tingkat berikutnya maupun untuk kehidupan sehari-hari. Jika murid menemukan relevansi antara materi pelajaran dengan realitas hidupnya, maka belajar akan terasa lebih hidup, tidak lagi sekadar kewajiban akademis.

Kedua adalah *joyful learning*. Pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti sekadar hiburan atau penuh kelucuan, tetapi suasana yang membangkitkan antusiasme. *Joyful* berarti ada motivasi yang tumbuh dari dalam, bahkan melampaui motivasi itu sendiri menuju *grit*—keteguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus belajar. Inilah yang membuat seorang murid mau menggali hal baru, mencoba pengalaman baru, dan bersemangat menemukan makna dari setiap pelajaran. Belajar yang *joyful* memupuk motivasi intrinsik, sehingga semangat itu tidak lagi tergantung pada paksaan atau hadiah, melainkan tumbuh dari kesadaran diri.

Ketiga, pembelajaran mendalam hanya dapat terwujud jika ada **ekosistem pendidikan yang kuat**. Belajar tidak berhenti di ruang

kelas. Ia berlangsung di rumah bersama keluarga, di masyarakat melalui interaksi sosial, dan melalui media yang kini semakin luas dengan hadirnya teknologi digital. Empat unsur inilah yang disebut sebagai *catur pusat pendidikan*: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Keempatnya harus saling melengkapi dan memperkuat agar pendidikan menjadi pengalaman yang utuh. Murid dapat belajar dari buku, dari sumber digital yang relevan, dari percakapan sehari-hari, hingga dari fenomena sosial di lingkungannya. Pendidikan yang hidup justru lahir ketika batas kelas melebur dengan realitas kehidupan.

Semua prinsip ini kini telah dituangkan dalam **Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025**. Regulasi tersebut menjadi pijakan agar pembelajaran mendalam bukan hanya wacana, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pendidikan. Namun, tentu saja, regulasi hanyalah kerangka. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami substansi dari peraturan itu, lalu menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Sebab, tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, dan yang paling penting: peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tentu proses ini tidak akan singkat. Pendidikan selalu merupakan kerja jangka panjang. Hasilnya tidak bisa diukur dalam hitungan bulan atau tahun saja, melainkan sebuah *proses longitudinal*—proses panjang yang berkesinambungan. Karena itu, dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk berubah. Tidak hanya murid yang belajar, tetapi juga para pendidik, orang tua, bahkan kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Perubahan mindset menjadi kunci agar semangat pembelajaran mendalam benar-benar hidup.

Di titik inilah kita menyadari bahwa pendidikan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan sebuah upaya peradaban. *Meaningful, joyful*, dan ekosistem yang kuat bukanlah slogan, tetapi prinsip yang bisa menjadikan anak-anak kita tumbuh sebagai pribadi yang utuh: cerdas secara akademik, tangguh menghadapi tantangan, dan peka terhadap makna kehidupan. Jika kita konsisten melangkah

di jalur ini, meski lambat, kita akan tiba pada tujuan: menciptakan generasi Indonesia yang tidak hanya pintar, tetapi juga berdaya dan berkarakter.

49 **Menjadi Generasi Hebat dari Kebiasaan Kecil:**

Pertemuan Pagi Ceria Serentak dalam rangka Hari Anak Nasional 2025

Rabu, 23 Juli 2025

Pertemuan pagi ceria dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 menghadirkan nuansa yang bukan sekadar seremonial. Ada makna besar yang tersampaikan, terutama tentang bagaimana kita memandang anak-anak sebagai pusat harapan bangsa. Dari kisah sederhana seorang anak bernama Auna yang bercita-cita menjadi atlet renang untuk mengharumkan nama Indonesia, tergambar betapa kuatnya semangat generasi muda. Auna hanyalah satu dari berjuta anak Indonesia yang memiliki mimpi, bakat, dan daya juang. Mereka membutuhkan ruang, dukungan, serta kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya.

Pesan utama yang bergema adalah bahwa setiap anak Indonesia, di manapun mereka berada, dengan kondisi ekonomi apapun, dari latar belakang suku manapun, tetaplah bagian dari generasi hebat bangsa. Mereka bukan hanya penerus orang tua, tetapi juga penyempurna cita-cita besar para pendiri bangsa. Karena itu, Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak diperlakukan hari ini.

Lingkungan tumbuh kembang anak haruslah aman, nyaman, menyenangkan, dan memberi ruang eksplorasi. Tidak boleh ada lagi bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat verbal,

fisik, maupun kultural. Semua itu harus ditinggalkan jauh-jauh karena hanya akan merusak jiwa dan mematikan semangat mereka. Sebaliknya, kita perlu menumbuhkan budaya saling menghormati, saling memuliakan, dan memberi ruang anak untuk bermain, belajar, dan menemukan dirinya.

Setiap anak memiliki bakat yang berbeda, dan keberagaman inilah yang menjadi kekayaan bangsa. Tugas orang tua dan pendidik bukan menyeragamkan mimpi, melainkan mendampingi anak agar bisa meniti jalannya sendiri. Dengan cara itu, anak-anak akan tumbuh percaya diri, mandiri, dan mampu membawa bangsa ini melangkah lebih jauh. Mereka lah yang nantinya mewujudkan cita-cita besar Indonesia: menjadi bangsa yang bermartabat dan diperhitungkan di dunia.

Pesan ini sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden yang menekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia unggul. Generasi yang kuat bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga soal karakter, daya juang, dan keceriaan. Lagu kebiasaan anak hebat yang dinyanyikan bersama, atau semangat Auna yang berlatih hingga berkeringat, menjadi simbol kecil betapa energi positif anak-anak perlu terus dipelihara. Bahkan panas terik yang membuat mereka kepayahan pun dianggap sebagai vitamin D alami yang menyehatkan, bukan penghalang untuk tetap bersemangat.

Hari Anak Nasional 2025 akhirnya bukan sekadar panggung simbolik. Ia menjadi pengingat keras bagi kita semua: apakah kita sudah benar-benar memberi ruang anak-anak untuk tumbuh bahagia? Apakah kita sudah menghapus kekerasan dan memberi mereka lingkungan aman? Apakah kita sudah mendampingi mereka menemukan jati dirinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan masa depan bangsa. Sebab anak-anaklah yang akan melanjutkan, bahkan menyempurnakan, cita-cita besar Indonesia.

Membentuk anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Tidak perlu hal besar atau rumit, melainkan rutinitas sederhana yang dilakukan

dengan konsisten. Justru dari hal-hal kecil inilah karakter kuat terbentuk, dan dari karakter itulah lahir generasi yang cerdas, sehat, serta berakhlak mulia.

TUJUH KEBIASAAN

Ada tujuh kebiasaan penting yang patut ditanamkan sejak dini. Pertama, bangun pagi. Kebiasaan sederhana ini sering disepelekan, padahal bangun lebih awal membuat tubuh segar, pikiran jernih, dan waktu lebih produktif. Kedua, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Setelah bangun tidur, anak-anak diajak untuk berdoa dan beribadah, karena spiritualitas adalah fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Ketiga, berolahraga ringan. Tidak harus lama atau berat, cukup gerakan sederhana yang membuat badan lebih bugar dan siap belajar.

Keempat, makan makanan bergizi. Asupan sehat bukan hanya membuat tubuh kuat, tetapi juga menunjang kecerdasan. Apalagi ke depan ada harapan besar melalui program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah, sehingga anak-anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh dengan lebih baik. Kelima, gemar belajar. Ilmu pengetahuan adalah bekal yang tak ternilai. Seperti pepatah Melayu: dengan ilmu semua menjadi mudah, dengan seni semua menjadi indah, dan dengan akhlak semua menjadi mulia. Tiga hal ini—ilmu, seni, dan akhlak—adalah landasan yang saling melengkapi.

Kebiasaan keenam adalah bermasyarakat, yakni membiasakan diri untuk terlibat dalam kegiatan bermanfaat setelah pulang sekolah. Anak-anak sebaiknya tidak larut dalam dunia gawai yang isinya sering kali tidak berguna. Gadget boleh digunakan, tapi harus bijak: jangan terlalu lama, gunakan untuk hal positif, dan jangan sampai menjauhkan dari kehidupan nyata. Kebiasaan terakhir adalah tidur tepat waktu. Anak-anak tidak boleh menjadi “manusia kelelawar” yang terjaga semalaman dan molor di pagi hari. Ritme hidup yang sehat akan membuat tubuh dan pikiran lebih seimbang.

Selain tujuh kebiasaan tersebut, ada pula langkah kecil lain yang bisa membangun jiwa nasionalisme sekaligus rasa syukur: memulai

pagi dengan ceria. Senam bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta berdoa sebelum beraktivitas adalah cara sederhana untuk mengisi hari dengan semangat. Kegiatan ini tidak hanya memberi energi, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini.

Keseimbangan hidup anak-anak juga perlu dibangun dari empat aspek utama. Pertama, olahraga untuk melatih jasmani. Kedua, olah pikir untuk menajamkan kecerdasan. Ketiga, olah hati untuk menumbuhkan ketulusan dan empati. Keempat, olah rasa untuk mengasah kepekaan dan seni dalam hidup. Jika keempat hal ini dijalani bersamaan, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat lahir batin, cerdas dalam ilmu, kuat menghadapi tantangan, dan memiliki karakter yang mulia.

Menjadi anak Indonesia yang hebat bukanlah hasil instan. Ia lahir dari pembiasaan kecil, kesederhanaan, dan kedisiplinan yang ditanamkan sejak dini. Dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, aktif bermasyarakat, hingga tidur tepat waktu—semua ini membentuk pola hidup yang kelak menjadi karakter. Jika setiap anak Indonesia terbiasa dengan kebiasaan baik ini, maka masa depan bangsa akan lebih cerah, karena generasi yang lahir adalah generasi sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter.

50 Pendidikan Islam Terpadu dan Kebangkitan Kelas Menengah Muslim:

Pembukaan Munas VI JSIT Indonesia

Kamis, 24 Juli 2025

Munas VI JSIT Indonesia ini adalah sebuah momentum penting yang menunjukkan betapa pendidikan Islam telah bergerak maju melampaui batas-batas yang dulu tak terbayangkan. Dari awalnya yang sederhana, hanya berupa bimbingan belajar dan gerakan mahasiswa kampus, kini JSIT menjelma menjadi gerakan pendidikan berskala nasional dengan visi yang konsisten. Perjalanan ini tentu tidak mulus, penuh dinamika internal yang hangat, bahkan kadang bergejolak. Namun, justru di situlah nilai tambahnya: JSIT tetap berdiri dengan arah yang jelas, membuktikan bahwa kekuatan ide mampu menembus perbedaan dan menggerakkan langkah bersama.

Terobosan utama yang ditawarkan pendidikan Islam Terpadu adalah keberanian melawan arus mainstream. Mereka tidak sekadar menjalankan kurikulum resmi dari pemerintah, melainkan menggandakan komitmen dengan 100 persen kurikulum Kementerian Pendidikan ditambah 100 persen kurikulum Kementerian Agama. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dianggap kurang penting. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “kurikulum 200 persen.” Sebuah konsep yang lahir dari keyakinan bahwa ilmu agama dan ilmu umum bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu keping yang sama. Integrasi ini menghadirkan pendidikan

yang tidak timpang—anak-anak dibentuk menjadi manusia berilmu sekaligus berkarakter, cerdas secara intelektual sekaligus kokoh secara spiritual.

Kebutuhan Kelas Menengah Muslim

Fenomena ini sesungguhnya tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari sebuah kelas menengah Muslim yang bangkit sejak dekade 1990-an. Cendekiawan Kuntowijoyo pernah menulis tentang kebangkitan kelas menengah Muslim, dan istilah MUKIDI menjadi cerminan yang pas: Muda, Kaya, Intelekt, Dermawan, dan Idealis. Kelompok inilah yang kemudian menggerakkan lahirnya sekolah Islam Terpadu. Mereka adalah generasi di bawah 60 tahun yang masih penuh energi, sebagian menjelang 50 tahun, sebagian baru melewatinya. Dengan semangat, modal intelektual, dan idealisme, mereka memilih pendidikan sebagai lahan pengabdian. Bukan sekadar membangun sekolah, melainkan membangun peradaban melalui jalur pendidikan.

Kehadiran kelompok ini memberi wajah baru bagi Indonesia. Pendidikan Islam tidak lagi dipandang semata sebagai warisan tradisional yang konservatif, melainkan sebagai alternatif modern yang solutif. Di tengah tantangan globalisasi, sekolah Islam Terpadu justru tampil dengan keyakinan bahwa integrasi ilmu adalah jawaban terbaik. Mereka tidak menolak modernitas, tetapi menyaringnya dengan nilai Islam. Mereka tidak larut dalam arus sekularisasi, tetapi juga tidak terjebak pada pola pendidikan yang hanya sibuk dengan ritus agama tanpa wawasan dunia.

Inilah yang membuat pendidikan Islam Terpadu relevan dan kontekstual. Ia menjawab kegelisahan para orang tua Muslim kelas menengah yang ingin anak-anak mereka berakar pada agama, sekaligus tidak tertinggal dalam persaingan global. Ia juga menunjukkan bahwa umat Islam mampu menciptakan gagasan, bukan hanya menjadi konsumen dari produk modernitas yang datang dari luar. Lebih dari itu, ia membuktikan bahwa idealisme bisa diwujudkan dalam bentuk nyata—sekolah, guru, kurikulum, dan murid-murid yang tumbuh

dengan visi besar.

Jika kita melihat lebih jauh, kontribusi JSIT dan sekolah Islam Terpadu tidak hanya berhenti pada dunia pendidikan. Mereka juga sedang membentuk wajah Indonesia masa depan. Generasi yang lahir dari sistem ini berpotensi menjadi generasi unggul: kuat imannya, luas ilmunya, dan luwes dalam pergaulan global. Dengan karakter semacam ini, Indonesia dapat terus menjaga identitasnya sebagai bangsa yang ramah, sekaligus kompetitif di kancah dunia.

Pendidikan selalu menjadi kunci bagi kemajuan bangsa. Maka, gerakan pendidikan Islam Terpadu yang lahir dari semangat pembaruan ini patut diapresiasi. Di dalamnya ada kombinasi iman, ilmu, dan idealisme yang jarang ditemukan pada gerakan lain. Jika keberlanjutan dan kualitasnya terus dijaga, sekolah Islam Terpadu bukan hanya akan menjadi alternatif, melainkan arus utama dalam pendidikan nasional.

Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar berhitung, tetapi juga bijak dalam bersikap. Generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan. Generasi yang tidak hanya siap bekerja di dunia, tetapi juga sadar tujuan hidup di akhirat. Itulah generasi yang coba dibentuk oleh pendidikan Islam Terpadu—sebuah harapan baru bagi masa depan bangsa.

Majalah *Times* pernah memberi julukan pada Islam Indonesia sebagai *The Smiling Islam*. Sebuah istilah yang sederhana, tetapi sarat makna. Julukan itu menggambarkan wajah Islam di Nusantara yang ramah, penuh senyum, dan membawa kebahagiaan bagi lingkungannya. Islam Indonesia tampil bukan sebagai agama yang kaku dan menakutkan, melainkan sebagai energi sosial yang menyatukan, menguatkan, dan menginspirasi.

Fenomena ini salah satunya tampak pada kelas menengah muslim di Indonesia. Mereka adalah kelompok yang bukan hanya religius, tetapi juga memiliki posisi kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak di antara mereka yang berpenghasilan cukup tinggi,

bahkan di atas rata-rata nasional. Namun yang menarik, kemapanan itu tidak menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Justru semakin mapan, semakin dekat dengan spiritualitas, semakin rajin berderma, dan semakin ingin berbagi. Inilah ciri khas kelas menengah muslim Indonesia yang jarang ditemukan di belahan dunia lain: kekayaan berjalan seiring dengan kesalehan sosial.

Lebih jauh lagi, kelompok ini bukanlah masyarakat biasa tanpa modal intelektual. Banyak dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi ternama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka para sarjana, doktor, bahkan profesor yang membawa inovasi dan gagasan maju di berbagai bidang kehidupan, terutama pendidikan. Ilmu dan pengalaman internasional yang mereka bawa membuat pandangan mereka luas, terbuka, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang inklusif.

Namun, kekhasan kelas menengah muslim Indonesia tidak hanya berhenti pada soal kekayaan, kesalehan, atau pendidikan. Mereka juga memiliki idealisme yang tinggi. Ada mimpi kolektif tentang Indonesia masa depan: sebuah bangsa yang maju, bermartabat, dan tidak tercerabut dari akarnya. Dalam pandangan mereka, Islam bukanlah sesuatu yang berdiri terpisah dari keindonesiaan, tetapi justru menyatu dan saling memperkuat. Identitas keislaman dan identitas kebangsaan berjalan berdampingan, saling meneguhkan, bukan saling menegasikan.

Di tengah konteks inilah, JSIT memainkan peran penting. JSIT berani mengambil pangsa murid dari kalangan menengah, sebuah langkah yang menuntut biaya tidak sedikit. Bahkan ada ungkapan bercanda yang berkembang: *terpadu* bukan hanya berarti terintegrasi, tetapi juga “terpaksa pakai duit.” Namun, bagi keluarga muslim kelas menengah, pendidikan anak adalah investasi masa depan yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekadar biaya. Masa depan anak-anak mereka tidak diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, melainkan dari kualitas pendidikan yang akan mereka peroleh.

Karena itulah, JSIT jarang bersuara ketika muncul wacana pendidikan gratis untuk sekolah swasta. Bagi mereka, selama masyarakat rela berpartisipasi, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Lagi pula, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 secara tegas menyebutkan peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Partisipasi publik dalam membiayai dan menyelenggarakan pendidikan adalah bagian dari cita-cita kolektif untuk membangun kualitas bangsa.

Namun, di balik semua itu, ada tantangan besar yang harus terus dijawab. Pendidikan bukan hanya urusan kelompok tertentu, tetapi investasi nasional yang menentukan arah masa depan bangsa. Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi bangsa besar hanya dengan kekayaan alam atau infrastruktur megah. Kualitas sumber daya manusialah yang akan menjadi penentu. Dan kualitas itu tidak mungkin terwujud tanpa pendidikan yang bermutu, adil, dan merata.

Presiden berkali-kali menegaskan hal ini: masa depan Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan disegani dunia bertumpu pada kualitas pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Dan lembaga-lembaga seperti JSIT harus menjadi bagian dari gerakan kolektif itu.

Yang perlu dijaga adalah satu prinsip utama: pendidikan bermutu harus terbuka untuk semua anak bangsa. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena kemiskinan, status sosial, agama, suku, atau tempat tinggal. Pendidikan adalah hak dasar warga negara, bukan hadiah istimewa untuk segelintir orang.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci. Pemerintah harus memastikan regulasi dan fasilitas dasar berjalan baik. Masyarakat perlu terus berpartisipasi, baik melalui pendanaan, ide, maupun dukungan sosial. Sementara lembaga pendidikan seperti JSIT dituntut membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar wadah belajar, tetapi motor penggerak

peradaban.

Jika semua ini bisa dijalankan, maka wajah Islam Indonesia sebagai *The Smiling Islam* akan semakin nyata. Bukan hanya ramah di tataran sosial, tetapi juga melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang bermartabat. Pada akhirnya, pendidikanlah yang akan menjadi jembatan antara idealisme dan kenyataan, antara mimpi dan kenyataan sejarah bangsa.

Membangun Generasi Kuat

Masa depan umat dan bangsa tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kualitas generasi yang kita tinggalkan. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Pesan ini bukan sekadar larangan, melainkan perintah implisit untuk melahirkan generasi yang kuat—generasi yang mampu bertahan dan berkontribusi dalam peradaban. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga meliputi keimanan, ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemandirian ekonomi.

Kisah-kisah dalam Al-Qur'an memberi gambaran konkret tentang karakter generasi kuat. Musa, misalnya, disebut sebagai al-Qawiyu al-Amīn, sosok yang kuat sekaligus amanah. Talut diangkat menjadi pemimpin bukan karena keturunan, harta, atau status sosial, melainkan karena Allah menganugerahkan padanya keluasan ilmu dan kekuatan jasmani. Dari sinilah kita memahami bahwa seorang pemimpin, bahkan seorang individu, tidak cukup hanya memiliki salah satu modal, tetapi harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan, amanah, dan ketangguhan fisik.

Kecerdasan yang dimaksud pun bukan hanya kemampuan menghafal fakta, melainkan keluasan ilmu yang memberi pencerahan. Al-Qur'an menyebut kategori manusia berilmu dengan istilah ulul albab, ulul 'ilm, ulul abshar, dan ulun nuha. Mereka bukan sekadar pintar secara kognitif, tetapi memiliki kedalaman akal, kejernihan hati, dan kebijaksanaan dalam memandang kehidupan. Inilah standar kecerdasan yang mestinya kita wariskan kepada anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi insan yang matang secara intelektual

sekaligus berakhlak mulia.

Namun, sebesar apa pun kapasitas intelektual, generasi tidak akan kuat jika fisiknya rapuh. Karena itu, aspek kesehatan dan gizi menjadi krusial. Anak-anak yang cerdas sekalipun tidak akan mampu berkontribusi optimal jika tubuhnya sakit-sakitan. Dalam hal ini, program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan upaya memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Bahkan, Al-Qur'an pun menegaskan pentingnya memperhatikan makanan, sebagai bagian dari tanggung jawab manusia menjaga tubuh yang Allah titipkan.

Meski begitu, kekuatan generasi tidak berhenti pada ilmu dan jasmani. Mereka juga harus kuat dalam akidah, agar tidak mudah goyah oleh arus zaman; kuat dalam ekonomi, agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain; serta kuat dalam karakter, agar mampu menjaga amanah kehidupan. Semua ini membutuhkan sistem pendidikan yang tidak sekadar mentransfer pengetahuan faktual, tetapi mendorong pembelajaran mendalam—pendidikan yang melahirkan pencerahan, bukan sekadar kepandaian.

Ilmu dalam tradisi Islam adalah cahaya. Ia menerangi hati, menuntun akal, dan mengarahkan langkah manusia agar tidak tersesat. Karena itu, supremasi ilmu menjadi kunci kebangkitan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar aksesoris, melainkan sumber martabat, pengaruh, dan peradaban.

Di titik inilah, peran sekolah dan lembaga pendidikan Islam terpadu menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya dituntut mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter, membiasakan akhlak, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Dukungan mereka terhadap kebijakan negara, seperti program gizi maupun strategi pendidikan mendalam, akan menjadi resonansi yang memperkuat visi besar membangun generasi unggul.

Membangun generasi kuat jelas bukan tugas satu pihak. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi. Pendidikan yang berkualitas, gizi yang memadai, serta penanaman nilai agama dan moral adalah tiga pilar utama yang tidak boleh terpisahkan. Tanpa itu semua, kita berisiko meninggalkan keturunan yang rapuh, yang pada akhirnya hanya menjadi beban zaman. Sebaliknya, dengan kerja sama yang sungguh-sungguh, kita dapat memastikan lahirnya generasi yang bukan hanya cerdas, sehat, dan mandiri, tetapi juga berakhlak mulia serta siap memimpin peradaban.

Pendidikan karakter sesungguhnya adalah inti dari pembangunan manusia. Kita sering kali terjebak pada ukuran-ukuran akademik, tetapi lupa bahwa inti dari sebuah bangsa yang kuat terletak pada manusianya yang berkarakter. Melalui kebiasaan sederhana yang dibiasakan sejak dini, anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang utuh, sehat jasmani dan rohani, serta siap berkontribusi untuk lingkungannya. Kebiasaan bangun pagi, beribadah dengan tertib, menjaga tubuh lewat olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, membiasakan diri untuk gemar belajar, aktif bermasyarakat, hingga disiplin tidur lebih awal, tampak sederhana, namun sejatinya adalah pilar yang menopang lahirnya generasi unggul. Kebiasaan ini bukan hanya mengatur ritme hidup sehari-hari, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, dan keteguhan iman.

Dalam hal ini, sekolah-sekolah Islam terpadu memiliki peran besar. Mereka bukan hanya tempat belajar matematika, sains, atau bahasa, melainkan juga ruang yang menumbuhkan nilai, membiasakan akhlak, dan mempraktikkan ajaran agama dalam keseharian. Pendidikan semacam ini sangat penting di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, ketika globalisasi dan teknologi sering menggerus nilai-nilai lokal dan spiritual. Kehadiran JSIT menjadi jawaban nyata terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang menyatukan kualitas akademik dan keteguhan moral.

Harapan besar pun disandarkan pada lembaga-lembaga pendidikan ini. Indonesia sedang menatap masa depan, khususnya visi

besar Indonesia Emas 2045, di mana bangsa ini diharapkan berdiri sejajar dengan negara maju di dunia. Visi tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa generasi yang memiliki fondasi karakter yang kokoh. Pendidikan bukan sekadar mencetak lulusan yang pintar, tetapi juga manusia yang jujur, pekerja keras, berempati, dan siap berkorban demi bangsa. Dalam konteks itulah, peran JSIT dan lembaga pendidikan sejenis menjadi sangat vital.

Musyawarah nasional yang digelar pun memiliki makna lebih dari sekadar forum formalitas. Ia menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, merumuskan langkah, dan memperkuat sinergi. Keputusan-keputusan yang lahir darinya diharapkan tidak hanya memberi dampak pada internal organisasi, tetapi juga menjadi kontribusi penting bagi perbaikan ekosistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah proyek bersama, yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh siswa atau sekolah tertentu, melainkan oleh seluruh bangsa.

Oleh karena itu, setiap langkah kecil dalam memperkuat pendidikan karakter sejatinya adalah investasi besar bagi masa depan. Kita sedang menanam benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kokoh: generasi Indonesia yang hebat. Dengan kebiasaan yang baik, pendidikan yang berkualitas, serta sinergi semua pihak, cita-cita Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat bukanlah sesuatu yang utopis, melainkan sebuah jalan yang bisa kita tempuh bersama.

51 **Dari *Complain Culture* Menuju *Compliance Culture*:**

Pembinaan Pegawai UPT Kemendikdasmen Provinsi Sulawesi Selatan

Jum'at, 25 Juli 2025

Pembinaan pegawai UPT di Sulawesi Selatan kali ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali betapa besar tanggung jawab yang dipikul insan pendidikan. Fakta bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meraih apresiasi tinggi dari berbagai lembaga independen seharusnya menjadi kebanggaan, tetapi juga sekaligus tantangan. Kepercayaan publik bukanlah hadiah, melainkan amanah. Ia bisa hilang kapan saja bila tidak dijaga dengan kerja nyata. Masyarakat melihat, menilai, bahkan menimbang kinerja kementerian bukan hanya dari program besar, tetapi juga dari hal-hal kecil yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Misalnya, tunjangan guru yang kini ditransfer setiap bulan langsung ke rekening tanpa menunggu tiga bulan sekali. Perubahan teknis semacam ini kadang dianggap biasa, padahal dampaknya sangat dirasakan.

Namun, di tengah capaian itu, realitas sosial kini menunjukkan wajah lain: masyarakat telah memasuki era “*complain culture*.” Apresiasi jarang terdengar, tetapi keluhan segera muncul bahkan untuk keterlambatan kecil. Kita hidup dalam sebuah “*complain society*” di mana kesalahan sekecil apapun bisa dibesar-besarkan, dan kebaikan sering kali luput dari ucapan terima kasih. Kondisi ini bisa melelahkan bagi para aparatur yang bekerja di balik layar, namun tidak ada jalan lain selain menyiapkan mental besar untuk terus melayani.

Justru di sinilah pentingnya menghadirkan budaya tandingan yang konstruktif, yakni “*compliance culture*.” Jika complain adalah ekspresi keresahan masyarakat, maka compliance adalah jawaban sistematis dari aparatur: bekerja dengan benar, disiplin, taat aturan, tidak memberi celah pada kelalaian. *Compliance* bukan sekadar soal mematuhi regulasi, melainkan juga tentang membangun kepercayaan diri bahwa pelayanan publik dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dengan begitu, kritik yang datang tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat untuk tetap berada di jalur yang benar.

Budaya ramah dan pribadi santun harus menjadi wajah nyata dari insan pendidikan. Di tengah tekanan publik yang keras, sikap humanis adalah jangkar moral. Pendidikan sejatinya tidak hanya mengurus kurikulum, standar mutu, atau penyaluran anggaran, melainkan juga membangun peradaban melalui teladan. Aparatur yang ramah dan santun menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah tembok dingin, tetapi pintu masuk yang memudahkan rakyat. Inilah cara sederhana namun bermakna untuk meredam ketegangan antara ekspektasi tinggi masyarakat dan keterbatasan yang dimiliki negara.

Kita pun perlu menyadari, di era keterbukaan informasi, kesalahan birokrasi sekecil apapun bisa viral dalam hitungan menit. Karena itu, prinsipnya bukan hanya bekerja dengan baik, tetapi juga bekerja benar sejak awal. Tidak cukup sekadar menghindari kesalahan, melainkan menyiapkan sistem kerja yang mencegah kesalahan itu lahir. Visi yang jelas, komitmen kolektif, dan keberanian untuk selalu memilih jalan yang lurus adalah fondasi agar kementerian tetap dipercaya.

Ke depan, pendidikan bermutu tidak bisa hanya diukur dari hasil ujian nasional atau capaian kurikulum. Ia juga tercermin dari kualitas layanan publik, dari cara pegawai melayani guru, orang tua, hingga siswa. Ketika kepercayaan masyarakat tumbuh, semangat berinovasi akan lahir dengan sendirinya. Sebaliknya, jika birokrasi justru abai, maka kritik akan menjadi semakin keras. Maka tidak ada pilihan lain

selain menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, santun, dan konsisten berlandaskan aturan.

Pembinaan seperti ini seharusnya tidak berhenti di ruang pertemuan, melainkan menjelma menjadi gerakan nyata di lapangan. Sebab pendidikan bukan hanya urusan teknis, melainkan misi peradaban. Dan misi itu hanya bisa dicapai jika aparatur pendidikan menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan kerendahan hati dalam melayani. Di tengah budaya *komplains*, mari kita justru menjawab dengan budaya *compliance* — bekerja dengan benar, berperilaku santun, dan menebar ramah dalam setiap layanan. Itulah cara terbaik menjaga kepercayaan, memajukan pendidikan, sekaligus mewariskan teladan bagi generasi mendatang.

Dalam membicarakan arah pendidikan, sering kali kita terjebak pada satu alasan klasik: keterbatasan anggaran. Memang benar, anggaran pendidikan tidak selalu sebesar harapan, tetapi menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak produktif adalah bentuk kemunduran. Justru di tengah keterbatasan itulah kreativitas diuji. Yang dibutuhkan bukan sekadar mengeluh, melainkan mencari terobosan dengan dua kunci utama: kolaborasi dan inovasi. Tanpa keduanya, kerja kita hanya akan jatuh pada rutinitas *business as usual*—sekadar melaksanakan tugas formalitas, tanpa prestasi, tanpa gebrakan baru.

Karena itu, cara pandang kita harus berubah. Pendidikan tidak bisa digerakkan oleh pola pikir lama yang menekankan prosedur semata. Harus ada keberanian untuk keluar dari zona nyaman, bekerja *out of the box* dengan tetap memegang teguh aturan. Di sinilah komunikasi menjadi hal yang sangat penting: komunikasi dengan masyarakat, dengan para penyelenggara pendidikan, dengan pemerintah daerah, hingga lintas kementerian. Semua pihak harus dilibatkan, karena pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan guru, tetapi juga urusan tenaga kerja, lingkungan hidup, bahkan keamanan.

Praktiknya, sinergi sudah mulai digalakkan. Kerja sama lintas kementerian—dari Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI,

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kepolisian—menjadi langkah nyata untuk memperkuat jaringan kerja. Presiden pun berulang kali menegaskan, kita tidak lagi hidup di era superman, di mana satu orang dianggap bisa menyelesaikan segalanya. Yang dibutuhkan adalah super team, sebuah tim yang saling menopang, mengisi kekurangan, dan bergerak bersama menuju tujuan yang sama.

Namun, membangun super team bukan hanya soal pembagian tugas. Lebih dalam dari itu, dibutuhkan nilai-nilai kolegialitas dalam bekerja. Relasi antarindividu seharusnya tidak dibatasi sekat hirarki dan jabatan. Kita memang berbeda peran dan posisi, tetapi semua tetap setara dalam tanggung jawab profesional. Prinsip kolegial mengajarkan kita untuk terbuka—open mind untuk terus belajar, *open heart* untuk lapang dada menerima masukan, serta open attitude untuk menghargai keberagaman. Dari sanalah tumbuh budaya kerja yang sehat: dinamis, fleksibel, tetapi tetap profesional.

Bayangkan jika kantor dan unit kerja di lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai ruang administrasi, melainkan rumah bersama. Rumah tempat orang bisa saling belajar, saling menguatkan, dan saling peduli. Di sanalah hadir nilai ngemong: sikap santun, ikhlas, dan penuh kepedulian. Dalam prinsip ngemong, setiap relasi dibangun dengan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Nilai *gotong royong* yang menjadi jati diri bangsa dikuatkan kembali, bukan sekadar jargon, tetapi menjadi semangat kerja sehari-hari.

Dengan cara inilah pendidikan bisa maju. Anggaran mungkin terbatas, tetapi kreativitas tidak boleh terbatas. Jabatan mungkin berbeda, tetapi semangat kolegial harus menyatukan. Tantangan mungkin besar, tetapi jika dihadapi bersama, semua bisa ditunaikan dengan baik. Pada akhirnya, kekuatan pendidikan bukan terletak pada satu individu atau satu lembaga saja, melainkan pada kolaborasi dan inovasi yang terus hidup di setiap lini.

Perubahan dalam dunia pendidikan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen resmi yang panjang dan kaku. Aturan

baru boleh saja diterbitkan, bahkan dalam setahun terakhir sudah lebih dari sepuluh peraturan menteri lahir untuk memperbaiki pelayanan pendidikan maupun sistem tata kelola. Namun, kebijakan sehebat apa pun akan sia-sia bila tidak diikuti dengan keberanian, kreativitas, dan inisiatif untuk menerapkannya sesuai situasi di daerah masing-masing. Pendidikan tidak bisa diperlakukan sebagai sistem yang seragam dari pusat hingga pelosok; ia menuntut adaptasi, keluwesan, dan kepekaan terhadap konteks lokal.

PRINSIP SIMI

Dalam kerangka inilah prinsip **SIMI** menjadi sangat relevan. SIMI adalah akronim yang sederhana tetapi sarat makna. Poin pertamanya, *sosialisasi*, sering kali dianggap sepele padahal sebenarnya penentu berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Masalah terbesar yang kerap muncul bukan pada substansi aturan, melainkan pada cara aturan itu disampaikan. Banyak orang tidak sempat atau enggan membaca dokumen setebal puluhan halaman. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan budaya serba cepat, budaya *scroll*. Mereka membaca sekilas, melihat judul, lalu memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak.

Jika kenyataan masyarakat memang seperti itu, maka menyampaikan kebijakan pendidikan pun harus menyesuaikan. Tidak cukup hanya mengunggah dokumen di laman kementerian lalu berharap semua pihak akan rajin mengaksesnya. Tidak semua penyelenggara pendidikan punya jaringan internet yang memadai, dan tidak semua guru atau kepala sekolah punya waktu untuk menekuni pasal demi pasal. Sosialisasi harus lebih kreatif, mudah diakses, dan disajikan dengan cara yang menyenangkan.

Bayangkan jika peraturan menteri yang rumit diurai menjadi poin-poin sederhana, kemudian dikemas dalam bentuk narasi singkat yang enak dibaca. Bayangkan pula jika narasi itu tidak berhenti sebagai teks, tetapi diolah menjadi infografis, video pendek, atau konten yang cocok dengan era digital seperti tiktok dan instagram. Kebijakan pendidikan tidak lagi tampil kaku, melainkan hadir dengan wajah

yang ramah dan mudah dipahami. Dengan begitu, informasi yang ingin disampaikan tidak hanya sampai ke sasaran, tetapi juga melekat dalam ingatan dan menggerakkan tindakan nyata.

Di sinilah pentingnya peran semua pihak. Kepala balai, guru, hingga pejabat daerah tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga agen penyebar gagasan. Mereka bisa menggunakan kreativitasnya untuk menyampaikan kebijakan terbaru dengan cara-cara segar. Tidak ada salahnya seorang kepala balai membuat video pendek yang menjelaskan inti peraturan terbaru. Justru langkah semacam itu bisa membuat kebijakan kementerian terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Reformasi pendidikan yang sesungguhnya hanya bisa terjadi bila kebijakan di pusat benar-benar dipahami dan dilaksanakan di lapangan. Itulah mengapa keberanian untuk mencoba cara baru, inisiatif untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, dan kreativitas dalam menyampaikan pesan menjadi sangat penting. Pendidikan bukan semata soal dokumen resmi atau rapat-rapat formal, melainkan tentang bagaimana gagasan bisa hidup, dipraktikkan, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan pendekatan semacam ini, kebijakan pendidikan tidak lagi berhenti di meja birokrat atau halaman web yang jarang dikunjungi. Ia akan menemukan jalannya ke ruang kelas, ke tangan guru, bahkan sampai ke hati murid. Dan di situlah, perubahan sejati dalam pendidikan mulai terasa.

Informasi adalah napas dari setiap kebijakan. Tanpa informasi yang tersampaikan dengan baik, aturan yang sejatinya membuka peluang justru bisa terlewat begitu saja. Contohnya, kini sudah ada kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan para pegawai yang dulu menempuh pendidikan tanpa izin atasan untuk mendaftarkan ijazahnya agar diakui secara resmi. Dengan pengakuan tersebut, mereka bisa mendapatkan penyesuaian pangkat dan jabatan. Ini adalah peluang besar bagi banyak pegawai yang sebelumnya terhambat, tetapi sayangnya masih sedikit yang mengetahuinya. Padahal aturan itu sudah berlaku. Situasi

seperti ini memperlihatkan betapa lemahnya rantai komunikasi kita. Informasi tidak boleh berhenti di meja birokrasi, ia harus sampai kepada masyarakat yang berkepentingan.

Karena itu, penyampaian informasi tidak bisa pasif. Menunggu orang mencari tahu bukanlah strategi yang bijak. Pemerintah, lembaga pendidikan, maupun unit teknis di lapangan harus proaktif. Apalagi dalam waktu dekat, akan hadir berbagai kebijakan baru yang langsung menyentuh kehidupan para guru. Salah satunya adalah aturan yang memberi ruang bagi guru ASN untuk mengajar di sekolah swasta, sebuah kebijakan yang bisa membuka jalan kolaborasi lebih luas dalam dunia pendidikan. Jika informasi ini tidak disampaikan dengan jelas, bukan tidak mungkin akan timbul salah tafsir, bahkan resistensi yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Selain informasi, ada hal lain yang tidak boleh diabaikan: mitigasi. Setiap kebijakan, betapapun baiknya, selalu punya potensi menimbulkan masalah di lapangan jika tidak diantisipasi sejak dini. Mitigasi berarti menyusun langkah-langkah sebelum badai datang. Misalnya, dalam pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi, pengalaman masa lalu menjadi bekal berharga untuk merancang skenario agar persoalan serupa tidak terulang. Dan hasilnya nyata: di daerah-daerah yang sebelumnya rentan konflik, pelaksanaan tahun ini bisa berlangsung lebih tenang dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dipikirkan secara matang, disertai mitigasi yang tepat, mampu menghindarkan kegaduhan.

Ke depan, tantangan mitigasi akan semakin kompleks. Tahun ini, Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai diperkenalkan. Tes ini tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan. Namun, justru karena tidak wajib, muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat: untuk apa tes ini? Apa konsekuensinya jika tidak ikut? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan lugas sejak awal. Tanpa komunikasi yang jelas, publik bisa terjebak dalam prasangka.

Di era digital, tantangan semakin berat. Kebijakan baru, seperti Peraturan Menteri tentang pembelajaran mendalam, kerap dipelintir di media sosial. Disinformasi bertebaran, kadang dibuat dengan sengaja oleh konten kreator yang haus sensasi. Ada yang memasang foto tokoh pendidikan, tetapi narasi dan suaranya bukan berasal dari tokoh tersebut. Tujuannya jelas: menarik klik, mengejar viewer, menambah subscriber, yang semuanya berujung pada pendapatan. Disinformasi semacam ini berbahaya, bukan hanya karena menyesatkan publik, tetapi juga karena dapat merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.

Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap. Ia adalah jantung dari kebijakan itu sendiri. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan bisa diakses siapa saja. Mitigasi harus dilakukan dengan cermat, melibatkan semua pihak, dari pusat hingga unit teknis di lapangan. Dan yang tak kalah penting, pemerintah harus berani melawan disinformasi dengan cara yang cerdas—menyediakan kanal resmi, cepat, dan kredibel, sehingga masyarakat tidak mudah terseret oleh narasi palsu.

Sebab pada akhirnya, kebijakan pendidikan bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal bagaimana aturan itu dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Tanpa informasi yang jelas, kebijakan bisa kehilangan arah. Tanpa mitigasi yang matang, kebijakan bisa menimbulkan masalah baru. Dan tanpa komunikasi publik yang kuat, kebijakan yang baik pun bisa tenggelam di tengah riuh rendah informasi yang menyesatkan.

Di tengah derasnyanya arus informasi, kita dihadapkan pada fenomena berbahaya: kabar keliru yang dibiarkan tanpa diluruskan. Ketika kesalahan dianggap sebagai kebenaran hanya karena tidak ada yang menegaskan sebaliknya, maka di situlah algoritma media sosial memainkan peran yang menyesatkan. Algoritma bekerja seperti cermin bias; ia memperkuat apa yang sering dibicarakan tanpa peduli benar atau tidak. Kondisi ini membuat publik rentan digiring ke

opini tertentu, bahkan demi kepentingan segelintir pihak. Karena itu, meluruskan informasi bukan hanya tugas moral, tetapi sebuah kewajiban sosial. Diam sama dengan ikut menguatkan kebohongan.

Dalam konteks ini, keaktifan dan sikap proaktif menjadi sangat penting. Bukan sekadar menjaga etika dengan bersikap ramah dan santun, tetapi juga menegakkan kebenaran dengan tegas. Budaya santun tanpa keberanian meluruskan hanya akan melahirkan ruang kompromi terhadap kebohongan. Tantangan zaman digital menuntut keseimbangan antara kelembutan sikap dan ketegasan prinsip.

MENJAGA INTEGRITAS

Pesan lain yang mengemuka adalah soal integritas. Korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang jelas tidak memiliki tempat di negeri ini. Peringatan keras bahwa praktik itu tidak boleh lagi terjadi adalah bentuk penegasan komitmen yang nyata. Jarak dari pusat kekuasaan tidak bisa dijadikan alasan untuk bekerja semaunya. Pengawasan tidak mengenal batas geografis; laporan bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dan akan langsung ditindaklanjuti. Bahkan nomor pribadi seorang pejabat bisa diakses luas oleh publik sebagai jalur pelaporan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi fondasi dalam membangun tata kelola yang bersih.

Integritas pejabat publik diuji setiap hari. Bukan sekadar dengan prestasi kinerja, tetapi terutama dalam menjaga kejujuran. Kisah tentang langkah pertama seorang pemimpin yang bukan mengangkat, melainkan memberhentikan pegawai karena masalah integritas, memberi pesan moral yang kuat: jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Surat keputusan pengangkatan tidak memiliki masa berlaku yang pasti, sehingga setiap orang harus menyadari bahwa posisinya bisa dicabut kapan saja bila kepercayaan publik dikhianati. Dengan kata lain, jaminan keberlanjutan jabatan bukan pada lembar SK, melainkan pada kejujuran dan konsistensi dalam bekerja.

Fenomena lain yang menarik adalah arus laporan masyarakat yang beragam, bahkan sering kali tidak terkait langsung dengan

kewenangan. Ada laporan tentang sekolah yang dilempari batu oleh masyarakat, yang setelah dicek ternyata terkait dengan lembaga di luar kendali kementerian. Meskipun demikian, laporan itu tetap ditanggapi. Mengapa? Karena masyarakat sudah menaruh harapan besar. Mereka melihat pejabat publik sebagai sosok yang bersedia mendengar dan bertindak. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang amat berharga, meskipun terkadang menimbulkan ekspektasi di luar kewenangan.

Terdapat dua hal yang tidak boleh dipisahkan: keberanian menjaga integritas dan kesiapan merawat kepercayaan. Di era keterbukaan informasi, publik tidak lagi menjadi penonton pasif. Mereka bisa melapor, mengawasi, bahkan menguji integritas pejabat kapan saja. Inilah wajah baru relasi masyarakat dan negara: terbuka, transparan, dan saling menuntut kejujuran. Jika prinsip ini dijaga, maka praktik kotor seperti korupsi, manipulasi opini, atau penyalahgunaan jabatan tidak akan punya ruang untuk tumbuh.

Belakang ini, viralnya kasus seorang anak yang memilih berhenti sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya study tour Rp350.000 seharusnya menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan kita. Pendidikan tidak boleh menjadi eksklusif hanya karena alasan ekonomi. Begitu pula dengan kisah 32 anak SMP yang mogok sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya. Masalah-masalah seperti ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan akses pendidikan di negeri ini, namun juga menggambarkan bagaimana penyelesaian cepat dan tepat bisa dilakukan bila ada kepedulian nyata dari pihak berwenang.

Namun, perhatian tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian masalah akses. Mereka yang berprestasi juga patut diberi ruang dan apresiasi, agar tumbuh ekosistem pendidikan yang adil: yang lemah ditolong, yang berprestasi diapresiasi. Semangat seperti ini sejalan dengan gagasan bahwa bekerja bukan semata mencari nafkah, melainkan bagian dari ibadah dan upaya membangun warisan berharga. Legacy sejati bukanlah harta melimpah yang bisa habis dan

dilupakan, tetapi nama baik, integritas, dan prestasi yang membuat anak-anak kita kelak berdiri tegak dengan penuh kebanggaan.

Integritas menjadi titik tekan yang tidak bisa ditawar. Apa artinya harta menumpuk jika akhirnya hanya mempermalukan keluarga sendiri karena terseret masalah hukum? Lebih baik meninggalkan teladan hidup yang bersih, berani, dan bermartabat daripada sekadar meninggalkan materi yang rapuh. Dengan integritas, kita bisa menatap pensiun atau akhir masa jabatan dengan gagah, meninggalkan kantor dengan persaudaraan yang tetap terjaga, dan menyadari bahwa hubungan kekeluargaan jauh lebih abadi dibanding kedudukan.

Di sisi lain, kehidupan sehari-hari para pekerja juga tidak luput dari persoalan finansial. Ada yang bergaji terbatas sehingga hanya bertahan hingga awal bulan, ada pula yang berpenghasilan cukup besar tetapi habis karena gaya hidup konsumtif: cicilan yang menumpuk, keinginan membeli barang baru, hingga terjebak arus belanja impulsif dari media sosial. Ini menjadi pengingat penting bahwa kecerdasan finansial harus sejalan dengan integritas kerja. Gaji berapa pun tidak akan cukup bila perilaku boros tidak dikendalikan.

Semua kisah ini, dari anak yang berhenti sekolah karena study tour, hingga para pegawai yang gajinya “enam koma” alias habis setelah tanggal enam, menyiratkan pesan yang sama: mari bekerja dengan hati, dengan kejujuran, dan dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita adalah warisan. Bukan hanya untuk bangsa, tetapi juga untuk anak-anak dan keluarga yang melihat kita sebagai teladan.

52 Integrasi Alquran dan Sains Teknologi:

Seminar Nasional Dan Musyawarah Wilayah III Tarjih
Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Sabtu, 2 Agustus 2025

Seminar Tarjih Muhammadiyah Wilayah III di Sulawesi Selatan kali ini menghadirkan tema kekinian: kecerdasan buatan (AI) dan masa depan pendidikan. Bagi sebagian orang, mungkin terasa agak jauh kaitannya dengan Tarjih yang selama ini identik dengan kajian hukum Islam. Namun justru di sinilah menariknya—membicarakan AI dalam ruang-ruang keagamaan membuka peluang refleksi yang lebih luas, bukan sekadar teknis, melainkan juga etis dan filosofis.

ERA DIGITAL & KECERDASAN ARTIFISIAL

Kita hidup di tengah era digital, sebuah masa di mana batas antara realitas dan imitasi semakin kabur. Teknologi 3D, animasi, dan berbagai produk digital kini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan berinteraksi manusia. Publik ramai memperbincangkan artificial intelligence, yang sejatinya lahir dari kombinasi algoritma matematika, logika, serta kemajuan teknologi komputer.

Perjalanan panjang AI sesungguhnya berakar dari pemahaman manusia atas dirinya sendiri. Komputer, pada dasarnya, hanya memiliki tiga fungsi dasar: menangkap informasi, menyimpannya, lalu menggunakannya. Pola kerja sederhana ini kemudian dihubungkan dengan cara kerja otak manusia melalui ilmu neuroscience. Sejak tahun

1950-an, ketika komputer mulai digunakan secara masif, muncul dorongan besar untuk memahami otak agar dapat direkayasa menjadi mesin pembelajaran. Amerika bahkan sudah berinvestasi besar dalam penelitian otak sebagai bagian dari upaya mengembangkan pendidikan.

Maka, ketika kita berbicara tentang masa depan pendidikan di Indonesia, tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran AI. Ia bukan sekadar teknologi tambahan, melainkan bagian dari transformasi peradaban. Pertanyaannya kemudian: bagaimana kita menempatkan AI dalam kerangka pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan akhlak dan budi pekerti?

Inilah tantangan yang harus dijawab. Era digital memang menawarkan efisiensi dan kecanggihan, tetapi juga menyimpan risiko dehumanisasi bila pendidikan hanya dipandang sebagai transfer informasi. Tarjih dan Muhammadiyah memiliki posisi strategis untuk mengingatkan bahwa pendidikan harus tetap berakar pada nilai, meskipun dikelilingi oleh algoritma dan jaringan neural.

Kalau menengok perjalanan gagasan pendidikan, kita bisa melihat betapa cepatnya perubahan pendekatan dalam cara manusia belajar. Pada awal tahun 2000-an, kita sempat mengenal istilah *quantum learning* dan *quantum teaching*. Keduanya menawarkan sudut pandang baru: belajar bukanlah kegiatan mekanis yang hanya mengandalkan hafalan, melainkan sebuah proses yang bisa dirancang sedemikian rupa dengan mengikuti cara kerja otak manusia. Dari sini, pendidikan mulai bergerak dari sekadar transfer informasi menuju rekayasa pengalaman belajar yang lebih efektif.

Tidak lama berselang, dunia pendidikan kembali diperkaya dengan konsep *mind map* yang dipopulerkan Tony Buzan. Lewat gagasan ini, kita belajar untuk meninggalkan pola mencatat linear yang kaku, baris demi baris, dari kiri ke kanan. *Mind map* justru mengajarkan bahwa pengetahuan seharusnya ditata seperti peta, dengan cabang-cabang yang saling terhubung. Ide-ide tidak lagi ditulis secara berurutan, melainkan dipetakan sesuai dengan keterkaitannya.

Cara ini ternyata jauh lebih sesuai dengan bagaimana otak bekerja dalam mengolah informasi.

Dalam ranah psikologi kognitif, konsep *mind map* berkelindan dengan istilah *skimata*. Skimata adalah cara otak menyusun pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk jaringan. Informasi baru tidak berdiri sendiri, melainkan ditautkan pada pengetahuan yang sudah ada. Proses ini pula yang membedakan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Informasi yang sekilas ditangkap pancaindra mungkin mudah diingat, tetapi cepat hilang. Hari ini kita hafal, besok bisa tinggal 20 persen saja yang tersisa. Sebaliknya, informasi yang terus diulang dan dipadukan dengan pengetahuan sebelumnya akan masuk ke memori jangka panjang.

Menariknya, kemampuan otak manusia dalam menyimpan informasi ternyata punya keterbatasan. Ada teori yang menyebutkan bahwa daya ingat kita berkisar pada “*the magical number seven*,” yaitu sekitar lima hingga sembilan informasi sekaligus. Di luar itu, otak cenderung kewalahan. Maka, jika kita ingin orang mudah mengingat pesan, cukup rangkum dalam tujuh poin atau kurang. Prinsip ini sederhana, tetapi sangat relevan dalam pendidikan, komunikasi publik, hingga strategi pembelajaran di kelas.

Lebih jauh, proses belajar bukan sekadar mengoleksi fakta. Otak bekerja dengan cara membangun jejaring pengetahuan. Setiap fakta yang kita dapatkan menjadi simpul kecil—atau *node*—yang terhubung dengan simpul lain. Dari jejaring itulah lahir konsep, dan dari konsep lahir pemahaman yang lebih utuh. Pengetahuan pun terbagi menjadi dua: deklaratif, yaitu pengetahuan tentang “apa”; dan prosedural, yaitu pengetahuan tentang “bagaimana.” Keduanya saling melengkapi. Seseorang mungkin tahu fakta sejarah, tetapi baru memahami maknanya ketika bisa mengaitkannya dengan konteks sosial, politik, atau budaya pada zamannya.

Inilah yang menjelaskan mengapa pengulangan sangat penting dalam belajar. Informasi yang sering muncul akan lebih mudah tertanam dalam memori. Prinsip ini, menariknya, serupa dengan

algoritma yang bekerja di gawai kita. Jika kita sering mengetik kata tertentu, sistem akan otomatis memprediksi kata berikutnya. Demikian pula otak: ia belajar dari pola, memperkuat yang sering diulang, dan akhirnya membentuk kebiasaan berpikir tertentu.

Lalu, apa makna semua ini bagi dunia pendidikan kita? Pertama, pendidikan seharusnya tidak lagi menjejalkan sebanyak mungkin informasi kepada siswa. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu dikaitkan, dipetakan, dan diulang dengan cara yang kreatif agar masuk ke memori jangka panjang. Kedua, guru perlu berperan sebagai perancang pengalaman belajar, bukan hanya penyampai materi. Seorang pendidik yang memahami cara kerja otak akan lebih bijak dalam menyusun strategi pembelajaran—mulai dari jumlah informasi yang diberikan, cara menyajikannya, hingga bagaimana melibatkan siswa dalam mengolah pengetahuan itu sendiri.

Di tengah derasny arus informasi hari ini, relevansi gagasan-gagasan tersebut semakin terasa. Kita hidup di era di mana setiap orang bisa mengakses data tanpa batas. Namun, kemampuan mengingat dan memahami tetap dibatasi oleh cara otak bekerja. Di sinilah keterampilan membuat *mind map*, menghubungkan pengetahuan, dan menyaring informasi menjadi amat penting. Tanpa itu, kita hanya akan kebanjiran data tanpa makna.

Belajar, pada akhirnya, bukanlah soal seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa kuat pengetahuan itu terhubung dalam jejaring pemahaman kita. Prinsip “*the magical number seven*,” teori skemata, hingga algoritma otak mengingatkan kita bahwa pendidikan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari hakikat manusia itu sendiri: makhluk yang berpikir, mengingat, dan selalu berusaha memberi makna pada apa yang dipelajarinya.

Jika kita menyadari cara kerja otak manusia, ada rumus sederhana yang bisa dijadikan kunci: kita mencari informasi (*pre-search*), mengolahnya (*process*), lalu melahirkan sesuatu dari hasil olahan itu (*product*). Tiga langkah ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya

ia merupakan mekanisme mendasar dari seluruh kerja intelektual manusia. Rumus inilah yang kini menjadi pondasi berkembangnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), di mana mesin dilatih untuk mencari, menyimpan, dan memproses data, kemudian menghasilkan produk berupa jawaban, analisis, atau keputusan. Menariknya, jika pola itu kita tarik ke dalam khazanah keislaman, terutama Al-Qur'an, kita akan menemukan kesesuaian yang mengejutkan.

Al-Qur'an tidak pernah hadir dengan format buku teks yang linier. Ia tidak disusun dalam urutan tema yang rapih: satu surat khusus tentang iman, satu surat tentang akhlak, satu surat tentang hukum, dan seterusnya. Tidak ada. Justru yang kita temukan adalah tema-tema yang tersebar, muncul berulang kali dalam bentuk yang beragam, dan terkadang disisipkan di tengah pembahasan lain. Pada pandangan pertama, susunan ini bisa terasa tidak sistematis. Namun jika dibaca lebih dalam, ada keteraturan yang jauh lebih kompleks: Al-Qur'an membangun jaringan makna yang saling berhubungan.

Fazlur Rahman dalam bukunya *Major Themes of the Qur'an*—yang dalam terjemahan Indonesia berjudul *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*—menjelaskan hal ini dengan sangat kuat. Menurutny, meski Al-Qur'an tidak memiliki urutan sistematis seperti karya ilmiah, ia tetap memiliki kesatuan struktur yang mengikat dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Hubungan itu bukanlah sekadar urutan teks, melainkan jejaring makna. Al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri, *self-explanatory*. Ayat yang satu memperjelas ayat lain, surat yang satu menyempurnakan penjelasan surat lainnya.

Di sinilah pendekatan tafsir tematik atau *tafsir maudhu'i* menemukan relevansinya. Dengan cara ini, pembaca menelusuri satu konsep kunci di berbagai bagian Al-Qur'an, lalu merangkainya menjadi satu pemahaman yang lebih utuh. Ulama kontemporer, termasuk Quraish Shihab, banyak mengembangkan pendekatan ini. Bahkan dalam tradisi tafsir Syiah, seperti *Tafsir Nafahatul Qur'an*, satu tema dapat dijelaskan berpuluh-puluh jilid, menunjukkan betapa luasnya kemungkinan pemaknaan jika kita serius mengaitkan ayat-

ayat yang tersebar.

Salah satu contoh paling jelas adalah konsep takwa. Kata takwa, dengan berbagai bentuk derivasinya, muncul lebih dari 250 kali dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu surat pun yang secara penuh hanya membicarakan takwa, namun jika ditelusuri, benang merahnya terjalin dengan kuat. Sejak awal, dalam Al-Baqarah ayat 2, Al-Qur'an menegaskan dirinya sebagai "petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Ayat-ayat berikutnya memberi penjelasan: mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian rezekinya.

Namun, tafsir takwa tidak berhenti di sana. Masih di Al-Baqarah, ayat 177 menyatakan bahwa kebaikan sejati bukan hanya soal arah kiblat atau ritual formal, tetapi tentang keimanan, kepedulian sosial, keadilan, kesabaran, dan komitmen pada janji. Takwa di sini terhubung dengan perilaku konkret dalam kehidupan sosial. Lalu dalam Ali Imran ayat 133-134, takwa kembali dijelaskan dalam konteks dorongan spiritual: bersegera mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi syarat menuju ke sana sangat nyata—mereka yang rela berbagi dalam kondisi lapang maupun sempit, mampu menahan amarah, dan pemaaf terhadap sesama.

Dari contoh ini saja kita melihat bagaimana satu konsep menyebar lintas ayat dan surat, saling melengkapi, dan membentuk gambaran yang utuh. Inilah yang membuat Al-Qur'an tidak pernah bisa dipahami secara parsial. Membaca satu ayat saja tidak cukup. Kita harus menelusuri keseluruhannya, mengaitkan satu simpul makna dengan simpul lainnya. Cara kerja ini sesungguhnya mirip dengan *mind map*, di mana gagasan-gagasan tidak berjalan lurus seperti daftar isi, melainkan membentuk jejaring yang saling bertaut.

Inilah yang membuat Al-Qur'an begitu khas: ia menuntut pembacanya untuk aktif berpikir, mencari hubungan, mengolah makna, dan menghasilkan pemahaman baru. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak hanya menjadi kitab petunjuk, tetapi juga melatih cara

berpikir manusia—melatih kecerdasannya. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah cetak biru kecerdasan. Polanya mengilhami cara kerja otak manusia, dan kini bahkan menjadi inspirasi dalam membangun kecerdasan buatan.

Pertanyaan pentingnya kemudian adalah: jika otak manusia dan Al-Qur'an sama-sama bekerja dengan pola *pre-search, process, dan product*, tidakkah kita seharusnya belajar dari Al-Qur'an bukan hanya untuk aspek moral-spiritual, tetapi juga untuk membangun peradaban ilmu pengetahuan? Jika artificial intelligence bisa lahir dari meniru cara berpikir manusia, maka sudah seharusnya manusia kembali meniru sumber inspirasinya yang lebih tinggi: Al-Qur'an.

Cara memahami Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara terpotong-potong. Ayat-ayatnya tersebar, tetapi saling terhubung membentuk satu jejaring makna yang utuh. Dalam istilah psikologi, ini mirip dengan *propositional network*, sebuah jaringan konsep yang saling menguatkan. Inilah rahasia mengapa Al-Qur'an tidak boleh dipahami secara atomistik—sebagaimana diingatkan Fazlur Rahman—yakni memahami satu ayat secara terisolasi tanpa mengaitkannya dengan ayat lain. Kesalahan memahami secara atomistik ini sering terlihat dalam praktik sebagian orang yang hanya mengutip satu ayat, mengulang-ulangnya, lalu menjadikannya sebagai kebenaran final. Padahal, teks suci itu menuntut kita untuk selalu melihat keterhubungan antar-bagian.

Bahkan potongan huruf di awal surah—seperti *Alif Lam Mim* atau *Yasin*—yang mungkin terlihat sederhana, sejatinya adalah bagian penting dari keseluruhan Al-Qur'an. Ia mengingatkan bahwa setiap elemen di dalam kitab ini tidak bisa dipisahkan, sekecil apapun tampaknya. Tidak mengherankan bila ayat-ayat Al-Qur'an diulang berkali-kali. Rahasiannya pun dijelaskan dalam Al-Qur'an itu sendiri: agar kebenaran tertanam kokoh di dalam hati dan dibaca dengan perlahan, penuh perenungan. Pola pengulangan ini bukan sekadar retorika, tetapi sebuah metode pembelajaran yang mengajarkan kedalaman (*deep learning*). Dengan demikian, Al-Qur'an menuntun

umat manusia untuk tidak berhenti pada hafalan dangkal, melainkan masuk ke pemahaman yang mendalam, berlapis, dan kontekstual.

Jika kita tarik ke zaman sekarang, pola tersebut ternyata sejalan dengan cara kerja teknologi modern, khususnya kecerdasan buatan (AI). AI dibangun dengan prinsip yang mirip: ia menyerap data sebanyak-banyaknya, menyimpannya dalam sistem, lalu memprosesnya untuk menghasilkan jawaban ketika dipanggil. Secara sederhana, AI hanyalah pengelola informasi. Ia tidak memiliki kesadaran, nilai, ataupun kebijaksanaan; ia hanya menampilkan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Karena itu, AI sebenarnya bukan ancaman, melainkan alat yang sepenuhnya bergantung pada siapa yang mengisinya.

TIGA PERSOALAN DALAM KECERDASAN ARTIFICIAL

Namun, ada tiga persoalan besar yang muncul. Pertama adalah masalah kebenaran. Informasi yang disajikan AI tidak selalu akurat, sebab sistemnya tidak memiliki mekanisme validasi seperti pengetahuan manusia. Ia bisa menyebut seseorang sebagai tokoh penting, tetapi di saat bersamaan bisa saja mencampuradukkannya dengan data orang lain yang tidak relevan. Sama halnya dengan Wikipedia: siapa saja bisa menulis, menambahkan, atau mengubah, tetapi kebenarannya tidak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Maka, hasil yang muncul dari AI sangat ditentukan oleh siapa yang paling banyak mengisi ruang datanya.

Persoalan kedua adalah persoalan otoritas. Ketika data begitu melimpah, siapa yang berhak menentukan kebenaran? Di era digital ini, muncul fenomena yang oleh Yuval Noah Harari disebut sebagai *Big Data Dictatorship*. Artinya, ada ancaman bahwa manusia akan hidup dalam “penjajahan baru” yang dikendalikan oleh segelintir pihak yang menguasai data besar. Mereka yang memegang kendali atas arus informasi pada akhirnya bisa mengarahkan cara kita berpikir, beropini, bahkan mengambil keputusan.

Persoalan ketiga adalah soal ketergantungan. Semakin kita menyerahkan pencarian informasi kepada mesin, semakin besar risiko kita kehilangan daya kritis. AI bisa menjadi cermin yang memantulkan kembali apa yang kita cari, tetapi tanpa kesadaran untuk menyaring, manusia akan dengan mudah terseret pada arus informasi yang menyesatkan.

Dari titik ini, kita bisa melihat satu benang merah: baik Al-Qur'an maupun teknologi modern sama-sama menuntut manusia untuk bersikap cerdas dalam memahami keterhubungan informasi. Al-Qur'an mengajarkan agar tidak memahami ayat secara terpisah, melainkan melihat jejaring makna yang membentuk kesatuan utuh. Demikian pula dengan data di era digital, ia hanya akan bermanfaat bila kita mampu memilah, menghubungkan, dan menyaringnya.

Maka, pelajaran penting yang bisa kita tarik adalah bahwa di balik derasnya arus informasi, baik yang datang dari teks suci maupun dari mesin cerdas, manusialah yang tetap memegang peran utama. Tanpa kebijaksanaan, kita mudah tersesat. Tetapi dengan pemahaman yang mendalam, kita justru bisa memanfaatkan semua itu untuk memperkuat pengetahuan dan memperkaya kehidupan.

Salah satu problem besar yang kita hadapi hari ini adalah ilusi kepakaran. Dunia digital membuat semua orang merasa bisa berbicara tentang apa saja, tanpa memandang latar belakang, otoritas, atau keilmuan yang dimiliki. Internet memberi ruang bagi siapa pun untuk mengunggah informasi, opini, bahkan fatwa. Akibatnya, batas antara pengetahuan yang sah dan sekadar opini pribadi menjadi kabur.

Analogi sederhana bisa menggambarkan situasi ini. Bayangkan seorang teknisi pembersih pesawat membaca manual tentang cara menerbangkan pesawat. Ia mengikuti panduan itu dan berhasil membuat pesawat lepas landas. Namun, karena tidak ada panduan untuk menurunkan pesawat, penerbangan itu justru berakhir celaka. Pengetahuan instan sering kali bekerja dengan cara yang sama—memberi ilusi seolah-olah kita paham, padahal hanya menguasai permukaan.

Fenomena ini semakin jelas dalam persoalan keagamaan. Kini, beragam fatwa agama tersedia hanya dalam hitungan detik di mesin pencari. Namun, siapa yang bisa menjamin kebenarannya? AI dan algoritma hanya menyajikan apa yang tersedia, tanpa tanggung jawab terhadap validitasnya. Ironisnya, banyak orang tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Mereka hanya mengklik jawaban yang sesuai dengan keinginannya, meskipun tidak akurat.

Di sisi lain, ada kekosongan yang justru memperparah keadaan. Informasi yang seharusnya diisi oleh orang-orang berotoritas sering kali tidak tersedia. Ulama, pakar, dan lembaga resmi sering kalah aktif dibandingkan mereka yang minim kapasitas, tetapi rajin bersuara. Akibatnya, ruang digital dipenuhi oleh fatwa-fatwa instan, yang justru rawan menyesatkan. Padahal, Nabi pernah mengingatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika orang bodoh dimintai fatwa, lalu ia menjawab, sehingga bukan hanya dirinya sesat, tetapi juga menyesatkan orang lain.

Di tengah situasi ini, kuncinya jelas: jangan hanya menjadi pengguna pasif. Kita harus aktif mengisi ruang digital dengan informasi yang akurat, shahih, dan bermanfaat. Jika para ulama, cendekiawan, dan lembaga resmi tidak mau mengunggah fatwa, kajian, atau pemikiran mereka, jangan heran bila masyarakat justru lebih banyak belajar dari sumber yang keliru. Teknologi seperti AI bekerja layaknya cermin—ia hanya memantulkan apa yang tersedia. Ketika diminta membuat pidato dalam bahasa Indonesia, ia mampu melakukannya dengan baik. Namun, ketika diminta membuat pidato dalam bahasa Jawa atau Bugis, ia gagal. Alasannya sederhana: tidak ada cukup bahan rujukan dalam bahasa tersebut yang diunggah di ruang digital.

Kondisi ini juga membawa tantangan serius di dunia pendidikan. Guru kini berhadapan dengan murid yang lebih cepat memanfaatkan teknologi. Satu perangkat ponsel bisa merekam seluruh isi ceramah guru, mengubahnya langsung menjadi teks transkrip, bahkan menyusunnya dalam bentuk ringkasan. Murid tidak lagi perlu

mencatat panjang lebar, cukup meletakkan gawai di meja, dan semua terekam otomatis. Jika guru tidak meningkatkan peranannya—tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga pengarah, pengkritik, dan pembimbing berpikir—maka perannya bisa tergeser oleh mesin.

Karena itu, penguasaan teknologi tidak bisa lagi dianggap pilihan, melainkan keharusan. Kita tidak boleh hanya memanfaatkannya untuk hiburan atau konsumsi pasif. Lebih penting dari itu, kita harus berperan sebagai produsen informasi, pengisi ruang digital dengan konten yang sehat, benar, dan mencerahkan. Jika tidak, umat akan tersesat oleh kebisingan informasi yang tidak bertanggung jawab. Teknologi adalah alat, yang bisa membawa kemajuan luar biasa, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju kesesatan massal. Yang membedakannya bukan pada mesinnya, melainkan pada kesadaran penggunaannya. Apakah kita memilih untuk menjadikannya sarana kebenaran, atau sekadar media pembenaran?

Teknologi semakin hari semakin berkembang dengan pesat, seolah ingin mengambil alih ruang-ruang kehidupan manusia. Namun, kita harus jernih dalam memandangnya. Seberapa canggih pun teknologi, termasuk kecerdasan buatan, pada akhirnya ia hanyalah alat. Manusia tetaplah subjek utama yang seharusnya memandu arah penggunaannya. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana kita “dipaksa” masuk ke dunia digital. Pertemuan, pembelajaran, bahkan takziah dilakukan secara virtual. Akan tetapi, pada momen tertentu batas teknologi terlihat jelas. Zoom mungkin bisa mempertemukan orang-orang dalam takziah virtual, tetapi ia tidak pernah bisa mengantarkan jenazah ke pemakaman. Di sinilah letak perbedaan hakiki: teknologi mampu menghadirkan simulasi, tetapi pengalaman nyata manusia tetap tak tergantikan.

Fenomena metaverse pun pernah dielu-elukan sebagai masa depan. Ada yang berangan-angan haji bisa dilakukan dengan alat virtual, melihat Ka’bah dari layar, lalu tawaf dalam dunia maya. Namun, gagasan ini justru mengaburkan makna ibadah. Haji bukan semata melihat bangunan suci atau bergerak memutar bentuk

Ka'bah, melainkan perjalanan spiritual yang menyatukan fisik, jiwa, dan niat dalam ruang nyata. Ketika teknologi dianggap mampu menggantikan esensi spiritualitas, yang muncul bukanlah kemajuan, melainkan kebingungan.

Karena itu, tantangan besar kita bukan sekadar bagaimana menguasai teknologi, melainkan bagaimana menjadikan manusia lebih cerdas daripada teknologi. AI dan perangkat digital akan terus berkembang, tetapi jika tidak dipandu dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan, manusia justru terperangkap menjadi budaknya. Bayangkan ketika arus informasi yang mengalir deras di internet tidak diarahkan dengan pengetahuan yang benar. Apa yang terjadi adalah kebingungan massal, tersesat dalam pusaran konten yang menyesatkan.

Ruang digital, mau tidak mau, akan selalu terisi. YouTube, Facebook, TikTok, dan berbagai platform lain akan terus dipenuhi konten. Pertanyaan pentingnya: siapa yang akan mengisinya? Jika ruang ini dibiarkan kosong, maka akan diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab, bahkan seringkali tanpa ilmu. Konten semacam itu hanya melahirkan generasi yang dholu wa adholu—tersesat dan menyesatkan orang lain. Sebaliknya, bila ruang digital aktif diisi oleh orang-orang berilmu, para ulama, para mubaligh, para akademisi, dan netizen yang peduli, maka media akan menjadi sarana dakwah, sarana pendidikan, dan sarana pencerahan.

Di titik ini, menjadi jelas bahwa literasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral. Umat memerlukan panduan dalam menghadapi derasnya arus informasi. Para pemimpin agama dan cendekiawan harus hadir di ruang maya, membumikan pengetahuan, dan meneguhkan ajaran agama agar tetap sesuai dengan sumber aslinya. Teknologi, termasuk AI, bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan, tetapi posisinya tidak boleh melebihi manusia.

Pada akhirnya, pesan terpenting adalah menjaga kesadaran bahwa manusia harus tetap di atas teknologi. Akal, ilmu, dan kebijaksanaan

harus menjadi kompas yang mengarahkan penggunaannya. AI dan media sosial hanyalah sarana, bukan pengganti esensi kehidupan maupun spiritualitas. Bila kesadaran ini kita pegang teguh, umat akan terbimbing dengan benar, tidak terseret dalam kebingungan digital, dan tetap mampu menjadikan teknologi sebagai pelayan peradaban, bukan tuannya.

53 Kampus Cermin Peradaban Bangsa:

Dies Natalis ke-64 Universitas Negeri Makassar 2025

Sabtu, 2 Agustus 2025

Peringatan Dies Natalis ke-64 Universitas Negeri Makassar menjadi ruang refleksi penting tentang arah pendidikan di Indonesia. Momen ini bukan sekadar seremoni, tetapi titik temu antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional. Di tengah berbagai tantangan global, dunia pendidikan kita sedang diuji: bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing, tanpa meninggalkan akar nilai-nilai kebangsaan.

Visi besar yang dibawa melalui Asta Cita Presiden menekankan penguatan manusia Indonesia melalui sains dan teknologi, sejalan dengan cita-cita pendidikan bermutu untuk semua. Hal ini tidak lagi sekadar wacana. Pemerintah telah melangkah nyata dengan program revitalisasi sekolah: tahun ini, ada lebih dari 10 ribu sekolah di seluruh Indonesia yang diperbaiki dengan anggaran hampir Rp17 triliun. Revitalisasi bukan hanya soal gedung, tetapi juga tentang menciptakan ruang belajar yang layak, nyaman, dan mendorong kreativitas anak. Fakta bahwa Sulawesi Selatan ikut menjadi bagian program ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh lagi terpusat hanya di kota-kota besar di Jawa.

Namun, fasilitas hanyalah satu sisi. Peningkatan kualitas guru adalah kunci sesungguhnya. Guru tidak boleh tertinggal dalam era teknologi yang berubah cepat. Program pelatihan berbasis STEM, kecerdasan buatan, coding, hingga pembelajaran mendalam adalah

ikhtiar besar agar para pendidik tidak hanya mengajarkan teori lama, tetapi juga membimbing siswa menghadapi dunia yang semakin digital dan kompetitif. Perguruan tinggi dalam hal ini memiliki tanggung jawab ganda: melahirkan guru berkualitas sekaligus mendampingi para pendidik di lapangan. UNM tidak boleh puas hanya dengan predikat sebagai lembaga pencetak tenaga pendidik; ia harus menjadi pusat inovasi pendidikan yang nyata dampaknya di masyarakat.

Satu terobosan penting lain adalah kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang dimulai sejak taman kanak-kanak. Gagasan “satu desa satu TK” jelas merupakan langkah strategis. Pendidikan usia dini adalah fondasi pembentukan karakter, logika berpikir, serta kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Di sini, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Universitas seperti UNM bisa berkontribusi dalam menyiapkan kurikulum pelatihan guru TK, membangun metode pengenalan matematika dan literasi sejak dini, hingga menyiapkan program berkelanjutan untuk guru BK dan PPG.

Dalam keseluruhan gagasan ini, ada satu benang merah: kolaborasi. Pendidikan tidak mungkin berhasil jika hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, bahkan masyarakat luas harus terlibat. Perguruan tinggi ditantang untuk tidak sekadar menjadi objek kebijakan—sekadar menunggu program dari pemerintah—tetapi hadir sebagai subjek yang memberi arah dan dampak. Dengan kapasitas akademik dan riset yang dimiliki, kampus bisa memperkaya kebijakan dengan gagasan segar, sekaligus mengawal implementasi agar tidak melenceng dari tujuan awal.

Dies Natalis UNM tahun ini seakan memberi pesan jelas: perguruan tinggi harus berada di garda depan perubahan. UNM tidak boleh hanya terdampak kebijakan, tetapi justru harus menjadi pusat dampak. Di sinilah makna sejati sebuah universitas negeri—bukan hanya tempat belajar, melainkan motor penggerak kemajuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya.

Jika refleksi ini kita hayati bersama, maka perjalanan menuju

Indonesia yang unggul bukanlah mimpi. Pendidikan yang bermutu, guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan komitmen kolaborasi akan menjadi pondasi kokoh. Dan dari Makassar, lewat momentum Dies Natalis UNM, kita bisa menyalakan optimisme bahwa wajah pendidikan Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih cerah.

Ada ide yang terasa segar dan agak tidak biasa: bagaimana jika profesor yang terbiasa mengajar di perguruan tinggi, turun langsung mengajar di sekolah, bahkan hingga taman kanak-kanak? Sekilas, ini mungkin terdengar berlebihan. Tetapi jika dipikir lebih dalam, mengajar di TK justru bisa menjadi pengalaman paling menantang sekaligus menyenangkan. Seorang profesor yang terbiasa berbicara di depan mahasiswa dengan teori-teori rumit akan diuji kemampuannya saat harus menjelaskan hal paling sederhana kepada anak-anak kecil. Di situlah terlihat siapa yang benar-benar hebat dalam mengajar. Candaan tentang keinginan menjadi kepala sekolah TK setelah pensiun, bahkan datang dari tokoh-tokoh besar. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa profesi guru TK bukan profesi sembarangan, melainkan pekerjaan penuh tanggung jawab yang menentukan dasar kualitas generasi mendatang.

Namun, percakapan ini tidak berhenti di urusan profesi guru saja. Ada pesan lebih luas tentang bagaimana perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Makassar yang sedang merayakan Dies Natalis ke-64, terus berperan dalam memajukan bangsa. Perjalanan UNM hingga menjadi salah satu universitas ternama di Indonesia Timur adalah capaian penting. Meski kerap ada pesimisme karena keterbatasan anggaran, seharusnya justru muncul optimisme. Dari timur, matahari selalu terbit, dan dari timur pula diharapkan lahir gagasan, kreativitas, dan kebangkitan pendidikan. Orang besar adalah mereka yang tetap mampu kreatif meski dalam keadaan terbatas. Kreativitas yang muncul dari keterbatasan sering kali lebih murni dibanding kreativitas karena kelimpahan dana. Bahkan, tak jarang dana yang besar justru bisa membuat seseorang lalai dan malah memangkas potensi kreativitas itu sendiri.

Persoalan pendidikan di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi nyata di lapangan. Presiden berkali-kali menegaskan bahwa tidak boleh ada sekolah yang rusak, roboh, atau memiliki toilet yang tidak sehat. Infrastruktur adalah fondasi penting, tetapi sesungguhnya inti dari pendidikan terletak pada sumber daya manusianya. Guru adalah poros yang menentukan arah kualitas bangsa. Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, sebesar apa pun bangunan sekolah tidak akan menghasilkan pendidikan yang baik.

Karena itu, keputusan pemerintah memberi tambahan honorarium Rp300.000 per bulan bagi guru honorer mulai Agustus adalah langkah kecil tapi signifikan. Transfer yang masuk langsung ke rekening masing-masing guru menjadi bukti kehadiran negara, meski nilainya belum sebanding dengan pengorbanan mereka. Ada pula pesan moral yang menyertainya: tambahan itu harus dipakai dengan bijak, jangan sampai lenyap untuk hal yang sia-sia, apalagi judi online. Sebuah sindiran halus, tetapi juga sekaligus pengingat bahwa kesejahteraan tak hanya soal menerima uang, tetapi juga soal mengelolanya dengan benar.

Di sisi lain, ada kenyataan yang sering jadi bahan gurauan: gaji guru disebut “6 koma”. Ungkapan ini punya dua makna. Bisa berarti enam juta koma sekian, atau bisa juga berarti setelah tanggal enam koma—alias gaji sudah habis tak bersisa. Ada dua penyebab: gaji yang memang kecil, atau kredit dan cicilan yang terlalu banyak. Fenomena ini menggambarkan betapa kompleksnya masalah kesejahteraan guru, bukan hanya soal nominal yang diterima, tetapi juga soal pola hidup dan kemampuan mengatur keuangan. Bahkan, sejak gaji ditransfer langsung ke rekening tanpa perantara, muncul dinamika baru. Jika transfer terlambat dua minggu, suara protes keras langsung muncul di media sosial. Tetapi begitu cair, ada juga yang merayakannya dengan cara heboh, misalnya membeli barang-barang konsumtif. Memang, ini tak bisa digeneralisasi, tetapi fenomena ini cukup untuk menjadi cermin bersama.

Pada akhirnya, jika semua potongan cerita ini disatukan, tampak jelas benang merahnya: pendidikan adalah kerja bersama yang menyentuh banyak aspek. Ada soal profesi guru yang harus dihargai setinggi-tingginya, ada soal kreativitas perguruan tinggi yang harus tumbuh meski anggaran terbatas, ada soal infrastruktur sekolah yang tak boleh dibiarkan rusak, dan ada soal kesejahteraan guru yang selalu perlu ditingkatkan. Semua ini bukan sekadar urusan teknis atau administratif, melainkan persoalan bagaimana bangsa ini menghargai ilmu pengetahuan dan mereka yang menanamkannya.

Maka, pendidikan tidak bisa hanya diukur dengan anggaran, laporan pembangunan, atau ranking universitas. Pendidikan harus dimaknai sebagai proses panjang yang berawal dari TK hingga perguruan tinggi, dari ruang kelas kecil dengan papan tulis sederhana hingga kampus besar dengan riset internasional. Pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar gedung megah atau jumlah profesor, tetapi kualitas manusia Indonesia yang lahir dari ruang-ruang pendidikan itu.

Pendidikan di Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ada kesadaran bahwa guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. Di sisi lain, ada upaya besar untuk menghadirkan teknologi sebagai penopang pembelajaran. Rencana menghadirkan interactive flat panel (IFP) ke setiap sekolah menjadi langkah konkret untuk membangun smart classroom. Langkah ini bukan sekadar soal alat canggih, melainkan bagaimana menjadikan proses belajar lebih menyenangkan dan relevan dengan zaman.

Namun, pendidikan dasar dan menengah tidak bisa berdiri sendiri. Di sinilah perguruan tinggi ditantang untuk hadir dan benar-benar memberi dampak. Perguruan tinggi tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal atau mengejar prestise akademik, melainkan harus mampu menyalurkan kualitas lulusannya ke masyarakat luas. Kualitas kampus akan langsung tercermin pada mutu pendidikan dasar dan menengah, karena dari sanalah guru dan tenaga pendidik lahir.

Kampus juga diharapkan menjadi cerminan peradaban bangsa. Ia adalah miniatur dari masyarakat berilmu, tempat di mana kesalahan intelektual dan keadaban budaya dipraktikkan. Jika ingin melihat bagaimana wajah peradaban bangsa di masa depan, lihatlah perilaku orang-orang di kampus hari ini. Tugas menjadikan kampus sebagai pusat ilmu sekaligus pusat peradaban jelas bukan perkara mudah, tetapi justru di situlah tantangan sekaligus harapan besar kita.

Dalam dinamika kehidupan kampus, fenomena mahasiswa yang berdemonstrasi sering menimbulkan kegelisahan. Padahal, demo tidak selalu identik dengan masalah. Justru sering kali, mahasiswa yang memilih jalan demonstrasi adalah mereka yang kritis dan cerdas, yang merasa gagasan atau keresahannya tidak cukup terwadahi di ruang kelas. Tentu ada juga yang melakukannya karena alasan lain, termasuk sekadar perjalanan akademiknya yang tidak mulus. Tetapi pada intinya, suara mahasiswa adalah bagian dari denyut intelektual kampus itu sendiri. Maka, pendidikan yang kita cita-citakan bukan hanya tentang perangkat modern atau gedung megah, melainkan juga tentang membangun ekosistem yang sinergis: guru yang dihargai, sekolah yang berdaya, perguruan tinggi yang berdampak, dan mahasiswa yang kritis. Semua itu harus berjalan bersama demi melahirkan bangsa yang cerdas, beradab, dan berperadaban.

Ada sebuah gagasan penting dari Ali Syariati tentang peran manusia berilmu. Ia membedakan antara intelektual yang hanya berkulat di laboratorium, sibuk dengan penelitian, tetapi lupa dengan denyut masyarakat; dan cendekiawan, yakni mereka yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memajukan masyarakat dan memuliakan manusia. Pendidikan tinggi idealnya melahirkan cendekiawan, bukan sekadar intelektual. Riset memang penting, tetapi nilainya tidak berhenti pada publikasi atau seminar—ia baru bermakna jika memberi dampak bagi kemajuan bangsa. Karena itu, sinergi antara riset perguruan tinggi dan arah pembangunan negara menjadi mutlak. Terlalu sering riset berjalan sendiri tanpa seirama dengan kebijakan bangsa.

Kesadaran inilah yang melahirkan kebijakan baru: dana riset LPDP harus diarahkan pada penelitian yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan program pembangunan nasional. Di saat yang sama, perhatian besar juga diberikan pada pendidikan dasar dan menengah, khususnya untuk melatih guru. Bukan hanya guru bimbingan konseling atau pembelajaran mendalam, tetapi juga guru sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Ada tantangan besar di depan mata. Jika Indonesia ingin berdiri sejajar dengan bangsa maju dan menguasai teknologi canggih, maka STEM adalah keharusan. Namun kenyataannya, jurusan-jurusan terkait STEM justru sepi peminat. Bagaimana kita bisa berbicara soal rekayasa genetika jika jurusan biologi tak diminati? Bagaimana bisa bermimpi soal teknologi canggih jika fisika ditinggalkan mahasiswa?

Untuk itu, pendidikan harus digeser dari hulu. Matematika tidak boleh hanya hadir sebagai rumus kering, melainkan logika berpikir dan computational thinking yang dikenalkan sejak taman kanak-kanak. Sejak tahun ini, coding dan kecerdasan buatan mulai diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan, dengan guru-guru yang telah disiapkan. Harapannya, generasi Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi pencipta yang handal.

Namun penguasaan teknologi saja tidak cukup. Ia harus diimbangi dengan kesalehan dalam menggunakannya. Dalam era digital, kecakapan digital mesti berjalan beriringan dengan kesalehan digital. Tanpa itu, teknologi bisa lebih banyak menjerumuskan ketimbang memajukan. Di sinilah pendidikan mesti dipahami sebagai proses rekayasa sosial. Tugasnya bukan sekadar merespons perubahan, melainkan mengantisipasi dan menyiapkan arah masa depan bangsa. Dengan begitu, kita tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga menciptakan jalan baru bagi kemajuan.

Kemajuan teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial, begitu pesat hingga apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi usang tahun depan. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya menekankan hard skill. Yang lebih mendesak adalah kemampuan

soft skill yang lentur dan bisa bertahan di tengah perubahan. Konsep 4C—creativity, critical thinking, communication, collaboration—sering dianggap kunci abad 21, tetapi dalam konteks Indonesia perlu ditambahkan dua lagi: character dan citizenship. Bahkan, lebih jauh lagi, pembelajaran sebaiknya juga mengasah kesehatan dan kemandirian. Dengan bekal itulah mahasiswa diharapkan mampu menghadapi zaman yang tak terduga.

Masa depan sudah di depan mata. Indonesia menargetkan visi emas 2045, tetapi jangan lupa dunia akan bergerak lebih jauh ke tahun 2050. Pendidikan harus dipikirkan dengan horizon jangka panjang, agar generasi bangsa bukan hanya bisa hidup di masanya, tetapi juga memberi kehidupan bagi masyarakat global.

Presiden menekankan perlunya melahirkan anak-anak unggul dengan kecerdasan di atas rata-rata. Walau jumlah mereka sedikit, perannya bisa besar. Seperti yang disebut dalam buku *The SS Code*, cukup 1% orang untuk memberi dampak pada 99% lainnya. Artinya, perguruan tinggi tidak boleh puas hanya sebagai lembaga penghasil ijazah. Ia harus hadir sebagai pusat ilmu pengetahuan, menumbuhkan ilmuwan yang tidak sekadar cerdas, tetapi juga berdedikasi memajukan masyarakat.

Ada teladan menarik dari luar negeri. Di Amerika, misalnya, anak-anak muda yang tergabung dalam *Future Farmers of America* sejak dini bangga bercita-cita menjadi petani. Mereka bukan petani biasa, melainkan petani yang menguasai ilmu dan teknologi. Mereka menanam bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan pengetahuan. Di sana pula berdiri pabrik John Deere yang memproduksi alat-alat pertanian, menopang kawasan pertanian besar yang hasilnya—termasuk kedelai—bahkan sampai ke Indonesia. Sebagian pengrajin tempe menilai kedelai impor itu lebih enak dibanding kedelai lokal.

Semua contoh itu menegaskan satu hal: pendidikan harus lebih berani melahirkan manusia yang siap menghadapi masa depan, bukan sekadar masa kini. Perguruan tinggi harus lebih berdampak, dan bangsa ini harus punya generasi yang bukan hanya ikut arus, tetapi

mampu menciptakan arus baru.

Ada satu pengalaman sederhana namun penuh makna tentang seorang petani bernama Pak John. Ia bukan sosok petani yang hidup susah seperti bayangan banyak orang. Rumahnya cukup mewah, televisinya besar, dan olahraga favoritnya golf—sesuatu yang biasanya identik dengan gaya hidup kelas atas. Lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya tentang hasil panen jagung, ia tidak menimbang dalam kilogram, melainkan menghitung butir jagung per paket. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya standar kualitas yang dijaga, betapa seriusnya nilai ekonomi hasil pertanian dihitung, dan betapa berbeda wajah pertanian modern dengan stereotipe yang selama ini kita kenal.

Kisah ini memberi pelajaran bahwa menjadi petani bukanlah pilihan hidup yang rendah, miskin, atau identik dengan keterbelakangan. Justru, bila dilakukan dengan manajemen yang baik, pertanian bisa menjadi profesi yang mendatangkan kesejahteraan dan kebanggaan. Sayangnya, di banyak daerah di Indonesia, realitas ini belum tertanam dalam benak generasi muda.

Pernah di sebuah desa penghasil singkong di Lampung, ketika ditanya soal cita-cita, anak-anak sekolah dasar hampir semuanya menjawab ingin menjadi dokter, polisi, atau tentara. Tidak ada satu pun yang menyebut ingin menjadi petani, padahal seluruh lingkungannya bertumpu pada singkong. Fenomena ini menyingkap masalah mendasar dalam pendidikan kita: sekolah sering kali memutuskan hubungan anak-anak dengan lingkungan alam tempat mereka tumbuh. Alih-alih membekali kecakapan hidup yang relevan dengan konteks sekitar, pendidikan lebih banyak mengarahkan mereka pada profesi yang jauh dari akar kehidupannya.

Padahal, mendekatkan anak dengan lingkungannya adalah kunci agar pendidikan benar-benar bermakna. Anak yang hidup di tepi laut semestinya bisa berenang, mengenal jenis-jenis ikan, dan memahami potensi kelautan. Anak yang tinggal di desa pertanian seharusnya bisa memahami siklus tanam, teknik sederhana dalam menjaga kualitas hasil bumi, dan melihat potensi itu sebagai peluang

masa depan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: pendidikan cenderung seragam dan semakin menjauhkan anak-anak dari potensi lokal.

Itulah mengapa pendidikan kejuruan perlu diarahkan pada keunggulan daerah. Tidak semua SMK harus mengambil jurusan komputer atau jaringan. Justru akan lebih relevan jika SMK di pesisir mengembangkan keahlian kelautan, SMK di pegunungan mengembangkan agrobisnis, dan SMK di daerah kaya seni-budaya mengembangkan industri kreatif berbasis tradisi. Dengan cara itu, anak-anak tidak tercerabut dari tanah tempat mereka lahir dan besar, melainkan tumbuh sebagai pewaris sekaligus pengembang potensi lokal.

Belajar dari negara lain, Cina adalah contoh yang mencolok. Negeri itu memang menjadi superpower berkat keunggulan teknologi. Namun, mereka tidak meninggalkan akar tradisi dan potensi alamnya. Teh, misalnya, bukan hanya sekadar minuman, tetapi menjadi komoditas bernilai tinggi. Proses menanam, memanen, menyeduh, hingga cara meminumnya telah menjadi ilmu tersendiri yang dihargai dan diwariskan. Teh menjadi identitas nasional sekaligus produk unggulan dunia.

Korea Selatan pun menunjukkan hal yang sama. Negeri ini dikenal sebagai eksportir teknologi dan budaya populer, mulai dari drama Korea hingga K-pop yang mendunia. Namun, pada saat yang sama, Korea tetap menjaga dan mengangkat kekayaan alamnya. Ginseng, misalnya, tetap menjadi oleh-oleh khas yang sekaligus merepresentasikan identitas negara itu. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak menghapus nilai tradisi, melainkan justru menguatkannya.

Dari Cina dan Korea, kita belajar bahwa penguasaan teknologi harus berpijak pada kekayaan alam dan budaya sendiri. Mereka tidak kehilangan jati diri ketika melompat maju dalam teknologi, justru menjadikan potensi alam sebagai bagian penting dari strategi global.

Indonesia seharusnya menempuh jalan serupa. Kita memang perlu mengejar teknologi, namun jangan sampai hanya menjadi konsumen dari teknologi asing tanpa pijakan pada kekayaan sendiri. Alam Indonesia yang subur, laut yang luas, serta ragam budaya yang kaya adalah modal yang tak ternilai. Pendidikan harus menjadikan kekayaan itu sebagai titik tolak: mengajarkan sains, teknologi, dan inovasi sekaligus menanamkan penghargaan pada alam dan budaya lokal.

Kalau tidak, kita hanya akan ikut-ikutan dalam perlombaan teknologi yang kecepatannya luar biasa, tanpa pernah benar-benar bisa bersaing. Sebaliknya, jika kita mampu memadukan teknologi dengan kekuatan alam dan budaya, maka kita bisa memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki bangsa lain. Inilah yang akan menjadi identitas sekaligus daya tawar Indonesia di mata dunia.

Pendidikan, dengan demikian, tidak cukup hanya mempersiapkan anak-anak untuk mengejar pekerjaan modern yang seragam di mana-mana. Ia harus membentuk generasi yang peka terhadap lingkungannya, mampu memanfaatkan kekayaan alamnya, bangga terhadap budayanya, sekaligus cakap menggunakan teknologi untuk mengangkat semua itu ke level yang lebih tinggi. Jalan menuju Indonesia yang maju bukan dengan meniru sepenuhnya negara lain, tetapi dengan menapak dari tanah sendiri. Menjadi bangsa yang modern sekaligus berakar. Itulah kekuatan yang sejati.

Kondisi anak-anak kita hari ini menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Fenomena “mager” yang melanda generasi muda bukan sekadar soal malas bergerak, tetapi juga menjadi cermin bagaimana kebugaran jasmani mereka tidak berada pada kondisi terbaik. Di saat yang sama, istilah generasi stroberi makin sering terdengar—fisiknya tampak gagah, tetapi rapuh ketika dihadapkan pada tekanan, mudah retak ketika diuji. Ini menjadi tanda bahwa pendidikan harus berperan lebih jauh, bukan hanya mencetak pengetahuan, melainkan juga membentuk ketangguhan.

Menjawab hal itu, lahirilah kebijakan tentang tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan yang sederhana, tetapi sarat makna: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Aktivitas-aktivitas ini jika dibiasakan sejak dini bukan saja memperkuat jasmani, tetapi juga menyehatkan mental. Penelitian pun menunjukkan aktivitas fisik berkorelasi erat dengan ketangguhan jiwa. Bayangkan seorang kiper nasional, fisiknya boleh saja prima, tetapi tanpa mental baja ia akan runtuh di adu penalti. Justru karena mentalnya terlatih, ia mampu berdiri tegak dan menjadi penentu kemenangan. Dari olahraga, anak-anak kita belajar bukan hanya keterampilan, melainkan juga kepemimpinan, kolaborasi, dan keberanian menghadapi tantangan.

Semua kebijakan ini tentu tidak akan berarti tanpa partisipasi bersama. Pendidikan bukan pekerjaan satu pihak, melainkan gerakan kolektif. Kerja sama dengan universitas, peningkatan kualitas guru, serta pembaruan ide dan semangat menjadi fondasi penting. Ulang tahun ke-64 Universitas Negeri Makassar, misalnya, diharapkan menjadi momentum reborn—kelahiran kembali dengan semangat yang segar demi melahirkan pendidikan bermutu bagi semua anak bangsa. Pendidikan yang berkualitas adalah jalan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, sehat lahir batin, dan siap menghadapi zaman. Itulah tantangan besar yang menunggu, sekaligus harapan yang bisa kita wujudkan bersama.

54 **Dari Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, hingga Kesejahteraan Guru:**

Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru

Rabu, 6 Agustus 2025

Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah usia yang matang untuk merefleksikan apa arti kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan sejati bukan hanya berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga memastikan rakyatnya sejahtera dan berdaya. Dari semua jalan yang bisa ditempuh, pendidikan selalu menjadi kunci. Sebab, bangsa tidak akan maju jika generasinya tertinggal.

Tahun ini, Presiden memberi sebuah “kado” bagi para guru dan dunia pendidikan, tepat di momen ulang tahun kemerdekaan ke-80. Bukan kado simbolis, melainkan kebijakan nyata yang menyentuh dua hal paling mendasar: sarana pendidikan yang layak dan kesejahteraan guru yang lebih terjamin.

Di satu sisi, pemerintah berkomitmen memperbaiki infrastruktur pendidikan. Revitalisasi dan renovasi sekolah menjadi program prioritas, dengan alokasi dana hampir Rp17 triliun. Angka itu digunakan untuk membenahi 13.763 sekolah—meningkat drastis dari target semula yang “hanya” 10.395 sekolah. Ini bukan sekadar hitungan statistik, tetapi bentuk keberpihakan nyata pada murid dan guru yang selama ini harus bertahan di ruang kelas yang jauh dari kata layak. Lebih dari itu, program ini diperkirakan menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja di daerah. Artinya, pendidikan sekaligus

menjadi lokomotif ekonomi rakyat.

Di sisi lain, modernisasi pendidikan juga digulirkan melalui digitalisasi. Pemerintah mulai menghadirkan Interactive Flat Panel (IFP) di sekolah-sekolah, perangkat pembelajaran interaktif yang bisa membuat proses belajar lebih hidup, menarik, dan relevan dengan zaman digital. Langkah ini penting, sebab dunia anak-anak kita tidak lagi terbatas pada papan tulis dan buku teks, melainkan sudah terkoneksi dengan teknologi. Menolak digitalisasi sama saja dengan menutup mata terhadap masa depan.

Namun, sebagai apapun bangunan sekolah dan canggihnya teknologi pembelajaran, semua akan sia-sia jika gurunya tidak diperhatikan. Karena itu, peningkatan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kesejahteraan guru ditempatkan sebagai prioritas cepat. Guru adalah ruh dari pendidikan itu sendiri. Mereka yang setiap hari bersentuhan dengan anak-anak, menanamkan ilmu sekaligus karakter, dan menjadi teladan dalam kehidupan nyata. Jika guru dibiarkan terpuruk, maka mustahil pendidikan akan melahirkan generasi unggul.

Kado dari Presiden ini, pada akhirnya, adalah jawaban atas kebutuhan lama yang sering terabaikan. Pendidikan tidak cukup hanya dengan jargon “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tapi harus hadir dengan langkah konkret. Renovasi sekolah yang layak, pembelajaran berbasis teknologi, dan guru yang sejahtera adalah tiga pilar penting yang kini mulai diperkuat.

Tentu, pekerjaan besar ini tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Konsistensi menjadi kunci. Janji politik sering kali kandas di tengah jalan, tetapi jika program ini terus dijaga, ia bisa menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Pendidikan yang kuat akan melahirkan masyarakat yang berdaya, dan masyarakat yang berdaya adalah pondasi bagi negara yang benar-benar merdeka.

KUALIFIKASI, SERTIFIKASI DAN KESEJAHTERAAN

Delapan puluh tahun lalu, bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Delapan puluh tahun

kemudian, perjuangan itu harus diwujudkan dalam bentuk lain: pena, papan tulis digital, dan ruang kelas yang penuh semangat belajar. Guru adalah pejuang barisan depan di medan baru itu. Dan kado dari Presiden, jika benar-benar sampai ke tangan mereka dengan baik, bisa menjadi energi untuk melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera.

Pemerintah menunjukkan langkah serius dalam memperkuat pilar utama pendidikan: guru. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memberi kesempatan kepada 12.500 guru untuk melanjutkan studi S1 di 112 perguruan tinggi merupakan investasi penting. Dana Rp37,5 miliar yang digelontorkan bukan hanya sekadar angka, melainkan wujud komitmen agar guru memiliki kualifikasi akademik yang lebih baik. Di era pendidikan yang menuntut kualitas, kesempatan melanjutkan pendidikan ini jelas akan memperluas wawasan, meningkatkan profesionalisme, sekaligus mengangkat derajat sosial para guru.

Selain peningkatan kualifikasi, perhatian pemerintah juga terlihat dalam bentuk insentif finansial. Sebanyak 341.248 guru honorer menerima insentif Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan, dengan realisasi transfer mencapai lebih dari 85% atau sekitar Rp716 miliar. Untuk guru PAUD nonformal, bantuan subsidi upah (BSU) juga digulirkan, sebesar Rp300.000 per bulan untuk dua bulan, dengan total Rp125 miliar telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Pola transfer langsung ini menandakan keseriusan dalam menjaga transparansi, meminimalisir birokrasi, dan memastikan hak guru tidak lagi terhambat oleh jalur administrasi yang panjang.

Perubahan mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi juga patut dicatat sebagai terobosan. Jika sebelumnya guru harus menunggu tiga bulan sekali dan bergantung pada pemerintah daerah, kini tunjangan tersebut ditransfer setiap bulan langsung ke rekening masing-masing. Perubahan sederhana ini memiliki dampak psikologis yang besar: guru dapat mengatur keuangan lebih stabil, merasa lebih dihargai,

dan fokus pada tugas mendidik tanpa dihantui ketidakpastian administratif. Hingga Agustus 2025, realisasi pencairan tunjangan bahkan sudah mencapai 97,4%.

Namun, kebijakan ini tidak berhenti pada kesejahteraan. Ada dimensi lain yang tak kalah penting: peningkatan kompetensi. Guru dihadapkan pada berbagai pelatihan strategis seperti pembelajaran mendalam (deep learning), coding, kecerdasan artifisial, bimbingan konseling, pendidikan profesi guru, kepemimpinan sekolah, hingga penguatan Science, Technology, Engineering, and Math (STEM). Dengan bekal tersebut, guru bukan hanya pengajar materi, melainkan juga fasilitator pembelajaran modern yang mampu menuntun siswa menghadapi dunia yang semakin kompleks.

Inisiatif ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dana dari kementerian didukung partisipasi masyarakat, yang berarti negara membuka ruang kolaborasi. Pendidikan tidak bisa hanya diletakkan di pundak guru atau pemerintah, tetapi butuh dukungan semesta.

Jika ditinjau dari perspektif yang lebih luas, rangkaian program ini adalah kado istimewa di usia ke-80 Republik Indonesia. Bukan kado basa-basi, melainkan hadiah yang diharapkan menumbuhkan dampak jangka panjang. Guru yang lebih sejahtera dan kompeten akan melahirkan murid yang lebih berkualitas, dan pada akhirnya mencetak generasi emas yang bisa membawa bangsa menuju kejayaan.

Kita tahu bahwa guru adalah garda terdepan dalam membangun peradaban. Dari tangan merekalah lahir pemimpin, ilmuwan, pengusaha, seniman, dan tokoh bangsa. Jika negara menaruh perhatian besar pada kesejahteraan dan pengembangan kompetensi mereka, itu berarti negara sedang menanam bibit kemajuan di tanah subur pendidikan.

Tentu, pekerjaan belum selesai. Masih banyak PR besar seperti distribusi guru yang merata, kualitas pendidikan di daerah 3T, hingga tantangan globalisasi yang menuntut adaptasi cepat. Namun, langkah yang telah ditempuh ini patut diapresiasi sebagai fondasi awal yang

kokoh.

Di tengah peringatan ulang tahun ke-80 kemerdekaan, program ini layak disebut bukan hanya sebagai kebijakan teknis, tetapi juga simbol persatuan dan keseriusan negara. Guru yang sejahtera adalah rakyat yang bahagia. Guru yang kompeten adalah bangsa yang maju.

Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga dengan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan, kita tidak hanya membangun bangsa yang berdaulat, tetapi juga peradaban yang berjaya. Merdeka!

55 **Setiap Anak Bisa Belajar Dimana Saja dan Kapan Saja:**

Peluncuran Uji Terap Penyelenggaraan Pendidikan
Jarak Jauh PJJ Jenjang Pendidikan Menengah

Rabu, 6 Agustus 2025

Pendidikan selalu menjadi denyut nadi sebuah bangsa. Namun, ketika bicara pemerataan pendidikan, kita masih sering berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Ada yang tinggal di kota besar dengan segala fasilitas modern, ada pula yang berada di pelosok atau bahkan di luar negeri, di mana akses ke sekolah formal sangat terbatas. Di tengah tantangan itu, peluncuran uji terap Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang menengah hadir sebagai langkah penting untuk memperluas akses dan menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif.

Selama bertahun-tahun, paradigma pendidikan kerap terikat pada “schooling” – keharusan hadir di sekolah dengan aturan waktu, ruang, dan metode tertentu. Padahal, esensi pendidikan yang sejati adalah “learning” – kesempatan untuk belajar, di mana pun dan kapan pun. Dengan hadirnya PJJ, pemerintah tidak hanya berbicara tentang jarak yang memisahkan siswa dari ruang kelas, tetapi juga tentang fleksibilitas yang memungkinkan proses belajar menyesuaikan dengan kebutuhan hidup nyata anak-anak.

Kelebihan terbesar PJJ terletak pada fleksibilitasnya. Jika sekolah formal menuntut kehadiran fisik dalam ruang dan waktu yang sama, PJJ justru memberi kebebasan agar proses belajar tetap berlangsung meski tidak secara *real time*. Anak-anak dapat mengakses materi

sesuai dengan kondisi dan jadwal mereka. Dalam era digital, hal ini semakin terbantu dengan melimpahnya sumber belajar daring: mulai dari modul interaktif, video pembelajaran, hingga forum diskusi virtual. Sejak internet populer, e-learning sudah terbukti menjadi solusi global yang memungkinkan siapa pun belajar tanpa batas ruang dan waktu.

Namun, di Indonesia, istilah “pendidikan jarak jauh” masih sering disalahpahami seakan hanya berkaitan dengan jauhnya lokasi. Padahal, masalah utamanya bukan sekadar soal jarak, melainkan soal akses yang tidak bisa dipenuhi lewat pendidikan formal konvensional. Seorang atlet bulu tangkis dunia seperti Taufik Hidayat menjadi contoh nyata. Latihan intensif membuatnya mustahil mengikuti jam kehadiran sekolah formal. Bila ia dipaksa menyesuaikan diri dengan pola tradisional, mungkin ia tidak akan pernah mencapai prestasi dunia. Fleksibilitas pendidikan memberi ruang agar ia bisa terus belajar tanpa meninggalkan mimpinya di lapangan.

Kisah itu hanyalah satu ilustrasi. Di luar sana, banyak anak menghadapi kondisi serupa: ada yang merantau, ada yang bekerja sambil belajar, ada pula yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, di mana kondisi sosial dan ekonomi membuat mereka sulit mengakses sekolah formal Indonesia. PJJ menawarkan jalan keluar. Anak-anak ini tidak lagi harus memilih antara pendidikan atau kondisi hidup mereka; keduanya bisa berjalan beriringan.

Tentu, program ini bukan tanpa tantangan. Fleksibilitas bisa berisiko bila tidak diimbangi dengan jaminan kualitas. Di sinilah tugas pemerintah: memastikan kurikulum PJJ tetap relevan, sistem penilaian terukur, dan tenaga pendidik memiliki kapasitas untuk mendampingi siswa di ruang digital. Akses teknologi juga harus dipikirkan. Percuma PJJ dibuka lebar, bila infrastruktur internet dan perangkat belajar tidak merata.

Namun, peluncuran uji terap ini tetap patut diapresiasi. Ia menandai perubahan cara pandang: dari pendidikan yang kaku menjadi pendidikan yang lentur, dari layanan terbatas menjadi

layanan yang inklusif. Pendidikan jarak jauh bukan sekadar proyek digitalisasi, melainkan sebuah upaya menghadirkan keadilan dalam pendidikan – memberi hak kepada setiap anak untuk belajar, tanpa terkekang oleh ruang dan waktu.

Pada akhirnya, pendidikan yang bermutu bukan hanya tentang buku, guru, atau ruang kelas. Ia adalah soal kesempatan. Kesempatan yang harus terbuka untuk semua, baik mereka yang ingin menjadi ilmuwan, seniman, pengusaha, maupun atlet dunia. Dengan hadirnya PJJ, kesempatan itu kini semakin nyata, tinggal bagaimana kita menjaganya agar tetap kokoh dan berkelanjutan.

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, di mana pun mereka berada. Namun, kenyataan di Kinabalu menunjukkan betapa hak itu belum sepenuhnya terwujud. Sekolah Indonesia di sana hanya memiliki daya tampung terbatas, sedangkan jumlah anak-anak dari keluarga pekerja migran Indonesia sangat besar. Banyak di antara mereka akhirnya hanya bisa bersekolah di *Community Learning Center* (CLC), yang secara fungsi memang membantu, tetapi belum mampu memberikan pendidikan formal sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kita akan membiarkan ribuan anak kehilangan kesempatan emas dalam hidup mereka hanya karena keterbatasan fasilitas?

Jawabannya tentu tidak. Setiap anak harus tetap belajar, dan di sinilah teknologi menjadi jembatan yang tak tergantikan. Pendidikan jarak jauh menawarkan solusi nyata: jarak tidak lagi menjadi penghalang, kesibukan orangtua tidak bisa dijadikan alasan, dan keterbatasan ruang kelas tidak boleh membatasi masa depan. Dengan teknologi, proses belajar bisa hadir di gubuk kecil di ladang, di sela-sela kesibukan keluarga, bahkan di tangan seorang anak yang hanya berbekal ponsel sederhana.

TIGA KUNCI KEBERHASILAN

Namun, teknologi hanyalah sarana. Kunci keberhasilan tetap terletak pada tiga hal penting. Yang *pertama* adalah semangat belajar anak-anak itu sendiri. Belajar tidak boleh dilihat sebagai

kewajiban semata, melainkan kebutuhan mendasar. Anak-anak perlu ditanamkan kesadaran untuk menjadi pembelajar mandiri. Mereka belajar bukan karena diperintah orang tua atau guru, melainkan karena memahami bahwa ilmu akan meningkatkan kualitas hidup, membuka pintu kompetensi baru, dan memperbaiki masa depan. Di sinilah letak pentingnya learner self-direction, di mana motivasi datang dari dalam diri.

Yang *kedua* adalah fleksibilitas dalam proses belajar. Dunia pendidikan tidak bisa lagi dipandang kaku. Dengan memanfaatkan e-learning, materi pelajaran bisa diakses lewat internet kapan saja. Bahkan ketika internet terbatas, pembelajaran tetap bisa berjalan dengan moda “unplug”—materi yang tersimpan di ponsel, tablet, atau media lain yang bisa dipelajari kapan pun. Gambaran anak gembala yang dahulu duduk di padang rumput sambil bersenandung kini bisa kita bayangkan ulang: seorang anak pekerja migran duduk di gubuk sederhana, membaca materi dari tabletnya, atau mendengarkan pelajaran dari rekaman suara. Inilah wajah baru pembelajaran fleksibel yang sesuai dengan realitas kehidupan mereka.

Yang *ketiga* adalah penjaminan mutu. Tanpa standar kualitas yang jelas, pendidikan jarak jauh hanya akan menjadi label kosong. Lulusan yang dihasilkan pun bisa diragukan kompetensinya. Karena itu, sistem *quality assurance* harus ditegakkan. Dulu, konsep standar pendidikan sudah pernah dirumuskan, termasuk standar untuk homeschooling, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan vokasi. Bahkan pernah digagas sistem multi-level standar, yang memungkinkan sekolah menyesuaikan diri dengan kapasitasnya, apakah menggunakan standar atas, tengah, atau bawah. Ide ini penting karena kondisi di setiap daerah berbeda, tetapi prinsip utamanya sama: mutu pendidikan tidak boleh dikorbankan. Pendidikan jarak jauh harus diakui resmi, ijazahnya sah, dan setara dengan lulusan sekolah formal. Dengan begitu, anak-anak pekerja migran tidak hanya bersekolah, tetapi juga memperoleh pengakuan penuh atas hasil belajarnya.

Ketiga kunci itu—motivasi belajar mandiri, fleksibilitas pembelajaran, dan penjaminan mutu—adalah fondasi yang memastikan pendidikan jarak jauh benar-benar memberi dampak. Bukan sekadar menambal keterbatasan, melainkan membuka peluang luas agar setiap anak memiliki akses pada pendidikan berkualitas.

Pada akhirnya, persoalan pendidikan anak-anak migran di Kinabalu adalah cermin dari komitmen kita sebagai bangsa. Apakah kita benar-benar serius memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal? Teknologi sudah membuka jalan, tinggal bagaimana kita memastikan semangat belajar tumbuh, sistem pembelajaran fleksibel tersedia, dan standar kualitas ditegakkan. Jika semua itu terwujud, maka pendidikan jarak jauh bukan hanya solusi darurat, melainkan jalan baru untuk mewujudkan keadilan pendidikan: bahwa setiap anak Indonesia, di manapun ia berada, tetap memiliki hak yang sama untuk belajar dan bermimpi.

Pendidikan jarak jauh bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah kebutuhan strategis bagi Indonesia. Negara yang luas, dengan jutaan anak tersebar hingga pelosok dan perbatasan, tidak mungkin hanya mengandalkan model pendidikan konvensional. Kehadiran modul-modul yang disiapkan dengan standar jelas, berkat dukungan Universitas Terbuka, adalah bukti keseriusan untuk menjaga mutu. Pendidikan jarak jauh tidak boleh dianggap pendidikan kelas dua. Justru di sinilah letaknya keunggulan: mampu menjangkau anak-anak yang sebelumnya rentan terpinggirkan, memastikan tidak ada diskriminasi, serta menegaskan bahwa jarak tidak boleh menjadi alasan seorang anak kehilangan haknya untuk belajar.

Persoalan akses ini semakin terasa ketika bicara tentang anak-anak Indonesia di mancanegara, khususnya di Malaysia. Di Kinabalu, misalnya, mereka sering mengalami kesulitan saat harus melanjutkan studi. Kebijakan pendidikan Malaysia hanya memberikan ruang belajar hingga tingkat SMP, kecuali bagi siswa yang bersekolah di institusi milik Indonesia. Ini berarti, untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, banyak anak kita yang terbentur aturan. Kondisi

semacam ini bukan hanya problem akademik, melainkan juga problem politik.

Di sinilah pentingnya diplomasi pendidikan. Hubungan baik antarpejabat, bahkan kedekatan personal antara Menteri Pendidikan Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, membuka peluang bagi solusi bersama. Komunikasi yang cair dan interaksi yang hangat memberi harapan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia bisa lebih luas. Jika hubungan politik kedua negara di tingkat pimpinan nasional sudah harmonis, semestinya kerja sama di bidang pendidikan juga dapat berjalan mulus. Harapannya, anak-anak Indonesia di luar negeri tidak hanya bisa belajar dengan tenang, tetapi juga tetap tumbuh dengan identitas kebangsaan yang kuat—menjadi generasi merah putih dengan kepribadian Indonesia, meski ditempa pengalaman internasional.

Lebih jauh lagi, program pendidikan jarak jauh ini tidak boleh berhenti sebagai proyek terbatas di satu tempat. Apa yang telah dimulai di Padalarang bersama SMA Negeri 2, misalnya, bisa menjadi model yang direplikasi di berbagai wilayah lain. Daerah-daerah dengan akses sulit seperti Papua, atau bahkan pusat-pusat komunitas Indonesia di mancanegara, sangat membutuhkan terobosan semacam ini. Jika berhasil diperluas, program ini bisa berkembang menjadi sebuah gerakan nasional: sebuah movement yang benar-benar menjawab cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.

Pendidikan yang berkualitas tidak lahir dari satu pihak saja. Butuh dukungan banyak elemen: lembaga pendidikan, pemerintah, parlemen, mitra lokal, hingga komunitas orang tua. Karena itu, rasa terima kasih patut disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut mendorong lahirnya program ini. Meski pasti masih ada kekurangan di sana-sini, semangat kolaborasi inilah yang membuat kita optimistis.

Akhirnya, jika semua ini terus dikembangkan, pendidikan jarak jauh bisa menjadi jembatan emas bagi generasi muda Indonesia. Tidak hanya menjawab kesenjangan akses, tetapi juga menguatkan komitmen kebangsaan. Sebab pendidikan bukan sekadar soal transfer

ilmu, melainkan juga upaya menjaga jati diri dan memastikan masa depan bangsa tetap berada di tangan anak-anak yang merdeka belajar, di mana pun mereka berada.

Mewujudkan Kemerdekaan Sejati melalui Pendidikan, Persatuan, dan Gotong Royong:

Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia

Minggu, 17 Agustus 2025

Delapan puluh tahun lalu, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks Proklamasi. Kalimat singkat itu bukan sekadar pengumuman politik, melainkan juga pernyataan lahirnya sebuah bangsa. Dari sana, pintu sejarah terbuka menuju perjalanan panjang yang penuh pengorbanan, ujian, sekaligus kebanggaan.

Hari ini, 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia kembali meneguhkan rasa syukur. Kita masih berdiri sebagai sebuah negara kesatuan yang kokoh, utuh, dan berdaulat. Kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa adalah anugerah besar, tetapi sekaligus tanggung jawab besar untuk mengisinya dengan kerja nyata.

Tema peringatan ke-80 tahun ini, *Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju*, terasa begitu relevan. Ia bukan sekadar jargon seremonial, tetapi cermin dari cita-cita bangsa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Jika menengok ke belakang, kemerdekaan memang tidak hanya berarti bebas dari belenggu penjajahan. Ia juga bermakna kedaulatan budaya, kebebasan untuk menentukan jati diri, dan keberanian berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari perjuangan panjang menuju kemandirian dan kejayaan.

Di tengah peringatan ini, pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali arah perjalanan bangsa lewat *asta cita*—delapan tekad untuk menjadikan Indonesia negeri yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Janji kemerdekaan harus diwujudkan secara nyata: merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari ketergantungan.

Tugas itu jelas bukan hanya pekerjaan pemerintah. Ia adalah kerja kolektif seluruh rakyat Indonesia. Semangat persatuan kembali dituntut agar bangsa ini bisa mengatasi berbagai tantangan, dari kesenjangan sosial hingga krisis global. Tanpa persatuan, kedaulatan akan mudah goyah. Tanpa kedaulatan, mustahil ada keadilan dan kemakmuran.

Di sisi lain, pendidikan memegang peranan paling vital. Hanya dengan pendidikan yang memerdekakan, lahirlah generasi baru yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki jiwa merdeka, semangat juang, patriotisme, serta tanggung jawab untuk menjaga martabat bangsa. Generasi seperti itulah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa berperadaban utama, bangsa yang tidak sekadar besar dari jumlah penduduk atau luas wilayah, tetapi juga dihormati karena kebudayaan, keadilan, dan kemanusiaannya.

Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya soal mengenang masa lalu, melainkan juga soal menyiapkan masa depan. Delapan puluh tahun perjalanan bangsa adalah bukti ketangguhan, tetapi sekaligus pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak. Masih ada rakyat yang tertinggal, masih ada anak bangsa yang belum mendapat pendidikan layak, masih ada kemiskinan yang harus dienyahkan, dan

masih ada ketergantungan yang perlu diputuskan.

Di sinilah makna merdeka harus kita tegakkan kembali: kemerdekaan yang menghadirkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan menegakkan keadilan. Itulah cara kita menjaga marwah bangsa, meninggikan harkat dan martabat, serta memuliakan manusia dan kemanusiaan.

Maka, pada usia ke-80 tahun ini, kemerdekaan bukan hanya diperingati, tetapi juga diteguhkan sebagai janji bersama. Janji untuk terus bersatu, menjaga kedaulatan, menyejahterakan rakyat, dan membawa Indonesia semakin maju. Karena merdeka sejatinya adalah ruang kebebasan untuk berkarya, sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan kemajuan bersama.

Manusia yang benar-benar merdeka bukan hanya mereka yang bebas secara lahiriah, melainkan juga yang memiliki asa dan cita-cita untuk terus berkembang. Kemerdekaan sejati tercermin dalam kegigihan meningkatkan kualitas diri dengan semangat belajar sepanjang hayat, menjaga pendirian, melestarikan budaya, mencintai alam, serta menebar kasih sayang kepada sesama.

Bangsa yang kuat pun lahir dari pribadi-pribadi yang demikian: unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter religius, terampil, berkepribadian utama, serta memiliki tanggung jawab besar untuk membawa bangsanya maju. Kekuatan sebuah negara bukan semata terletak pada kekayaan alam, tetapi terutama pada kualitas manusia yang dimilikinya.

Di sinilah semangat kemerdekaan menemukan maknanya. Kita diajak untuk merapatkan barisan, saling bergandengan tangan, dan bekerja sama dalam semangat gotong royong. Pendidikan yang bermutu bagi semua harus menjadi perjuangan bersama, sebab dari sanalah jalan menuju bangsa yang cerdas, sejahtera, adil, dan makmur dapat terwujud. Dan pada akhirnya, segala ikhtiar itu bermuara pada harapan agar negeri ini tumbuh dalam keberkahan serta ridha Tuhan Yang Maha Kuasa.

57 **Mahir Numerasi Majukan Negeri:**

Peluncuran Gerakan Numerasi Nasional

Selasa, 19 Agustus 2025

Peluncuran Gerakan Numerasi Nasional *Mahir Numerasi Majukan Negeri* menjadi sebuah momentum penting untuk menata ulang cara kita memandang matematika dan keterampilan berhitung. Selama ini, banyak orang menganggap numerasi sebatas kemampuan teknis yang hanya relevan bagi bidang eksakta. Padahal, ia jauh lebih luas: numerasi adalah akar dari beragam cabang ilmu pengetahuan sekaligus keterampilan hidup sehari-hari.

Fakta yang seringkali menggelisahkan adalah rendahnya capaian numerasi anak-anak Indonesia bila dibandingkan secara global, misalnya lewat skor PISA. Angka-angka itu sering menjadi bahan kritik, seakan hanya menyoroti kelemahan. Namun sebenarnya, data tersebut harus dipandang sebagai pemicu semangat. Bukan hanya agar skor internasional kita naik, tetapi agar tumbuh rasa cinta, gairah, dan kepercayaan diri anak-anak terhadap matematika. Angka hanyalah indikator, sementara yang lebih penting adalah membangun pola pikir numerik yang kuat sejak dini.

Simbol pohon yang digunakan dalam gerakan ini menyimpan filosofi mendalam. Pohon dikatakan sempurna jika memiliki akar, batang, daun, dan dalam perspektif Islam ditambah dengan buah. Filosofi ini memberi gambaran bahwa numerasi adalah akar: ia menopang batang dan cabang pengetahuan lain. Jika akar itu rapuh, batang pun takkan tumbuh kokoh. Dengan kata lain, tanpa keterampilan numerasi yang kuat, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang lain akan terhambat. Maka, memperkuat dasar numerasi

sama saja dengan menyiapkan generasi yang siap menapaki berbagai jalur ilmu.

Sayangnya, masih banyak yang memandang numerasi sebagai urusan orang-orang sains semata. Pandangan ini justru mempersempit ruang anak-anak untuk memahami bahwa matematika hadir dalam hampir setiap aspek kehidupan. Dalam ajaran agama pun, numerasi tak bisa dilepaskan. Al-Qur'an memberikan contoh konkret dalam aturan pembagian warisan, yang terperinci dalam hitungan bagian dan proporsi. Bahkan arah kiblat yang menjadi tuntunan ibadah ditentukan lewat perhitungan derajat dan posisi geografis. Semua itu menunjukkan bahwa berhitung bukan monopoli ruang kelas, melainkan napas keseharian manusia.

Gerakan ini juga mengingatkan kita bahwa numerasi adalah alat berpikir, bukan sekadar hafalan rumus. Dengan keterampilan numerasi, anak-anak akan lebih mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, serta menilai situasi dengan data dan logika. Ia juga memberi bekal agar mereka bisa menavigasi kehidupan yang semakin kompleks — mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, pemahaman teknologi, hingga keterlibatan dalam diskusi publik yang berbasis bukti.

Membangun budaya numerasi tentu tak bisa dilakukan hanya oleh sekolah atau guru. Butuh keterlibatan bersama: pemerintah, lembaga pendidikan, mitra swasta, bahkan keluarga di rumah. Di sinilah pentingnya gerakan kolektif, sebab anak-anak belajar bukan hanya di kelas, melainkan di setiap ruang kehidupan yang mereka jalani.

Peluncuran gerakan ini seakan menegaskan satu hal: matematika bukan musuh, melainkan sahabat. Selama ini banyak anak merasa takut pada angka, bahkan trauma karena matematika diperlakukan hanya sebagai kumpulan soal sulit. Gerakan numerasi mencoba memutus rantai itu dengan mengubah cara pandang: matematika adalah alat untuk memahami dunia, bukan sekadar ujian untuk lulus sekolah.

Pada akhirnya, yang ingin dituju bukan sekadar peningkatan skor PISA, melainkan lahirnya generasi yang berani berlogika, terbiasa bernalar dengan angka, dan mampu menjadikan matematika sebagai bahasa sehari-hari. Inilah pondasi yang akan memajukan negeri. Karena ketika anak-anak mencintai numerasi, sesungguhnya mereka sedang menanam pohon pengetahuan yang akarnya kuat, batangnya tegak, cabangnya rindang, dan buahnya bisa dipetik oleh bangsa di masa depan.

Matematika sering dianggap sebagai momok yang menakutkan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa matematika itu sulit, rumit, bahkan menyakitkan. Tak jarang, istilah yang muncul di kalangan pelajar adalah “matematian”—sebuah permainan kata yang menandakan betapa pelajaran ini dianggap mematikan semangat. Pandangan itu bukan tanpa sebab; cara mengajar yang kaku, wajah guru yang tampak serius tanpa ekspresi ramah, hingga soal-soal yang terlepas dari kehidupan sehari-hari membuat matematika semakin menjauh dari hati anak-anak. Padahal, sejatinya, matematika bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bila diajarkan dengan cara yang tepat.

Fondasi membangun numerasi seharusnya dimulai dari rasa cinta. Ketika anak merasa nyaman dan bahagia belajar matematika, mereka akan lebih mudah memahami konsep-konsepnya. Belajar tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai pengalaman yang penuh rasa ingin tahu. Guru berperan penting di sini—penampilan yang menyenangkan, cara mengajar yang kreatif, serta pendekatan yang penuh cerita akan membuat anak lebih tertarik. Numerasi bukan sekadar tentang angka-angka, tetapi tentang bagaimana angka itu hidup dalam keseharian kita.

Masalah besar pendidikan kita muncul ketika pembelajaran numerasi hanya dipersempit menjadi hitung-hitungan abstrak. Anak-anak dicekoki rumus, tetapi jarang diberi kesempatan melihat bagaimana rumus itu bekerja dalam realitas. Padahal, soal cerita sederhana seperti menghitung waktu tempuh perjalanan, kecepatan

kendaraan, atau membaca peta bisa membangun keterampilan logis yang nyata. Tak heran jika skor PISA Indonesia dalam numerasi rendah, karena anak-anak kesulitan memahami soal yang disajikan dalam bentuk narasi. Itu artinya, literasi dan numerasi saling terkait dan harus diperkuat bersamaan.

Ada contoh lain yang cukup memprihatinkan. Banyak anak Indonesia tidak bisa membaca jam analog. Mereka mampu membaca jam digital karena tinggal melihat angka yang terpampang jelas. Namun, ketika dihadapkan pada jam dengan jarum panjang dan pendek, mereka bingung. Padahal, membaca jam analog bukan sekadar mengetahui waktu, tetapi juga memahami konsep sudut, arah, dan posisi. Dari hal sederhana seperti inilah numerasi sebenarnya bisa dipelajari: berapa derajat pergeseran jarum, berapa sudut yang terbentuk, atau bagaimana posisi jarum jam bisa dihubungkan dengan arah mata angin.

Lebih jauh, numerasi seharusnya menjadi bagian dari budaya. Ia harus hadir dalam kebiasaan sehari-hari, bukan hanya di buku pelajaran. Anak-anak bisa diajak berhitung sambil bermain, belajar logika lewat permainan papan, atau bahkan melatih kecepatan berhitung lewat tradisi-tradisi yang menyenangkan. Dulu, orang bisa belajar matematika lewat pantun yang disiarkan di radio. Jika ada bait pantun berbunyi “empat kali empat sama dengan enam belas”, pendengar pun harus segera menanggapi. Aktivitas ringan semacam ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga cara kreatif menanamkan kebiasaan numerasi.

Tentu, kita tidak boleh melupakan sisi saintifik. Numerasi bukan hanya tentang kebiasaan bermain angka, tetapi juga tentang membangun pola pikir kritis, sistematis, dan logis. Gerakan literasi dan numerasi yang kini digalakkan secara nasional menjadi langkah penting. Apresiasi patut diberikan kepada berbagai pihak—dari guru, pemerintah, lembaga masyarakat, hingga tokoh pendidikan—yang telah bekerja sama meletakkan dasar gerakan ini. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa semua inisiatif itu tidak

berhenti pada seremoni belaka.

Numerasi harus benar-benar mengakar dalam budaya belajar kita. Ia harus menjadi gerakan bersama, sesuatu yang diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekadar hafalan rumus. Dengan begitu, anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan kemampuan berpikir logis yang kuat, mampu menghadapi persoalan dengan solusi nyata, dan tidak tergantung pada teknologi untuk hal-hal dasar.

Inilah jalan untuk membangun generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas berhitung, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan zaman. Generasi yang hebat lahir dari budaya numerasi yang kokoh, dari kebiasaan sederhana membaca jam, menghitung jarak, hingga menalar masalah kehidupan. Dan pada akhirnya, dari rasa cinta yang tumbuh sejak dini bahwa matematika itu bukan momok, melainkan sahabat.

Pendidikan di Indonesia kini tengah diarahkan pada satu titik pijak yang sangat mendasar: kemampuan numerasi. Dari berbagai paparan kebijakan, terlihat jelas bahwa pemerintah ingin menegaskan bahwa matematika bukan sekadar pelajaran wajib di sekolah, melainkan sebuah pondasi untuk membangun kecakapan hidup yang lebih luas. Di era ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepat, numerasi ditempatkan sebagai syarat mutlak agar generasi muda bisa bersaing.

Numerasi sesungguhnya lebih dari sekadar berhitung. Ia adalah keterampilan memahami angka, logika, pola, dan hubungan sebab-akibat yang akan mendukung pemahaman di hampir semua bidang ilmu. Tanpa dasar ini, sulit bagi anak-anak untuk menapaki tangga ilmu pengetahuan lain seperti sains, teknologi, atau bahkan seni. Tidak mengherankan bila istilah STEM—Science, Technology, Engineering, and Math—terus digaungkan. Bahkan belakangan diperluas menjadi STEAM dengan menambahkan unsur seni, agar pengembangan kemampuan kognitif anak tidak hanya kaku tetapi juga kreatif.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun yang masuk dalam RPJMN mempertegas keseriusan arah pembangunan sumber daya manusia. Namun, kebijakan itu tidak berhenti pada soal durasi belajar. Yang lebih penting adalah bagaimana kurikulum dan gerakan pendidikan memberi ruang bagi anak-anak untuk terbiasa dengan numerasi sejak dini. Matematika kini mulai dikenalkan sejak taman kanak-kanak, bukan agar anak dipaksa menghafal angka lebih cepat, melainkan supaya mereka terbiasa menghubungkan angka dengan realitas sehari-hari.

Di sinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Anak-anak perlu mengalami bahwa belajar adalah bagian dari kehidupan. Misalnya, membiasakan anak berhitung ketika berbelanja, mengenalkan pola saat bermain, atau mengajarkan logika sederhana melalui cerita dan percakapan. Dengan cara ini, numerasi tumbuh sebagai kebiasaan, bukan kewajiban yang menekan.

Inovasi yang dirancang pemerintah, seperti pembangunan “taman numerasi”, juga menjadi langkah menarik. Ruang publik yang memungkinkan anak bermain sambil belajar akan memutus jarak antara keseriusan sekolah dan keceriaan masa kanak-kanak. Dengan bermain ular tangga berhitung, puzzle angka, atau permainan logika, anak-anak akan belajar tanpa merasa sedang “diajar”. Numerasi menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan momok yang menakutkan.

Tak kalah menarik, hadirnya media kreatif seperti album kicau berisi lagu-lagu anak dengan muatan numerasi. Lagu adalah sarana paling sederhana untuk menanamkan nilai. Anak-anak yang terbiasa bernyanyi sambil berhitung akan membangun hubungan emosional yang positif dengan angka. Dari sini lahirlah generasi yang lebih siap untuk menekuni bidang-bidang yang memerlukan kemampuan logis di kemudian hari.

Gerakan numerasi nasional yang diluncurkan dengan slogan “*mahir numerasi, majukan negeri*” adalah simbol dari tekad untuk

menjadikan matematika sebagai bahasa masa depan bangsa. Slogan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah pengingat bahwa tanpa pondasi numerasi, anak-anak kita akan kesulitan beradaptasi di dunia yang semakin berbasis data, algoritma, dan teknologi.

Tantangan terbesar tentu terletak pada konsistensi. Gerakan numerasi harus benar-benar menjadi gerakan bersama. Sekolah perlu menyiapkan kurikulum dan guru yang mendukung. Orang tua harus terlibat aktif dalam kebiasaan sehari-hari. Masyarakat perlu menyediakan ruang dan budaya belajar yang menyenangkan. Jika semua elemen ini bergerak seiring, maka numerasi bukan hanya sekadar keterampilan akademik, melainkan modal sosial untuk membangun bangsa yang lebih maju.

Dengan kata lain, berbicara tentang numerasi berarti berbicara tentang masa depan. Anak-anak yang hari ini bermain angka dengan riang, esok bisa menjadi ilmuwan, insinyur, seniman, atau pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan logika yang kuat. Maka, ketika kita bicara tentang membangun bangsa, sesungguhnya kita sedang bicara tentang bagaimana memastikan setiap anak tumbuh dengan fondasi numerasi yang kokoh.

Membangun Kepemimpinan yang Melayani:

Pidato Pelantikan Pejabat Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

Kamis, 11 September 2025

Pelantikan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi momen penting dalam reformasi birokrasi. Tidak sekadar pelantikan pejabat baru, tetapi menandai sebuah langkah strategis dengan perubahan nomenklatur dari *Balai Guru Penggerak* menjadi *Balai Guru dan Tenaga Kependidikan*. Perubahan tersebut membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar pergantian nama. Ia mencerminkan arah baru kebijakan yang tidak hanya fokus pada guru, namun menempatkan seluruh unsur pendidikan seperti tenaga kependidikan, laboran, pustakawan, sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Ada beberapa hal penekanan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, jabatan adalah amanah. Jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban, tidak hanya secara institusional, melainkan juga secara sosial, moral, dan spiritual. Amanah ini menuntut dedikasi yang tulus untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, memberi layanan dengan semangat partisipasi semesta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto — khususnya cita keempat, yakni “*peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia*” — Kementerian berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan semangat partisipasi semesta.

Ketiga, memperkuat budaya ramah dan insan yang santun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya membangun budaya RAMAH yakni *Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis*. Kita dituntut menjadi insan pendidikan yang SANTUN yakni setia, amanah, negarawan, teladan, unggul, dan ngemong.

Dalam situasi kebangsaan saat ini, kementerian juga mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat budaya hidup sederhana. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepekaan terhadap situasi dan dinamika yang berkembang masyarakat. Menunjukkan komitmen, menjadi teladan dan memastikan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Sebagai bagian dari nilai dasar pelayanan publik, penting untuk mengedepankan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*). Kepemimpinan yang melayani senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dengan itu, maka harus membangun birokrasi yang tidak birokratis, birokrasi yang memudahkan. Prinsip ini sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW: “*Yassiruu wa la tu’assiruu, basyiruu wa la tunaffiruu*” — mudahkanlah, jangan mempersulit; gembirakanlah, jangan menakut-nakuti.

Seluruh pejabat di lingkungan kementerian adalah bagian dari elit birokrasi negara. Namun menjadi elit bukan berarti bersikap elitis. Kita justru harus menjadi elit yang tidak elitis, elit yang peduli pada *kaum alit*. Elit yang senantiasa hadir membersamai masyarakat dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Nilai-nilai RAMAH, SANTUN, sederhana, dan melayani harus menjadi identitas kolektif seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan itu, diharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah dapat menjadi teladan bagi kementerian lainnya, menunjukkan bahwa kementerian bukan hanya mengatur pendidikan, tetapi menjadi cermin pendidikan itu sendiri.

59 Teknologi & Kemampuan Literasi:

Pidato pada Jagat Literasi Festival – Live HUT 30 Tahun Kompas.com

Senin, 15 September 2025

Teknologi pada awalnya diciptakan untuk membantu manusia melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan secara fisik. Namun dalam perkembangannya, teknologi tumbuh menjadi semacam “organisme” yang seolah hidup dan bahkan mulai menguasai manusia yang menciptakannya. Fenomena ini kini menjadi kenyataan yang dihadapi seluruh masyarakat modern. Berbagai tulisan menjelaskan tentang bagaimana teknologi mulai beberapa level telah menggeser peran manusia, bahkan memori manusia dan juga bagaimana expertise mulai diabaikan. Sejumlah karya tulis seperti *The Death of Expertise* (2017) mengingatkan bagaimana ada pergeseran yang semula ‘bertanya’ pada ahli/pakar, kini digantikan oleh mesin pencari. Sementara itu, Franklin Foer dalam *World Without Mind* menyoroti bahwa kehadiran teknologi tidak otomatis membuat manusia menjadi lebih cerdas.

Namun refleksi semacam ini tidak dimaksudkan untuk menyesali keadaan. Justru sebaliknya, semua itu menjadi pengingat agar manusia tetap memiliki arah, visi, dan komitmen untuk menjaga kecerdasan serta keadaban di tengah laju inovasi teknologi.

Melalui literasi dapat membaca realitas masa depan. Literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca aksara, melainkan juga kemampuan membaca realitas. Literasi mencakup kepekaan untuk

membedakan antara yang benar dan yang palsu, antara informasi faktual dan fabrikasi. Di era disinformasi dan kebisingan digital, kemampuan untuk memilah antara *voice* dan *noise* menjadi semakin penting. Ada kecemasan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Buku *The Anxious Generation* misalnya, menggambarkan menggambarkan betapa generasi muda yang menjadi *the native user of digital technology*, mulai cemas dengan teknologi yang mereka menjadi bagian dari generasi yang tumbuh seiring dengan teknologi.

Pada tataran dasar, literasi memang dimulai dari kemampuan membaca huruf. Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, literasi berarti kemampuan memahami gagasan, menafsirkan makna, serta menelaah berbagai pandangan secara kritis. Literasi sejati tidak berhenti pada membaca, melainkan juga menciptakan pemikiran dan gagasan baru yang konstruktif.

Dalam konteks pendidikan, literasi harus dibangun sejak dini. Anak-anak perlu dibiasakan membaca, menulis, dan menghargai karya orang lain. Mereka juga perlu didorong untuk berani menyampaikan pandangan serta menciptakan karya sendiri.

Sebuah film yang sering disebut dalam diskusi tentang literasi adalah *Freedom Writers*. Film ini, yang diangkat dari kisah nyata, menampilkan seorang guru muda di Amerika Serikat yang berhasil membimbing siswa-siswanya dari berbagai latar belakang etnis melalui kebiasaan menulis. Melalui tulisan, para siswa menemukan ruang kebebasan untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan stabilitas intelektual, dan belajar berinteraksi secara beradab.

Semangat yang sama perlu diterapkan di dunia pendidikan kita: menumbuhkan generasi yang gemar membaca, gemar menulis, menghargai perbedaan gagasan, serta berani berpikir dan berkreasi demi kemajuan peradaban bangsa.



Meneladani Rasulullah dalam Pendidikan Karakter:

Pidato dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Jum'at, 19 September 2025

Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW melalui sudut pandang pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menganjurkan kegiatan disekolah adalah dengan memperingati Hari besar Agama-Agama di Indonesia, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, dan melatih kepemimpinan para pelajar, serta menjadi bagian dari kegiatan positif di sekolah. Bagaimana mengaitkan Maulid Nabi dengan konteks pendidikan karakter adalah dengan meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad seorang manusia, Rasul akhir zaman yang sempurna, sehingga dari sisi manapun kita bisa meneladaninya.

maka nilai utama yang dapat kita ambil adalah keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan hidup. Rasulullah adalah manusia paripurna, teladan sepanjang zaman, yang kehidupan dan akhlaknya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia.

Dalam kitab *Al-Barzanji*, pada bacaan ke-18 disebutkan teladan rasulullah. Rasulullah adalah pribadi yang sangat pemalu, artinya sangat menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Beliau juga digambarkan sebagai sosok yang tawadhu, hidup dengan kesederhanaan, serta senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan.

Kesederhanaan Rasulullah tercermin dalam kesehariannya. Ketika sandalnya rusak, beliau memperbaikinya sendiri. Jika pakaiannya sobek, beliau menjahitnya sendiri. Bahkan ketika menginginkan susu, beliau memerahnya langsung dari kambingnya. Sikap seperti ini menunjukkan kemandirian dan kerendahan hati yang patut diteladani. Dalam kehidupan keluarga, Rasulullah juga dikenal sebagai suami yang mandiri, tidak merepotkan istrinya. Berkhidmat melayani keluarganya dengan pelayanan yang setulus-tulusnya. Rasulullah dikenal sangat dekat dengan kaum fakir miskin dan tidak menyulitkan orang fakir. Beliau mencintai mereka, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah yang meninggal.

Peringatan Maulid Nabi di lingkungan Kementerian sebagai upaya terus belajar dan meneladani kehidupan nabi. Dengan meneladani Rasulullah Muhammad SAW, diharapkan seluruh insan pendidikan mampu menjadi pribadi yang berkarakter.



Membangun Budaya STEM:

Pidato pada Rilis Panduan dan Hasil Kurasi
Pembelajaran STEM 2025

Selasa, 23 September 2025

Dalam perjalanan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia, penguatan pendidikan berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) menjadi salah satu prioritas strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita keempat yang menekankan pentingnya *membangun manusia Indonesia yang kuat melalui pendidikan, sains, dan teknologi*. STEM bukan soal konsep semata, bukan soal teori semata, tapi soal bagaimana membangun budaya. Budaya yang bisa mendukung pengembangan *science, technology, engineering, and math*.

Masyarakat ke depan menuju arah masyarakat yang teknokratik (technocratic society). Masyarakat yang terkoneksi dan ‘melek’ teknologi, serta masa depan yang ditentukan oleh kemampuan didalam bidang-bidang teknologi. *Technocratic society* adalah realitas yang memang harus disiapkan sejak dini, dimulai dari bagaimana kita membangun masyarakat ilmu atau *knowledge based society*, dan kemudian kita membangun kemampuan-kemampuan yang mendorong mereka dalam pengembangan sains dan teknologi.

Dalam konteks inilah, pengembangan STEM harus dibangun di atas ekosistem pendidikan yaitu catur pusat pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Penerapan teknologi bukanlah penerapan yang hanya berorientasi pada pengembangan ilmu, tetapi

juga pengembangan yang memberikan dampak dalam kehidupan nyata. Teknologi terapan atau *applied sciences* merupakan bagian penting dari bagaimana teknologi bisa memberi solusi atas berbagai macam persoalan. Pengamatan sederhana di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak di tingkat dasar dan menengah sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan teknologi terapan. Perlu dorongan untuk bagaimana iklim sekolah dikembangkan dengan kreatifitas dan memberi kepekaan serta pendekatan dengan alam.

Di Darul Hikam ini, contoh dapat merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 21–22, di mana Al-Qur'an memanggil manusia untuk menyembah Tuhan yang menciptakan mereka dan generasi sebelumnya: *Ya ayyuhanna su'budu robbakumulati kholaqokum walladzina min qoblikum la'an lakum tat takum*. "Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan manusia sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Ayat ini mengandung struktur pembelajaran yang luar biasa jika dibaca dalam perspektif pendidikan modern. Seruan "*Ya ayyuhannaas*" merupakan bentuk panggilan perhatian (attention). Kunci pertama dalam belajar dalam *deep learning* adalah membangun konsentrasi, dalam teori disebut dengan *allocatable mental resources*. Bagaimana proses mental itu bisa difokuskan sehingga mereka siap untuk belajar.

Selanjutnya, perintah teologis "*u'budu rabbakum*" (sembahlah tuhan kamu) menunjukkan bahwa belajar dan beribadah sejatinya adalah dua aktivitas yang terintegrasi. Proses belajar tidak semata-mata proses dimana *constructing knowledge*, membangun ilmu. Tapi juga proses di mana *serving our God*, melayani tuhan. Tuhan dengan kemahakuasaannya menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, ini menjadi landasan bahwa ada manusia sekarang, ada manusia masa lalu, hal ini jika dikaitkan dengan ilmu dikenal dengan ilmu antropologi dan juga biologi.

Kemudian Tuhan menyampaikan *Alladzii ja'ala lakumul ardo firosa Wassamaa bina'a wa angzalam minas sama'i ma'a Fakhbrojab*

minasamaro tiris kol lakum Fala taj'adu lillahi anta'adu wa antum ta'lamun. Lebih jauh, ayat ini juga mengajak manusia untuk memahami keteraturan ciptaan Tuhan seperti bumi, langit, kemudian proses hujan, dan tumbuhan sebagai manifestasi dari sistem alam semesta. Dari semua itu dapat menelusuri keterkaitan antara ilmu fisika, biologi, geografi, hingga ekonomi. Alam menjadi ruang belajar terbuka bagi anak-anak untuk memahami hukum sebab-akibat, proses kehidupan, dan keteraturan kosmik. Dengan demikian, pembelajaran sains tidak hanya mengasah kecerdasan kognitif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran transendental dan kepedulian ekologis.

Kementerian mengembangkan Pendidikan STEM tidak sekedar mengarahkan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga untuk membangun karakter. Integrasi antara sains dan pendidikan karakter diharapkan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral, spiritual, dan sosial. STEM tidak lagi diposisikan semata sebagai strategi peningkatan kompetensi akademik, tetapi sebagai penguatan karakter. Dengan cara ini, penguasaan sains dan teknologi diharapkan berbanding lurus dengan pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Seorang saintis sejati tidak hanya menghasilkan penemuan, tetapi juga memastikan bahwa ilmunya membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan sains seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. Untuk mengatasi persepsi ini, Kementerian berusaha mengembangkan pendekatan yang disebut “Saint 3M” — Sains yang Mudah, Murah, dan Menyenangkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendemistifikasi sains, menjadikannya dekat dengan keseharian anak-anak, dan membangun keyakinan bahwa sains adalah bagian dari kehidupan, bukan sesuatu yang menakutkan.



Mewujudkan Cita-Cita Besar:

Pidato pada Acara Mengenal Sekolah GARUDA:
Harapan Baru Pendidikan Unggul

Rabu, 8 Oktober 2025

Sekolah Unggul Garuda menjadi tonggak baru dalam upaya membangun pendidikan transformatif di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto — sebuah cita-cita besar untuk melahirkan generasi Indonesia yang unggul, tangguh, dan bermartabat. Gagasan Sekolah Unggul Garuda tidak hanya menjadi inovasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga simbol tekad untuk membawa perubahan nyata bagi masa depan bangsa.

Sebagai seseorang yang meniti jalan panjang di dunia pendidikan, saya sering merenungkan bahwa kunci dari segala pencapaian adalah cita-cita. Cita-cita yang tinggi dan mulia, yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Ayah saya, seorang petani sederhana yang tidak sempat menamatkan sekolah dasar, selalu mengingatkan agar anak-anaknya berani bermimpi besar. “Jangan pernah berhenti bercita-cita,” katanya. Kalimat itu menjadi pegangan hidup saya hingga kini.

Sejak kecil, di sebuah kampung kecil di Kabupaten Kudus yang dulu termasuk desa tertinggal, saya sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Setiap pagi, saya mendengarkan siaran *English from Radio Australia*, membayangkan seperti apa rupa negeri dimana radio itu disiarkan. Malam hari, saya menonton “Dunia Dalam Berita” di TVRI, dan mendengarkan BBC London versi bahasa Inggris. Dari situlah saya mulai berimajinasi tentang dunia luar — tentang negara-negara yang hanya bisa saya jangkau lewat suara dan berita. Imajinasi

itu menumbuhkan semangat belajar dan membentuk arah cita-cita saya.

Takdir kemudian menuntun langkah saya. Dari madrasah kecil tempat guru-gurunya sebagian besar honorer, saya melangkah ke Madrasah Tsanawiyah, lalu ke Aliyah, dan akhirnya ke perguruan tinggi Islam. Perjalanan itu bahkan membawa saya ke luar negeri — ke Australia, ke Inggris, dan ke banyak negara lainnya. Saya tidak memiliki banyak keistimewaan selain satu hal: keinginan kuat untuk terus belajar dan berusaha.

Dari pengalaman itu, saya meyakini bahwa doa dan restu orang tua adalah sumber kekuatan terbesar dalam setiap perjalanan hidup. Sebesar apa pun kecerdasan dan prestasi yang dimiliki seseorang, tanpa doa orang tua, keberhasilan tidak akan memiliki makna yang utuh.

Selain cita-cita dan doa, ada satu hal lain yang selalu saya tekankan: semangat pantang menyerah dan kemampuan memimpin. Dalam dunia modern, kepemimpinan bukan hanya soal posisi, melainkan kemampuan untuk memotivasi diri dan orang lain. Dunia kerja masa depan menuntut bukan hanya *hard skill* dan *soft skill*, tetapi juga *leadership competence* — kemampuan memimpin diri, mengambil keputusan, dan bekerja dalam tim dengan tanggung jawab. Bagi saya, kemampuan itulah yang menempa perjalanan hidup hingga akhirnya saya diberi amanah menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Maka, ketika saya melihat para siswa di SMA Unggul M.H. Thamrin, saya merasa bangga sekaligus berbahagia. Mereka memiliki kesempatan belajar di sekolah dengan fasilitas yang luar biasa, guru-guru terbaik, dan lingkungan yang mendukung. Dengan semua modal itu, saya percaya mereka akan bisa melampaui generasi sebelumnya. Jika saya, anak dari madrasah kecil dengan segala keterbatasan, dapat melangkah sejauh ini, maka para siswa di Sekolah Unggul Garuda harus bisa melangkah lebih jauh lagi.

Kini, hampir semua mimpi masa kecil saya telah tercapai, bahkan beberapa di antaranya melampaui apa yang pernah saya bayangkan. Saya pernah menjadi mahasiswa di Australia, negara yang dulu hanya saya dengar dari radio. Saya juga pernah berkunjung ke Inggris, dan dipercaya menjadi advisor di British Council, bahkan menjadi salah satu dari tujuh orang Indonesia yang tergabung dalam Indonesia–UK Islamic Advisory Board. Saya juga menjadi bagian dari Indonesia–United States Forum for Religion and Pluralism. Hingga saat ini, saya telah berkesempatan berbagi pengalaman di 58 negara di dunia. Semua itu bukan semata karena kemampuan pribadi, tetapi berkat cita-cita yang besar, doa orang tua, dan keteguhan untuk terus belajar serta memimpin. Dan saya percaya, generasi Sekolah Garuda dapat melangkah lebih jauh. *They can be better, they can do better, they can achieve more.*

Sekolah Unggul Garuda bukan hanya program pendidikan baru; ia adalah simbol harapan baru — harapan untuk membangun generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan siap memimpin perubahan. Semoga dari sekolah-sekolah unggul seperti ini akan lahir para pemimpin masa depan yang membawa Indonesia terbang tinggi, gagah perkasa seperti Garuda yang menjadi lambang kebanggaan bangsa.



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025